



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LKPK & LSKP



TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2025
UNAUDITED



**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH (LKPK-TW) DAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH (LSKP-TW)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TAHUN 2025 *UNAUDITED*

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Rahmat Mulyono

Ketua Tim
Yusuf Widjaya

Kontributor Data LKPP
Moch. Fahrudin
Melly Yustriana

Kontributor Data LKPD
Selamet Riyadi
Fitri Anisah

**Konsolidasi Data dan Penyusun
Laporan**
Tengku Yustisia Abdul Rahman
Dinda Ornaz Annisa



KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

*new DJPb
in Town*

new DJPB
in Town



KATA PENGANTAR

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang berkat rahmat dan karunia-Nya, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Pemerintah secara konsisten melakukan penyempurnaan tata kelola melalui landasan hukum Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan berlaku umum. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang menjadi acuan dalam



RAHMAT MULYONO

KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT

proses penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Kualitas informasi dalam laporan keuangan diukur dari aspek komprehensivitas, akurasi, dan ketepatan waktu guna mendukung pengambilan keputusan yang



tepat. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas informasi keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah mampu menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada standar internasional. Hal ini bertujuan untuk mendukung analisis kebijakan, pemantauan kondisi fiskal, serta kebutuhan perbandingan pengelolaan keuangan antarnegara.

Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makroekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik.

Berkat reformasi di segala bidang termasuk reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, berangsur-angsur Indonesia menjadi negara yang cukup disegani di kancah perekonomian internasional yang ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia ke posisi *Investment Grade*, sehingga dapat dikatakan sejajar dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, tidak dapat

dipungkiri bahwa penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) telah menjadi salah satu lompatan besar di dalam upaya reformasi pengelolaan keuangan negara terutama dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas laporan keuangan serta pentahapan pengembangan dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah tingkat wilayah yang berguna dalam rangka perencanaan, analisis dan pengambilan kebijakan fiskal daerah.

Laporan ini, walaupun secara umum telah menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta posisi keuangan pemerintah tingkat wilayah, namun laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan konsolidasi dalam



pengertian yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data akun resiprokal dalam rangka eliminasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah terdiri dari Laporan Operasional Tingkat Wilayah yang di-mapping menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian Tingkat Wilayah, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, dan Laporan Arus Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini terutama kepada seluruh pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat yang telah menyediakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan laporan ini.

Harapan kami, laporan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah serta mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui penerapan Statistik Keuangan Pemerintah.

Pontianak, 16 April 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rahmat Mulyono



new DJPB
in Town



DAFTAR ISI

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Ringkasan Eksekutif	2
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian	13
Laporan Operasional Konsolidasian	14
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	15
Neraca Konsolidasian	16
Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum	18
Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum	19
Laporan Sumber dan Penggunaan Kas	20
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	22
Catatan atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum	74
Metadata	97
Analisis Rasio Keuangan dan Indikator Fiskal	102
Lampiran	127



New DJPB
in Town



DAFTAR TABEL

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Daftar Tabel

- 
- Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)
- Tabel 2 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)
- Tabel 3 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)
- Tabel 4 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)
- Tabel 5 Ringkasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)
- Tabel 6 Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 7 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 8 Perbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 9 Rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 10 Rincian Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 11 Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 12 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 13 Rincian Pendapatan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 14 Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)



- Tabel 15 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 16 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 17 Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 18 Rincian Pendapatan Lainnya – LO Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 19 Rincian Beban Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 20 Rincian Beban Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 21 Rincian Beban Operasional Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 22 Rincian Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 23 Rincian Ekuitas Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 24 Rincian Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 25 Rincian Aset Lancar Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 26 Rincian Aset Tetap Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 27 Rincian Aset Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 28 Rincian Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 29 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)



- Tabel 30 Rincian Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 31 Rincian Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 32 Rincian Saldo Operasi Bruto dan Saldo Operasi Neto Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 33 Rincian Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 34 Peminjaman Neto (*Net Lending*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 35 Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 36 Rincian Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 37 Rincian Aset Tetap Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 38 Rincian Persediaan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 39 Rincian Aset Non Produksi Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 40 Rincian Aset Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 41 Rincian Kewajiban Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 42 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 43 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)
- Tabel 44 Rincian Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)



new DJPB
in 2025

DAFTAR GRAFIK

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Daftar Grafik

- Grafik 1 Proporsi Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*
- Grafik 2 Proporsi Aset Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*
- Grafik 3 Komponen LO Statistik Keuangan Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Triliun Rupiah)
- Grafik 4 Komponen Neraca Konsolidasian Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Triliun Rupiah)
- Grafik 5 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024
- Grafik 6 Perbandingan Komponen Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Triliun Rupiah)
- Grafik 7 Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
- Grafik 8 Komposisi Pendapatan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
- Grafik 9 Komposisi Aset Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
- Grafik 10 Perbandingan Aset Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam miliar rupiah)
- Grafik 11 Komposisi Aset Tetap Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025
- Grafik 12 Komposisi Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025
- Grafik 13 Komponen Statistik Keuangan Sektor Publik
- Grafik 14 Proporsi Komponen Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025
- Grafik 15 Proporsi Komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025



- Grafik 16 Proporsi Aset Non Keuangan dan Aset Keuangan per 31 Desember 2025
- Grafik 17 Proporsi Komponen Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025
- Grafik 18 Proporsi Komponen Aset Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025
- Grafik 19 Proporsi Komponen Kewajiban Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025



new DJPB
in Town



RINGKASAN EKSEKUTIF

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Ringkasan Eksekutif

Konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan langkah krusial dalam penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*). Berdasarkan amanat UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 71 Tahun 2010, GFS disusun untuk menyediakan basis analisis kebijakan fiskal, evaluasi kegiatan pemerintahan, serta studi komparasi antarwilayah maupun antarnegara. Kebutuhan ini diperkuat oleh hasil reviu BPK atas transparansi fiskal tahun 2010, yang menegaskan bahwa konsolidasi fiskal sangat diperlukan guna menjamin kejelasan tanggung jawab pemerintah dan pemenuhan hak informasi publik

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang dihasilkan dari konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah merupakan laporan manajerial pemerintah sebagai wujud upaya peningkatan pengelolaan sistem keuangan negara. LSKP dihasilkan dari *mapping* laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi LKPP, (2) Konsolidasi LKPD, dan (3) Konsolidasi LKPP dengan LKPD.

Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) Tahun 2025 Unaudited

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) merupakan laporan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW)



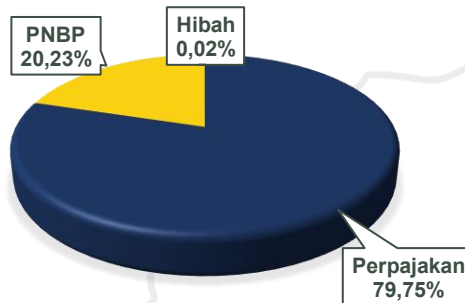
dalam satu periode pelaporan. LKPK-TW menyajikan informasi terkait Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang menggambarkan kondisi fiskal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah menyajikan informasi keuangan terkait realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran secara konsolidasian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Konsolidasi Tingkat Wilayah pada tahun 2025 sebesar Rp19.592.310.916.270,00 mengalami penurunan sebesar 36,89 persen dari Pendapatan Konsolidasi 31 Desember 2024 sebesar Rp31.045.135.490.591,00. Pendapatan Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasi sebesar Rp15.624.444.191.938,00, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.964.405.963.825,00, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp3.460.760.507,00. Proporsi Pendapatan Konsolidasian tersebut dapat dilihat pada Grafik 1 sebagai berikut.

Grafik 1. Proporsi Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*



Sumber: Diolah dari LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

Realisasi Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar Rp33.158.991.674.948,00 mengalami penurunan 9,46 persen dari 31 Desember 2024 sebesar Rp36.621.626.098.098,00. Sementara itu, Belanja Transfer secara umum mengalami penurunan sebesar 80,33 persen (*yoy*). Belanja Transfer tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.846.703.814.488,00 dan Rp14.474.796.151.119,00

Dari realisasi Pendapatan Konsolidasian dan Belanja dan Transfer Konsolidasian tersebut, terdapat Defisit Anggaran sebesar minus Rp16.413.384.573.165,00 pada tahun 2025. Sementara itu, Pembiayaan Neto pada tahun 2025 sebesar Rp1.054.193.737.022,00 atau



turun sebesar 28,52 persen (*yoy*). Dengan demikian, pada tahun 2025, terdapat SiKPA sebesar Rp15.359.190.836.143,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 *Unaudited* dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan Konsolidasian	19.592.310.916.270	31.045.135.490.591	(11.452.824.574.321)
Belanja dan Transfer Konsolidasian	36.005.695.489.436	51.096.422.249.216	(15.090.726.759.780)
Surplus / (Defisit)	(16.413.384.573.165)	(20.051.286.758.625)	3.637.902.185.460
Pembiayaan Neto	1.054.193.737.022	1.474.722.724.945	(420.528.987.923)
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(15.359.190.836.143)	(18.576.564.033.680)	3.217.373.197.537

Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Dari kegiatan operasional, Pendapatan Operasional Pemerintah Konsolidasian pada tahun 2025 sebesar Rp26.221.102.017.130,00 atau mengalami kenaikan 32,02 persen dari Pendapatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp19.861.506.262.952,00. Sementara itu, Beban Operasional pada tahun 2025 sebesar Rp44.448.486.187.820,00 atau mengalami kenaikan sebesar 9,13 persen dari Beban Operasional Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp40.728.485.361.533,00. Dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional tersebut, terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp18.227.384.170.690,00) yang mengalami penurunan defisit sebesar 12,56 persen (*yoy*).

Selain dari kegiatan operasional, terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp42.184.130.190,00 pada tahun 2025. Selain itu, terdapat Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar (Rp11.085.419.843,00) pada tahun 2025. Dengan demikian, Defisit pada Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar (Rp18.196.285.460.344,00). Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 *Unaudited* dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan Operasional	26.221.102.017.130	19.861.506.262.952	6.359.595.754.178
Beban Operasional	44.448.486.187.820	40.728.485.361.533	3.720.000.826.287
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(18.227.384.170.690)	(20.866.979.098.581)	2.639.594.927.891
Surplus / (Defisit) Kegiatan Non Operasional	42.184.130.190	(179.014.223.226)	221.198.353.416
Surplus / (Defisit) Pos Luar Biasa	(11.085.419.843)	(4.790.665.603)	(6.294.754.240)
Surplus / (Defisit) LO	(18.196.285.460.343)	(21.050.783.987.410)	2.854.498.527.067

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah konsolidasian pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya.

Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar Rp168.590.512.919.166,00. Penurunan Ekuitas pada tahun 2025 sebesar Rp175.055.361.125,00 yang berasal dari Surplus/(Defisit) Laporan Operasional sebesar (Rp18.196.285.460.343,00), Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar (Rp522.990.918.799,00), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp18.544.221.018.018,00. Dengan demikian, Ekuitas Akhir Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar Rp168.415.457.558.041,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 *Unaudited* dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan
Ekuitas Awal	168.590.512.919.166	167.586.743.677.496	1.003.769.241.670
Kenaikan/Penurunan Ekuitas			-
Surplus/(Defisit) - LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	2.854.498.527.066
Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/(Mengurangi) Ekuitas	(522.990.918.799)	557.724.601.355	(1.080.715.520.154)
Transaksi Antar Entitas	18.544.221.018.018	21.584.918.906.345	(3.040.697.888.327)
Ekuitas Akhir	168.415.457.558.041	168.678.603.197.786	(263.145.639.745)

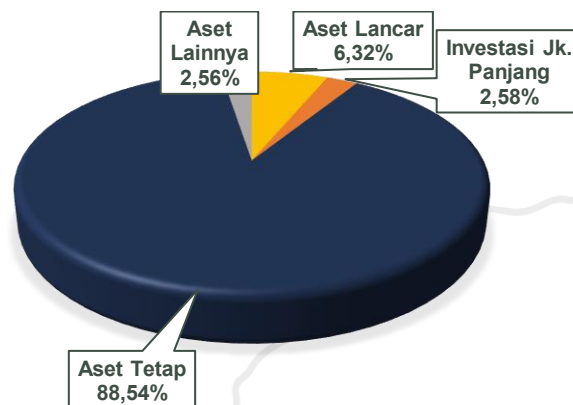


Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah menyajikan informasi terkait posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yang meliputi posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Per 31 Desember 2025, jumlah Aset Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp174.953.774.573.342,00. Nilai tersebut naik sebesar 0,41 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.235.467.665.737,00. Komposisi Aset Pemerintah Konsolidasian tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp11.060.726.421.582,00, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp4.515.911.259.057,00, Aset Tetap sebesar Rp154.882.146.698.333,00, Properti Investasi sebesar Rp5.380.003.147,00, Dana Cadangan sebesar Rp0,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp9.952.214.237,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp4.479.657.976.986,00. Proporsi Aset dalam Neraca Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada Grafik 2 sebagai berikut.

Grafik 2. Proporsi Aset Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*



Sumber: Diolah dari LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

Sementara itu, jumlah Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.538.317.015.300,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,66 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.556.864.467.956,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 tersebut berasal dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.045.164.577.476,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.493.152.437.824,00. Dengan demikian, jumlah Ekuitas Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp168.415.457.558.042,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dari tahun 2024 yang sebesar Rp168.678.603.197.783,00.



Ringkasan Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 *Unaudited* dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan
Aset Konsolidasian	174.953.774.573.342	174.235.467.665.737	718.306.907.605
Aset Lancar	11.060.726.421.582	10.553.048.134.746	507.678.286.836
Investasi Jangka Panjang	4.515.911.259.057	4.264.306.591.487	251.604.667.570
Aset Tetap	154.882.146.698.333	154.912.343.702.823	(30.197.004.490)
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	(98.500.881)
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	(27.468.900.302)
Piutang Jangka Panjang	9.952.214.237	6.125.046.122	3.827.168.115
Aset Lainnya	4.479.657.976.986	4.466.696.786.229	12.961.190.757
Kewajiban Konsolidasian	6.538.317.015.300	5.556.864.467.956	981.452.547.344
Kewajiban Jangka Pendek	3.045.164.577.476	1.950.598.707.384	1.094.565.870.092
Kewajiban Jangka Panjang	3.493.152.437.824	3.606.265.760.572	(113.113.322.748)
Ekuitas Konsolidasian	168.415.457.558.042	168.678.603.197.783	(263.145.639.741)
Kewajiban dan Ekuitas	174.953.774.573.342	174.235.467.665.739	718.306.907.603

Ringkasan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW)

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) adalah sistem pelaporan statistik yang menghasilkan data komprehensif tentang kegiatan ekonomi dan keuangan pemerintah yang disajikan dengan mengacu pada metodologi yang diterima secara internasional. LSKPU-TW disusun berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi laporan keuangan konsolidasian yang menggambarkan aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dalam satu periode.

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum melaporkan transaksi unit sektor pemerintah umum dalam suatu periode pelaporan berbasis akrual. Transaksi tersebut meliputi Pendapatan, Beban, Transaksi Aset Non Keuangan Neto, Dan Transaksi Aset Keuangan Neto.



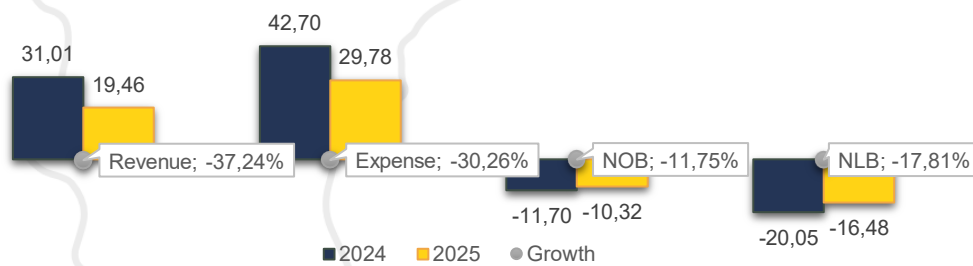
Kinerja Pendapatan Statistik Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar Rp19.460.278.924.137,00 atau mengalami penurunan 37,24 persen dari tahun 2024 sebesar Rp31.008.531.170.902,00. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan pada komponen Pendapatan Pajak sebesar 0,18 persen dan penurunan Pendapatan Hibah sebanyak 98,47 persen (yoy). Sementara itu, Beban Statistik juga mengalami penurunan sebesar Rp12.922.133.543.296,00 atau 30,26 persen (yoy) menjadi Rp29.782.766.516.771,00 pada tahun 2025 dari Rp42.704.900.060.067,00

Dari Pendapatan Statistik dan Beban Statistik tersebut menghasilkan Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*) dan Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*) sebesar (Rp10.322.487.592.633,00). Selain itu, Transaksi Aset dan Kewajiban Neto sebesar (Rp10.389.762.793.253,00), nilai tersebut juga dapat diperoleh dari nilai Akuisisi Aset Non Keuangan Neto sebesar Rp6.090.896.980.532,00 ditambah *Net Lending/Borrowing* sebesar minus (Rp16.480.659.773.785,00)

Sementara itu, nilai *Net Lending/Borrowing* pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat bernilai negatif, yaitu minus Rp(16.480.659.773.785,00), yang menunjukkan posisi *Net Borrowing* atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. *Net Lending* tersebut berasal dari Akuisisi Aset Keuangan Neto sebesar (Rp16.554.630.100.825,00) dikurangi dengan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar (Rp73.970.327.040,00).

Ringkasan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* dapat dilihat pada Grafik 3 sebagai berikut.

Grafik 3. Komponen LO Statistik Keuangan Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024 dan 2025 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari LSKPU-TW Kalimantan Barat Tahun 2024 (*Audited*) & 2025 (*Unaudited*)

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum menunjukkan posisi atau saldo dari Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih pemerintah umum pada awal dan akhir periode akuntansi.



Neraca Statistik Pemerintah Umum Tahun 2025 menunjukkan posisi *Net Worth* sebesar Rp168.421.573.128.368,00. Nilai tersebut menurun sebesar 0,15 persen dari tahun 2024 sebesar Rp168.678.603.197.783,00.

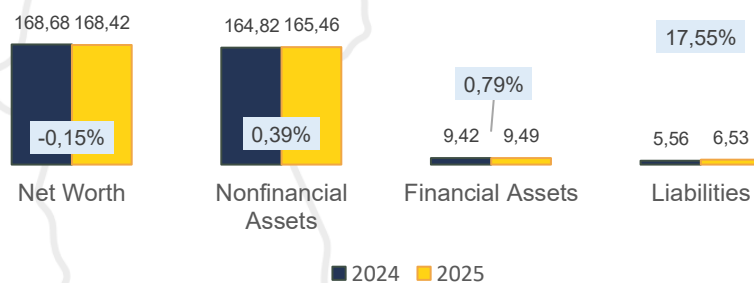
Aset Nonkeuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp165.459.210.637.645,00 yang terdiri dari Aset Tetap (*Fixed Assets*) sebesar Rp71.057.059.157.592,00, Persediaan (*Inventories*) sebesar Rp7.042.174.889.180,00, dan Aset Nonproduksi (*Nonproduced Assets*) sebesar Rp87.359.976.590.873,00. Sementara itu, Aset Keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.494.563.935.697,00 yang terdiri dari Uang dan Deposito sebesar Rp2.515.694.109.250,00, Surat Berharga selain Saham sebesar Rp61.871.413,00, Saham dan Ekuitas Lainnya sebesar Rp4.515.849.387.643,00, dan Piutang Lainnya sebesar Rp2.462.958.567.390,00. Aset Finansial tersebut seluruhnya berasal dari debitur dalam negeri (*Domestic Debtors*).

Selanjutnya, Kewajiban Statistik per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.532.201.444.974,00 terdiri dari Pinjaman sebesar Rp252.354.377.999,00 dan Utang Lainnya sebesar Rp6.279.847.066.975,00. Jumlah Kewajiban Statistik tersebut seluruhnya berasal dari kreditur dalam negeri (*Domestic Creditors*).

Aset dan Kewajiban Statistik Pemerintah secara umum mengalami peningkatan secara *year-on-year*, antara lain Aset Non Keuangan meningkat 0,39 persen, Aset Keuangan meningkat 0,79 persen, dan Kewajiban meningkat 17,55 persen.

Ringkasan Neraca Konsolidasian Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Grafik 4 sebagai berikut.

Grafik 4. Komponen Neraca Konsolidasian Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024 dan 2025 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari LSKPU-TW Kalimantan Barat Tahun 2024 (*Audited*) & 2025 (*Unaudited*)

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menunjukkan jumlah total dari kas yang dihasilkan atau diserap oleh unit pemerintah umum melalui operasi tahun berjalan, transaksi aset non



keuangan, dan transaksi aset dan kewajiban keuangan (selain uang tunai-mata uang dan deposito itu sendiri).

Berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan 31 Desember 2025 diketahui Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (*Net Cash Inflow from Operating Activities*) sebesar minus (Rp10.322.487.592.633,00) yang berasal dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (*Cash Receipts from Operating Activities*) sebesar Rp19.460.278.924.137,00 dikurangi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi (*Cash Payments for Operating Activities*) sebesar Rp29.782.766.516.771,00.

Sementara itu, Arus Kas dari Investasi pada Aset Nonfinansial (*Cash Flows from Investments in Nonfinancial Assets / NFAS*) sebesar Rp6.090.896.980.532,00 yang berasal dari Perolehan Aset Non Keuangan (*Purchases of Nonfinancial Assets*) sebesar Rp8.188.084.767.130,00 dan Penjualan Aset Non Keuangan (*Sales of Nonfinancial Assets*) sebesar Rp2.097.187.786.598,00. Dengan demikian, terdapat Defisit Kas sebesar (Rp16.413.384.573.165,00).

Selanjutnya, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (*Net Cash Flows from Financing Activities*) sebesar Rp150.170.327.040,00 yang berasal dari Perolehan Aset Keuangan selain Kas yang seluruhnya berasal dari dalam negeri sebesar Rp76.200.000.000,00 dan Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence of Liabilities*) sebesar (Rp73.970.327.040,00).

Ringkasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Ringkasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited* (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan
Cash Flows from Operating Activities			
Cash Receipts from Operating Activities	19.460.278.924.137	56.309.886.199.612	(36.849.607.275.475)
Cash Payments for Operating Activities	29.782.766.516.771	38.894.497.914.751	(9.111.731.397.980)
Net Cash Inflow from Operating Activities	(10.322.487.592.633)	17.415.388.284.861	(27.737.875.877.494)
Cash Flows from Investments in Nonfinancial Assets (NFAS)			
Purchases of Nonfinancial Assets	8.188.084.767.130	6.917.364.714.359	1.270.720.052.771
Sales of Nonfinancial Assets	2.097.187.786.598	11.684.556.733	2.085.503.229.865
Net Cash Outflow	6.090.896.980.532	6.905.680.157.625	(814.783.177.093)
Cash Surplus/Deficit	(16.413.384.573.165)	10.509.708.127.235	(26.923.092.700.400)
Cash Flows from Financing Activities			
Net Acquisition of Financial Assets Other than Cash	76.200.000.000	74.200.000.000	2.000.000.000
Net Incurrence of Liabilities	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	145.573.910.000
Net Cash from Financing Activities	150.170.327.040	293.744.237.040	(143.573.910.000)
Net Change in the Stock of Cash	(16.263.214.246.125)	10.803.452.364.275	(27.066.666.610.400)



Metadata Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Metadata berisi informasi dasar, definisi data, cakupan data, periode publikasi, waktu publikasi, status data, sumber data, metodologi, integritas data, dan akses data terkait Laporan Statistik Keuangan Pemerintah.



new DJPB
in Town



FACE LAPORAN KEUANGAN

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
PENDAPATAN KONSOLIDASI	19.592.310.916.270	31.045.135.490.591	-36,89%
Pendapatan Perpajakan Konsolidasi	15.624.444.191.938	15.758.842.981.577	-0,85%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.964.405.963.825	15.251.548.153.378	-74,01%
Pendapatan Hibah	3.460.760.507	34.744.355.636	-90,04%
BELANJA DAN TRANSFER	36.005.695.489.436	51.096.422.249.216	-29,53%
BELANJA KONSOLIDASI	33.158.991.674.948	36.621.626.098.098	-9,46%
Belanja Pegawai	15.371.174.955.146	14.063.278.549.304	9,30%
Belanja Barang dan Jasa	11.986.636.514.922	13.945.760.265.666	-14,05%
Belanja Modal	4.968.034.713.292	6.924.810.076.855	-28,26%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
Belanja Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
Belanja Hibah	751.007.068.359	1.606.015.104.776	-53,24%
Belanja Bantuan Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
Belanja Lain-Lain	33.330.606.274	13.977.908.786	138,45%
TRANSFER KONSOLIDASI	2.846.703.814.488	14.474.796.151.119	-80,33%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.658.107.317.596	3.054.594.880.596	-12,98%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	88.409.478.674	72.366.915.553	22,17%
Transfer Bantuan Keuangan	2.569.697.838.922	2.982.227.965.043	-13,83%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH DAN DANA DESA	188.596.496.892	11.420.201.270.523	-98,35%
Dana Bagi Hasil	15.773.434.115	956.355.074.480	-98,35%
Dana Alokasi Umum	-	7.517.739.381.007	-100,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	1.515.640.480.170	-100,00%
Dana Insentif Daerah	-	6.381.677.000	-100,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88.748.187.133	1.298.890.056.966	-93,17%
Dana Desa	84.074.875.644	125.194.600.900	-32,84%
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B-C)	(16.413.384.573.165)	(20.051.286.758.625)	-18,14%
PEMBIAYAAN	1.054.193.737.022	1.474.722.724.945	-28,52%
Penerimaan Pembiayaan	1.339.137.974.062	1.865.066.961.985	-28,20%
Pengeluaran Pembiayaan	284.944.237.040	390.344.237.040	-27,00%
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (D+E)	(15.359.190.836.143)	(18.576.564.033.680)	-17,32%



LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional – LO	26.221.102.017.130	19.861.506.262.952	32,02%
Pendapatan Perpajakan – LO	14.934.573.552.292	15.847.498.280.977	-5,76%
Pendapatan Bukan Pajak – LO	2.942.425.421.430	2.814.315.067.531	4,55%
Pendapatan Transfer – LO	6.441.337.049.948	30.086.490.727	21309,40%
Pendapatan BLU – LO	734.536.117.542	614.538.933.035	19,53%
Pendapatan Hibah – LO	1.139.261.066.673	478.202.686.182	138,24%
Pendapatan Lainnya - LO	28.968.809.246	76.864.804.500	-62,31%
Beban Operasional	44.448.486.187.820	40.728.485.361.533	9,13%
Beban Pegawai	15.538.453.242.397	14.331.089.460.053	8,42%
Beban Persediaan	624.308.897.359	650.426.794.505	-4,02%
Beban Barang dan Jasa	11.102.455.572.933	13.392.723.804.840	-17,10%
Beban Bunga	10.093.937.097	20.584.710.225	-50,96%
Beban Subsidi	2.104.177.825	2.190.015.581	-3,92%
Beban Hibah	785.416.125.371	1.614.861.436.614	-51,36%
Beban Bantuan Sosial	35.092.337.469	43.743.482.890	-19,78%
Beban Lain-Lain/Tidak Terduga	3.036.359.569	0	100,00%
Beban Akrual Lainnya	7.382.050.354.464	7.527.227.383.317	-1,93%
Beban Transfer	8.965.475.183.336	3.145.638.273.508	185,01%
Transfer Pempus ke Daerah dan dana Desa	7.588.052.003.847	2.007.031.152.869	278,07%
Dana Bagi Hasil	0	198.247.735	-100,00%
Dana Bagi Hasil Pajak	0	0	0,00%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	198.247.735	-100,00%
Dana Bagi Hasil Cukai	0	0	0,00%
Dana Alokasi Umum	4.325.581.920.831	13.614.488.351	31671,90%
Dana Alokasi Khusus	0	0	0,00%
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	29.834.845.000	5.910.960.000	404,74%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.636.915.481.928	48.688.880.430	3261,99%
Dana Desa	1.595.719.756.088	1.938.618.576.353	-17,69%
Beban Transfer Lain-Lain			0,00%
Beban Transfer Pemda	1.377.423.179.488	1.138.607.120.639	20,97%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	712.068.448.369	93.424.722.400	662,18%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	5.951.885.098	-100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	37.449.114.634	0	100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	627.905.616.485	1.039.230.513.141	-39,58%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18.227.384.170.690)	(20.866.979.098.581)	-12,65%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	42.184.130.190	(179.014.223.226)	-123,56%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.185.200.040.501)	(21.045.993.321.807)	-13,59%
POS LUAR BIASA	(11.085.419.843)	(4.790.665.603)	131,40%
SURPLUS (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	-13,56%



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
EKUITAS AWAL	168.590.512.919.166	167.586.743.677.496	0,60%
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	168.590.512.919.166	167.586.743.677.496	0,60%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	-13,56%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	40.048.222.871	(143.120.980.527)	-127,98%
Selisih Revaluasi Aset	13.521.622.880	(326.186.759.311)	-104,15%
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977	593.285.583.529	-47,34%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011	103.290.816.176	-98,77%
Koreksi Lain-lain	(890.233.778.538)	330.455.941.487	-369,40%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(522.990.918.799)	557.724.601.355	-193,77%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.544.221.018.018	21.584.918.906.345	-14,09%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(175.055.361.125)	1.091.859.520.290	-116,03%
EKUITAS AKHIR	168.415.457.558.041	168.678.603.197.786	-0,16%



NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
ASET	174.953.774.573.342	174.235.467.665.738	0,41%
Aset Lancar	11.060.726.421.582	10.553.048.134.746	4,81%
Kas dan setara kas	2.204.120.426.902	2.197.339.299.770	0,31%
Investasi jangka pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	58,82%
Belanja dibayar di muka dan uang muka belanja	26.629.723.943	42.813.936.008	-37,80%
Piutang	1.679.801.381.557	1.790.921.694.181	-6,20%
Piutang Perpajakan	902.642.910.836	1.032.652.635.482	-12,59%
Piutang Bukan Pajak	1.817.991.372.368	1.662.740.212.220	9,34%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.523.471.478	-	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	620.743.272	584.645.137	6,17%
Piutang Lain-Lain	28.345.872.935	17.623.823.060	60,84%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1.071.322.989.331)	(922.679.621.718)	16,11%
Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	9,11%
Investasi Jangka Panjang	4.515.911.259.057	4.264.306.591.487	5,90%
Investasi jangka panjang non permanen	61.871.413	61.871.413	0,00%
Investasi jangka panjang permanen	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
Aset Tetap	154.882.146.698.333	154.912.343.702.823	-0,02%
Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
Peralatan dan Mesin	26.175.891.155.913	24.420.712.102.012	7,19%
Gedung dan Bangunan	34.570.081.165.092	33.058.859.080.729	4,57%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79.610.251.431.173	76.567.157.679.817	3,97%
Aset Tetap Lainnya	1.863.314.115.945	1.746.219.236.437	6,71%
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.524.240.215.198	1.846.562.430.198	-17,46%
Konsesi Jasa	3.508.429.618.546	3.507.516.169.746	0,03%
Akumulasi Penyusutan	(79.730.037.594.407)	(72.376.810.108.568)	10,16%
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	-1,80%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Piutang Jangka Panjang	9.952.214.237	6.125.046.122	62,48%
Tagihan piutang penjualan angsuran	1.401.564.945	1.575.385.210	-11,03%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	8.628.398.783	4.591.690.553	87,91%
Piutang jangka panjang lainnya	-	32.557.800	-100,00%
Penyisihan piutang jangka panjang	(77.749.491)	(74.587.441)	4,24%
Aset Lainnya	4.479.657.976.986	4.466.696.786.229	0,29%
Kemitraan dengan pihak ketiga	746.575.247.653	728.246.121.768	2,52%
Aset tidak berwujud	712.686.201.189	525.514.046.006	35,62%
Dana yang dibatasi penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	-31,04%
Aset lain-lain	3.550.228.167.318	3.552.319.480.738	-0,06%
Akumulasi penyusutan/amortisasi	(733.405.321.522)	(634.578.864.515)	15,57%
KEWAJIBAN	6.538.317.015.300	5.556.864.467.956	17,66%
Kewajiban Jangka Pendek	3.045.164.577.476	1.950.598.707.384	56,11%
Utang perhitungan pihak ketiga	599.636.211	518.107.784	15,74%
Utang kepada pihak ketiga	888.205.100.499	1.259.020.166.055	-29,45%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Utang bunga	7.613.724.020	9.802.763.059	-22,33%
Utang transfer	532.345.551.139	95.485.958.416	457,51%
Bagian lancar utang jangka panjang	62.144.237.040	62.144.237.040	0,00%
Utang kelebihan pembayaran pendapatan	405.848.803.088	274.862.110.657	47,66%
Pendapatan diterima dimuka	1.140.267.273.844	144.193.585.735	690,79%
Uang muka	19.562.000	260.384.809	-92,49%
Utang jangka pendek lainnya	8.120.689.634	104.311.393.829	-92,21%
Kewajiban Jangka Panjang	3.493.152.437.824	3.606.265.760.572	-3,14%
Utang jangka panjang dalam negeri	192.537.857.959	252.354.377.999	-23,70%
Kewajiban Konsesi Jasa	3.300.614.579.865	3.353.911.382.573	-1,59%
EKUITAS	168.415.457.558.042	168.678.603.197.783	-0,16%



LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Pendapatan	19.460.278.924.137	31.008.531.170.902	-37,24%
11 Pajak	15.614.456.267.245	15.642.661.243.531	-0,18%
12 Kontribusi Sosial	-	-	-
13 Hibah	182.607.446.481	11.934.511.589.287	-98,47%
14 Pendapatan Lainnya	3.663.215.210.411	3.431.358.338.083	6,76%
2 Beban	29.782.766.516.771	42.704.900.060.067	-30,26%
21 Kompensasi Pegawai	14.891.481.739.673	14.028.128.229.776	6,15%
22 Penggunaan Barang dan Jasa	10.677.645.631.544	12.028.162.026.003	-11,23%
23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
24 Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
25 Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
26 Hibah	2.871.249.341.289	15.075.666.945.858	-80,95%
27 Manfaat Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
28 Beban Lainnya	1.293.581.987.309	1.505.158.665.719	-14,06%
GOB Saldo Operasi Bruto (Gross Operating Balance) (1-2+23+NOBz)	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	-11,75%
NOB Saldo Operasi Neto (Net Operating Balance) (1-2+NOBz)	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	-11,75%
3 TRANSAKSI ASET DAN KEWAJIBAN NETO (NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES)	(10.389.762.793.253)	(11.696.368.889.165)	-11,17%
31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	6.090.896.980.532	8.354.917.869.460	-27,10%
311 Aset Tetap	4.936.522.277.057	6.886.245.796.019	-28,31%
312 Persediaan	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
313 Barang Berharga	-	-	0,00%
314 Aset Non Produksi	12.257.879.776	26.879.724.102	-54,40%
NLB Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (Net Lending / Borrowing) (1-2+NOBz-31)	(16.480.659.773.785)	(20.051.286.758.625)	-17,81%
3 TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) (TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING))	(16.628.600.427.865)	(20.051.286.758.625)	-17,07%
32 Akuisisi Aset Keuangan (321+322+323)	(16.554.630.100.825)	(20.270.830.995.665)	-18,33%
321 Dalam Negeri	(16.554.630.100.825)	(20.270.830.995.665)	-18,33%
322 Luar Negeri	-	-	-
33 Keterjadian Kewajiban Neto (331+332)	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
331 Dalam Negeri	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
332 Luar Negeri	-	-	-



NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 KEKAYAAN BERSIH	168.421.573.128.368	168.678.603.197.783	-0,15%
61 Aset Non Keuangan	165.459.210.637.645	163.229.840.953.895	0,39%
611 Aset Tetap	71.057.059.157.592	71.640.163.619.855	-1,61%
6111 Gedung dan Bangunan	62.829.723.835.909	61.337.375.470.958	-2,02%
6112 Peralatan dan Mesin	4.522.741.738.268	4.912.888.184.296	-1,80%
6113 Aset Tetap Lainnya	4.758.724.254.024	5.389.899.964.601	3,77%
612 Persediaan	7.042.174.889.180	5.859.787.850.705	9,11%
6121 Persediaan untuk Tujuan Strategis	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6122 Persediaan Lainnya	7.042.099.409.780	6.453.862.097.388	9,11%
614 Aset Non Produksi	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
6141 Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
6142 Aset Bawah Tanah	-	-	-
6143 Aset yang Terjadi secara Alamiah Lainnya	-	-	-
6144 Aset Non Produksi Tak Berwujud	-	-	-
62 Aset Keuangan	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	0,79%
6202 Uang dan Deposito	2.515.694.109.250	2.588.004.202.304	-2,79%
6203 Surat Berharga selain Saham	61.871.413	61.871.413	0,00%
6204 Pinjaman	0	32.557.800	-100,00%
6205 Saham dan Ekuitas Lainnya	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6208 Piutang Lainnya	2.462.958.567.390	2.568.074.240.279	-4,09%
621 Aset Keuangan Domestik	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	0,79%
6212 Uang dan Deposito	2.515.694.109.250	2.588.004.202.304	-2,79%
6213 Surat Berharga selain Saham	61.871.413	61.871.413	0,00%
6214 Pinjaman	0	32.557.800	-100,00%
6215 Saham dan Ekuitas Lainnya	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6218 Piutang Lainnya	2.462.958.567.390	2.568.074.240.279	-4,09%
622 Aset Keuangan Luar Negeri	-	-	-
6222 Uang dan Deposito	-	-	-
6225 Surat Berharga selain Saham	-	-	-
63 Kewajiban	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	17,55%
6303 Surat Berharga selain Saham	-	-	-
6304 Pinjaman	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6308 Utang Lainnya	6.279.847.066.975	5.242.365.852.917	19,79%
631 Kewajiban Domestik	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	17,55%
6313 Surat Berharga selain Saham	-	-	-
6314 Pinjaman	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6318 Utang Lainnya	6.279.847.066.975	5.242.365.852.917	19,79%
632 Kewajiban Luar Negeri	-	-	-
6323 Surat Berharga selain Saham	-	-	-
6324 Pinjaman	-	-	-



LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
C1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	19.460.278.924.137	56.309.886.199.612	-65,44%
C11 Pajak	15.614.456.267.245	7.930.196.792.551	96,90%
C13 Hibah	182.607.446.481	11.934.511.589.287	-98,47%
C14 Penerimaan Lainnya	3.663.215.210.411	36.445.177.817.774	-89,95%
C2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	29.782.766.516.771	38.894.497.914.751	-23,43%
C21 Kompensasi Pegawai	14.891.481.739.673	14.268.762.039.719	4,36%
C22 Pembelian Barang dan Jasa	10.677.645.631.544	12.331.169.797.445	100%
C23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
C24 Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
C25 Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
C26 Hibah	2.871.249.341.289	9.683.246.110.421	946,82%
C27 Manfaat Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
C28 Pembayaran Lainnya	1.293.581.987.309	2.543.535.774.456	-49,14%
CIO Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) (C1-C2)	(10.322.487.592.633)	17.415.388.284.861	-159,27%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAs)			
C31A Pembelian Aset Non Keuangan	8.188.084.767.130	6.917.364.714.359	18,37%
C311A Aset Tetap	4.955.776.833.516	6.890.484.990.257	-28,08%
C312A Persediaan	3.220.050.053.838	-	100,00%
C313A Barang Berharga	-	-	-
C314A Aset Non Produksi	12.257.879.776	26.879.724.102	-54,40%
C31B Penjualan Aset Non Keuangan	2.097.187.786.598	11.684.556.733	17848,37%
C311B Aset Tetap	19.254.556.459	11.684.556.733	64,79%
C312B Persediaan	2.077.933.230.139	-	100,00%
C313B Barang Berharga	-	-	-
C314B Aset Non Produksi	-	-	-
C31 Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B)	6.090.896.980.532	6.905.680.157.625	-11,80%
CSD Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31)	(16.413.384.573.165)	10.509.708.127.235	-256,17%
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
C32x Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
C321x Domestik	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
C322x Luar Negeri	-	-	-
C33 Keterjadian Kewajiban Neto	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	4,56%
C331 Domestik	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	4,56%
C332 Luar Negeri	-	-	-
NFB Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	150.170.327.040	293.744.237.040	175,52%
NCB Perubahan Kas (CSD+NFB)	(16.263.214.246.125)	10.803.452.364.275	-250,54%



New DJPB
in Town



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2017.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH (LKPK-TW)

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian menyatakan bahwa laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu



laporan tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11 tersebut, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Proses penggabungan laporan ini dilakukan secara bertahap atau berjenjang, di mana entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ruang lingkup laporan konsolidasi ini meliputi LRA Konsolidasian, LO Konsolidasian, LPE Konsolidasian, dan Neraca Konsolidasian. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian meliputi tiga tahap, antara lain: (1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; (2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.

A.2.1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) melalui Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dan Laporan Keuangan UAKBUN-D

LKPP-TW mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat di wilayah, yang terdiri dari Kuasa BUN dan Kementerian Negara/Lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk Satuan Kerja BLU dan Satuan Kerja pengguna Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. LKPP-TW tidak mencakup entitas Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

LKPP-TW mencakup transaksi-transaksi keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. LKPP-TW disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah



Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah, serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, tidak untuk tujuan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

SAI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (DIPA), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan Neraca.

Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan SA-BUN untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu SiAP, SA-UP&H, SA-IP, SA-PPP, SA-TD, SA-BS, SA-BL, SA-TK, dan SA-BL. SiAP terdiri dari dua subsistem, yaitu SAKUN dan SAU. SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan LAK Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP, namun saat ini belum mengakomodasikan LKPP-TW. LKPP-TW disusun melalui konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Tingkat Kanwil dengan Laporan Keuangan Satuan Kerja di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah disusun berdasarkan LRA Satuan Kerja yang disesuaikan dengan realisasi yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. LRA Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah terdiri dari:

- 1) Angka realisasi Pendapatan dan Hibah tingkat wilayah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan data pendapatan yang dilakukan oleh wajib pajak



atau wajib setor yang berdomisili di Kalimantan Barat. Pendapatan tersebut diuji dengan penerimaan kas yang dikelola oleh Kuasa BUN di wilayah sebagai pembukuan intrakompatel atas seluruh penerimaan uang riil masuk ke Kas Negara di wilayah (data SAKUN). Sedangkan data realisasi Pendapatan dan Hibah yang dilaporkan Satuan Kerja berfungsi sebagai penguji (kontrol) data Kuasa BUN.

- 2) Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada LRA Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan kompilasi realisasi belanja yang dilaporkan oleh Satuan Kerja yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat, di mana kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Apabila proses rekonsiliasi antara KPPN dan satker dilaksanakan dengan baik, angka yang dilaporkan oleh Satuan Kerja akan sama dengan angka yang dilaporkan oleh Kanwil sebagai Kuasa BUN. Apabila masih terdapat angka suspen, yaitu selisih antara angka Satuan Kerja dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka angka realisasi Belanja Wilayah dapat menggunakan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh Kuasa BUN (data SAU/SAKUN). Angka tersebut berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja Satuan Kerja. Hal ini dimungkinkan karena LKPP wilayah disusun dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah, bukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan penggunaan data SAU/SAKUN untuk belanja dilakukan dengan pertimbangan angka suspen yang terkecil.
- 3) LRA Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah tidak menyajikan angka realisasi Pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN Pusat.

b. Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Tingkat Satuan Kerja dan Neraca Tingkat Kuasa BUN. Perlakuan konsolidasi atas Neraca Tingkat Satuan Kerja dan Neraca Tingkat Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dan Bank meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU.



- 2) Angka Kas di KPPN diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN sedangkan Angka Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU diambil dari Neraca Tingkat SATUAN KERJA. Rekening Kas di KPPN, Kas di Bendaharan Pengeluaran, Kas dan Kas Lainnya yang telah disahkan ke KPPN dan Kas pada BLU yang telah disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA (Ekuitas).
 - 3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN, disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA (Ekuitas).
 - 4) Utang kepada Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Satuan Kerja, disajikan dengan akun pasangan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
 - 5) Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dengan akun pasangan Ekuitas.
 - 6) Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung berbentuk kas yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Ekuitas.
 - 7) Kas pada BLU yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Ekuitas.
 - 8) Piutang, Investasi Jangka Pendek, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta akun pasangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam jurnal standar, didasarkan pada Neraca Satuan Kerja.
- c. Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
- Laporan Operasional disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun Berjalan yang dikompilasi dari seluruh LK K/L dan LK BUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
- Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang disajikan di Neraca.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah



Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca Pemerintah Pusat serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam LKPP TW Tahun 2024, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga (K/L) yang dikonsolidasi meliputi 529 LK Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat.

A.2.2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPKD-TW)

LKPKD-TW merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Laporan Operasional Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024 merupakan konsolidasi dari seluruh 15 Pemerintah Daerah yang ada pada lingkup Kalimantan Barat, meliputi 1 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kabupaten, dan 2 Pemerintah Kota. Konsolidasi atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dilakukan terhadap 15 LRA, LO, LPE, dan Neraca LKPD Tahun 2024.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana tunai yang masuk ke sektor pemerintahan, baik yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh Pemerintah Daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana tunai yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

Proses konsolidasi diawali dengan menghimpun LKPD yang telah disajikan dalam format sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021. Proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan LKPD dari Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum dilakukan konsolidasi dengan LKPP, akun timbal-balik antar Pemerintah Daerah



pada LKPD Konsolidasian diidentifikasi dan dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal-balik tersebut.

A.2.3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) melalui Konsolidasi LKPP-TW dan LKPDK-TW

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara LKPP-TW dengan LKPDK-TW merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui Laporan Keuangan Konsolidasian ini dapat dilihat peran pemerintah pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan. Guna mencapai tujuan tersebut, pendekatan penyusunan LRA Konsolidasian ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas per wilayah yang merupakan komponen utama yang mencerminkan kondisi fiskal daerah dari sektor pemerintahan.

Kebutuhan penyusunan LKPK-TW dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antar wilayah negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir 1.5 (Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang juga ditegaskan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah.

Penyusunan LKPK-TW juga dilakukan dalam rangka menjawab laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010, yang mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan



LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah dan ketersediaan informasi bagi publik. Menurut hasil reviu tersebut, secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (integrasi LKPP dengan LKPD) sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

LKPK-TW merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Konsolidasi LKPP dan LKPD tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal.

Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 mencakup:

a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Angka yang dikonsolidasikan dalam LRA Konsolidasian ini adalah angka realisasi anggaran baik untuk LRA Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka APBN maupun APBD. Dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi ini, realisasi per jenis belanja Pemerintah Pusat disajikan berdasarkan data BUN (SAU/SAKUN) sehingga tidak disajikan angka suspen belanja.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam Menyusun LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut.

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun sejenis untuk dijumlahkan. Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal-balik pada LRA Konsolidasian, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi.



- Eliminasi pendapatan transfer pada LKPD kabupaten dan kota dengan belanja transfer pada LKPD Provinsi. Belanja transfer dari provinsi berasal dari PAD Provinsi. Pos tersebut pada umumnya berupa bagi hasil dan bantuan keuangan.
- Belanja transfer dari kabupaten ke desa tetap disajikan karena tidak ada laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan.

b. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Operasional disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun Berjalan yang dikompilasi dari seluruh LK K/L dan LK BUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Proses konsolidasi dilakukan terhadap Pendapatan dan Beban Operasional, Pendapatan dan Beban Non Operasional, Pendapatan dan Beban Luar Biasa, serta Surplus/Defisit Laporan Operasional pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang disajikan di Neraca.

d. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Konsolidasi Neraca Pemerintah Daerah dilakukan terhadap 529 Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Neraca 6 KPPN dan Neraca 15 Pemda yang ada di wilayah Kalimantan Barat.

Langkah-langkah konsolidasi tingkat wilayah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan.

Secara umum, aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemda merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun aset Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun aset Pemda. Kemudian akun kewajiban Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban Pemda.



- kecuali untuk akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan Pemda yang harus dieliminasi.
- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi.
Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca Konsolidasian, yang berupa akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, yaitu akun utang-piutang antara kedua entitas tersebut.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Analisis dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
- Analisis belanja dilakukan dengan:
 - 1) Merinci belanja pemerintah pusat per jenis belanja. Data belanja pemerintah pusat diambil dari sistem akuntansi pemerintah pusat;
 - 2) Realisasi belanja per fungsi untuk pemerintah daerah diambil dari LKPD;
 - 3) Analisis dilakukan terhadap komposisi belanja per jenis belanja.
 - Analisis per jenis pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas erta akun per tahun dan antar tahun.

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI AKUN TIMBAL BALIK

LRA Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP-TW telah mengacu pada SAP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian LKPD Konsolidasian mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan telah mengacu pada SAP melalui Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan



Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP-TW dan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN/D yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN/D. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada pemerintah pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada tampilan muka (*face*) laporan keuangan dan CaLK menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

3. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.



Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Penerapan akrual hanya menganut satu jenis Ekuitas, berbeda dengan tahun 2014 yang masih berbasis CTA yang menganut 3 (tiga) jenis Ekuitas, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

6. Bagan Akun Standar

Pos-pos yang disajikan pada LRA adalah berdasarkan BAS yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 214/PMK.05/2014. Pos-pos yang disajikan pada LRA APBD adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya.

a) Eliminasi Akun Timbal Balik

Akun timbal balik adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antar Pempus dan Pemda. Eliminasi akun timbal balik dilakukan dengan jumlah yang sama pada LRA Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian.

b) Eliminasi Akun Timbal Balik yang Tidak Sama Jumlahnya

Akun timbal balik dengan jumlah yang tidak sama dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia, eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya dilakukan dengan mengeliminasi akun timbal balik berdasarkan jumlah masing-masing. Contoh eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya adalah akun Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil pada LRA Konsolidasian Pemda dengan Belanja Transfer Dana Bagi Hasil pada LRA Pempus.

c) Eliminasi Akun Timbal Balik yang Tidak Habis Terkonsolidasi pada Konsolidasi Tingkat Sebelumnya



Pada konsolidasi laporan keuangan Pemda terdapat beberapa akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan angka akun timbal balik, tidak ada laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan, dan tidak ditemukan akun timbal balik dari akun yang seharusnya dieliminasi. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia dan mempertimbangkan manfaat penyajian akun tersebut pada laporan keuangan konsolidasi, maka eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya dilakukan dengan mengeliminasi akun tersebut sebesar jumlahnya. Contoh akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya yaitu Bagian Lancar Utang ke Pemda Lainnya dan Utang Dalam Negeri Pemda Lainnya pada Neraca Konsolidasian Pemda.

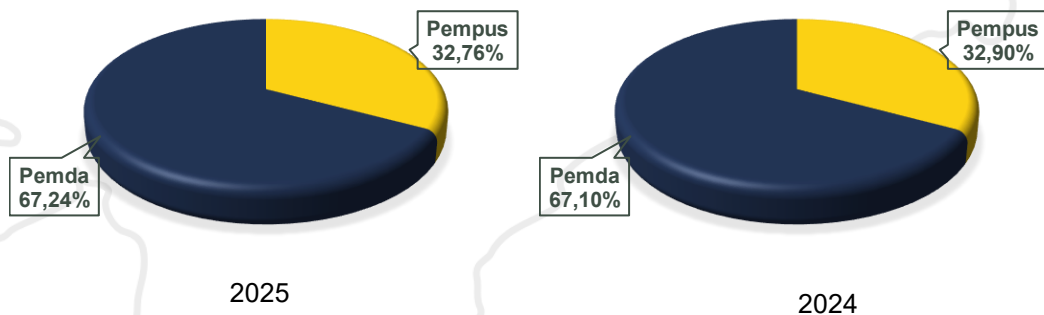


B. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 *UNAUDITED*

B.1. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 mencapai Rp19.592.310.916.270,00 yang merupakan konsolidasi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp12.980.874.401.546,00 dan konsolidasi Pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah sebesar Rp26.649.038.836.568,00 serta konsolidasian sebesar (Rp20.037.602.321.844,00). Komposisi Pendapatan Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasi, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat. Perbandingan komposisi pendapatan konsolidasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Grafik 5 sebagai berikut.

Grafik 5. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024

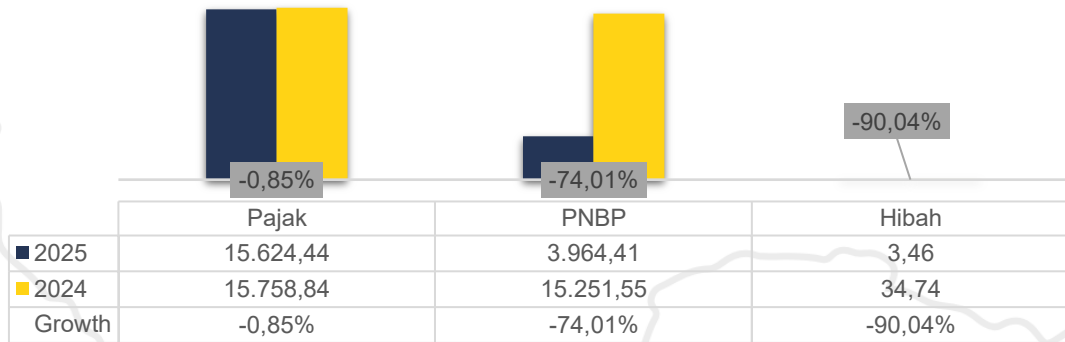


Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2024 (*Audited*) & 2025 (*Unaudited*)

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebesar Rp19.592.310.916.270,00 mengalami penurunan 36,89 persen dari tahun 2024 sebesar Rp31.045.135.490.591,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada komponen pendapatan secara umum, antara lain Pendapatan Perpajakan turun sebesar 0,85 persen (*yoy*), Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak turun sebesar 74,01 persen (*yoy*), dan Pendapatan Hibah turun sebesar 90,04 persen (*yoy*). Rincian perbandingan komponen Pendapatan Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Grafik 6 sebagai berikut.



Grafik 6. Perbandingan Komponen Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*) & 2024 (*Audited*)

B.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan berkontribusi secara dominan terhadap Total Pendapatan Konsolidasi Tingkat Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025. Realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasi Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 secara umum mengalami penurunan dari tahun 2024. Pendapatan Perpajakan tahun 2025 sebesar Rp15.624.444.191.938,00 atau turun 0,85 persen dari tahun 2024 sebesar Rp15.758.842.981.577,00. Rincian Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pajak Dalam Negeri	15.207.299.058.938	15.431.161.377.577	(223.862.318.639)	-1,45%
Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000	327.681.604.000	89.463.529.000	27,30%
Pendapatan Perpajakan	15.624.444.191.938	15.758.842.981.577	(134.398.789.639)	-0,85%

Berdasarkan Tabel 6, penurunan Pendapatan Perpajakan tahun 2025 secara umum disebabkan oleh penurunan komponen Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri. Pendapatan Pajak Dalam Negeri pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp15.207.299.058.938,00 dan Rp15.431.161.377.577,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp223.862.318.639,00 atau 1,45 persen (*yoy*). Sementara itu, Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar



Rp417.145.133.000,00 dan Rp327.681.604.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp89.463.529.000,00 atau naik 27,30 persen (yoy).

B.1.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.964.405.963.825,00 yang berasal dari Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp291.643.600.453,00, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2.669.442.687.737,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp167.106.469.535,00 dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp836.213.206.100,00.

Tabel 7. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Bagian Laba BUMN	291.643.600.453	260.280.433.621	31.363.166.832	12,05%
PNBP Lainnya	2.669.442.687.737	1.860.087.843.008	809.354.844.729	43,51%
Pendapatan Transfer	167.106.469.535	11.885.375.159.487	(11.718.268.689.952)	-98,59%
Pendapatan BLU	836.213.206.100	1.245.804.717.262	(409.591.511.162)	-32,88%
Total PNBP	3.964.405.963.825	15.251.548.153.378	(11.287.142.189.553)	-74,01%

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 74,01 persen (yoy). Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan komponen Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp11.718.268.689.952,00 atau turun 98,59 persen (yoy) dan Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp409.591.511.162,00 atau turun 32,88 persen (yoy). Sementara itu, Bagian Laba BUMN mengalami kenaikan sebesar Rp31.363.166.832,00 atau naik 12,05 persen (yoy) dan PNBP Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp809.354.844.729,00 atau 43,51 persen (yoy).

B.1.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.460.760.507,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 90,04 persen apabila dibandingkan dengan Pendapatan Hibah tahun 2024 sebesar Rp34.744.355.636,00.



B.2. Belanja dan Transfer Konsolidasian

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp36.005.695.489.436,00 yang terdiri dari konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp29.993.341.566.227,00 dan Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp26.049.956.245.052,00. Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 53,52 persen dari total Belanja Pemerintah Konsolidasian, sedangkan Belanja Pemerintah Daerah berkontribusi sebesar 46,48 persen.

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp36.005.695.489.436,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.090.726.759.781,00 atau 29,53 persen dari Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp51.096.422.249.217,00. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan Belanja Konsolidasian sebesar Rp3.462.634.423.150,00 atau 9,46 persen (yoy) dan Belanja Transfer sebesar Rp11.628.092.336.631,00 atau 80,33 persen (yoy). Adapun perbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 tersebut sebagai berikut.

Tabel 8. Perbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Belanja Konsolidasian	33.158.991.674.948	36.621.626.098.098	(3.462.634.423.150)	-9,46%
Transfer	2.846.703.814.488	14.474.796.151.119	(11.628.092.336.631)	-80,33%
Jumlah Belanja dan Transfer	36.005.695.489.436	51.096.422.249.217	(15.090.726.759.781)	-29,53%

B.2.1. Belanja Pemerintah Konsolidasian

Belanja Pemerintah Konsolidasian pada tahun 2025 sebesar Rp33.158.991.674.948,00 mengalami penurunan sebesar 9,46 persen dari Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp36.621.626.098.098,00. Rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

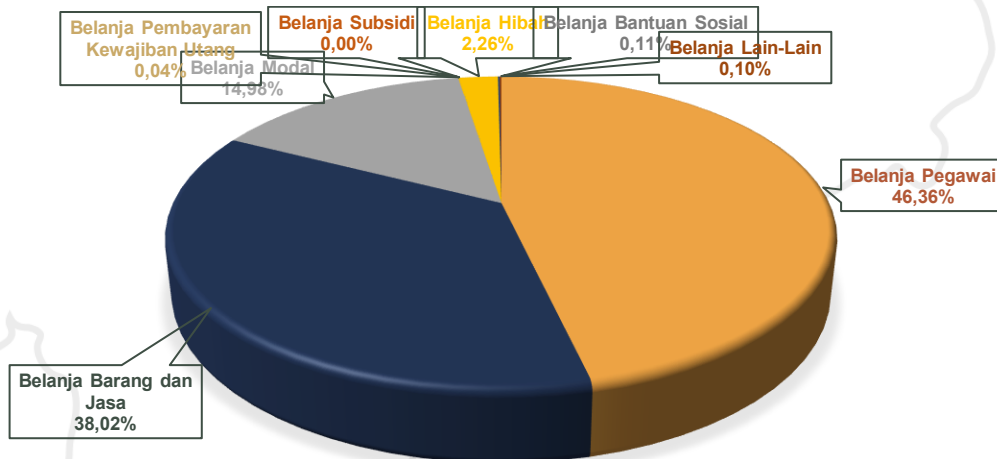
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Belanja Pegawai	15.371.174.955.146	14.063.278.549.304	1.307.896.405.842	9,30%
Belanja Barang dan Jasa	11.986.636.514.922	13.945.760.265.666	(1.959.123.750.744)	-14,05%
Belanja Modal	4.968.034.713.292	6.924.810.076.855	(1.956.775.363.563)	-28,26%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	12.099.794.486	22.942.531.167	(10.842.736.681)	-47,26%
Belanja Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	(542.330.581)	-24,76%
Belanja Hibah	751.007.068.359	1.606.015.104.776	(855.008.036.417)	-53,24%



Belanja Bantuan Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	(7.591.308.494)	-17,80%
Belanja Lain-Lain	33.330.606.274	13.977.908.786	19.352.697.488	138,45%
Jumlah Belanja Konsolidasian	33.158.991.674.948	36.621.626.098.098	(3.462.634.423.150)	-9,46%

Berdasarkan rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian pada Tabel 9 di atas, diketahui bahwa penurunan jumlah Belanja Konsolidasian pada tahun 2025 didominasi oleh penurunan pada Belanja Modal yang turun sebesar Rp1.956.775.363.563,00 dari tahun 2024. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang, Belanja Subsidi, Belanja Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial juga mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp1.959.123.750.744,00, Rp10.842.736.681,00, Rp542.330.581,00, Rp855.008.036.417,00, dan Rp7.591.308.494,00. Sementara itu, Belanja Pegawai dan Belanja Lain-Lain mengalami kenaikan pada tahun 2025. Adapun komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik 7 sebagai berikut.

Grafik 7. Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

Berdasarkan Grafik 7, Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 didominasi oleh Belanja Pegawai dengan proporsi 46,36 persen dari Total Belanja Konsolidasian, diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa dengan proporsi sebesar 38,02 persen, dan Belanja Modal sebesar 14,98 persen. Sementara itu, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi, Belanja Pembayaran Kewajiban Bunga Utang, dan Belanja Lain-Lain memiliki proporsi di bawah 5 persen terhadap Total Belanja Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Barat.



B.2.2. Transfer Konsolidasian

Transfer Konsolidasian pada tahun 2025 sebesar Rp2.846.703.814.488,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.628.092.336.631,00 atau 80,33 persen apabila dibandingkan dengan Transfer Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp14.474.796.151.119,00. Rincian Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Rincian Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	188.596.496.892	11.420.201.270.523	(11.231.604.773.631)	-98,35%
Transfer Antar Pemerintah Daerah	2.658.107.317.596	3.054.594.880.596	(396.487.563.000)	-12,98%
Jumlah Transfer Konsolidasian	2.846.703.814.488	14.474.796.151.119	(11.628.092.336.631)	-80,33%

Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp188.596.496.892,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.231.604.773.631,00 atau 98,35 persen dari tahun 2024 sebesar Rp11.420.201.270.523,00. Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Sementara itu, Transfer Antar Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.658.107.317.596,00 juga mengalami penurunan sebesar Rp396.487.563.000,00 atau 12,98 persen dari tahun 2024 sebesar Rp3.054.594.880.596,00. Transfer Antar Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

B.3. Surplus / (Defisit) Anggaran

Pada tahun 2025 terdapat Defisit Anggaran Konsolidasian sebesar (Rp16.413.384.573.165,00). Defisit tersebut merupakan konsolidasian dari Defisit Anggaran Pemerintah Pusat sebesar Rp(17.012.467.164.681,00) dan Surplus Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp599.082.591.516,00. Defisit Anggaran Konsolidasian Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.637.902.185.460,00 atau 18,14 persen dibandingkan dengan Defisit Anggaran Tahun 2024 sebesar (Rp20.051.286.758.625,00).



B.4. Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan Neto Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat berasal dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Neto Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.054.193.737.022,00. Nilai tersebut berasal dari Pemerintah Daerah. Pembiayaan Bersih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp420.528.987.923,00 atau 28,52 persen dibandingkan dengan Pembiayaan Bersih Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.474.722.724.945,00.

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian tahun 2025 sebesar Rp1.339.137.974.062,00 mengalami penurunan sebesar Rp525.928.987.923,00 atau 28,20 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.865.066.961.985,00. Penerimaan Pembiayaan tersebut didominasi berasal dari Penggunaan SILPA sebesar Rp1.197.216.370.958,00. Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 11. Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Penggunaan SILPA	1.197.216.370.958	1.731.044.233.380	(533.827.862.422)	-30,84%
Pencairan Dana Cadangan	7.147.693.104	37.422.728.605	(30.275.035.501)	-80,90%
Pinjaman Dalam Negeri	134.773.910.000	96.600.000.000	38.173.910.000	39,52%
Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	0,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.339.137.974.062	1.865.066.961.985	(525.928.987.923)	-28,20%

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian tahun 2025 sebesar Rp284.944.237.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp105.400.000.000,00 atau 27,00 persen dari tahun 2024 sebesar Rp390.344.237.040,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut didominasi berasal dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp208.744.237.040,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 12. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00%



Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	76.200.000.000	74.200.000.000	2.000.000.000	2,70%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	208.744.237.040	316.144.237.040	(107.400.000.000)	-33,97%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00%
Jumlah Pengeluaran pembiayaan	284.944.237.040	390.344.237.040	(105.400.000.000)	-27,00%

B.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2025 sebesar (Rp15.359.190.836.143,00) atau mengalami penurunan sebesar Rp3.217.373.197.537,00 atau 17,32 persen apabila dibandingkan dengan Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2024 sebesar (Rp18.576.564.033.680,00).



C. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 *UNAUDITED*

C.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.221.102.017.130,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.359.595.754.178,00 atau naik 32,02 persen dari pendapatan operasional per 31 Desember 2024 yakni Rp19.861.506.262.952,00. Rincian komponen Pendapatan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 13. Rincian Pendapatan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

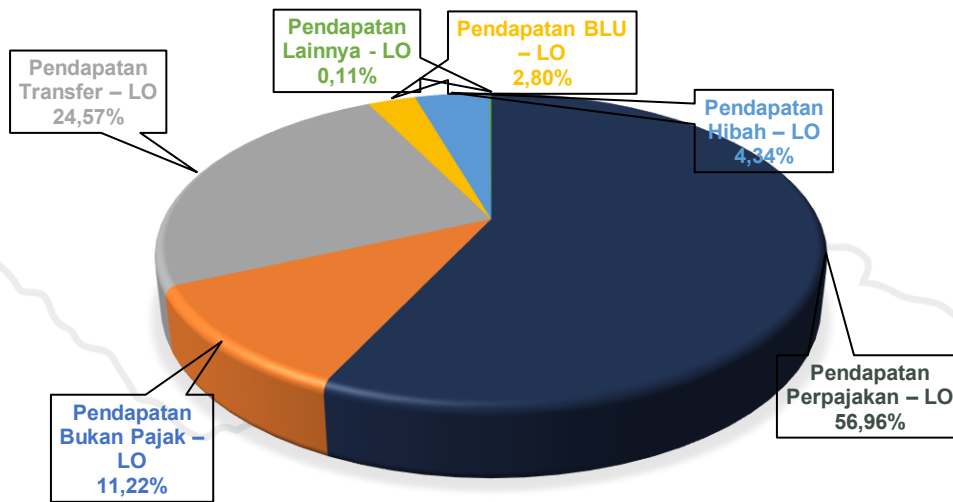
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pendapatan Perpajakan	14.934.573.552.292	15.847.498.280.977	(912.924.728.685)	-5,76%
Pendapatan Bukan Pajak	2.942.425.421.430	2.814.315.067.531	128.110.353.899	4,55%
Pendapatan Transfer	6.441.337.049.948	30.086.490.727	6.411.250.559.221	21309,40%
Pendapatan BLU	734.536.117.542	614.538.933.035	119.997.184.507	19,53%
Pendapatan Hibah	1.139.261.066.673	478.202.686.182	661.058.380.491	138,24%
Pendapatan Lainnya	28.968.809.246	76.864.804.500	(47.895.995.254)	-62,31%
Jumlah Pendapatan	26.221.102.017.130	19.861.506.262.952	6.359.595.754.178	32,02%

Berdasarkan Tabel 13, kenaikan Pendapatan Operasional Konsolidasian secara umum didominasi oleh kenaikan Pendapatan Transfer yang naik sebesar Rp6.411.250.559.221,00 atau 21309,40 persen (*yoy*). Selain itu, Pendapatan Bukan Pajak, Pendapatan BLU, dan Pendapatan Hibah juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp128.110.353.899,00 atau 4,55 persen, Rp119.997.184.507,00 atau 19,53 persen, dan Rp661.058.380.491,00 atau 138,24 persen. Di sisi lain, Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Lainnya mengalami penurunan pada tahun 2025. Pendapatan Perpajakan mengalami penurunan sebesar Rp912.924.728.685,00 atau 5,76 persen dari tahun 2024. Sementara itu, Pendapatan Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp47.895.995.254,00 atau 62,31 persen dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, komposisi komponen Pendapatan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagai berikut.



Grafik 8. Komposisi Pendapatan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

Berdasarkan Grafik 8, Pendapatan Perpajakan memiliki proporsi terbesar dari Total Pendapatan Operasional Konsolidasian tahun 2025, yaitu sebesar 56,96 persen, diikuti oleh Pendapatan Transfer sebesar 24,57 persen dan Pendapatan Bukan Pajak sebesar 11,22 persen. Sementara itu, Pendapatan Hibah, Pendapatan BLU, dan Pendapatan Lainnya masing-masing memiliki proporsi di bawah 5 persen terhadap Total Pendapatan Operasional Konsolidasian tahun 2025.

C.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.934.573.552.292,00 berasal dari Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp10.889.935.092.693,00 dan Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp4.044.638.459.599,00. Pendapatan Perpajakan Pemerintah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp912.924.728.685,00 atau turun 5,76 persen dibandingkan periode sampai dengan 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp15.847.498.280.977,00.

Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 14. Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pendapatan Pajak Dalam Negeri – LO	14.516.339.180.292	15.518.272.923.977	(1.001.933.743.685)	-6,46%
Pajak Penghasilan	3.691.822.199.107	4.705.851.899.216	(1.014.029.700.109)	-21,55%
Pajak Pertambahan Nilai	6.324.942.604.083	6.098.720.060.701	226.222.543.382	3,71%
Pajak Bumi dan Bangunan	192.673.297.412	504.474.989.247	(311.801.691.835)	-61,81%
Cukai	247.295.409.000	129.210.395.000	118.085.014.000	91,39%
Pajak Pemerintah Daerah	4.044.638.459.599	3.919.114.863.698	125.523.595.901	3,20%
Pajak Lainnya	14.967.211.091	160.900.716.115	(145.933.505.024)	-90,70%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional – LO	418.234.372.000	329.225.357.000	89.009.015.000	27,04%
Bea Masuk	67.645.443.000	76.214.898.000	(8.569.455.000)	-11,24%
Bea Keluar	350.588.929.000	253.010.459.000	97.578.470.000	38,57%
Pendapatan Perpajakan	14.934.573.552.292	15.847.498.280.977	(912.924.728.685)	-5,76%

Penurunan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2025 didominasi oleh penurunan Pendapatan Pajak Dalam Negeri yang turun sebesar Rp1.001.933.743.685,00 atau 6,46 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan Pendapatan Pajak Dalam Negeri terbesar terdapat pada Pendapatan Pajak Penghasilan yang turun sebesar Rp1.014.029.700.109,00 atau 21,55 persen (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemindahan kewajiban perpajakan dari kantor cabang ke kantor pusat melalui penggunaan NPWP satuan kerja induk, sehingga pengakuan Pajak Penghasilan terpusat pada kantor pajak induk. Komponen Pajak Dalam Negeri lainnya juga mengalami penurunan, kecuali Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Pajak Pemerintah Daerah yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp226.222.543.382,00 atau 3,71 persen, Rp118.085.014.000,00 atau 91,39 persen, dan Rp125.523.595.901,00 atau 3,20 persen. Selain itu, Pendapatan pajak Perdagangan Internasional juga mengalami kenaikan secara umum sebesar Rp89.009.015.000,00 atau 27,04 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan Bea Keluar sebesar Rp97.578.470.000,00 atau 38,57 persen dan penurunan Bea Masuk yang turun sebesar Rp8.569.455.000,00 atau 11,24 persen.

C.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak tingkat Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.942.425.421.430,00 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak



Pemerintah Pusat sebesar Rp615.336.736.872,00 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pemerintah Daerah sebesar Rp2.327.088.684.558,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/BUMD	399.400.155.485	389.162.685.907	10.237.469.578	2,63%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	442.338.052.390	880.919.606.472	(438.581.554.082)	-49,79%
Pendapatan Jasa	1.459.651.534.548	917.546.586.402	542.104.948.146	59,08%
Pendapatan Bunga	1.178.712.059	-	1.178.712.059	100,00%
Pendapatan Pendidikan	-	-	-	0,00%
Pendapatan Iuran dan Denda	24.520.230.077	-	24.520.230.077	100,00%
Pendapatan Lain-Lain	615.336.736.872	626.686.188.751	(11.349.451.879)	-1,81%
Jumlah PNBPNP	2.942.425.421.430	2.814.315.067.532	128.110.353.898	4,55%

Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 didominasi oleh peningkatan pada Pendapatan Jasa yang naik sebesar Rp542.104.948.146,00 atau 59,08 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp917.546.586.402,00.

C.1.3. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.441.337.049.948,00 mengalami kenaikan Rp6.411.250.559.221,00 atau 21.309,40 persen dari periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp30.086.490.727,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	6.166.910.225.738	16.184.609.873	6.150.725.615.865	38003,55%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	14.685.115.000	5.910.960.000	8.774.155.000	0,00%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	259.645.452.093	7.990.920.854	251.654.531.239	3149,26%



Bantuan Keuangan Daerah - LO	96.257.117	-	96.257.117	100,00%
Jumlah Pendapatan Transfer	6.441.337.049.948	30.086.490.727	6.411.250.559.221	21309,40%

Kenaikan Pendapatan Transfer per 31 Desember 2025 didominasi oleh kenaikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang naik sebesar Rp6.150.725.615.865,00 atau 38003,55 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.184.609.873,00.

C.1.4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.873.797.184.214,00 mengalami kenaikan sebesar Rp781.055.564.997,00 dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.092.741.619.217,00. Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pendapatan BLU	734.536.117.542	614.538.933.035	119.997.184.507	19,53%
Pendapatan Hibah	1.139.261.066.673	478.202.686.182	661.058.380.491	138,24%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan	1.873.797.184.214	1.092.741.619.217	781.055.564.997	71,48%

Kenaikan Lain-lain pendapatan yang sah per 31 Desember 2025 didominasi oleh kenaikan pada Pendapatan Hibah sebesar Rp661.058.380.491,00 atau 138,24% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp478.202.686.182,00.

C.1.5. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.968.809.246,00 mengalami penurunan Rp47.895.995.254,00 atau turun 62,31 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.864.804.500,00. Rincian Pendapatan Lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Rincian Pendapatan Lainnya – LO Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pendapatan Lainnya Pemda	-	59.828.286.301	(59.828.286.301)	-100,00%
Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	28.968.809.246	17.036.518.199	11.932.291.047	70,04%
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	-	-	-	0,00%



Jumlah Pendapatan Lainnya	28.968.809.246	76.864.804.500	(47.895.995.254)	-62,31%
---------------------------	----------------	----------------	------------------	---------

C.2. Beban Operasional

Beban Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.448.486.187.820,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.720.000.826.287,00 atau naik 9,13 persen dari Beban Operasional per 31 Desember 2024 yakni Rp40.728.485.361.533,00. Selanjutnya rincian komponen Beban Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Rincian Beban Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Beban Operasional Pemerintah Pusat	32.345.366.757.078	34.399.554.455.198	(2.054.187.698.120)	-5,97%
Beban Operasional Pemerintah Daerah	24.635.530.670.631	24.864.007.296.561	(228.476.625.930)	-0,92%
Eliminasi	(12.532.411.239.889)	(18.535.076.390.226)	6.002.665.150.337	-32,39%
Jumlah Beban Operasional	44.448.486.187.820	40.728.485.361.533	3.720.000.826.287	9,13%

C.2.1. Beban Operasional Pemerintah Pusat

Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.345.366.757.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.054.187.698.120,00 atau naik 5,97 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp34.399.554.455.198,00. Rincian Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Rincian Beban Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Beban Pegawai	4.845.807.569.274	4.455.492.271.687	390.315.297.587	8,76%
Beban Persediaan	624.308.897.359	649.438.474.565	(25.129.577.206)	-3,87%
Beban Barang dan Jasa	1.280.583.296.478	2.715.346.342.013	(1.434.763.045.535)	-52,84%
Beban Pemeliharaan	663.926.183.397	543.334.749.063	120.591.434.334	22,19%
Beban Perjalanan Dinas	257.494.259.337	718.729.538.472	(461.235.279.135)	-64,17%
Beban BLU/BLUD	258.673.381.829	-	258.673.381.829	100,00%
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	715.597.010.337	1.151.602.522.132	(436.005.511.795)	-37,86%
Beban Bantuan Sosial	17.501.442.000	13.967.735.100	3.533.706.900	25,30%



Beban Transfer	20.120.463.243.736	20.542.107.543.095	(421.644.299.359)	-2,05%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.434.810.556.338	3.477.710.798.072	(42.900.241.734)	-1,23%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	126.200.916.993	131.824.480.999	(5.623.564.006)	-4,27%
Jumlah Beban Pemerintah Pusat	32.345.366.757.078	34.399.554.455.198	(2.054.187.698.120)	-5,97%

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa penurunan Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp2.054.187.698.120,00 atau 5,97 persen (yoy) disebabkan oleh penurunan komponen Beban secara umum. Penurunan terbesar terjadi pada Beban Barang dan Jasa yang turun sebesar Rp1.434.763.045.535,00 atau 52,84 persen (yoy). Penurunan juga terjadi pada seluruh komponen Beban Operasional Pemerintah Pusat kecuali Beban Pegawai, Beban BLUD, dan Beban Bantuan Sosial.

C.2.2. Beban Operasional Pemerintah Daerah

Beban Operasional Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.635.530.670.631,00 mengalami penurunan sebesar Rp228.476.625.932,00 atau turun 0,92 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp24.864.007.296.562,00. Rincian Beban Operasional Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Rincian Beban Operasional Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Beban Pegawai	10.692.645.673.123	9.875.597.188.366	817.048.484.757	8,27%
Beban Barang dan Jasa	7.926.181.441.555	8.264.698.973.100	(338.517.531.545)	-4,10%
Beban Bunga	10.093.937.097	20.584.710.225	(10.490.773.128)	-50,96%
Beban Subsidi	2.104.177.825	2.190.015.581	(85.837.756)	-3,92%
Beban Hibah	785.416.125.371	1.614.861.436.614	(829.445.311.243)	-51,36%
Beban Bantuan Sosial	17.590.895.469	29.775.747.790	(12.184.852.321)	-40,92%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.568.770.748.655	3.661.038.069.879	(92.267.321.224)	-2,52%
Beban Penyisihan Piutang	252.268.132.478	63.533.579.836	188.734.552.642	297,06%
Beban Lain-Lain	3.036.359.569	193.120.454.532	(190.084.094.963)	-98,43%
Beban Transfer	1.377.423.179.488	1.138.607.120.639	238.816.058.849	20,97%
Jumlah Beban Pemerintah Daerah	24.635.530.670.631	24.864.007.296.562	(228.476.625.932)	-0,92%

Penurunan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp228.476.625.932,00 atau 0,92 persen (yoy) disebabkan oleh penurunan komponen Beban secara umum yang lebih besar dari kenaikan yang terjadi. Penurunan Beban terbesar terjadi pada Beban Hibah yang turun sebesar Rp829.445.311.243,00 atau 51,36 persen (yoy).



Penurunan juga terjadi pada Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Lain-Lain. Sementara itu, Beban Pegawai, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

C.3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus (defisit) dari kegiatan operasional adalah selisih lebih atau kurang antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional selama satu periode pelaporan. Defisit dari Kegiatan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni sebesar (Rp18.227.384.170.690,00) mengalami penurunan sebesar Rp2.639.594.927.891,00 atau 12,65 persen dari Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar (Rp20.866.979.098.581,00). Penurunan nilai Defisit dari Kegiatan Operasional tersebut disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Operasional yang lebih besar dari peningkatan Beban Operasional.

C.4. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni Surplus sebesar Rp42.184.130.190,00 mengalami kenaikan sebesar Rp221.198.353.416,00 dari posisi per 31 Desember 2024 yakni dengan defisit sebesar (Rp179.014.223.226,00) Meningkatnya nilai surplus dari kegiatan non operasional tersebut didominasi oleh kenaikan surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar.

C.5. Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa

Surplus/(defisit) Pos Luar Biasa pada Tahun 2025 berasal dari Pemerintah Daerah berupa selisih antara Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa selama satu periode pelaporan.

Surplus Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni sebesar (Rp11.085.419.843,00) mengalami penurunan sebesar Rp6.294.754.240,00 atau 131,40 persen dari Surplus/(Defisit) Laporan Operasional per 31 Desember 2024 yang mengalami defisit sebesar (Rp21.050.783.987.410,00)



C.6. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Surplus/(defisit) Laporan Operasional selisih antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Defisit Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni sebesar (Rp18.196.285.460.344,00) mengalami penurunan sebesar Rp2.854.498.527.066,00 atau 13,56 dari Surplus/(Defisit) Laporan Operasional per 31 Desember 2024 yang mengalami defisit sebesar (Rp21.050.783.987.410,00).



D. CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 *UNAUDITED*

D.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 1 Januari 2025 yakni sebesar Rp168.590.512.919.166,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.663.968.690.866,00 atau naik 4,12 persen dari posisi per 1 Januari 2024 sebesar Rp161.926.544.228.300,00. Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp168.590.512.919.166,00 berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat sebesar Rp104.237.038.370.849,00 dan Ekuitas Awal Pemerintah Daerah sebesar Rp64.353.474.548.317,00.

Selanjutnya informasi rincian terkait Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 1 Januari 2025 dan per 1 Januari 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Rincian Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	1 Januari 2025	1 Januari 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Ekuitas Awal Pemerintah Pusat	104.237.038.370.849	102.952.402.952.357	1.284.635.418.492	1,25%
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	64.353.474.548.317	64.634.340.725.139	-280.866.176.822	-0,43%
Jumlah Ekuitas Awal	168.590.512.919.166	161.926.544.228.300	6.663.968.690.866	4,12%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kenaikan Ekuitas Awal Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.663.968.690.866,00 didominasi berasal dari kenaikan Ekuitas Awal Pemerintah Pusat sebesar Rp1.284.635.418.492,00 atau 1,25 persen.

D.2. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni sebesar (Rp18.196.285.460.344,00), mengalami penurunan defisit sebesar Rp2.854.498.527.066,00 atau turun 13,56 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp21.050.783.987.410,00).

Selanjutnya informasi rincian terkait Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 23. Rincian Ekuitas Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Surplus/(Defisit) LO Pemerintah Pusat	(20.139.156.003.884)	(21.217.955.990.885)	1.078.799.987.001	-5,08%
Surplus/(Defisit) LO Pemerintah Daerah	1.942.870.543.540	167.172.003.475	1.775.698.540.065	1062,20%
Jumlah Surplus/(Defisit) LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	2.854.498.527.066	-13,56%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyempitan Defisit Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.854.498.527.066,00 didominasi berasal dari kenaikan Surplus Laporan Operasional Pemerintah Daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.775.698.540.065,00 dan penurunan Defisit Laporan Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp1.078.799.987.001,00.

D.3. Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah atau Mengurangi Ekuitas

Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni sebesar (Rp522.990.918.799,00) mengalami penurunan sebesar Rp1.080.715.520.153,00 atau turun 193,77 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp557.724.601.354,00. Koreksi-koreksi tersebut berasal dari Koreksi Pemerintah Pusat sebesar (Rp506.491.337.357,00) dan Pemerintah Daerah sebesar (Rp16.499.581.442,00).

Selanjutnya informasi rincian terkait Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 24. Rincian Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Koreksi Nilai Persediaan	40.048.222.871	(143.120.980.527)	183.169.203.398	-127,98%
Selisih Revaluasi Aset	13.521.622.880	(326.186.759.311)	339.708.382.191	-104,15%
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977	593.285.583.529	(280.887.148.552)	-47,34%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011	103.290.816.176	(102.016.237.165)	-98,77%
Koreksi Lain-Lain	(890.233.778.538)	330.455.941.487	(1.220.689.720.025)	-369,40%
Jumlah Koreksi	(522.990.918.799)	557.724.601.354	(1.080.715.520.153)	-193,77%



D.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp18.544.221.018.018,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.040.697.888.327,00 atau 14,09 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.584.918.906.345,00.

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp18.544.221.018.018,00 seluruhnya berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah.

D.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp168.415.457.558.041,00 mengalami penurunan sebesar Rp263.145.639.745,00 atau turun 0,16 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.678.603.197.786,00.

Sebagai informasi, ekuitas akhir tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.678.603.197.783,00 berbeda sejumlah Rp88.090.278.620,00 dibandingkan dengan ekuitas awal tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 1 Januari 2025 sebesar Rp168.590.512.919.166,00. Perbedaan antara ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dengan ekuitas awal per 1 Januari 2025 tersebut berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah yang mengalami perbedaan sebesar Rp88.090.278.620,00.

Adapun proses penginputan data neraca LKPP-TW per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025 ke template excel neraca LKPP-TW telah sesuai sebagaimana petunjuk yang terdapat pada PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

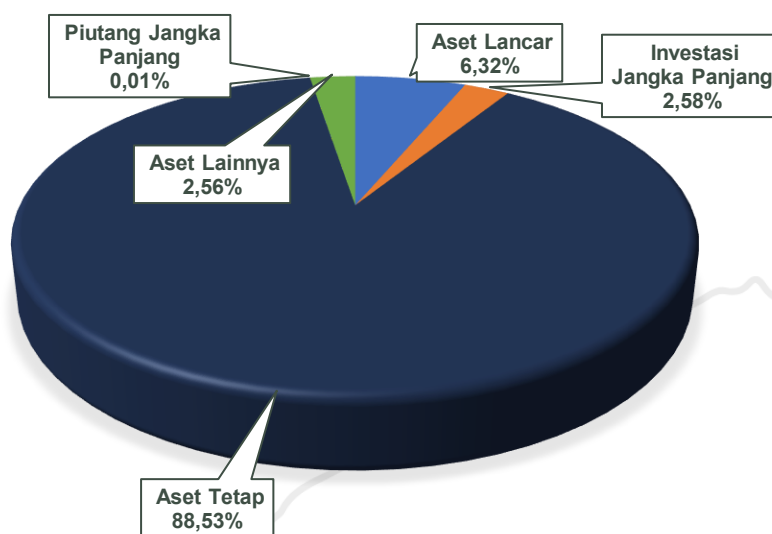


E. CATATAN ATAS NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 *UNAUDITED*

E.1. Aset Konsolidasian

Aset Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp174.953.774.573.342,00 terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp11.060.726.421.582,00, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp4.515.911.259.057,00, Aset Tetap Konsolidasian sebesar Rp154.882.146.698.333,00, Piutang Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp9.952.214.237,00, Properti Investasi sebesar Rp5.380.003.147,00, dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp4.479.657.976.986,00. Rincian komposisi Aset Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 9. Komposisi Aset Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

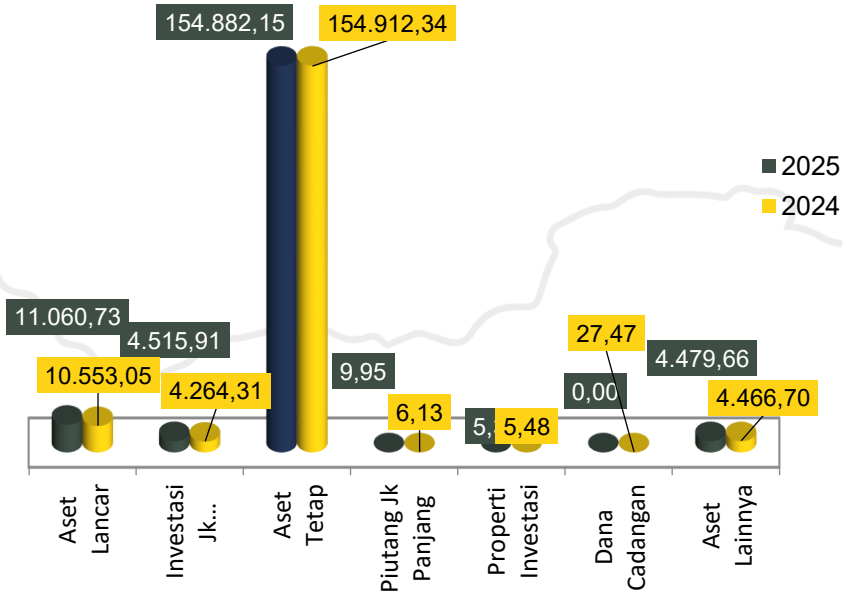
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa komposisi Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap Konsolidasian yaitu 88,53 persen dari Total Aset Konsolidasian, disusul oleh Aset Lancar Konsolidasian 6,32 persen, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian 2,58 persen, dan Aset Lainnya Konsolidasian 2,56 persen.

Secara umum, Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp174.953.774.573.342,00 mengalami kenaikan sebesar Rp718.306.907.604,00 atau 0,41 persen dari posisi Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut didominasi oleh meningkatnya jumlah Aset Lancar sebesar Rp507.678.286.836,00 atau 4,81 persen (*yoy*), dan komponen Aset Konsolidasian lainnya yang juga mengalami peningkatan secara umum. Perbandingan perubahan struktur Aset



Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 10. Perbandingan Aset Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (Unaudited)

E.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja, Piutang, dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.060.726.421.582,00. Aset Lancar per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp507.678.286.835,00 atau 11,05 persen dari Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.553.048.134.747,00. Rincian Aset Lancar Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Rincian Aset Lancar Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Kas dan Setara Kas	2.204.120.426.902	2.197.339.299.770	6.781.127.132	0,31%
Investasi Jangka Pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	40.000.000.000	58,82%
Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja	26.629.723.943	42.813.936.008	-16.184.212.065	-37,80%



Piutang	1.679.801.381.557	1.790.921.694.181	-111.120.312.624	-6,20%
Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	588.201.684.392	9,11%
Jumlah Aset Lancar	11.060.726.421.582	10.553.048.134.747	507.678.286.835	4,81%

Kas dan Setara Kas Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.204.120.426.902,00. Nilai tersebut terdiri dari:

- a. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah
Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah. Jumlah Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.376.284.218.759,00 yang seluruhnya terdapat di Neraca Pemerintah Daerah.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran
Merupakan kas yang dikuasi, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor atau dipertanggungjawabkan ke kas negara atau daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.420.347.652,00, terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp83.297.681,00 dan Kas di Bendahara Pemerintah Daerah sebesar Rp1.337.049.971,00. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 menurun sebesar 69,34 persen atau Rp3.211.973.905,00 dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.632.321.557,00.
- c. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.905.052,00 yang berasal dari Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca Pemerintah Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.768.078,00 atau 34,02 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.673.130,00.
- d. Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp322.838.760.505,00 merupakan kas yang berada di Bendahara Pengeluaran selain Uang Persediaan yang terdiri dari Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp286.708.064.215,00 dan Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp36.130.696.290,00. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 menurun sebesar Rp376.463.739.966,00 atau 53,83 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp699.302.500.471,00. Saldo tersebut dapat berupa



pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dana lancar BLU, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan lainnya.

e. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp503.525.194.934,00 terdiri dari Kas pada Bendahara Layanan Umum pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp329.652.158.324,00 dan Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp173.873.036.610,00. Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 menurun sebesar Rp44.575.051.066,00 atau 8,13 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp548.100.246.000,00.

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp108.000.000.000,00 yang merupakan Investasi Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai tersebut naik sebesar Rp40.000.000.000,00 atau 58,82 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.000.000.000,00.

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.629.723.943,00 terdiri dari Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp19.798.957.577,00 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp6.830.766.366,00. Jumlah Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp16.184.212.065,00 atau 37,80 persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.813.936.008,00.

Piutang Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.679.801.381.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp111.120.312.624,00 atau 6,20 persen dari posisi Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.790.921.694.181,00. Rincian Piutang Konsolidasian antara lain sebagai berikut:

a. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp902.642.910.836,00 yang berasal dari Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp873.092.255.320,00 dan Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp29.550.655.516,00.

b. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.817.991.372.368,00 merupakan gabungan Piutang Bukan Pajak pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp990.639.198.999,00 dan Piutang Bukan Pajak pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp827.352.173.369,00.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran



Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.523.471.478,00 yang merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Neraca Pemerintah Daerah.

- d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 sebesar Rp620.743.272,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca Pemerintah Pusat.
- e. Piutang Lain-Lain
Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.345.872.935,00 merupakan saldo Piutang Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp13.724.505.494,00 dan Piutang Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp14.621.367.441,00.
- f. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.071.322.989.331,00) yang berasal dari Neraca Pemerintah Pusat sebesar (Rp646.238.677.212,00) dan Neraca Pemerintah Daerah sebesar (Rp425.084.312.119,00).

Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.042.174.889.180,00 yang merupakan gabungan dari Persediaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp6.100.891.837.144,00 dan Persediaan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp941.283.052.036,00. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp588.201.684.392,00 atau 9,11 persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.453.973.204.788,00.

E.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan rolayti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.515.911.259.057,00. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tersebut meningkat sebesar Rp251.604.667.570,00 atau 5,90 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.264.306.591.487,00.



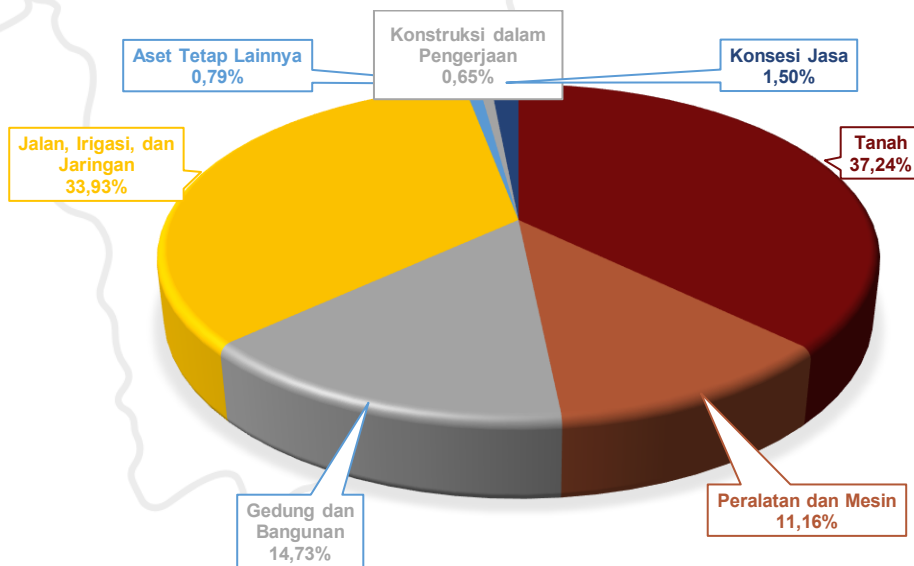
Investasi Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 tersebut seluruhnya berasal dari Neraca Pemerintah Daerah berupa Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sebesar Rp61.871.413,00 dan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp4.515.849.387.643,00.

E.1.3. Aset Tetap Konsolidasian

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, serta Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.882.146.698.333,00 yang merupakan gabungan dari Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp98.693.864.663.107,00 dan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp56.188.282.035.226,00. Nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.197.004.490,00 atau 0,02 persen jika dibandingkan dengan Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.912.343.702.823,00. Komposisi Aset Tetap Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Grafik 11 sebagai berikut.

Grafik 11. Komposisi Aset Tetap Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (Unaudited)



Rincian Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Rincian Aset Tetap Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1.217.849.478.420	1,41%
Peralatan dan Mesin	26.175.891.155.913	24.420.712.102.012	1.755.179.053.901	7,19%
Gedung dan Bangunan	34.570.081.165.092	33.058.859.080.729	1.511.222.084.363	4,57%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79.610.251.431.173	76.567.157.679.817	3.043.093.751.356	3,97%
Aset Tetap Lainnya	1.863.314.115.945	1.746.219.236.437	117.094.879.508	6,71%
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.524.240.215.198	1.846.562.430.198	(322.322.215.000)	17,46%
Konsesi Jasa	3.508.429.618.546	3.507.516.169.746	913.448.800	0,03%
Akumulasi Penyusutan	(79.730.037.594.407)	(72.376.810.108.568)	(7.353.227.485.839)	10,16%
Jumlah Aset Tetap	154.882.146.698.333	154.912.343.702.823	(30.197.004.490)	-0,02%

Tanah

Jumlah Aset Tetap Tanah Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp87.359.976.590.873,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp68.885.428.998.986,00 dan Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp18.474.547.591.887,00. Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.217.849.478.420,00 atau 1,41 persen dari nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.142.127.112.453,00.

Peralatan dan Mesin

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.175.891.155.913,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp14.368.923.965.871,00 dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp11.806.967.190.042,00. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.755.179.053.901,00 atau 7,19 persen dari nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.420.712.102.012,00.



Gedung dan Bangunan

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.570.081.165.092,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp10.289.216.356.946,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp24.280.864.808.146,00. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.511.222.084.363,00 atau 4,57 persen dari nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.058.859.080.729,00.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp79.610.251.431.173,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp36.996.449.106.920,00 dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp42.613.802.324.253,00. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.043.093.751.356,00 atau 3,97 persen dari nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.567.157.679.817,00.

Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.863.314.115.945,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp156.331.794.296,00 dan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp1.706.982.321.649,00. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp117.094.879.508,00 atau 6,71 persen dari nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.746.219.236.437,00.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.524.240.215.198,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp714.756.063.260,00 dan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp809.484.151.938,00. Nilai Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31



Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp322.322.215.000,00 atau 17,46 persen dari nilai Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.846.562.430.198,00.

Konsesi Jasa

Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang disediakan oleh mitra yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra, serta atau disediakan oleh pemberi konsesi yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Jumlah Aset Tetap Konsesi Jasa Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.508.429.618.546,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Aset Tetap Konsesi Jasa pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Aset Tetap Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp913.448.800,00 atau 0,03 persen dari nilai Aset Tetap Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.507.516.169.746,00.

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar (Rp79.730.037.594.407,00) terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp21.306.964.781.522,00), Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp9.264.622.295.934,00), Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp48.868.645.104.999,00), Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp71.329.520.661,00), dan Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa sebesar (Rp218.475.891.290,00).

E.1.4. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, serta atau tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Properti Investasi Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.380.003.147,00 yang berasal dari Neraca Pemerintah Pusat. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar



Rp98.500.881,00 atau 1,80 persen dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.478.504.028,00.

E.1.5. Dana Cadangan

Dana Cadangan Konsolidasian adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Dana Cadangan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.468.900.302,00 atau 100 persen dari nilai Dana Cadangan Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.468.900.302,00.

E.1.6. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah Piutang Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.952.214.237,00. Nilai tersebut berasal dari Piutang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp369.682.572,00 dan Piutang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp9.582.531.665,00. Nilai Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.827.168.115,00 atau 62,48 persen dari posisi per 31 Desember 2024. Adapun nilai Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tersebut berasal dari Piutang Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.401.564.945,00, Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp8.628.398.783,00, Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp0,00, dan Penyisihan Piutang Jangka Panjang sebesar (Rp77.749.491,00).

E.1.7. Aset Lainnya

Aset Lainnya Konsolidasian terdiri dari antara lain Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian, Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian, Aset Tak Berwujud Konsolidasian, Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, Dana yang Dibatasi Penggunaannya Konsolidasian, Aset Lain-lain Konsolidasian, dan Akumulasi Amortisasi – Aset Lainnya (ATB) Konsolidasian.



Aset Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.479.657.976.986,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.961.190.757,00 atau 0,29 persen dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.466.696.786.229,00. Rincian Aset Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 27. Rincian Aset Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	746.575.247.653	728.246.121.768	18.329.125.885	2,52%
Aset Tidak Berwujud	712.686.201.189	525.514.046.006	187.172.155.183	35,62%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	(91.622.319.884)	-31,04%
Aset Lain-Lain	3.550.228.167.318	3.552.319.480.738	(2.091.313.420)	-0,06%
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	(733.405.321.522)	(634.578.864.515)	(98.826.457.007)	15,57%
Jumlah Aset Lainnya	4.479.657.976.986	4.466.696.786.229	12.961.190.757	0,29%

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Jumlah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp746.575.247.653,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah. Nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.329.125.885,00 atau 2,52 persen dari nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp728.246.121.768,00.

Aset Tidak Berwujud

Jumlah Aset Tidak Berwujud Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp712.686.201.189,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Tidak Berwujud pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp449.420.765.037,00 dan Aset Tidak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp263.265.436.152,00. Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp187.172.155.183,00 atau 35,62 persen dari nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp525.514.046.006,00.



Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp203.573.682.348,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp91.622.319.884,00 atau 31,04 persen dari nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp295.196.002.232,00.

Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lain-Lain Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.550.228.167.318,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Aset Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp667.652.408.266,00 dan Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp2.882.575.759.052,00. Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.091.313.420,00 atau 0,06 persen dari nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.552.319.480.738,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Jumlah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar (Rp733.405.321.522,00). Nilai tersebut berasal dari jumlah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar (Rp505.909.922.051,00) dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar (Rp227.495.399.471,00). Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp98.826.457.007,00 atau 15,57 persen dari nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp634.578.864.515,00).

E.2. Kewajiban Konsolidasian

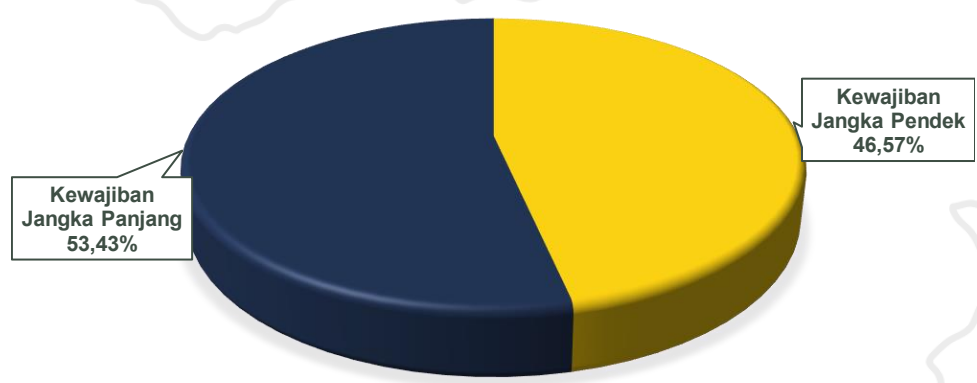
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan



menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp6.538.317.015.300,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Konsolidasian sebesar Rp3.045.164.577.476,00 dan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian sebesar Rp3.493.152.437.824,00. Rincian komposisi Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 12. Komposisi Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa komposisi Kewajiban Konsolidasian didominasi oleh Kewajiban Jangka Panjang yaitu 53,43 persen dari Total Kewajiban Konsolidasian dan Kewajiban Jangka Pendek sebesar 46,57 persen.

Secara umum, Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.538.317.015.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp981.452.547.344,00 atau 17,66 persen dari posisi Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut didominasi oleh meningkatnya jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar 56,11 persen (*yoy*), sedangkan jumlah Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar 3,14 persen (*yoy*). Rincian Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.



Tabel 28. Rincian Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Kewajiban Jangka Pendek	3.045.164.577.476	1.950.598.707.384	1.094.565.870.092	56,11%
Kewajiban Jangka Panjang	3.493.152.437.824	3.606.265.760.572	(113.113.322.748)	-3,14%
Jumlah Kewajiban	6.538.317.015.300	5.556.864.467.956	981.452.547.344	17,66%

E.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Transfer, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang yang Belum Ditagihkan, Utang Jangka Pendek Lainnya, Uang Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 29. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	599.636.211	518.107.784	81.528.427	15,74%
Utang kepada Pihak Ketiga	888.205.100.499	1.259.020.166.055	(370.815.065.556)	-29,45%
Utang Bunga	7.613.724.020	9.802.763.059	(2.189.039.039)	-22,33%
Utang Transfer	532.345.551.139	95.485.958.416	436.859.592.723	457,51%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	62.144.237.040	62.144.237.040	-	0,00%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	405.848.803.088	274.862.110.657	130.986.692.431	47,66%
Pendapatan Diterima Dimuka	1.140.267.273.844	144.193.585.735	996.073.688.109	690,79%
Uang muka	19.562.000	260.384.809	(240.822.809)	-92,49%
Utang jangka pendek lainnya	8.120.689.634	104.311.393.829	(96.190.704.195)	-92,21%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.045.164.577.476	1.950.598.707.384	1.094.565.870.092	56,11%

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp599.636.211,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada Neraca



Pemerintah Daerah. Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp81.528.427,00 atau 15,47 persen dari nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp518.107.784,00.

Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp888.205.100.499,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp214.854.807.408,00 dan Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp673.350.293.091,00. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp370.815.065.556,00 atau 29,45 persen dari nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.259.020.166.055,00.

Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.613.724.020,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Utang Bunga pada Neraca Pemerintah Daerah. Nilai Utang Bunga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.189.039.039,00 atau 22,33 persen dari nilai Utang Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.802.763.059,00.

Utang Transfer

Jumlah Utang Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp532.345.551.139,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Utang Transfer pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Utang Transfer per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp436.859.592.723,00 atau 457,51 persen dari nilai Utang Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.485.958.416,00.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.144.237.040,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Daerah. Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sama dengan nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.144.237.040,00.



Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp405.848.803.088,00. Nilai tersebut berasal dari Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp148.259.680.705,00 dan Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp257.589.122.383,00. Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp130.986.692.431,00 atau 47,66 persen dari nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp274.862.110.657,00

Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.140.267.273.844,00. Nilai tersebut berasal dari Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp1.058.346.419.264,00 dan Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp81.920.854.580,00. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp996.073.688.109,00 atau 690,79 persen dari nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp144.193.585.735,00

Uang Muka

Jumlah Uang Muka Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.562.000,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari jumlah Uang Muka pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Uang Muka per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp240.822.809,00 atau 92,49 persen dari nilai Uang Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp260.384.809,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.120.689.634,00. Nilai tersebut berasal dari jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp15.143.046,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp8.105.546.588,00. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut berasal dari Utang Bendahara sebesar Rp15.143.046,00, Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor sebesar Rp7.485.088.290,00, dan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp620.458.298,00. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar



Rp96.190.704.195,00 atau 92,21 persen dari nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.311.393.829,00.

E.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp3.493.152.437.824,00 dan Rp3.606.265.760.572,00 yang berarti Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp113.113.322.748,00 atau sebesar 3,14 persen. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2025 terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp190.210.140.959,00 pada Neraca Pemerintah Daerah, Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.327.717.000,00 pada Neraca Pemerintah Pusat, dan Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp3.300.614.579.865,00 pada Neraca Pemerintah Pusat.

Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian konsesi jasa, yaitu pengaturan mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. Pada saat pemberi konsesi mengakui Aset Konsesi Jasa, pemberi konsesi juga mengakui Kewajiban Konsesi Jasa.

E.3. Ekuitas Konsolidasian

Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp168.415.457.558.042,00 yang merupakan penggabungan Ekuitas pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp102.135.612.047.626,00 dan Ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp66.279.845.510.416,00. Ekuitas Dana Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp263.145.639.741,00 atau 0,16 persen dibandingkan dengan Ekuitas Dana Konsolidasian per 31 Desember 2024 yang berjumlah Rp168.678.603.197.783,00.

Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah. Namun proses eliminasi tersebut masih terkendala dengan tidak tersedianya informasi rinci untuk



mengidentifikasi akun yang bersifat resiprokal antara Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Selain akun resiprokal, eliminasi dengan jumlah yang sama juga akan dilakukan terhadap akun pasangan dari akun yang dieliminasi karena sistem akuntansi yang diterapkan menganut sistem akun berpasangan. Untuk Neraca Pemerintah Konsolidasi Tingkat Wilayah tidak dilakukan eliminasi akun resiprokal karena hampir tidak ada transaksi resiprokal antara instansi Pemerintah Pusat di daerah (Kementerian Negara/Lembaga) dengan pemerintah daerah.



New DJPB
in Town



CATATAN ATAS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



A. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir I.5 terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*). Penyusunan GFS tersebut bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 juga ditegaskan terkait kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang.

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang diadaptasi dari *Government Finance Statistics Manual* (GFSM) 2014 yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Selain itu, untuk memenuhi amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2014, disusun Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Pedoman tersebut diatur melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional.

Grafik 13. Komponen Statistik Keuangan Sektor Publik



Statistik Keuangan Pemerintah meliputi Sektor Pemerintahan Umum (*general government sector*) dan Sektor Publik (*public sectors*).

1. Sektor Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Umum mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, Sektor Pemerintahan Umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya dan merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi, dan pembebanan biaya ke pengguna layanan.

Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, Sektor Pemerintahan Umum dibedakan menjadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kotad. Subsektor Pemerintahan Pusat terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga, BUN, BLU, dan Lembaga Non Struktural (LNS) yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun berada dalam kendali Pemerintah Pusat.

2. Sektor Korporasi Publik

Sektor korporasi publik mencakup sektor korporasi publik non keuangan dan sektor korporasi publik keuangan. Sektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan. Mereka dapat memunculkan kewajiban keuangan atas tanggung jawabnya sendiri.

Konsolidasi sektor publik dilakukan dengan identifikasi dan eliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Dalam mengkompilasi statistik untuk sektor publik ini, transaksi dan hubungan debitur dan kreditur antara sub sektor dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda sebagai bagian dari proses konsolidasi. Total pelaporan sektor publik juga dikenal dengan pelaporan pemerintah secara keseluruhan (*whole of government reporting*).

Statistik Keuangan Pemerintah dibangun dalam kerangka analitis arus (*flows*) dan posisi keuangan (*stock*) yang diintegrasikan dengan pendekatan neraca.



1. Arus adalah ekspresi moneter atas tindakan ekonomi yang dilakukan oleh unit dan kejadian lainnya yang mempengaruhi status ekonomi suatu unit yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.
2. Posisi keuangan merupakan aset dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu unit pada suatu waktu tertentu dan menghasilkan kekayaan neto yang dihitung dari total aset dikurangi total kewajiban. Posisi keuangan disajikan dalam Neraca.

Arus dan posisi keuangan dicatat dan diintegrasikan dalam Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga semua perubahan dalam posisi dapat dijelaskan secara penuh oleh arus. Secara umum, nilai suatu posisi keuangan yang dimiliki oleh suatu unit pada waktu tertentu merupakan nilai kumulatif semua arus yang mempengaruhi posisi keuangan sejak unit tersebut pertama kali dibentuk. Statistik Keuangan Pemerintah yang terintegrasi tersebut dapat sepenuhnya menjelaskan defisit dan keterkaitannya dengan neraca. Perubahan kekayaan neto merupakan ukuran untuk menilai kesinambungan aktivitas fiskal.

Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi, yang berasal dari sistem akuntansi yang menghasilkan data akuntansi (merupakan sumber terbaik karena tepat waktu) dan laporan keuangan. Data transaksi dicatat dan dilaporkan secara berjenjang melalui sistem akuntansi yang ada pada sektor pemerintah umum dan korporasi publik.

Dalam rangka memenuhi ketentuan metodologi pedoman Statistik Keuangan Pemerintah, data akuntansi tersebut akan diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara *mapping* Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik keuangan Pemerintah.

Data yang akan di-*mapping* ke Statistik Keuangan Pemerintah adalah data Pemerintah Pusat, data konsolidasi pemerintah daerah, data perusahaan negara, dan data Bank Indonesia. Data hasil *mapping* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor pemerintah umum. Data hasil *mapping* perusahaan negara dan Bank Indonesia dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor korporasi publik. Data statistik keuangan konsolidasian sektor pemerintah umum akan dikonsolidasi dengan data statistik keuangan konsolidasian sektor korporasi publik menjadi data statistik keuangan konsolidasian sektor publik. Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan tiga



laporan utama yaitu: Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas.

B. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Kementerian Keuangan telah melakukan mapping BAS sistem akuntansi pemerintah ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah yang disampaikan ke *International Monetary Fund* (IMF). Namun mapping dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah tersebut masih terbatas pada sub sektor Pemerintah Pusat.

Dalam rangka penyusunan Manual dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual, Pemerintah telah melakukan *exercise* mapping dan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian. Cakupan *exercise* penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ini adalah Sektor Pemerintah Umum, yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendekatan mapping BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah dilakukan dengan *high level mapping* terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan secara akuntansi, kemudian dilakukan mapping terhadap akun konsolidasian yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hal ini dilakukan karena belum tersedianya data detail BAS Pemerintah Daerah.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) per 31 Desember 2025 *Unaudited* ini terdiri dari Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Umum Tingkat Wilayah, dan Metadata. LSKP-TW tersebut disusun melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui *mapping* BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW).
2. Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), melalui *mapping* BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW), dan
3. Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).



C. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Laporan Operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (*net cost*) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (*full cost*) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), Laporan Operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan Operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

- 1) Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban; dan
- 2) Pinjaman Neto (*Net Lending/Borrowing*, yang juga dikenal dengan Saldo Fiskal/*Fiscal Balance*) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Operasional periode ini dilakukan berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) menjadi BAS Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas.

Pendekatan *high level mapping* dilakukan dengan mapping data lembar muka laporan keuangan konsolidasian ke dalam laporan Statistik Keuangan Pemerintah. *Mapping* BAS sistem akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya dilakukan pada level BAS yang terendah untuk memastikan keakuratan *mapping* tersebut. Pendekatan *high level mapping* ini dilakukan karena keterbatasan data BAS detail pemerintah daerah. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan keakuratan *high level mapping* yaitu antara lain perbandingan dengan pola mapping BAS sistem akuntansi pemerintah pusat.

Secara umum, akun LRA Konsolidasian telah sejalan dengan akun Statistik Keuangan Pemerintah terutama untuk klasifikasi Pendapatan dan Belanja. Pengecualian hanya dilakukan untuk belanja modal yang di-*mapping* menjadi *Net Acquisition of Nonfinancial*

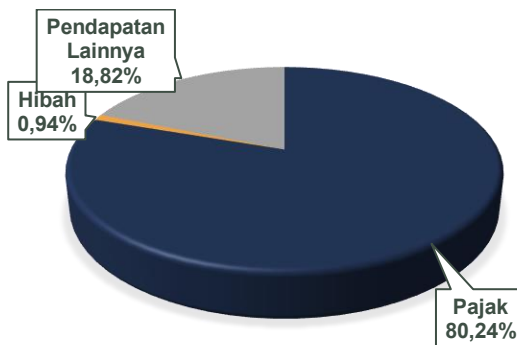


Assets. Pembiayaan Konsolidasian (neto) di-*mapping* menjadi Transaksi dalam Aset Keuangan dan Kewajiban.

C.1. Pendapatan Operasional Statistik

Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp19.460.278.924.137,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.548.252.246.765,00 atau turun 37,24 persen apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.008.531.170.902,00. Proporsi komponen Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 tersebut dapat dilihat pada Grafik 14 sebagai berikut.

Grafik 14. Proporsi Komponen Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025



Sumber: Diolah dari LSKP-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

Berdasarkan Grafik 14, Pendapatan Operasional Statistik didominasi berasal dari Pendapatan Pajak dengan proporsi 80,24 persen dari Total Pendapatan Operasional Statistik atau sebesar Rp15.614.456.267.245,00. Pendapatan Hibah menyumbang 0,94 persen terhadap Total Pendapatan Operasional Statistik atau sebesar Rp182.607.446.481,00. Selanjutnya, 18,82 persen dari Total Pendapatan Operasional Statistik berasal dari Pendapatan Lainnya atau sebesar Rp3.663.215.210.411,00.

Informasi rincian komponen Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Rincian Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pajak	15.614.456.267.245	15.642.661.243.531	(28.204.976.286)	-0,18%
Hibah	182.607.446.481	11.934.511.589.287	(11.751.904.142.806)	-98,47%
Pendapatan Lainnya	3.663.215.210.411	3.431.358.338.083	231.856.872.328	6,76%
Jumlah Pendapatan Operasional Statistik	19.460.278.924.137	31.008.531.170.901	(11.548.252.246.764)	-37,24%

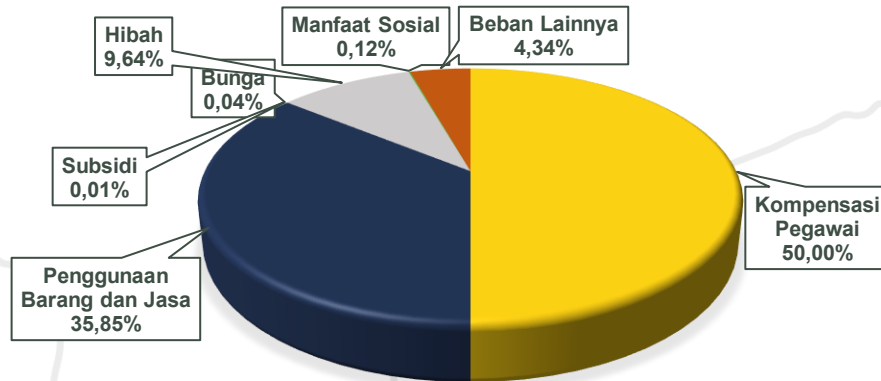


Berdasarkan Tabel 30, penurunan Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sebesar Rp11.548.252.246.764,00 didominasi oleh penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp11.751.904.142.806,00 atau 98,47 persen (yoy). Pendapatan Perpajakan juga mengalami penurunan sebesar Rp28.204.976.286,00 atau turun 0,18 persen (yoy). Sementara itu, Pendapatan Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp231.856.872.328,00 atau naik 6,76 persen (yoy).

C.2. Beban Operasional Statistik

Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp29.782.766.516.771,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.922.133.543.296,00 atau turun 30,26 persen apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp42.704.900.060.067,00. Proporsi komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 tersebut dapat dilihat pada Grafik 15 sebagai berikut.

Grafik 15. Proporsi Komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025



Sumber: Diolah dari LSKP-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

Berdasarkan Grafik 15, Beban Operasional Statistik didominasi berasal dari Kompensasi Pegawai dengan proporsi 50,00 persen dari Total Beban Operasional Statistik atau sebesar Rp14.891.481.739.673,00. Proporsi Beban terbesar berikutnya ialah Penggunaan Barang dan Jasa dengan proporsi sebesar 35,83 persen dari Total Beban Operasional Statistik atau sebesar Rp10.677.645.631.544,00. Selanjutnya, Beban Hibah, Lainnya, Manfaat Sosial, Bunga, dan Subsidi masing-masing memiliki proporsi sebesar 9,64 persen, 4,34 persen, 0,12 persen, 0,04, dan 0,01 persen terhadap Total Beban Operasional Statistik tahun 2025.



Informasi rincian komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Rincian Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Kompensasi Pegawai	14.891.481.739.673	14.028.128.229.776	863.353.509.897	6,15%
Penggunaan Barang dan Jasa	10.677.645.631.544	12.028.162.026.003	(1.350.516.394.459)	-11,23%
Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	(10.842.736.681)	-47,26%
Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	(542.330.581)	-24,76%
Hibah	2.871.249.341.289	15.075.666.945.858	(12.204.417.604.569)	-80,95%
Manfaat Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	(7.591.308.494)	-17,80%
Beban Lainnya	1.293.581.987.309	1.505.158.665.719	(211.576.678.410)	-14,06%
Jumlah Beban Operasional Statistik	29.782.766.516.770	42.704.900.060.067	(12.922.133.543.297)	-30,26%

Berdasarkan Tabel 31, penurunan Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sebesar Rp12.922.133.543.297,00 didominasi oleh penurunan Beban secara umum. Penurunan terbesar terjadi pada Komponen Beban Hibah sebesar Rp12.204.417.604.569,00 atau turun 80,95 persen, lalu penurunan Komponen Beban Penggunaan Barang dan Jasa sebesar Rp1.350.516.394.459,00 atau turun 11,23 persen, diikuti oleh Beban Lainnya yang turun sebesar Rp211.576.678.410,00 atau turun 14,06 persen. Selanjutnya, Beban Bunga, Subsidi, dan Manfaat Sosial juga mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp10.842.736.681,00 atau 47,26 persen, Rp542.330.581,00 atau 24,76 persen, dan Rp7.591.308.494,00 atau turun 17,80 persen. Sementara itu, Beban Kompensasi Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp863.353.509.897,00 atau 6,15 persen dari posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp14.028.128.229.776,00

C.3. Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*) dan Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*)

Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*/GOB) diperoleh dari Pendapatan Operasional Statistik setelah dikurangi dengan Beban Operasional Statistik tanpa memasukkan komponen Konsumsi Aset Tetap. Sementara itu, Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*/NOB) berasal dari Pendapatan Operasional Statistik dikurangi dengan Beban Operasional Statistik. Nilai Saldo Operasi Bruto dan Saldo Operasi Neto Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar Rp(10.322.487.592.633,00). Nilai tersebut mengalami penurunan defisit sebesar Rp1.373.881.296.532,00 atau 11,75 persen apabila



dibandingkan dengan defisit yang terjadi pada Saldo Operasi Bruto per 31 Desember 2024 sebesar (Rp11.696.368.889.165,00). Persamaan nilai Saldo Operasi Bruto dan Saldo Operasi Bruto tersebut disebabkan tidak adanya nilai Konsumsi Aset Tetap yang tercatat pada Laporan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2025.

Informasi rincian terkait komponen Saldo Operasi Bruto dan Saldo Operasi Neto Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Rincian Saldo Operasi Bruto dan Saldo Operasi Neto Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pendapatan Operasional	19.460.278.924.137	31.008.531.170.902	(11.548.252.246.765)	-37,24%
Dikurangi Beban (Tanpa Konsumsi Aset Tetap)	29.782.766.516.771	42.704.900.060.067	(12.922.133.543.296)	-30,26%
Saldo Operasi Bruto	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	1.373.881.296.531	-11,75%
Konsumsi Aset Tetap	-	-	-	-
Saldo Operasi Neto	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	1.373.881.296.531	-11,75%

C.4. Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (*Net Acquisition of Nonfinancial Assets*)

Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (*Net Acquisition of Nonfinancial Assets*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.090.896.980.532,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.264.020.888.928,00 atau turun 27,10 persen dari posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp8.354.917.869.460,00.

Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (*Net Acquisition of Nonfinancial Assets*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 tersebut berasal dari Akuisisi Aset Tetap sebesar Rp4.936.522.277.057,00, Akuisisi Persediaan sebesar Rp1.142.116.823.699,00 dan Akuisisi atas Aset Non Produksi sebesar Rp12.257.879.776,00.

Selanjutnya informasi rincian komponen Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (*Net Acquisition of Nonfinancial Assets*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Rincian Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Aset Tetap	4.936.522.277.057	6.886.245.796.019	(1.949.723.518.962)	-28,31%
Persediaan	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	(299.675.525.640)	-20,78%



Aset Non Produksi	12.257.879.776	26.879.724.102	(14.621.844.326)	-54,40%
Jumlah Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	6.090.896.980.532	8.354.917.869.460	(2.264.020.888.928)	-27,10%

C.5. Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (*Net Lending/Borrowing*)

Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (*Net Lending/Borrowing*) menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan atau diperoleh dari sektor ekonomi lain. Peminjaman/Pinjaman Neto sama dengan total kebutuhan pembiayaan.

Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp16.480.659.773.785,00) yang berasal dari Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto Pemerintah Pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00) dan Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto Pemerintah Daerah sebesar Rp531.807.390.896,00.

Nilai Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan posisi *Net Borrowing* atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. Sementara itu, apabila Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto bernilai positif menunjukkan posisi *Net Lending* atau adanya kelebihan sumber daya keuangan. Rincian komponen Peminjaman Neto (*Net Lending*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Peminjaman Neto (*Net Lending*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Saldo Operasi Neto (<i>Net Operating Balance</i>)	(10.389.762.793.253)	(11.696.368.889.165)	1.306.606.095.912	-11,17%
Dikurangi Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	6.090.896.980.532	8.354.917.869.460	(2.264.020.888.928)	-27,10%
<i>Net Borrowing</i> (Pinjaman Neto)	(16.480.659.773.785)	(20.051.286.758.625)	3.570.626.984.840	-17,81%

C.6. Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban (Pembiayaan) (*Transactions in Financial Assets and Liabilities (Financing)*)

Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban (Pembiayaan) berasal dari Akuisisi Aset Keuangan Neto (*Net Acquisition of Financial Assets*) dikurangi dengan Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence of Liabilities*). Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban



Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar (Rp16.628.600.427.865,00) yang berasal dari Akuisisi Aset Keuangan Neto sebesar (Rp16.554.630.100.825,00) dikurangi Keterjadian Kewajiban Neto sebesar (Rp73.970.327.040,00).

C.6.1. Akuisisi Aset Keuangan Neto (*Net Acquisition of Financial Assets*)

Akuisisi Aset Keuangan Neto (*Net Acquisition of Financial Assets*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar (Rp16.554.630.100.825,00) mengalami penurunan Rp3.716.200.894.840,00 atau 18,33 persen dari posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar (Rp20.270.830.995.665,00).

Akuisisi Aset Keuangan tersebut keseluruhannya berasal dari dalam negeri yang terdiri dari Akuisisi Neto Aset Keuangan (*Net Acquisition of Financial Assets*) Pemerintah Pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), Akuisisi Neto Aset Keuangan (*Net Acquisition of Financial Assets*) Pemerintah Provinsi sebesar Rp192.618.167.810,00 dan Akuisisi Neto Aset Keuangan (*Net Acquisition of Financial Assets*) gabungan Kabupaten/Kota sebesar Rp265.218.896.046,00.

C.6.2. Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence of Liabilities*)

Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence of Liabilities*) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar (Rp73.970.327.040,00) mengalami penurunan sebesar Rp145.573.910.000,00 atau turun sebesar 66,31 persen dari posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar (Rp219.544.237.040,00).

Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence of Liabilities*) yang tercatat di Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 keseluruhannya berasal dari dalam negeri yang terdiri dari Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence of Liabilities*) gabungan Kabupaten/Kota .



D. PENJELASAN NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan serta Kewajiban yang dimiliki pemerintah pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Sedangkan Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam Aset Non Keuangan, Aset Keuangan, dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset Keuangan dan Kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, perubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur.

Struktur klasifikasi aset keuangan/kewajiban baik aset keuangan/kewajiban dalam negeri (domestik) maupun luar negeri adalah sebagai berikut:

1) Uang dan Deposito

Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran. Deposito adalah aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya.

2) Surat Berharga selain Saham

Surat berharga selain saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti bahwa suatu unit mempunyai kewajiban untuk melunasi dengan kas, instrumen keuangan atau hal lain yang bernilai ekonomis.

3) Pinjaman

Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset tersebut.

4) Saham dan Ekuitas Lain

Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan.

5) Cadangan Teknis Asuransi



Cadangan teknis asuransi terdiri dari ekuitas bersih rumah tangga dalam cadangan dana pensiun dan asuransi jiwa, premi yang dibayar di muka, dan cadangan klaim yang belum dibayar.

6) Derivatif Keuangan

Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang dihubungkan dengan instrumen keuangan, indikator atau komoditas tertentu dan dapat diperjualkan dalam pasar keuangan dengan resiko keuangan tertentu.

7) Piutang/Utang Lain

Piutang/utang lain terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar.

Aset dan Kewajiban Pemerintah Umum terdiri dari konsolidasi aset dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Mapping* data Kewajiban Pemerintah Umum ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah (Dalam Negeri/Domestik dan Luar Negeri) dilakukan berdasarkan jenis mata uang kewajiban tersebut (Rupiah atau mata uang asing) dan belum dilakukan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur. Kewajiban dengan mata uang Rupiah diklasifikasikan sebagai Kewajiban Dalam Negeri (domestik) dan kewajiban dengan mata uang asing diklasifikasikan sebagai Kewajiban Luar Negeri. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ini juga belum dapat menggambarkan keterkaitan antara arus (*flow*) dan posisi (*stock*) secara sempurna.

Mapping Neraca Konsolidasian per 31 Desember 2024 ke dalam Neraca Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan pendekatan *high level mapping*, dengan penjelasan sebagai berikut.

D.1. Kekayaan Bersih

Kekayaan Bersih merupakan total kekayaan pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban. Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp168.421.573.128.368,00 mengalami penurunan Rp257.030.069.415,00 atau turun sebesar 0,15 persen dari posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp168.678.603.197.783,00.

Nilai Kekayaan Bersih pada per 31 Desember 2025 tersebut berasal dari Aset Non Keuangan sebesar Rp165.459.210.637.645,00 dan Aset Keuangan sebesar Rp9.494.563.935.697,00 setelah dikurangi Kewajiban yang keseluruhannya merupakan Kewajiban Dalam Negeri sebesar Rp6.532.201.444.974,00. Selanjutnya informasi rincian



nilai Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

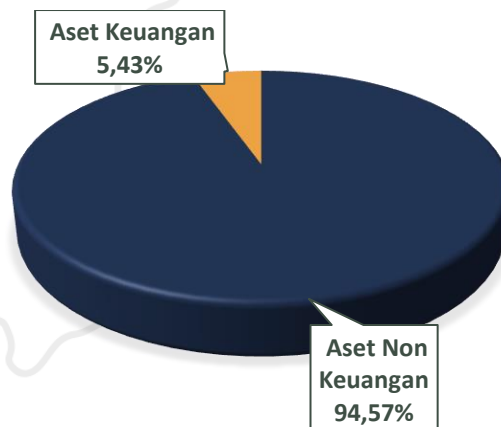
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Aset Non Keuangan	165.459.210.637.645	164.815.050.073.869	644.160.563.776	0,39%
Aset Keuangan	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	74.146.343.827	0,79%
Dikurangi: Kewajiban	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	975.336.977.018	17,55%
Jumlah Kekayaan Bersih	168.421.573.128.368	168.678.603.197.783	(257.030.069.415)	-0,15%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penurunan Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp257.030.069.415,00 atau 0,15 persen didominasi berasal dari meningkatnya Kewajiban sebesar Rp975.336.977.018,00 atau 17,55 persen.

D.2. Aset

Aset dalam Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Aset Non Keuangan dan Aset Keuangan. Jumlah Aset Non Keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp165.459.210.637.645,00 dan jumlah Aset Keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.494.563.935.697,00. Aset Non Keuangan mendominasi Total Aset pada Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dengan proporsi sebesar 94,57 persen. Sementara itu, proporsi Aset Keuangan sebesar 5,43 persen dari Total Aset per 31 Desember 2025. Proporsi nilai Aset Non Keuangan dan Aset Keuangan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Grafik 16 sebagai berikut.

Grafik 16. Proporsi Aset Non Keuangan dan Aset Keuangan per 31 Desember 2025



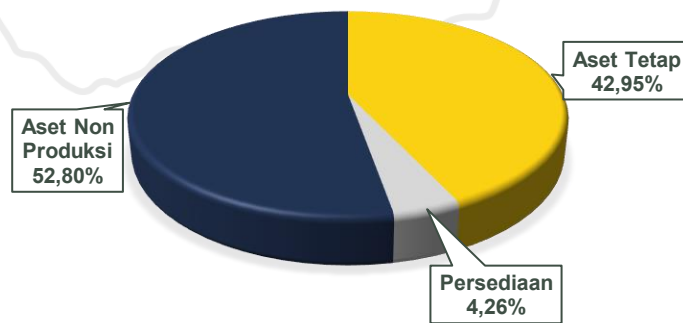
Sumber: Diolah dari LSKP-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (Unaudited)



D.2.1. Aset Non Keuangan

Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp165.459.210.637.645,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp644.160.563.776,00 atau 0,39 persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp164.815.050.073.869,00. Proporsi komponen Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 tersebut dapat dilihat pada Grafik 17 sebagai berikut.

Grafik 17. Proporsi Komponen Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025



Sumber: Diolah dari LSKP-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

Berdasarkan Grafik 17, Aset Non Keuangan didominasi berasal dari Aset Non Produksi dengan proporsi 52,80 persen dari Total Aset Non Keuangan atau sebesar Rp87.359.976.590.873,00. Proporsi Aset Non Keuangan terbesar berikutnya ialah Aset Tetap dengan proporsi sebesar 42,95 persen dari Total Aset Non Keuangan atau sebesar Rp71.057.059.157.592,00. Terakhir, Persediaan memiliki proporsi sebesar 4,26 persen terhadap Total Aset Non Keuangan tahun 2024 atau sebesar Rp7.042.174.889.180,00.

Informasi rincian komponen Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36. Rincian Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Aset Tetap	71.057.059.157.592	72.218.949.756.628	(1.161.890.599.036)	-1,61%
Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	588.201.684.392	9,11%
Aset Non Produksi	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1.217.849.478.420	1,41%
Jumlah Aset Non Keuangan	165.459.210.637.645	164.815.050.073.869	644.160.563.776	0,39%



Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp71.057.059.157.592,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.161.890.599.036,00 atau turun 1,61 persen jika dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp72.218.949.756.628,00. Adapun rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Rincian Aset Tetap Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Gedung dan Bangunan	61.080.978.192.713	62.339.126.400.380	(1.258.148.207.667)	-2,02%
Peralatan dan Mesin	4.868.926.374.391	4.958.119.968.502	(89.193.594.111)	-1,80%
Aset Tetap Lainnya	5.107.154.590.489	4.921.703.387.746	185.451.202.743	3,77%
Jumlah Aset Tetap	71.057.059.157.592	72.218.949.756.628	(1.161.890.599.036)	-1,61%

Penurunan Aset Tetap Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.161.890.599.036,00 tersebut berasal dari penurunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.258.148.207.667,00 atau 2,02 persen serta penurunan Peralatan dan Mesin sebesar Rp89.193.594.111,00 atau 1,80 persen dari posisi 31 Desember 2024. Sementara itu, nilai Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp185.451.202.743,00 atau 3,77 persen.

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp7.042.174.889.180,00 mengalami kenaikan sebesar Rp588.201.684.392,00 atau naik 9,11 persen jika dibandingkan dengan persediaan per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp6.453.973.204.788,00. Adapun rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Rincian Persediaan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Persediaan untuk Tujuan Strategis	75.479.400	111.107.400	(35.628.000)	-32,07%
Persediaan Lainnya	7.042.099.409.780	6.453.862.097.388	588.237.312.392	9,11%
Jumlah Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	588.201.684.392	9,11%

Kenaikan Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp588.201.684.392,00 tersebut didominasi berasal dari meningkatnya jumlah Persediaan Lainnya sebesar Rp588.237.312.392,00 atau 9,11 persen. Sementara itu, Persediaan untuk Tujuan Strategis mengalami penurunan sebesar Rp35.628.000,00 atau turun 32,07 persen.



Aset Non Produksi

Aset Non Produksi per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp87.359.976.590.873,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.217.849.478.420,00 atau naik 1,41 persen jika dibandingkan dengan Aset Non Produksi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp86.142.127.112.453,00. Adapun rincian Aset Non Produksi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Rincian Aset Non Produksi Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

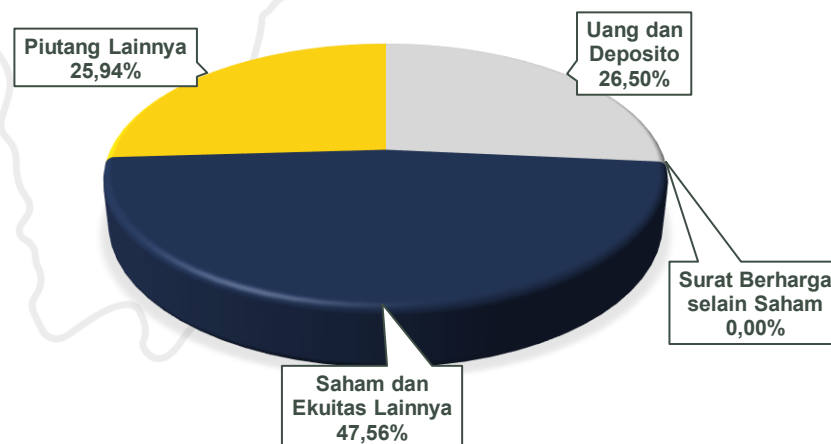
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1.217.849.478.420	1,41%
Aset Non Produksi Tidak Berwujud	-	-	-	-
Jumlah Aset Non Produksi	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1.217.849.478.420	1,41%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kenaikan Aset Non Produksi sebesar Rp1.217.849.478.420,00 per 31 Desember 2025 merupakan kenaikan Aset Tanah sebesar Rp1.217.849.478.420,00 atau 1,41 persen.

D.2.2. Aset Keuangan

Aset Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp9.494.563.935.697,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp74.146.343.827,00 atau 0,79 persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.420.417.591.870,00. Proporsi komponen Aset Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 tersebut dapat dilihat pada Grafik 18 sebagai berikut.

Grafik 18. Proporsi Komponen Aset Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025



Sumber: Diolah dari LSKP-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (Unaudited)



Berdasarkan Grafik 18, Aset Keuangan didominasi berasal dari Saham dan Ekuitas Lainnya dengan proporsi 47,56 persen dari Total Aset Keuangan atau sebesar Rp4.515.849.387.643,00. Proporsi Aset Keuangan terbesar berikutnya ialah Uang dan Deposito dengan proporsi sebesar 26,50 persen dari Total Aset Keuangan atau sebesar Rp2.515.694.109.250,00. Piutang Lainnya memiliki proporsi sebesar 25,94 persen terhadap Aset Keuangan atau sebesar Rp2.462.958.567.390,00. Terakhir, Surat Berharga Selain Saham dan Pinjaman memiliki proporsi terkecil terhadap Total Aset Keuangan tahun 2025 dengan total Rp61.871.413,00.

Informasi rincian komponen Aset Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Rincian Aset Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

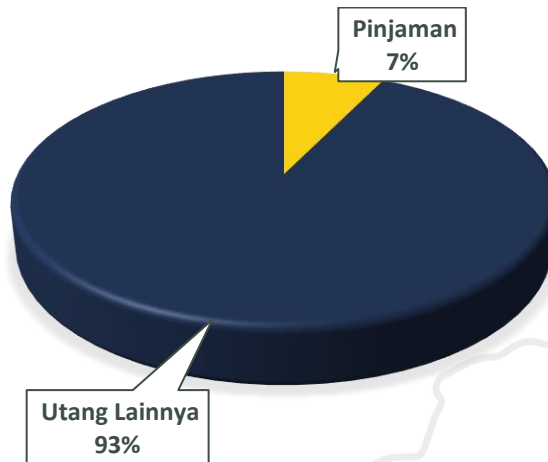
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Uang dan Deposito	2.515.694.109.250	2.588.004.202.304	(72.310.093.054)	-2,79%
Surat Berharga Selain Saham	61.871.413	61.871.413	0	0%
Pinjaman	-	-	-	-
Saham dan Ekuitas Lainnya	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	251.604.667.569	5,90%
Piutang Lainnya	2.462.958.567.390	2.568.074.240.279	(105.115.672.889)	-4,09%
Jumlah Aset Keuangan	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	74.146.343.827	0,79%

D.3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 seluruhnya merupakan Kewajiban Dalam Negeri yakni sebesar Rp6.532.201.444.974,00 mengalami kenaikan Rp975.336.977.018,00 atau naik 17,55 persen dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2024 yakni Rp5.556.864.467.956,00. Kewajiban per 31 Desember 2025 tersebut berasal dari Pinjaman sebesar Rp252.354.377.999,00 dan Utang Lainnya Rp6.279.847.066.975,00. Proporsi komponen Kewajiban Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 tersebut dapat dilihat pada Grafik 19 sebagai berikut.



Grafik 19. Proporsi Komponen Kewajiban Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025



Sumber: Diolah dari LSKP-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 (*Unaudited*)

Berdasarkan Grafik 19, Kewajiban didominasi berasal dari Utang Lainnya dengan proporsi 93 persen dari Total Kewajiban atau sebesar Rp6.279.847.066.975,00. Sementara itu, Pinjaman memiliki proporsi sebesar 7 persen terhadap Kewajiban atau sebesar Rp252.354.377.999,00.

Informasi rincian komponen Kewajiban Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Rincian Kewajiban Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pinjaman	252.354.377.999	314.498.615.039	(62.144.237.040)	-19,76%
Utang Lainnya	6.279.847.066.975	5.242.365.852.917	1.037.481.214.058	19,79%
Jumlah Kewajiban	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	975.336.977.018	17,55%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan Kewajiban Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp975.336.977.018,00 didominasi dan berasal dari meningkatnya Utang Lainnya sebesar Rp1.037.481.214.058,00 atau 19,79 persen. Sementara itu, Pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp62.144.237.040,00 atau turun 19,76 persen dari posisi 31 Desember 2024.



E. PENJELASAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK TINGKAT WILAYAH

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Umum mencatat arus kas masuk dan keluar pemerintah yang dialokasikan di antara berbagai aktivitas dan pengaruh bersihnya terhadap saldo kas. LAK mengungkapkan bagaimana pemerintah memperoleh dan menggunakan kas. Laporan ini mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi investasi dan pembiayaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang terkait dengan pengumpulan pajak, hibah, dan penyediaan barang dan jasa. Aktivitas investasi adalah aktivitas yang terkait dengan akuisisi dan penghentian aset keuangan dan non keuangan. Aktivitas pembiayaan terkait dengan perubahan ukuran dan komposisi struktur keuangan pemerintah.

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Umum melaporkan dua ukuran fiskal yaitu kenaikan bersih pada kas dan surplus/defisit kas. Kenaikan bersih pada kas adalah jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan surplus/defisit kas terdiri dari kas bersih dari aktivitas operasi ditambah dengan penjualan dan dikurangi pembelian aset non keuangan. Penyusunan LSKP periode ini dilakukan dengan high level mapping melalui pendekatan tidak langsung (indirect method), yang dilakukan dengan mapping terhadap LRA Konsolidasian dan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan sumber dan penggunaan kas per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

E.1. Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 yakni sebesar (Rp10.322.487.592.633,00) mengalami penurunan sebesar Rp27.737.875.877.494,00 atau turun 159,27 persen jika dibandingkan dengan Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp17.415.388.284.861,00. Adapun Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi merupakan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

E.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp19.460.278.924.137,00, mengalami penurunan sebesar Rp36.849.607.275.475,00 atau turun 65,44 persen jika dibandingkan dengan Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp56.309.886.199.612,00. Rincian Arus Kas Masuk



dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pajak	15.614.456.267.245	7.930.196.792.551	7.684.259.474.694	96,90%
Hibah	182.607.446.481	11.934.511.589.287	(11.751.904.142.806)	-98,47%
Penerimaan Lainnya	3.663.215.210.411	36.445.177.817.774	(32.781.962.607.363)	-89,95%
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	19.460.278.924.137	56.309.886.199.612	(36.849.607.275.475)	-65,44%

E.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp29.782.766.516.771,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.111.731.397.980,00 atau turun 23,43 persen jika dibandingkan dengan Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp38.894.497.914.751,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Kompensasi Pegawai	14.891.481.739.673	14.268.762.039.719	622.719.699.954	4,36%
Pembelian Barang dan Jasa	10.677.645.631.544	12.331.169.797.445	(1.653.524.165.901)	100%
Konsumsi Aset Tetap	-	-	-	0,00%
Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	(10.842.736.681)	-47,26%
Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	(542.330.581)	-24,76%
Hibah	2.871.249.341.289	9.683.246.110.421	(6.811.996.769.132)	946,82%
Manfaat Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	(7.591.308.494)	-17,80%
Pembayaran Lainnya	1.293.581.987.309	2.543.535.774.456	(1.249.953.787.147)	-49,14%
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	29.782.766.516.771	38.894.497.914.751	(9.111.731.397.980)	-23,43%

E.2. Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp6.090.896.980.532,00 mengalami penurunan sebesar Rp814.783.177.093,00 atau turun 11,80 persen jika dibandingkan dengan Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp6.905.680.157.625,00. Adapun Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi berasal dari Pembelian Aset Non Keuangan dan Penjualan Aset Non Keuangan dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 44. Rincian Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
Pembelian Aset Non Keuangan	8.188.084.767.130	6.917.364.714.359	1.270.720.052.771	18,37%
Aset Tetap	4.955.776.833.516	6.890.484.990.257	(1.934.708.156.741)	-28,08%
Persediaan	3.220.050.053.838	0	3.220.050.053.838	100,00%
Aset Non Produksi	12.257.879.776	26.879.724.102	(14.621.844.326)	-54,40%
Penjualan Aset Non Keuangan	2.097.187.786.598	11.684.556.733	2.085.503.229.865	17848,37%
Aset Tetap	19.254.556.459	11.684.556.733	7.569.999.726	64,79%
Persediaan	2.077.933.230.139	0	2.077.933.230.139	100,00%
Jumlah Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	6.905.418.283.802	7.367.680.899.073	(814.783.177.093)	-11,80%

E.3. Surplus/(Defisit) Kas

Surplus/(Defisit) Kas berasal dari penjumlahan Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Pembelian Aset Non Keuangan). Adapun per 31 Desember 2025 mengalami Defisit sebesar (Rp16.413.384.573.165,00) mengalami penurunan sebesar Rp26.923.092.700.400,00 atau turun 256,17 persen jika dibandingkan dengan Surplus Kas per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp10.509.708.127.235,00.

E.4. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2025 yakni Rp150.170.327.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp143.573.910.000,00 atau turun 48,88 persen jika dibandingkan dengan Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 yakni Rp293.744.237.040,00

Adapun Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan tersebut merupakan Akuisisi Aset Keuangan Neto selain kas sebesar Rp76.200.000.000,00 dikurangi dengan Keterjadian Kewajiban Neto yang seluruhnya berasal dari Dalam Negeri (Domestik) sebesar (Rp73.970.327.040,00). Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence Of Liabilities*) yang tercatat di Laporan Sumber Dan Penggunaan Kas Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2025 seluruhnya berasal dari dalam negeri.



New DJPB
in Town



METADATA

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



METADATA

INFORMASI DASAR

1. Nama Data : Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah Tahun 2025 *Unaudited*
2. Penyelenggara : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat : Jl. KS. Tubun No. 36 Pontianak
4. Nomor Telepon : (0561) 733466, 733444
5. Nomor Faksimili : (0561) 732029
6. Email : aklap016@gmail.com

DEFINISI DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts – SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

LSKPU-TW merupakan konsolidasi dari kertas kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKPU-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan Umum
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan Umum
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas
4. Metadata.

CAKUPAN DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik



- Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas merupakan laporan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan klasifikasi yang sama dengan Laporan Operasional. Informasi terkait sumber dan penggunaan kas digunakan untuk menilai likuiditas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menunjukkan total kas yang dihasilkan dan digunakan untuk kegiatan operasional tahun berjalan, transaksi aset non keuangan, transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

PERIODE PUBLIKASI

Triwulanan, Semesteran, Tahunan

WAKTU PUBLIKASI

Data triwulan dan semester diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data.

Data tahunan *preliminary* diterbitkan tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

Data tahunan *unaudited* diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya.

Data tahunan final (*audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

STATUS DATA

1. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (**) diberikan apabila:
 - a. LKPK-TW dan LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang disusun menggunakan angka estimasi.
 - b. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan *Preliminary*.
2. Status Angka Sementara dengan tanda satu bintang (*) diberikan apabila:
 - a. LKPK-TW dan LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang telah dilakukan updating
 - b. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan dengan data *Unaudited*
 - c. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan yang belum seluruhnya disusun dengan data *Audited*



3. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan berstatus angka tetap (tanpa tanda bintang) apabila telah seluruhnya disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit.

SUMBER DATA

1. Kertas kerja LKPP-TW diunduh dari Aplikasi SIKRI-MP.
2. Kertas kerja LKPKD-TW meliputi LRA LKPKD dan LRA LKPKD Per Urusan disusun menggunakan data yang diperoleh dari 15 Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kertas kerja LO LKPKD, Neraca LKPKD, dan LPE LKPKD disusun menggunakan data yang diperoleh dari 15 entitas Pemerintah Daerah.
4. Penyusunan LO LSKPP-TW, LO LSKPKD-TW, dan LO LSKP-TW menggunakan kertas kerja yang diunduh dari Aplikasi SIKRI MP, yaitu *Table 1 Revenue*, *Table 2 Expense*, dan *Table 3 Transactions in Assets and Liabilities* (dengan penyesuaian berupa penghapusan akun 3212 *Currency and Deposit*).
5. Penyusunan Neraca LSKPP-TW, Neraca LSKPKD-TW, dan Neraca LSKP-TW menggunakan kertas kerja yang diunduh dari Aplikasi SIKRI MP, yaitu *Table 6 Balance Sheet*.

METODOLOGI

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPKD-TW). LSKPKD-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPKD-TW. Sedangkan kertas kerja LSKPP-TW dihasilkan melalui Aplikasi SIKRI Modul MP. Data LKPKD-TW dimasukkan ke dalam Aplikasi SIKRI Modul MP dan kemudian akan menghasilkan LKPK-TW dan LSKP-TW.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data Tahun 2025 *Unaudited* yang telah terekonsiliasi dari 532 (lima ratus tiga puluh dua) UAKPA dari 44 (empat puluh empat) Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 *Unaudited*, proses konsolidasi dilakukan terhadap 1 LKPD provinsi, 12 LKPD kabupaten, dan 2 LKPD kota. Seluruhnya merupakan data LKPD Tahun 2025 *Unaudited* yang diperoleh dari masing-



masing Pemerintah Daerah melalui saluran komunikasi e-mail aklap016@gmail.com. Komponen LKPD yang diperoleh tersebut antara lain LRA, LRA Per Urusan LO, LPE, dan Neraca Tahun 2025 *Unaudited*.

3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. KS. Tubun No. 36 Pontianak. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.





New DJPB
Tahun

ANALISIS RASIO DAN ANALISIS INDIKATOR FISKAL

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

JALAN KS TUBUN NO. 36, PONTIANAK 78121; TELEPON (0561) 733444, 733445; FAKSIMILE (0561) 732029;
SUREL KANWIL16.DJPBKALBAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/KALBAR

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025 *UNAUDITED***

A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	<p>Rasio Solvabilitas Jangka Pendek mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun. Analisis terhadap rasio solvabilitas jangka pendek pada LKPK dan LKPDK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024 <i>Unaudited</i> dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>a. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 363,22% yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp11.060.726.421.582,00 dibagi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.045.164.577.476,00. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa secara konsolidasian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Aset Lancar yang 3 kali lebih besar dari jumlah Kewajiban Jangka Pendeknya.</p> <p>b. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPDK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 291,64% yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp3.182.682.195.955,00 dibagi dengan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.091.323.413.914,00.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Jumlah Aset Lancar yang 2 kali lebih besar dari Kewajiban Jangka Pendek tersebut menunjukkan Pemerintah Kalimantan Barat secara konsolidasian pada tingkat Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya.</p> <p>Jika dilihat lebih rinci, Solvabilitas Jangka Pendek tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sintang dengan rasio sebesar 1789,23%. Sementara itu, Solvabilitas Jangka Pendek terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sambas dengan rasio sebesar 36,91%.</p>
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	<p>Rasio Solvabilitas Jangka Panjang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun. Hasil analisis terhadap Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK dan LKPKS Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 5.008,48% yang berasal dari Total Aset sebesar Rp174.953.774.573.342,00 dibagi Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.493.152.437.824,00. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa secara konsolidasian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjangnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Total Aset yang 50 kali lebih besar dari jumlah Kewajiban Jangka Panjangnya. b. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPKS Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 35.519,34% yang berasal dari Total Aset sebesar Rp67.561.379.065.289,00 dibagi dengan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp190.210.140.959,00.



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Jumlah Total Aset yang 355 kali lebih besar dari Kewajiban Jangka Panjang tersebut menunjukkan Pemerintah Kalimantan Barat secara konsolidasian pada tingkat Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjangnya.</p> <p>Jika dilihat lebih rinci, Solvabilitas Jangka Panjang tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Singkawang dengan rasio sebesar 2.943,40%. Sementara itu, Solvabilitas Jangka Panjang terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan rasio sebesar 2.319,18%.</p>

2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah.</p> <p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Rasio Kemandirian = (Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan termasuk Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi) x 100%</i></p> <p>Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.</p> <p>Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS													
		Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah												
		>50,00	Sangat Baik												
		40,01 – 50,00	Baik												
		30,01 – 40,00	Cukup												
		20,01 – 30,00	Sedang												
		10,01 – 20,00	Kurang												
		0,00 – 10,00	Sangat Kurang												
		<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada lingkup Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 7,64% sampai 51,06%. Rasio Kemandirian tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 51,06% dan terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 7,64%.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tingkat wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> menunjukkan kondisi kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:</p>													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kemandirian Keuangan Daerah</th> <th>Pemda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>1. Pemprov Kalbar</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>1. Pemkot Pontianak</td> </tr> <tr> <td>Sedang</td> <td>1. Pemkot Singkawang</td> </tr> <tr> <td>Kurang</td> <td>1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Sanggau 3. Kabupaten Sambas 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kabupaten Ketapang 6. Kabupaten Sintang 7. Kabupaten Bengkayang</td> </tr> <tr> <td>Sangat Kurang</td> <td>1. Kabupaten Sekadau 2. Kabupaten Kayong Utara 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Melawi 5. Kabupaten Kapuas Hulu</td> </tr> </tbody> </table>	Kemandirian Keuangan Daerah	Pemda	Sangat Baik	1. Pemprov Kalbar	Cukup	1. Pemkot Pontianak	Sedang	1. Pemkot Singkawang	Kurang	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Sanggau 3. Kabupaten Sambas 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kabupaten Ketapang 6. Kabupaten Sintang 7. Kabupaten Bengkayang	Sangat Kurang	1. Kabupaten Sekadau 2. Kabupaten Kayong Utara 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Melawi 5. Kabupaten Kapuas Hulu	
Kemandirian Keuangan Daerah	Pemda														
Sangat Baik	1. Pemprov Kalbar														
Cukup	1. Pemkot Pontianak														
Sedang	1. Pemkot Singkawang														
Kurang	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Sanggau 3. Kabupaten Sambas 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kabupaten Ketapang 6. Kabupaten Sintang 7. Kabupaten Bengkayang														
Sangat Kurang	1. Kabupaten Sekadau 2. Kabupaten Kayong Utara 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Melawi 5. Kabupaten Kapuas Hulu														
		<p>Data di atas menunjukkan bahwa 41,67% Pemda tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang “Sangat Kurang”. Hal tersebut berarti sebagian daerah di Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pihak eksternal, seperti Transfer dari Pemerintah Pusat, untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>													



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Selain itu, secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 17,07% atau termasuk kategori “Kurang” menunjukkan bahwa 82,93% dari total pendapatan daerah secara rata-rata masih berasal dari kontribusi pihak eksternal. Hal tersebut juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah dalam pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
2.	Rasio Solvabilitas Anggaran	<p>Rasio Solvabilitas Anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi rasio solvabilitas suatu daerah maka semakin baik pula kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan. Rasio solvabilitas anggaran diukur dengan formula berikut:</p> <p><i>Rasio = (Total Pendapatan LRA – DAK LRA) / (Total Belanja – Belanja Modal)</i></p> <p>Secara rata-rata, rasio solvabilitas anggaran pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 100,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata Pemda lingkup Kalimantan Barat dapat dikatakan mampu menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran.</p> <p>Apabila dirinci, Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki rasio solvabilitas anggaran paling tinggi terdapat pada Pemkot Pontianak dengan rasio sebesar 126,07% dan terendah pada Pemkab Melawi dengan rasio sebesar 91,13%. Rasio solvabilitas anggaran di atas 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang dapat membiayai seluruh belanjanya. Sebaliknya, pemerintah daerah dengan rasio solvabilitas anggaran kurang dari 100% dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut belum dapat membiayai aktivitas belanjanya melalui pendapatan, sehingga pemerintah perlu</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		mencari sumber pendapatan lain, seperti melalui aktivitas pembiayaan.
3.	Rasio Solvabilitas Layanan	<p>Rasio solvabilitas layanan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio solvabilitas layanan diukur dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Rasio = Total Aset / Jumlah Penduduk</i></p> <p>Semakin tinggi rasio solvabilitas layanan menunjukkan semakin baik pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada publik.</p> <p>Rata-rata rasio solvabilitas layanan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp8.517.846,00 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki total aset yang lebih dari cukup untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, apabila dilihat secara rinci, Pemkot Pontianak memiliki rasio solvabilitas layanan tertinggi, yaitu sebesar Rp15.231.746,00 untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki rasio solvabilitas layanan terendah yaitu sebesar Rp4.010.913,00 untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu.</p>
4.	Rasio Solvabilitas Operasional	<p>Rasio solvabilitas operasional menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio solvabilitas operasional dihitung dengan formula:</p> <p><i>Rasio = (Total Pendapatan LO – DAK LO) / Beban Operasi LO</i></p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Semakin tinggi rasio solvabilitas operasional suatu daerah, semakin baik pula kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan.</p> <p>Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2025 <i>Unaudited</i> secara rata-rata memiliki rasio solvabilitas operasional sebesar 103,14%. Rasio tertinggi terdapat pada Pemkab Kubu Raya dengan rasio sebesar 127,04% dan terendah pada Pemkab Sekadau dengan rasio sebesar 89,38%. Rasio solvabilitas operasional di atas 100% menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah dapat menutupi seluruh beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rata-rata rasio solvabilitas operasional lebih dari 100% menunjukkan rata-rata pendapatan operasional pemerintah mampu menutupi seluruh beban operasional selama periode anggaran. Dengan demikian, secara rata-rata, rasio solvabilitas pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 103,14% menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah dapat memenuhi seluruh beban operasional pada satu periode anggaran.</p>
5.	Rasio Fleksibilitas Keuangan	<p>Rasio fleksibilitas keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Rasio fleksibilitas keuangan diukur menggunakan formula sebagai berikut:</p> $\text{Rasio} = \frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{DAK LO} - \text{Pembayaran Pokok Utang} - \text{Beban Operasional LO})}{(\text{Beban Operasional LO} + \text{Pembayaran Pokok Utang})}$ <p>Semakin tinggi rasio fleksibilitas keuangan maka semakin baik pula fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi kondisi peningkatan pendapatan atau utang.</p> <p>Rata-rata rasio fleksibilitas keuangan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,22% pada periode Tahun 2025 <i>Unaudited</i>. Hal tersebut menunjukkan secara</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>rata-rata pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki fleksibilitas keuangan yang kurang baik. Pemerintah dapat dikatakan kurang mampu mampu meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang.</p> <p>Rasio fleksibilitas keuangan tertinggi terdapat pada Pemkab Kubu Raya sebesar 27,04% dan terendah pada Pemkab Sambas sebesar -13,13%. Rasio fleksibilitas keuangan bernilai negatif pada Pemkab Melawi dan beberapa pemerintah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh jumlah Pendapatan-LO setelah dikurangi DAK-LO belum dapat menutupi pembayaran Beban Operasional-LO dan Pembayaran Pokok Utang pada periode bersangkutan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah bersangkutan dalam hal pengelolaan utang untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang serta menjalankan aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang.</p>



B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Keseimbangan Operasi Neto (<i>Net Operating Balance / NOB</i>)	<p>NOB merupakan perubahan pada saldo <i>Net Worth</i> (kekayaan bersih pemerintah) yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan. Saldo NOB diperoleh dari saldo Pendapatan GFS dikurang Beban GFS.</p> <p>Selama periode Tahun 2025 <i>Unaudited</i>, nilai NOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sebesar (Rp10.322.487.592.633,00) yang berasal dari NOB Pemerintah Pusat sebesar (Rp14.693.680.762.071,00), NOB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp943.562.771.641,00, dan NOB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.427.630.397.797,00.</p> <p>Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa kekayaan bersih pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> mengalami pertumbuhan negatif yang berasal dari Pendapatan GFS yang lebih kecil dari Beban GFS.</p>
2.	Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Gross Operating Balance / GOB</i>)	<p>GOB merupakan perubahan pada saldo <i>Net Worth</i> (kekayaan bersih pemerintah) yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan tanpa memperhitungkan konsumsi aset tetap (<i>consumption of fixed capital/CFC</i>). GOB diperoleh melalui formula sebagai berikut:</p> <p><i>Keseimbangan Operasi Bruto (Gross Operating Balance/GOB) = Pendapatan GFS – (Beban GFS – Konsumsi Aset Tetap)</i></p> <p>GOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp10.322.487.592.633,00) yang berasal dari GOB Pemerintah Pusat sebesar (Rp14.693.680.762.071,00), GOB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp943.562.771.641,00, dan GOB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.427.630.397.797,00.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>GOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sebesar (Rp10.322.487.592.633,00) mencerminkan kondisi operasional sektor pemerintah belum mampu memenuhi beban dari pendapatannya, karena jumlah Pendapatan GFS lebih kecil dari Beban GFS tanpa memperhitungkan beban konsumsi aset tetap periode bersangkutan.</p>
3.	<p>Peminjaman / Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing/NLB</i>)</p>	<p>NLB menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan ataupun diperoleh dari sektor ekonomi lain. Peminjaman/pinjaman neto sama dengan total kebutuhan pembiayaan. NLB diperoleh melalui formula berikut:</p> <p><i>Peminjaman/Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing/NLB) = Pendapatan GFS – (Beban GFS + Investasi neto aset nonkeuangan)</i></p> <p>Berdasarkan perhitungan, NLB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.480.659.773.785,00) yang berasal dari NLB Pemerintah Pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), NLB Pemerintah Provinsi sebesar Rp192.618.167.810,00, dan NLB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp339.189.223.086,00.</p> <p>Nilai NLB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan posisi <i>net borrowing</i> atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. Sementara itu, NLB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bernilai positif menunjukkan posisi <i>net lending</i> atau adanya kelebihan sumber daya keuangan.</p>
4.	<p>Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>)</p>	<p>Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>) menunjukkan selisih <i>revenue</i> dan <i>expense</i> yang telah dikurangi dengan <i>interest expense</i>. Keseimbangan Operasi Primer diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p><i>Keseimbangan Operasi Primer (Primary Operating Balance)</i> = NOB + Beban Bunga</p> <p>Keseimbangan Operasi Primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp10.310.387.798.147,00), berasal dari Pemerintah Pusat sebesar (Rp14.693.680.762.071,00), Pemerintah Provinsi sebesar Rp943.562.771.641,00, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.439.730.192.283,00.</p> <p>NOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban bunga utang melalui pendapatan operasionalnya, sehingga memerlukan sumber pembiayaan lainnya.</p>
5.	Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>)	<p><i>Primary Balance</i> atau keseimbangan primer merupakan selisih <i>revenue</i> dan <i>expenditure</i> yang telah dikurangi dengan <i>interest expense</i>. <i>Primary balance</i> menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban <i>interest expense</i> tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru. <i>Primary balance</i> dapat diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Keseimbangan Primer (Primary Balance) = NLB + Beban Bunga</i></p> <p>Berdasarkan perhitungan, Keseimbangan Primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.401.284.778.679,00) yang berasal dari Keseimbangan Primer Pemerintah Pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), Keseimbangan Primer Pemerintah Provinsi sebesar Rp192.618.167.810,00, dan Keseimbangan Primer Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp418.564.218.192,00</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Keseimbangan primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban bunga utang tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru, sehingga masih memerlukan penambahan kewajiban baru untuk memenuhi bunga utangnya. Sementara itu, keseimbangan primer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kalimantan Barat yang bernilai positif menunjukkan bahwa pemerintah mampu memenuhi kewajiban bunga utang tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru.</p>

2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>)	<p>Pajak langsung (<i>Direct Taxes</i>) merupakan penerimaan pajak yang perhitungannya mempertimbangkan situasi/keadaan/kemampuan masing-masing wajib pajaknya, misalnya pajak penghasilan perorangan dan badan usaha. Pajak langsung pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Pajak Langsung (Direct Taxes) = Taxes on Income, profits, and capital gain + recurrent taxes on immovable property + recurrent taxes on net wealth + other recurrent taxes on property</i></p> <p>Pajak Langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp4.317.185.269.875,00 yang berasal dari Pajak Langsung Pemerintah Pusat sebesar Rp3.908.522.125.059,00 dan Pajak Langsung pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp408.663.144.816,00. Kontribusi Pajak Langsung yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dapat disebabkan oleh penerimaan pajak penghasilan yang merupakan pajak pusat.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
2.	Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>)	<p>Pajak tidak langsung (<i>Indirect Taxes</i>) merupakan pajak yang perhitungannya tidak mempertimbangkan situasi/keadaan/kemampuan individual masing-masing wajib pajak, misalnya pajak atas barang dan jasa. Pajak tidak langsung diperoleh dari formula:</p> <p><i>Pajak tidak langsung (indirect taxes) = taxes on payroll and workforce + taxes on goods and services + taxes on international trade and transactions + other taxes</i></p> <p>Pajak tidak langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp11.297.270.997.370,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7.721.460.048.159,00, Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.292.462.645.747,00, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.283.348.303.464,00.</p> <p>Apabila dibandingkan dengan Pajak Langsung, Pajak Tidak Langsung memiliki proporsi yang lebih besar dari total pendapatan pajak tingkat wilayah Kalimantan Barat, yaitu 72,35% dari total penerimaan pajak. Pajak tidak langsung tersebut sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat yang dapat berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak pusat.</p>
3.	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>)	<p>Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) merupakan pajak yang dibebankan secara tidak berkala dan tidak sering atas nilai aset atau kekayaan neto unit institusi atau nilai aset yang ditransfer antar unit institusi sebagai warisan, hadiah, dan transfer lain. Pajak Modal diperoleh dari formula:</p> <p><i>Pajak modal (capital taxes) = estate, inheritance, and gift taxes + other nonrecurrent taxes on property</i></p> <p>Pajak modal Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp0,00.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
4.	<p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah (Government Final Consumption Expenditure)</p>	<p>Belanja konsumsi final pemerintah (<i>government final consumption expenditure</i>) berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Belanja konsumsi final pemerintah tersebut diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Belanja konsumsi final pemerintah (government final consumption expenditure) = compensation of employees + use of goods and services + consumption of fixed capital + miscellaneous other expenses – sales of goods and services</i></p> <p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp23.992.506.641.287,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.343.322.538.489,00, Pemerintah Provinsi sebesar Rp3.572.178.594.247,00 dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp14.077.005.508.551,00.</p>
5.	<p>Tabungan Bruto (Gross Saving)</p>	<p>Tabungan bruto (<i>gross saving</i>) sama dengan keseimbangan operasi bruto dikurangi piutang transfer modal neto, termasuk hibah modal neto dan pajak modal, atau peminjaman neto/pinjaman neto tanpa investasi bruto aset non keuangan dan piutang transfer modal neto. Tabungan neto diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Tabungan bruto (gross saving) = GOB – net capital transfer.</i></p> <p>Tabungan Bruto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp9.805.091.048.223,00) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar (Rp13.740.009.169.123,00), pemerintah provinsi sebesar Rp1.158.862.986.381,00 dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp3.541.771.477.467,00.</p>



3. Analisis Indikator Pembiayaan

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)	<p>Total pembiayaan (<i>total financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban.</p> <p>Total Pembiayaan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.480.659.773.785,00) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), pemerintah provinsi sebesar - Rp192.618.167.810,00, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp339.189.223.086,00.</p> <p>Total pembiayaan pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif tersebut menunjukkan transaksi aset keuangan pemerintah yang lebih kecil dari transaksi kewajiban. Jumlah total pembiayaan tersebut seluruhnya berasal dari pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>).</p> <p>Angka negatif total pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota tersebut menunjukkan situasi di mana penerimaan pemerintah lebih kecil jumlah pengeluarannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah lebih banyak membayar atau mengurangi utang daripada memperoleh pendapatan atau mengambil utang baru.</p>
2.	Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>)	<p>Pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dengan unit institusi residen dikurangi transaksi kewajiban dengan unit institusi residen (debitur/kreditur dalam negeri). Pembiayaan dalam negeri diperoleh dengan formula:</p> <p><i>Pembiayaan dalam negeri (domestic financing) = transactions in financial assets with resident institutional units – transactions in liabilities with resident institutional units</i></p> <p>Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.480.659.773.785,00) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), pemerintah provinsi sebesar - Rp192.618.167.810,00, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp339.189.223.086,00.</p> <p>Pembiayaan pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat seluruhnya berasal dari pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>) ini mencerminkan bahwa pemerintah mengandalkan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakannya.</p>
3.	Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>)	<p>Pembiayaan luar negeri (<i>foreign financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dengan unit institusi non residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi non residen (debitur/kreditur luar negeri).</p> <p>Sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i>, tidak terdapat pembiayaan yang berasal dari luar negeri (<i>foreign financing</i>) pada pemerintah tingkat wilayah Kalimantan Barat.</p>
4.	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Bank Financing</i>)	<p>Pembiayaan perbankan dalam negeri (<i>domestic bank financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban dengan bank sentral dan korporasi penyimpan uang residen selain bank sentral.</p> <p>Pembiayaan perbankan dalam negeri (<i>domestic bank financing</i>) pemerintah pada tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> tidak dapat diidentifikasi nilainya.</p>
5.	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Nonbank Financing</i>)	<p>Pembiayaan non perbankan dalam negeri (<i>domestic nonbank financing</i>) merupakan transaksi aset finansial dengan pihak selain bank sentral dan perbankan dikurangi dengan transaksi liabilitas dengan pihak selain bank sentral dan perbankan.</p> <p>Pembiayaan non perbankan dalam negeri (<i>domestic nonbank financing</i>) pemerintah pada tingkat wilayah</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> tidak dapat diidentifikasi nilainya.



4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>)	<p>Utang bruto (<i>gross debt</i>) merupakan posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan pokok oleh debitur kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa depan, termasuk semua kewajiban dalam instrumen utang (total kewajiban kecuali saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Dengan kata lain, utang bruto menunjukkan total nilai dari seluruh utang yang dimiliki oleh pemerintah pada suatu periode, tanpa mempertimbangkan aset atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah.</p> <p>Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp6.731.129.560.161,00 berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp5.449.596.005.288,00, pemerintah provinsi sebesar Rp246.247.665.263,00, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.036.967.689.610,00.</p>
2.	Utang Neto (<i>Net Debt</i>)	<p>Utang neto (<i>net debt</i>) merupakan utang bruto dikurangi posisi aset keuangan terkait instrumen utang, termasuk semua aset keuangan, kewajiban dalam instrumen utang (aset keuangan/kewajiban tanpa saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Utang neto menggambarkan posisi utang pemerintah dengan mempertimbangkan nilai aset yang dapat digunakan untuk membayar utang.</p> <p>Utang Neto (<i>Net Debt</i>) Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp1.752.415.012.107,00 berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp3.269.572.136.698,00, pemerintah provinsi sebesar (Rp940.316.921.783,00) dan pemerintah kabupaten/kota sebesar (Rp775.768.317.995,00).</p> <p>Utang Neto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>memiliki aset yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Sementara itu, utang neto pemerintah pusat yang bernilai positif menunjukkan bahwa pemerintah memiliki lebih banyak utang daripada aset yang bisa digunakan untuk membayar utang. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya risiko keuangan.</p>



C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No	Kat.	Rasio	
		Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang
1.	LKPK	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} = \frac{11.060.726.421.582}{3.045.164.577.476} = 363,22\%$	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} = \frac{174.953.774.573.342}{3.493.152.437.824} = 5.008,48\%$
2.	LKPKD	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} = \frac{3.182.682.195.955}{1.091.323.413.914} = 291,64\%$	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} = \frac{67.561.379.065.289}{190.210.140.959} = 35.519,34\%$

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Barat

No.	Pemerintah Daerah	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas Jangka Panjang
1.	Provinsi Kalimantan Barat	241,06%	-
2.	Kabupaten Sambas	36,91%	-
3.	Kabupaten Sanggau	943,67%	-
4.	Kabupaten Sintang	1789,23%	-
5.	Kabupaten Mempawah	1338,37%	-
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	580,97%	-
7.	Kabupaten Ketapang	211,11%	-
8.	Kabupaten Bengkayang	116,13%	2319,18%
9.	Kabupaten Landak	953,80%	-
10.	Kabupaten Melawi	466,71%	-
11.	Kabupaten Sekadau	426,28%	-
12.	Kabupaten Kayong Utara	1666,48%	-
13.	Kabupaten Kubu Raya	431,77%	-
14.	Kota Pontianak	561,39%	-
15.	Kota Singkawang	346,35%	2943,40%

b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Pemerintah Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Solvabilitas Anggaran	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Operasional	Fleksibilitas Keuangan
1.	Provinsi Kalimantan Barat	51,06%	103,68%	2.980.173	117,89%	17,89%
2.	Kabupaten Sambas	14,49%	97,60%	5.248.135	94,60%	-13,13%
3.	Kabupaten Sanggau	15,51%	95,59%	6.739.740	99,06%	-0,94%
4.	Kabupaten Sintang	13,23%	98,81%	12.052.334	98,69%	-1,31%
5.	Kabupaten Mempawah	16,66%	94,68%	5.302.585	96,17%	-3,83%
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	7,64%	104,48%	12.074.494	94,48%	-5,52%
7.	Kabupaten Ketapang	13,89%	99,59%	10.538.001	98,80%	-1,20%
8.	Kabupaten Bengkayang	10,28%	91,61%	7.767.617	105,74%	2,27%
9.	Kabupaten Landak	8,24%	97,27%	6.614.765	107,79%	7,79%
10.	Kabupaten Melawi	7,76%	91,13%	8.835.804	89,51%	-10,49%
11.	Kabupaten Sekadau	8,87%	98,33%	9.554.846	89,38%	-10,62%
12.	Kabupaten Kayong Utara	8,26%	99,69%	10.714.446	109,61%	9,61%
13.	Kabupaten Kubu Raya	14,29%	92,04%	4.010.913	127,04%	27,04%
14.	Kota Pontianak	36,42%	126,07%	15.231.746	122,02%	22,02%
15.	Kota Singkawang	29,43%	109,87%	10.102.099	96,34%	-6,34%

2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

a. Analisis Keseimbangan Fiskal

No	Pemerintah Daerah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1.	Pemerintah Pusat	- 14.693.680.762.071	- 14.693.680.762.071	- 17.012.467.164.681	- 14.693.680.762.071	- 17.012.467.164.681
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	943.562.771.641	943.562.771.641	192.618.167.810	943.562.771.641	192.618.167.810
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	3.427.630.397.797	3.427.630.397.797	406.464.423.706	3.439.730.192.283	418.564.218.192
4.	Pemerintah Umum	- 10.322.487.592.633	- 10.322.487.592.633	- 16.413.384.573.165	- 10.310.387.798.147	- 16.401.284.778.679

b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No	Pemerintah Daerah	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1.	Pemerintah Pusat	3.908.522.125.059	7.721.460.048.159	-	6.343.322.538.489	- 13.740.009.169.123
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	-	2.292.462.645.747	-	3.572.178.594.247	1.158.862.986.381
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	408.663.144.816	1.283.348.303.464	-	14.077.005.508.551	3.541.771.477.467
4.	Pemerintah Umum	4.317.185.269.875	11.297.270.997.370	-	23.992.506.641.287	- 9.805.091.048.223

c. Analisis Indikator Pembiayaan

No	Pemerintah Daerah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1.	Pemerintah Pusat	-17.012.467.164.681	-17.012.467.164.681	0	N/A	N/A
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	192.618.167.810	192.618.167.810	0	N/A	N/A
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	339.189.223.086	339.189.223.086	0	N/A	N/A
4.	Pemerintah Umum	(16.480.659.773.785)	(16.480.659.773.785)	0	N/A	N/A

d. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No	Pemerintah Daerah	Utang Bruto	Utang Neto
1.	Pemerintah Pusat	5.449.596.005.288	3.269.572.136.698
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	246.247.665.263	(940.316.921.783)
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1.036.967.689.610	(775.768.317.995)
4.	Pemerintah Umum	6.731.129.560.161	1.752.415.012.107

Dibuat di Pontianak
Pada tanggal 16 April 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rahmat Mulyono

New DJPB
in Town



LAMPIRAN

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



New DJPB
in Town



LAMPIRAN

LKPK-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
PENDAPATAN KONSOLIDASI	19.592.310.916.270	31.045.135.490.591	-36,89%
Pendapatan Perpajakan Konsolidasi	15.624.444.191.938	15.758.842.981.577	-0,85%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.964.405.963.825	15.251.548.153.378	-74,01%
Pendapatan Hibah	3.460.760.507	34.744.355.636	-90,04%
BELANJA DAN TRANSFER	36.005.695.489.436	51.096.422.249.216	-29,53%
BELANJA KONSOLIDASI	33.158.991.674.948	36.621.626.098.098	-9,46%
Belanja Pegawai	15.371.174.955.146	14.063.278.549.304	9,30%
Belanja Barang dan Jasa	11.986.636.514.922	13.945.760.265.666	-14,05%
Belanja Modal	4.968.034.713.292	6.924.810.076.855	-28,26%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
Belanja Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
Belanja Hibah	751.007.068.359	1.606.015.104.776	-53,24%
Belanja Bantuan Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
Belanja Lain-Lain	33.330.606.274	13.977.908.786	138,45%
TRANSFER KONSOLIDASI	2.846.703.814.488	14.474.796.151.119	-80,33%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.658.107.317.596	3.054.594.880.596	-12,98%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	88.409.478.674	72.366.915.553	22,17%
Transfer Bantuan Keuangan	2.569.697.838.922	2.982.227.965.043	-13,83%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH DAN DANA DESA	188.596.496.892	11.420.201.270.523	-98,35%
Dana Bagi Hasil	15.773.434.115	956.355.074.480	-98,35%
Dana Alokasi Umum	-	7.517.739.381.007	-100,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	1.515.640.480.170	-100,00%
Dana Insentif Daerah	-	6.381.677.000	-100,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88.748.187.133	1.298.890.056.966	-93,17%
Dana Desa	84.074.875.644	125.194.600.900	-32,84%
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B-C)	(16.413.384.573.165)	(20.051.286.758.625)	-18,14%
PEMBIAYAAN	1.054.193.737.022	1.474.722.724.945	-28,52%
Penerimaan Pembiayaan	1.339.137.974.062	1.865.066.961.985	-28,20%
Pengeluaran Pembiayaan	284.944.237.040	390.344.237.040	-27,00%
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (D+E)	(15.359.190.836.143)	(18.576.564.033.680)	-17,32%



**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
ASET	174.953.774.573.342	174.235.467.665.738	0,41%
Aset Lancar	11.060.726.421.582	10.553.048.134.746	4,81%
Kas dan setara kas	2.204.120.426.902	2.197.339.299.770	0,31%
Investasi jangka pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	58,82%
Belanja dibayar di muka dan uang muka belanja	26.629.723.943	42.813.936.008	-37,80%
Piutang	1.679.801.381.557	1.790.921.694.181	-6,20%
Piutang Perpajakan	902.642.910.836	1.032.652.635.482	-12,59%
Piutang Bukan Pajak	1.817.991.372.368	1.662.740.212.220	9,34%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.523.471.478	-	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	620.743.272	584.645.137	6,17%
Piutang Lain-Lain	28.345.872.935	17.623.823.060	60,84%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1.071.322.989.331)	(922.679.621.718)	16,11%
Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	9,11%
Investasi Jangka Panjang	4.515.911.259.057	4.264.306.591.487	5,90%
Investasi jangka panjang non permanen	61.871.413	61.871.413	0,00%
Investasi jangka panjang permanen	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
Aset Tetap	154.882.146.698.333	154.912.343.702.823	-0,02%
Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
Peralatan dan Mesin	26.175.891.155.913	24.420.712.102.012	7,19%
Gedung dan Bangunan	34.570.081.165.092	33.058.859.080.729	4,57%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79.610.251.431.173	76.567.157.679.817	3,97%
Aset Tetap Lainnya	1.863.314.115.945	1.746.219.236.437	6,71%
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.524.240.215.198	1.846.562.430.198	-17,46%
Konsesi Jasa	3.508.429.618.546	3.507.516.169.746	0,03%
Akumulasi Penyusutan	(79.730.037.594.407)	(72.376.810.108.568)	10,16%
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	-1,80%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Piutang Jangka Panjang	9.952.214.237	6.125.046.122	62,48%
Tagihan piutang penjualan angsuran	1.401.564.945	1.575.385.210	-11,03%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	8.628.398.783	4.591.690.553	87,91%
Piutang jangka panjang lainnya	-	32.557.800	-100,00%
Penyisihan piutang jangka panjang	(77.749.491)	(74.587.441)	4,24%
Aset Lainnya	4.479.657.976.986	4.466.696.786.229	0,29%
Kemitraan dengan pihak ketiga	746.575.247.653	728.246.121.768	2,52%
Aset tidak berwujud	712.686.201.189	525.514.046.006	35,62%
Dana yang dibatasi penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	-31,04%
Aset lain-lain	3.550.228.167.318	3.552.319.480.738	-0,06%
Akumulasi penyusutan/amortisasi	(733.405.321.522)	(634.578.864.515)	15,57%
KEWAJIBAN	6.538.317.015.300	5.556.864.467.956	17,66%
Kewajiban Jangka Pendek	3.045.164.577.476	1.950.598.707.384	56,11%
Utang perhitungan pihak ketiga	599.636.211	518.107.784	15,74%
Utang kepada pihak ketiga	888.205.100.499	1.259.020.166.055	-29,45%
Utang bunga	7.613.724.020	9.802.763.059	-22,33%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Utang transfer	532.345.551.139	95.485.958.416	457,51%
Bagian lancar utang jangka panjang	62.144.237.040	62.144.237.040	0,00%
Utang kelebihan pembayaran pendapatan	405.848.803.088	274.862.110.657	47,66%
Pendapatan diterima dimuka	1.140.267.273.844	144.193.585.735	690,79%
Uang muka	19.562.000	260.384.809	-92,49%
Utang jangka pendek lainnya	8.120.689.634	104.311.393.829	-92,21%
Kewajiban Jangka Panjang	3.493.152.437.824	3.606.265.760.572	-3,14%
Utang jangka panjang dalam negeri	192.537.857.959	252.354.377.999	-23,70%
Kewajiban Konsesi Jasa	3.300.614.579.865	3.353.911.382.573	-1,59%
EKUITAS	168.415.457.558.042	168.678.603.197.783	-0,16%



LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional – LO	26.221.102.017.130	19.861.506.262.952	32,02%
Pendapatan Perpajakan – LO	14.934.573.552.292	15.847.498.280.977	-5,76%
Pendapatan Bukan Pajak – LO	2.942.425.421.430	2.814.315.067.531	4,55%
Pendapatan Transfer – LO	6.441.337.049.948	30.086.490.727	21309,40%
Pendapatan BLU – LO	734.536.117.542	614.538.933.035	19,53%
Pendapatan Hibah – LO	1.139.261.066.673	478.202.686.182	138,24%
Pendapatan Lainnya - LO	28.968.809.246	76.864.804.500	-62,31%
Beban Operasional	44.448.486.187.820	40.728.485.361.533	9,13%
Beban Pegawai	15.538.453.242.397	14.331.089.460.053	8,42%
Beban Persediaan	624.308.897.359	650.426.794.505	-4,02%
Beban Barang dan Jasa	11.102.455.572.933	13.392.723.804.840	-17,10%
Beban Bunga	10.093.937.097	20.584.710.225	-50,96%
Beban Subsidi	2.104.177.825	2.190.015.581	-3,92%
Beban Hibah	785.416.125.371	1.614.861.436.614	-51,36%
Beban Bantuan Sosial	35.092.337.469	43.743.482.890	-19,78%
Beban Lain-Lain/Tidak Terduga	3.036.359.569	0	100,00%
Beban Akrual Lainnya	7.382.050.354.464	7.527.227.383.317	-1,93%
Beban Transfer	8.965.475.183.336	3.145.638.273.508	185,01%
Transfer Pempus ke Daerah dan dana Desa	7.588.052.003.847	2.007.031.152.869	278,07%
Dana Bagi Hasil	0	198.247.735	-100,00%
Dana Bagi Hasil Pajak	0	0	0,00%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	198.247.735	-100,00%
Dana Bagi Hasil Cukai	0	0	0,00%
Dana Alokasi Umum	4.325.581.920.831	13.614.488.351	31671,90%
Dana Alokasi Khusus	0	0	0,00%
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	29.834.845.000	5.910.960.000	404,74%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.636.915.481.928	48.688.880.430	3261,99%
Dana Desa	1.595.719.756.088	1.938.618.576.353	-17,69%
Beban Transfer Lain-Lain			0,00%
Beban Transfer Pemda	1.377.423.179.488	1.138.607.120.639	20,97%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	712.068.448.369	93.424.722.400	662,18%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	5.951.885.098	-100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	37.449.114.634	0	100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	627.905.616.485	1.039.230.513.141	-39,58%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18.227.384.170.690)	(20.866.979.098.581)	-12,65%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	42.184.130.190	(179.014.223.226)	-123,56%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.185.200.040.501)	(21.045.993.321.807)	-13,59%
POS LUAR BIASA	(11.085.419.843)	(4.790.665.603)	131,40%
SURPLUS (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	-13,56%



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
EKUITAS AWAL	168.590.512.919.166	167.586.743.677.496	0,60%
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	168.590.512.919.166	167.586.743.677.496	0,60%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	-13,56%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	40.048.222.871	(143.120.980.527)	-127,98%
Selisih Revaluasi Aset	13.521.622.880	(326.186.759.311)	-104,15%
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977	593.285.583.529	-47,34%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011	103.290.816.176	-98,77%
Koreksi Lain-lain	(890.233.778.538)	330.455.941.487	-369,40%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(522.990.918.799)	557.724.601.355	-193,77%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.544.221.018.018	21.584.918.906.345	-14,09%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(175.055.361.125)	1.091.859.520.290	-116,03%
EKUITAS AKHIR	168.415.457.558.041	168.678.603.197.786	-0,16%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN

LKPP-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
I. Pendapatan Perpajakan	11.639.970.097.911	11.902.301.578.087	-2,20%
1. Pajak Dalam Negeri	11.222.824.964.911	11.574.619.974.087	-3,04%
2. Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000	327.681.604.000	27,30%
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.340.904.303.635	1.340.721.625.509	0,01%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	-
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	600.370.473.248	621.813.087.217	-3,45%
4. Pendapatan PNBP Lainnya	740.533.830.387	718.908.538.292	3,01%
III. Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	12.980.874.401.546	13.243.023.203.596	-1,98%
B. BELANJA NEGARA			
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.767.142.747.491	12.360.701.965.645	-20,98%
1. Belanja Pegawai	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
2. Belanja Barang	3.950.905.076.900	5.837.444.808.345	-32,32%
3. Belanja Modal	1.187.367.511.626	2.274.614.912.926	-47,80%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-
5. Belanja Subsidi	-	-	-
6. Belanja Hibah	-	-	-
7. Belanja Sosial	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
8. Belanja Lain-Lain	-	-	-
II. Transfer ke Daerah	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
1. Dana Transfer Umum	14.294.864.139.901	13.908.446.382.005	2,78%
a. Dana Bagi Hasil	1.313.884.911.500	1.310.900.175.870	0,23%
b. Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401	12.597.546.206.135	3,04%
2. Dana Transfer Khusus	4.283.661.097.747	4.639.912.206.183	-7,68%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	765.716.342.948	1.580.677.889.833	-51,56%
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.517.944.754.799	3.059.234.316.350	14,99%
c. Hibah Kepada Daerah	-	-	-
3. Dana Insentif Daerah	51.953.825.000	140.326.341.000	-62,98%
4. Dana Otonomi Khusus	-	-	-
5. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-
6. Insentif Fiskal	-	-	-
7. Dana Desa	1.595.719.756.088	1.940.131.177.902	-17,75%
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29.993.341.566.227	32.989.518.072.735	-9,08%
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A – B)	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
D. PEMBIAYAAN	-	-	-
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN – SILPA (SIKPA) (D-C)	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%



**NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ASET			
Aset Lancar	8.076.972.340.814	8.002.576.109.291	0,93%
Kas dan setara kas			
Kas di Bendahara Pengeluaran	83.297.681	279.946.809	-70,25%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	286.708.064.215	647.602.020.800	-55,73%
Kas pada Badan Layanan Umum	329.652.158.324	369.064.989.385	-10,68%
Investasi jangka pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	58,82%
Belanja dibayar di muka (prepaid)	2.505.421.888	24.251.680.009	-89,67%
Uang muka belanja (prepayment)	10.228.565.859	485.860	2105149,63%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.064.969.830	14.109.522.627	-49,93%
Piutang	-	-	-
Piutang Perpajakan	873.092.255.320	919.374.484.207	-5,03%
Piutang Bukan Pajak	990.639.198.999	877.307.002.247	12,92%
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	620.743.272	584.645.137	6,17%
Piutang dari Kegiatan BLU	13.724.505.494	6.949.927.258	97,48%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(646.238.677.212)	(560.545.450.739)	15,29%
Persediaan	6.100.891.837.144	5.635.596.855.691	8,26%
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-
Aset Tetap	98.693.864.663.107	99.626.477.232.384	-0,94%
Tanah	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
Peralatan dan Mesin	14.368.923.965.871	13.280.952.865.951	8,19%
Gedung dan Bangunan	10.289.216.356.946	9.995.330.692.127	2,94%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.996.449.106.920	35.989.089.095.889	2,80%
Aset Tetap Lainnya	156.331.794.296	143.313.742.932	9,08%
Konstruksi dalam Pengerjaan	714.756.063.260	1.020.320.276.516	-29,95%
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-	-
Aset Konsesi Jasa	3.508.429.618.546	3.507.516.169.746	0,03%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(36.225.671.241.718)	(32.542.628.271.330)	11,32%
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	-1,80%
Properti Investasi	6.394.258.710	6.394.258.710	0,00%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.014.255.563)	(915.754.682)	10,76%
Piutang Jangka Panjang	369.682.572	662.834.558	-44,23%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	447.432.063	704.864.199	-36,52%
Piutang jangka panjang lainnya	0	32.557.800	-100,00%
Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka panjang	(77.749.491)	(74.587.441)	4,24%
Aset Lainnya	814.736.933.600	743.640.890.770	9,56%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	0,00%
Aset tidak berwujud	449.420.765.037	271.434.366.560	65,57%
Dana yang dibatasi penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	-31,04%
Aset lain-lain	667.652.408.266	600.034.312.862	11,27%
Akumulasi penyusutan aset lainnya	(350.760.857.616)	(300.566.230.052)	16,70%
Akumulasi amortisasi aset lainnya	(155.149.064.435)	(122.457.560.832)	26,70%
JUMLAH ASET KEWAJIBAN	107.591.323.623.240	108.378.835.571.031	-0,73%
Kewajiban Jangka Pendek	2.152.769.278.749	699.795.538.989	207,63%
Utang kepada pihak ketiga	214.854.807.408	255.933.589.694	-16,05%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
Utang transfer	731.273.666.326	251.723.337.326	190,51%
Utang kelebihan pembayaran pendapatan	148.259.680.705	129.271.866.789	14,69%
Pendapatan diterima dimuka	1.058.346.419.264	62.598.229.377	1590,70%
Utang jangka pendek lainnya	15.143.046	8.130.994	86,24%
Uang muka dari KPPN	19.562.000	260.384.809	-92,49%
Kewajiban Jangka Panjang	3.302.942.296.865	3.353.911.382.573	-1,52%
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	2.327.717.000	-	100,00%
Kewajiban konsesi jasa	3.300.614.579.865	3.353.911.382.573	-1,59%
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS	3.776.761.620.792	4.053.706.921.562	-6,83%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	102.135.612.047.626	104.325.128.649.469	-2,10%
	107.591.323.623.240	108.378.835.571.031	-0,73%

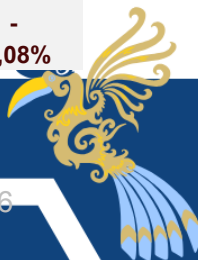


LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Perpajakan	10.889.935.092.693	11.928.383.417.279	-8,71%
Pendapatan Pajak Penghasilan	3.691.822.199.107	4.705.851.899.216	-21,55%
Pendapatan PPN dan PPnBM	6.324.942.604.083	6.098.720.060.701	3,71%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	192.673.297.412	504.474.989.247	-61,81%
Pendapatan Cukai	247.295.409.000	129.210.395.000	91,39%
Pendapatan Pajak Lainnya	14.967.211.091	160.900.716.115	-90,70%
Pendapatan Bea Masuk	67.645.443.000	76.214.898.000	-11,24%
Pendapatan Bea Keluar	350.588.929.000	253.010.459.000	38,57%
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.250.167.937.871	1.258.261.639.985	-0,64%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	644.305.546.118	643.722.706.950	0,09%
Pendapatan Badan Layanan Umum	605.862.391.753	614.538.933.035	-1,41%
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	12.140.103.030.564	13.186.645.057.264	-7,94%
Beban Operasional			
Beban Pegawai	4.845.807.569.274	4.455.492.271.687	8,76%
Beban Persediaan	623.008.899.309	649.438.474.565	-4,07%
Beban Barang dan Jasa	1.539.256.678.307	2.715.346.342.013	-43,31%
Beban Pemeliharaan	663.926.183.397	543.334.749.063	22,19%
Beban Perjalanan Dinas	257.494.259.337	718.729.538.472	-64,17%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	716.897.008.387	1.151.602.522.132	-37,75%
Beban Bantuan Sosial	17.501.442.000	13.967.735.100	25,30%
Beban Transfer	20.120.463.243.736	20.542.107.543.095	-2,05%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.434.810.556.338	3.477.710.798.072	-1,23%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	126.200.916.993	131.824.480.999	-4,27%
Jumlah Beban Operasional	32.345.366.757.078	34.399.554.455.198	-5,97%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20.205.263.726.514)	(21.212.909.397.934)	-4,75%
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.697.798.886	5.128.408.184	108,60%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.502.098.638	80.984.333.891	-93,21%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5.195.700.248	(75.855.925.707)	-106,85%
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	67.594.276.755	79.436.840.555	-14,91%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.682.254.373	8.627.507.799	-22,55%
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	60.912.022.382	70.809.332.756	-13,98%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	66.107.722.630	-5.046.592.951	-1409,95%
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	(20.139.156.003.884)	(21.217.955.990.885)	-5,08%



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
EKUITAS AWAL	104.237.038.370.849	102.952.402.952.357	1,25%
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	104.237.038.370.849	102.952.402.952.357	1,25%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(20.139.156.003.884)	(21.217.955.990.885)	-5,08%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	40.038.054.726	36.226.933.933	10,52%
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977	593.285.583.529	-47,34%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011	103.290.816.176	-98,77%
Koreksi Lain-lain	(860.202.406.071)	272.959.448.014	-415,14%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(506.491.337.357)	1.005.762.781.652	-150,36%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.544.221.018.018	21.584.918.906.345	-14,09%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2.101.426.323.223)	1.372.725.697.112	-253,08%
EKUITAS AKHIR	102.135.612.047.626	104.325.128.649.469	-2,10%



LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

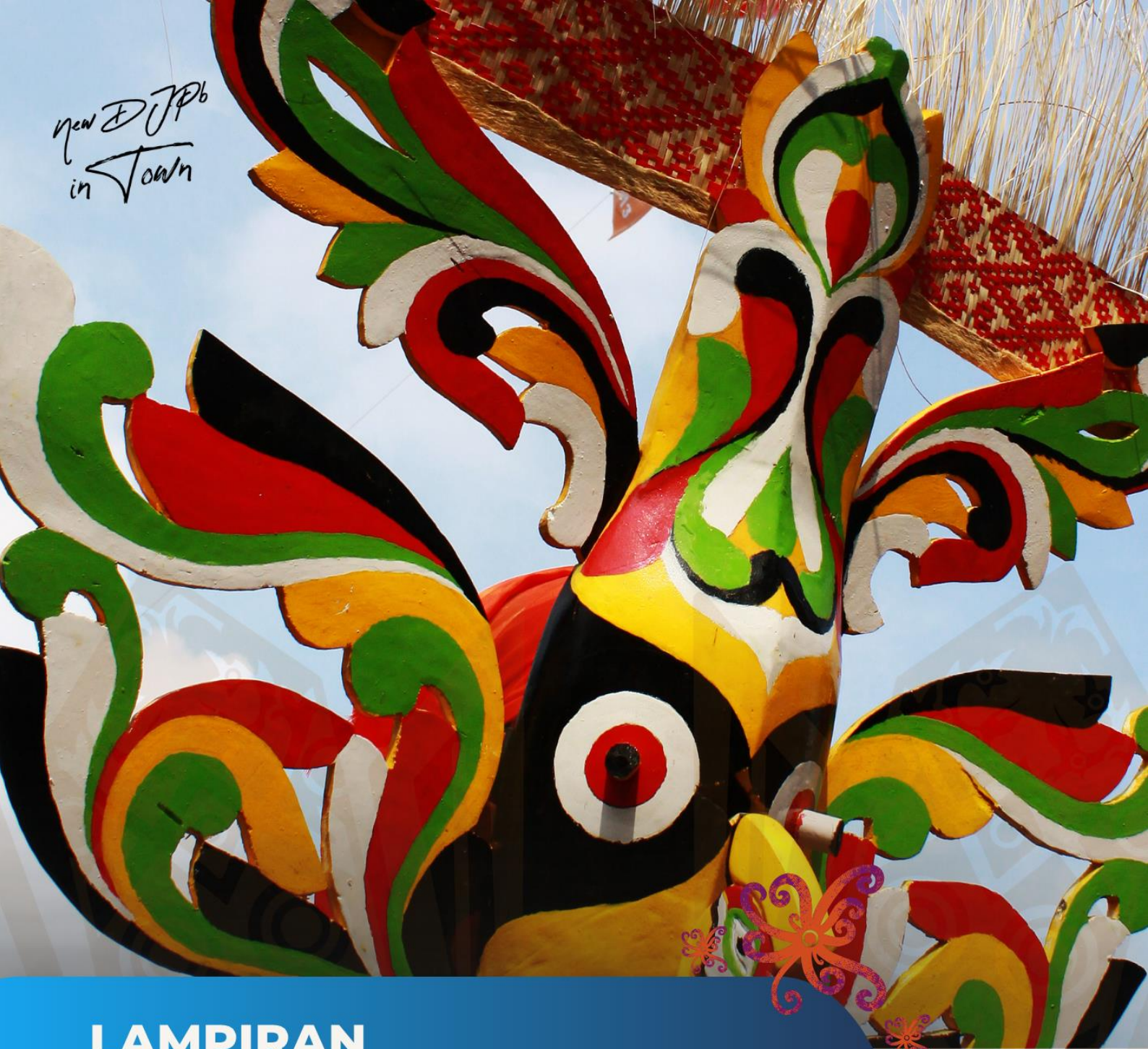
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perpajakan	11.639.970.097.911	11.902.301.578.087	-2,20%
Pendapatan Pajak Penghasilan	3.741.968.047.659	4.682.093.557.746	-20,08%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	6.354.922.015.111	6.049.184.793.762	5,05%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	166.554.077.400	508.807.052.000	-67,27%
Pendapatan Cukai	247.295.409.000	129.222.749.000	91,37%
Pendapatan Pajak Lainnya	712.085.415.741	205.311.821.579	246,83%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000	327.681.604.000	27,30%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.330.206.370.920	1.335.593.217.325	-0,40%
Pendapatan PNBPN Lainnya	729.835.897.672	713.780.130.108	2,25%
Pendapatan Badan Layanan Umum	600.370.473.248	621.813.087.217	-3,45%
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	12.970.176.468.831	13.237.894.795.412	-2,02%
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
Belanja Barang	3.950.905.076.900	5.837.444.808.345	-32,32%
Belanja Bantuan Sosial	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	597.460.483.900	546.264.557.000	9,37%
Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	714.609.782.600	763.740.219.500	-6,43%
Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	1.814.645.000	895.399.370	102,66%
Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401	12.597.546.206.135	3,04%
Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	765.716.342.948	1.580.677.889.833	-51,56%
Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah	51.953.825.000	140.326.341.000	-62,98%
Transfer Lainnya	3.517.944.754.799	3.059.234.316.350	14,99%
Dana Desa	1.595.719.756.088	1.940.131.177.902	-17,75%
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	28.805.974.054.601	30.714.903.159.809	-6,21%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I – A.II)	(15.835.797.585.770)	(17.477.008.364.397)	-9,39%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pengelolaan dan Penjualan BMN	10.697.932.715	5.128.408.184	108,60%
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	10.697.932.715	5.128.408.184	108,60%
Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	1.187.367.511.626	2.274.614.912.926	-47,80%
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	1.187.367.511.626	2.274.614.912.926	-47,80%



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)	(1.176.669.578.911)	(2.269.486.504.742)	-48,15%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Transito (Netto)	(89.533.139.982)	24.279.954.477	- 468,75%
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	(89.533.139.982)	24.279.954.477	- 468,75%
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN			
Penyesuaian Pembukuan	(216.268.742.528)	-	- 100,00%
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN			
SALDO AWAL KAS	496.620.414.305	584.703.680.873	-15,06%
SALDO AKHIR KAS	(16.821.648.632.886)	(19.137.511.233.789)	-12,10%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(16.821.648.632.886)	(19.137.511.233.789)	-12,10%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LKPK-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
PENDAPATAN	26.649.038.836.568	27.010.727.123.562	-1,34%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	6.441.977.700.705	5.881.992.771.872	9,52%
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	3.984.474.094.027	3.856.541.403.490	3,32%
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	1.555.445.468.570	842.163.237.715	84,70%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	291.643.600.453	260.280.433.621	12,05%
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	610.414.537.655	923.007.697.045	-33,87%
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	20.135.624.146.686	21.034.161.709.753	-4,27%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	18.572.025.441.242	19.085.280.468.751	-2,69%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	1.563.598.705.444	1.948.881.241.002	-19,77%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	71.436.989.177	94.572.641.937	-24,46%
Pendapatan Hibah - LRA	3.460.760.507	34.744.355.636	-90,04%
Pendapatan Lainnya - LRA	67.976.228.670	59.828.286.301	13,62%
BELANJA	26.049.956.245.052	27.315.519.013.048	-4,63%
BELANJA OPERASI	19.577.851.119.517	19.596.751.059.738	-0,10%
Belanja Pegawai	10.759.774.238.181	9.828.604.040.030	9,47%
Belanja Barang dan Jasa	8.035.731.438.022	8.108.315.457.321	-0,90%
Belanja Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
Belanja Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
Belanja Hibah	751.007.068.359	1.606.015.104.776	-53,24%
Belanja Bantuan Sosial	17.590.895.469	28.683.910.863	-38,67%
BELANJA MODAL	3.780.667.201.666	4.650.195.163.929	-18,70%
Belanja Modal Tanah	11.646.878.336	13.532.146.500	-13,93%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.495.298.127	776.940.754.351	-18,46%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.017.347.703.137	1.245.727.475.426	-18,33%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.826.827.799.143	2.468.064.295.968	-25,98%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	174.007.245.506	138.485.129.188	25,65%
Belanja Modal Aset Lainnya	5.648.060.395	7.445.362.496	-24,14%
Belanja Modal BLUD	111.694.217.022	-	100,00%
BELANJA TAK TERDUGA	33.330.606.274	13.977.908.786	138,45%
TRANSFER	2.658.107.317.596	3.054.594.880.596	-12,98%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	88.409.478.674	72.366.915.553	22,17%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	80.866.638.118	65.946.246.920	22,63%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.542.840.556	6.420.668.633	17,48%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.569.697.838.922	2.982.227.965.043	-13,83%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	826.719.906.830	481.459.033.175	71,71%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.742.977.932.092	2.500.768.931.868	-30,30%
SURPLUS/DEFISIT LRA	599.082.591.516	(304.791.889.486)	-296,55%
PEMBIAYAAN	1.054.193.737.022	1.474.722.724.945	-28,52%
Penerimaan Pembiayaan	1.339.137.974.062	1.865.066.961.985	-28,20%
Pengeluaran Pembiayaan	284.944.237.040	390.344.237.040	-27,00%
SISA LEBIH/KURANG ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	1.653.276.328.538	1.169.930.835.459	41,31%



NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ASET	67.561.379.065.289	66.012.869.473.619	2,35%
Aset Lancar	3.182.682.195.955	2.706.709.404.368	17,58%
Kas dan Setara Kas	1.587.676.906.682	1.180.392.342.777	34,50%
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Piutang Pendapatan	1.055.830.944.072	1.054.948.740.158	0,08%
Piutang Lainnya	16.144.838.919	10.673.895.802	51,26%
Penyisihan Piutang	(425.084.312.119)	(362.134.170.978)	17,38%
Beban Dibayar Dimuka	6.830.766.366	4.452.247.512	53,42%
Persediaan	941.283.052.036	818.376.349.097	15,02%
Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-
Investasi Jangka Panjang	4.515.911.259.057	4.264.306.591.487	5,90%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	61.871.413	61.871.413	0,00%
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
Aset Tetap	56.188.282.035.226	55.285.866.470.439	1,63%
Tanah	18.474.547.591.887	17.909.544.451.900	3,15%
Peralatan dan Mesin	11.806.967.190.042	11.139.759.236.061	5,99%
Gedung dan Bangunan	24.280.864.808.146	23.063.528.388.602	5,28%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.613.802.324.253	40.578.068.583.928	5,02%
Aset Tetap Lainnya	1.706.982.321.649	1.602.905.493.505	6,49%
Konstruksi dalam Pengerjaan	809.484.151.938	826.242.153.682	-2,03%
Akumulasi Penyusutan	(43.504.366.352.689)	(39.834.181.837.239)	9,21%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	100,00%
Aset Lainnya	3.674.503.575.051	3.728.518.107.023	-1,45%
Tagihan Jangka Panjang	9.582.531.665	5.462.211.564	75,43%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	746.575.247.653	728.246.121.768	2,52%
Aset Tidak Berwujud	35.770.036.681	42.524.605.815	-15,88%
Aset Lain-lain	2.882.575.759.052	2.952.285.167.876	-2,36%
KEWAJIBAN	1.281.533.554.873	1.659.394.925.303	-22,77%
Kewajiban Jangka Pendek	1.091.323.413.914	1.407.040.547.304	-22,44%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	599.636.211	518.107.784	15,74%
Utang Bunga	7.613.724.020	9.802.763.059	-22,33%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	62.144.237.040	62.144.237.040	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	82.541.312.878	81.835.354.696	0,86%
Utang Belanja	673.350.293.091	1.003.086.576.361	-32,87%
Utang Jangka Pendek Lainnya	265.074.210.673	249.653.508.364	6,18%
Kewajiban Jangka Panjang	190.210.140.959	252.354.377.999	-24,63%
Utang Dalam Negeri	190.210.140.959	252.354.377.999	-24,63%
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	0,00%
EKUITAS	66.279.845.510.416	64.353.474.548.316	2,99%



LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
PENDAPATAN - LO	26.613.410.226.455	25.209.937.595.914	5,57%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	6.500.400.869.945	6.106.743.742.478	6,45%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	4.044.638.459.599	3.919.114.863.698	3,20%
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.455.503.860.072	917.546.586.402	58,63%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	399.400.155.485	389.162.685.907	2,63%
Lain-lain PAD yang Sah - LO	600.858.394.790	880.919.606.472	-31,79%
PENDAPATAN TRANSFER - LO	18.905.772.061.167	18.565.162.880.953	1,83%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	18.609.226.256.957	18.416.845.619.099	1,04%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	36.804.095.000	140.326.341.000	-73,77%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	259.645.452.093	7.990.920.854	3149,26%
Bantuan Keuangan - LO	96.257.117	-	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	1.207.237.295.343	538.030.972.483	124,38%
Pendapatan Hibah - LO	1.139.261.066.673	478.202.686.182	138,24%
Pendapatan Lainnya - LO	67.976.228.670	59.828.286.301	13,62%
BEBAN	24.635.530.670.631	24.864.007.296.561	-0,92%
BEBAN OPERASI - LO	23.258.107.491.142	23.725.400.175.922	-1,97%
Beban Pegawai	10.692.645.673.123	9.875.597.188.366	8,27%
Beban Barang dan Jasa	7.926.181.441.555	8.264.698.973.100	-4,10%
Beban Bunga	10.093.937.097	20.584.710.225	-50,96%
Beban Subsidi	2.104.177.825	2.190.015.581	-3,92%
Beban Hibah	785.416.125.371	1.614.861.436.614	-51,36%
Beban Bantuan Sosial	17.590.895.469	29.775.747.790	-40,92%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.568.770.748.655	3.661.038.069.879	-2,52%
Beban Penyisihan Piutang	57.206.447.020	63.533.579.836	-9,96%
Beban Lain-lain	198.098.045.026	193.120.454.532	2,58%
BEBAN TRANSFER	1.377.423.179.488	1.138.607.120.639	20,97%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	712.068.448.369	93.424.722.400	662,18%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	5.951.885.098	-100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	37.449.114.634	-	100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	627.905.616.485	1.039.230.513.141	-39,58%
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	0,00%
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.977.879.555.824	345.930.299.353	471,76%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(23.923.592.440)	(173.967.630.275)	-86,25%
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(11.085.419.843)	(4.790.665.603)	131,40%
SURPLUS/DEFISIT - LO	1.942.870.543.540	167.172.003.475	1062,20%



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
EKUITAS AWAL	64.353.474.548.317	64.634.340.725.139	-0,43%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	1.942.870.543.540	167.172.003.475	1062,20%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(16.499.581.442)	(448.038.180.297)	-96,32%
Koreksi Nilai Persediaan (BAS Level 4)	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	10.168.145	(179.347.914.460)	-100,01%
Selisih Revaluasi Aset Tetap	13.521.622.880	(326.186.759.311)	-104,15%
Koreksi Lainnya	(30.031.372.467)	57.496.493.473	-152,23%
EKUITAS AKHIR	66.279.845.510.415	64.353.474.548.317	2,99%



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah	(3.642.674.449.496)	(3.252.844.522.907)	11,98%
Penerimaan Retribusi Daerah	(1.275.438.636.073)	-	-100,00%
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(276.258.385.369)	(242.972.523.903)	13,70%
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(610.414.537.655)	(785.821.724.986)	-22,32%
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(730.665.562.540)	(354.545.101.390)	106,09%
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(648.054.920.802)	-	-100,00%
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(12.962.676.011.391)	(5.019.978.538.827)	158,22%
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(4.194.912.910.614)	(1.825.381.669.047)	129,81%
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-	0,00%
Penerimaan Hibah	(2.959.386.170)	(34.744.355.636)	-91,48%
Penerimaan Lainnya	(67.976.228.670)	(59.828.286.301)	13,62%
Jumlah Arus Kas Masuk	(24.412.031.028.779)	(11.576.116.722.998)	110,88%
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	10.759.774.238.181	6.897.090.100.538	56,00%
Pembayaran Barang	6.816.981.484.648	6.746.376.861.596	1,05%
Pembayaran Bunga	12.099.794.486	11.052.613.833	9,47%
Pembayaran Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
Pembayaran Beban Hibah	751.007.068.359	1.348.490.496.983	-44,31%
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	17.590.895.469	-	100,00%
Pembayaran Tak terduga	33.330.606.274	13.977.908.786	138,45%
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	80.866.638.118	65.946.246.920	22,63%
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/Kota	7.542.840.556	6.420.668.633	17,48%
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	7.542.840.556	6.420.668.633	17,48%
Jumlah Arus Kas Keluar	18.488.384.091.646	15.097.965.581.503	22,46%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(42.900.415.120.424)	(26.674.082.304.501)	60,83%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan	(7.147.693.104)	(37.422.728.605)	-80,90%
Jumlah Arus Kas Masuk	(7.147.693.104)	(37.422.728.605)	-80,90%
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
Perolehan Tanah	897.921.000	-	100,00%
Perolehan Peralatan dan Mesin	633.495.298.127	433.901.610.964	46,00%
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.015.854.069.537	1.001.365.684.311	1,45%
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.705.837.679.542	2.269.902.342.179	-24,85%
Perolehan Aset Tetap Lainnya	174.007.245.506	88.784.870.324	95,99%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
Jumlah Arus Kas Keluar	3.606.292.213.712	3.868.154.507.778	-6,77%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.613.439.906.816)	(3.905.577.236.383)	-7,48%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-	0,00%
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	(134.773.910.000)	(96.600.000.000)	39,52%
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	(134.773.910.000)	(96.600.000.000)	39,52%
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	34.366.248.672	-100,00%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	-	232.000.000.000	-100,00%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	146.600.000.000	22.000.000.000	566,36%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	62.144.237.040	27.777.988.368	123,72%
Jumlah Arus Kas Keluar	208.744.237.040	316.144.237.040	-33,97%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(343.518.147.040)	(412.744.237.040)	-16,77%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(46.857.373.174.281)	(30.992.403.777.924)	51,19%
SALDO AKHIR KAS	(46.857.373.174.281)	(29.093.169.238.072)	61,06%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LSKPU-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Pendapatan	19.460.278.924.137	31.008.531.170.902	-37,24%
11 Pajak	15.614.456.267.245	15.642.661.243.531	-0,18%
12 Kontribusi Sosial	182.607.446.481	11.934.511.589.287	-98,47%
13 Hibah	3.663.215.210.411	3.431.358.338.083	6,76%
14 Pendapatan Lainnya	29.782.766.516.771	42.704.900.060.067	-30,26%
2 Beban	14.891.481.739.673	14.028.128.229.776	6,15%
21 Kompensasi Pegawai	10.677.645.631.544	12.028.162.026.003	-11,23%
22 Penggunaan Barang dan Jasa	-	-	0,00%
23 Konsumsi Aset Tetap	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
24 Bunga	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
25 Subsidi	2.871.249.341.289	15.075.666.945.858	-80,95%
26 Hibah	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
27 Manfaat Sosial	1.293.581.987.309	1.505.158.665.719	-14,06%
28 Beban Lainnya	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	-11,75%
GOB Saldo Operasi Bruto (Gross Operating Balance) (1-2+23+NOBz)	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	-11,75%
NOB Saldo Operasi Neto (Net Operating Balance) (1-2+NOBz)	(10.389.762.793.253)	(11.696.368.889.165)	-11,17%
3 TRANSAKSI ASET DAN KEWAJIBAN NETO (NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES)	6.090.896.980.532	8.354.917.869.460	-27,10%
31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	4.936.522.277.057	6.886.245.796.019	-28,31%
311 Aset Tetap	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
312 Persediaan	-	-	0,00%
313 Barang Berharga	12.257.879.776	26.879.724.102	-54,40%
314 Aset Non Produksi	(16.480.659.773.785)	(20.051.286.758.625)	-17,81%
NLB Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (Net Lending / Borrowing) (1-2+NOBz-31)			
3 TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) (TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING))	(16.628.600.427.865)	(20.051.286.758.625)	-17,07%
32 Akuisisi Aset Keuangan (321+322+323)			
321 Dalam Negeri	(16.554.630.100.825)	(20.270.830.995.665)	-18,33%
322 Luar Negeri	(16.554.630.100.825)	(20.270.830.995.665)	-18,33%
33 Keterjadian Kewajiban Neto (331+332)	-	-	-
331 Dalam Negeri	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
332 Luar Negeri	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%



NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6	KEKAYAAN BERSIH	168.421.573.128.368	168.678.603.197.783	-0,15%
61	Aset Non Keuangan	165.459.210.637.645	164.815.050.073.869	0,39%
611	Aset Tetap	71.057.059.157.592	72.218.949.756.628	-1,61%
6111	Gedung dan Bangunan	61.080.978.192.713	62.339.126.400.380	-2,02%
6112	Peralatan dan Mesin	4.868.926.374.391	4.958.119.968.502	-1,80%
6113	Aset Tetap Lainnya	5.107.154.590.489	4.921.703.387.746	3,77%
612	Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	9,11%
6121	Persediaan untuk Tujuan Strategis	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6122	Persediaan Lainnya	7.042.099.409.780	6.453.862.097.388	9,11%
614	Aset Non Produksi	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
6141	Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
6144	Aset Non Produksi Tak Berwujud	-	-	0,00%
62	Aset Keuangan	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	0,79%
6202	Uang dan Deposito	2.515.694.109.250	2.588.004.202.304	-2,79%
6203	Surat Berharga selain Saham	61.871.413	61.871.413	0,00%
6204	Pinjaman	0	32.557.800	-
				100,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lainnya	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6208	Piutang Lainnya	2.462.958.567.390	2.568.074.240.279	-4,09%
621	Aset Keuangan Domestik	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	0,79%
6212	Uang dan Deposito	2.515.694.109.250	2.588.004.202.304	-2,79%
6213	Surat Berharga selain Saham	61.871.413	61.871.413	0,00%
6214	Pinjaman	0	32.557.800	-
				100,00%
6215	Saham dan Ekuitas Lainnya	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6218	Piutang Lainnya	2.462.958.567.390	2.568.074.240.279	-4,09%
622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-	-
6222	Uang dan Deposito	-	-	-
6225	Surat Berharga selain Saham	-	-	-
63	Kewajiban	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	17,55%
6303	Surat Berharga selain Saham	-	-	-
6304	Pinjaman	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6308	Utang Lainnya	6.279.847.066.975	5.242.365.852.917	19,79%
631	Kewajiban Domestik	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	17,55%
6314	Pinjaman	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6318	Utang Lainnya	6.279.847.066.975	5.242.365.852.917	19,79%
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-	-
6323	Surat Berharga selain Saham	-	-	-
6324	Pinjaman	-	-	-



LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
C1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	19.460.278.924.137	56.309.886.199.612	-65,44%
C11 Pajak	15.614.456.267.245	7.930.196.792.551	96,90%
C13 Hibah	182.607.446.481	11.934.511.589.287	-98,47%
C14 Penerimaan Lainnya	3.663.215.210.411	36.445.177.817.774	-89,95%
C2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	29.782.766.516.771	38.894.497.914.751	-23,43%
C21 Kompensasi Pegawai	14.891.481.739.673	14.268.762.039.719	4,36%
C22 Pembelian Barang dan Jasa	10.677.645.631.544	12.331.169.797.445	100%
C23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
C24 Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
C25 Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
C26 Hibah	2.871.249.341.289	9.683.246.110.421	946,82%
C27 Manfaat Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
C28 Pembayaran Lainnya	1.293.581.987.309	2.543.535.774.456	-49,14%
CIO Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) (C1-C2)	(10.322.487.592.633)	17.415.388.284.861	-159,27%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAs)			
C31A Pembelian Aset Non Keuangan	8.188.084.767.130	6.917.364.714.359	18,37%
C311A Aset Tetap	4.955.776.833.516	6.890.484.990.257	-28,08%
C312A Persediaan untuk Tujuan Strategis	3.220.050.053.838	-	100,00%
C314A Aset Non Produksi	12.257.879.776	26.879.724.102	-54,40%
C31B Penjualan Aset Non Keuangan	2.097.187.786.598	11.684.556.733	17848,37%
C311B Aset Tetap	19.254.556.459	11.684.556.733	64,79%
C312B Persediaan untuk Tujuan Strategis	2.077.933.230.139	-	100,00%
C31 Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B)	6.090.896.980.532	6.905.680.157.625	-11,80%
CSD Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31)	(16.413.384.573.165)	10.509.708.127.235	-256,17%
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
C32x Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
C321x Domestik	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
C322x Luar Negeri	-	-	-
C33 Keterjadian Kewajiban Neto	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
C331 Domestik	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
C332 Luar Negeri	-	-	-
NFB Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	150.170.327.040	293.744.237.040	-48,88%
NCB Perubahan Kas (CSD+NFB)	(16.263.214.246.125)	10.803.452.364.275	-250,54%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LSKPP-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1	Revenue	12.970.176.468.831	13.237.894.795.412	-2,02%
11	Taxes	11.629.982.173.218	11.786.119.840.041	-1,32%
12	Social Contributions	-	-	-
13	Grants	14.999.602.608	17.999.996.800	-16,67%
14	Other Revenue	1.325.194.693.005	1.433.774.958.571	-7,57%
2	Expense	27.663.857.230.902	29.273.110.810.470	-5,50%
21	Compensation of Employees	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
22	Use of Goods and Services	2.614.986.613.201	4.192.667.338.752	-37,63%
23	Consumption of Fixed Capital	-	0	-
24	Interests	-	-	-
25	Subsidies	-	-	-
26	Grants	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
27	Social Benefits	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
28	Other Expense	193.801.640.000	202.985.120.254	-4,52%
GOB	Gross Operating Balance (1-2+23+NOBz)	-14.693.680.762.071	-16.035.216.015.058	-8,37%
NOB	Net Operating Balance (1-2+NOBz)	-14.693.680.762.071	-16.035.216.015.058	-8,37%
3	NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	-14.693.680.762.071	-16.035.216.015.058	-8,37%
31	Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	2.318.786.402.610	3.711.278.854.081	-37,52%
311	Fixed Assets	1.176.058.577.471	2.256.138.927.140	-47,87%
312	Inventories	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
313	Valuables	-	-	-
314	Nonproduced Assets	611.001.440	13.347.577.602	-95,42%
NLB	Net Lending / Borrowing (1-2+NOBz-31)	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
3	TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
32	Net Acquisition of Financial Assets (321+322+323)	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
321	Domestic Debtors	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
322	External Debtors	-	-	-
33	Net Incurrence of Liabilities (331+332)	-	-	-
331	Domestic Creditors	-	-	-
332	External Creditors	-	-	-



**NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 NET WORTH	102.141.727.617.952	104.325.128.649.469	-2,09%
61 Nonfinancial Assets	105.411.299.754.650	105.715.997.480.641	-0,29%
611 Fixed Assets	30.424.978.918.520	31.847.817.964.397	-4,47%
6111 Building and structures	26.815.597.274.841	28.484.757.828.053	-5,86%
6112 Machinery and equipment	3.127.555.170.572	3.039.072.015.794	2,91%
6113 Other fixed assets	481.826.473.107	323.988.120.550	48,72%
6114 Weapon systems	-	-	-
612 Inventories	6.100.891.837.144	5.635.596.855.691	8,26%
6121 Strategic stocks	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6122 Other inventories	6.100.816.357.744	5.635.485.748.291	8,26%
614 Nonproduced Assets	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
6141 Land	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
6142 Mineral and energy resources	-	-	-
6143 Other naturally occurring assets	-	-	-
6144 Intangible nonproduced assets	-	-	-
62 Financial Assets	2.180.023.868.590	2.662.838.090.390	-18,13%
6202 Currency and deposits	928.017.202.568	1.380.142.959.226	-32,76%
6203 Debt securities	-	-	-
6204 Loans	-	32.557.800	-100,00%
6205 Equity and investment fund	-	-	-
6208 Other accounts receivable	1.252.006.666.022	1.282.662.573.364	-2,39%
621 Domestic	2.180.023.868.590	2.662.838.090.390	-18,13%
6212 Currency and deposits	928.017.202.568	1.380.142.959.226	-32,76%
6213 Debt securities	-	-	-
6214 Loans	-	32.557.800	-100,00%
6215 Equity and investment fund	-	-	-
6218 Other accounts receivable	1.252.006.666.022	1.282.662.573.364	-2,39%
622 External Creditors	-	-	-
6222 Currency and deposits	-	-	-
6225 Equity and investment fund	-	-	-
63 Liabilities	5.449.596.005.288	4.053.706.921.562	34,43%
6303 Debt securities	102.141.727.617.952	104.325.128.649.469	-2,09%
6304 Loans	105.411.299.754.650	105.715.997.480.641	-0,29%
6308 Other accounts payable	30.424.978.918.520	31.847.817.964.397	-4,47%
631 Domestic	26.815.597.274.841	28.484.757.828.053	-5,86%
6313 Debt securities	3.127.555.170.572	3.039.072.015.794	2,91%
6314 Loans	481.826.473.107	323.988.120.550	48,72%
6318 Other accounts payable	-	-	-
632 External Creditors	6.100.891.837.144	5.635.596.855.691	8,26%
6323 Debt securities	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6324 Loans	6.100.816.357.744	5.635.485.748.291	8,26%
Memorandum items:	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
6M2 Net Financial Worth (62-63)	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%



LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
C1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	12.970.176.468.831	13.237.894.795.412	-2,02%
C11 Pajak	11.629.982.173.218	11.786.119.840.041	-1,32%
C13 Hibah	14.999.602.608	17.999.996.800	-16,67%
C14 Penerimaan Lainnya	1.325.194.693.005	1.433.774.958.571	-7,57%
C2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	27.663.857.230.902	29.273.110.810.470	-5,50%
C21 Kompensasi Pegawai	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
C22 Pembelian Barang dan Jasa	2.614.986.613.201	4.192.667.338.752	-37,63%
C23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	-
C24 Bunga	-	-	-
C25 Subsidi	-	-	-
C26 Hibah	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
C27 Manfaat Sosial	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
C28 Pembayaran Lainnya	193.801.640.000	202.985.120.254	-4,52%
CIO Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) (C1-C2)	(14.693.680.762.071)	(16.035.216.015.058)	-8,37%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAS)			
C31A Pembelian Aset Non Keuangan	2.318.786.402.610	3.711.278.854.081	-37,52%
C311A Aset Tetap	1.176.058.577.471	2.256.138.927.140	-47,87%
C312A Persediaan untuk Tujuan Strategis	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
C313A Barang Berharga	-	-	-
C314A Aset Non Produksi	611.001.440	13.347.577.602	-95,42%
C31B Penjualan Aset Non Keuangan	-	-	-
C311B Aset Tetap	-	-	-
C312B Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
C313B Barang Berharga	-	-	-
C314B Aset Non Produksi	-	-	-
C31 Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B)	2.323.054.240.309	3.711.278.854.081	-37,41%
CSD Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31)	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
C32x Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
C321x Domestik	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
C322x Luar Negeri	-	-	-
C33 Keterjadian Kewajiban Neto	-	-	-
C331 Domestik	-	-	-
C332 Luar Negeri	-	-	-
NFB Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	17.012.467.164.681	19.746.494.869.139	-13,85%
NCB Perubahan Kas (CSD+NFB)	-	-	-



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LSKPK-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Revenue	27.582.799.005.831	28.199.723.397.994	-2,19%
11 Taxes	3.984.474.094.027	3.856.541.403.490	3,32%
12 Social Contributions	-	-	-
13 Grants	21.191.219.749.705	22.285.770.328.690	-4,91%
14 Other Revenue	2.407.105.162.099	2.057.411.665.813	17,00%
2 Expense	23.211.605.836.393	23.860.876.272.101	-2,72%
21 Compesation of Employees	10.280.081.022.708	9.793.453.720.502	4,97%
22 Use of Goods and Services	8.062.659.018.343	7.835.494.687.251	2,90%
23 Consumption of Fixed Capital	-	-	#DIV/0!
24 Interests	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
25 Subsidies	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
26 Grants	3.737.747.073.078	4.875.937.861.272	-23,34%
27 Social Benefits	17.590.895.469	28.683.910.863	-38,67%
28 Other Expense	1.099.780.347.310	1.302.173.545.464	-15,54%
GOB Gross Operating Balance (1-2+23+NOBz)	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
NOB Net Operating Balance (1-2+NOBz)	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
3 NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
31 Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	3.772.110.577.922	4.643.639.015.380	-18,77%
311 Fixed Assets	3.760.463.699.586	4.630.106.868.880	-18,78%
312 Inventories	-	-	-
313 Valuables	-	-	-
314 Nonproduced Assets	11.646.878.336	13.532.146.500	-13,93%
NLB Net Lending / Borrowing (1-2+NOBz-31)	531.807.390.896	(304.791.889.487)	-274,48%
3 TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	531.807.390.896	(304.791.889.486)	-274,48%
32 Net Acquisition of Financial Assets (321+322+323)	457.837.063.856	(524.336.126.526)	-187,32%
321 Domestic Debtors	457.837.063.856	(524.336.126.526)	-187,32%
322 External Debtors	-	-	-
33 Net Incurrence of Liabilities (331+332)	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
331 Domestic Creditors	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
332 External Creditors	-	-	-



**NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 NET WORTH	66.279.845.510.416	64.353.474.548.314	2,99%
61 Nonfinancial Assets	60.047.910.882.995	40.371.131.792.231	48,74%
611 Fixed Assets	40.632.080.239.072	33.854.368.572.327	20,02%
6111 Building and structures	34.265.380.917.872	0	100,00%
6112 Machinery and equipment	1.741.371.203.818	1.919.047.952.708	-9,26%
6113 Other fixed assets	4.625.328.117.382	4.597.715.267.196	0,60%
6114 Weapon systems	-	0	-
612 Inventories	941.283.052.036	818.376.349.097	15,02%
6121 Strategic stocks	-	-	-
6122 Other inventories	941.283.052.036	818.376.349.097	15,02%
614 Nonproduced Assets	18.474.547.591.887	17.909.544.451.900	3,15%
6141 Land	18.474.547.591.887	17.909.544.451.900	3,15%
6142 Mineral and energy resources	-	-	-
6143 Other naturally occurring assets	-	-	-
6144 Intangible nonproduced assets	-	-	-
62 Financial Assets	7.515.149.982.294	6.913.816.880.390	8,70%
6202 Currency and deposits	1.587.676.906.682	1.207.861.243.078	31,45%
6203 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6204 Loans	-	0	-
6205 Equity and investment fund	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6208 Other accounts receivable	1.411.561.816.555	1.441.649.045.824	-2,09%
621 Domestic	7.515.149.982.294	6.913.816.880.390	8,70%
6212 Currency and deposits	1.587.676.906.682	1.207.861.243.078	31,45%
6213 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6214 Loans	-	0	-
6215 Equity and investment fund	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6218 Other accounts receivable	1.411.561.816.555	1.441.649.045.824	-2,09%
622 External Creditors	-	-	-
6222 Currency and deposits	-	-	-
6225 Equity and investment fund	-	-	-
63 Liabilities	1.283.215.354.873	1.659.394.925.303	-22,67%
6303 Debt securities	-	-	-
6304 Loans	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6308 Other accounts payable	1.030.860.976.874	1.344.896.310.264	-23,35%
631 Domestic	1.283.215.354.873	1.659.394.925.303	-22,67%
6313 Debt securities	-	-	-
6314 Loans	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6318 Other accounts payable	1.030.860.976.874	1.344.896.310.264	-23,35%
632 External Creditors	-	-	-
6323 Debt securities	-	-	-
6324 Loans	-	-	-
Memorandum items:	-	-	-
6M2 Net Financial Worth (62-63)	6.231.934.627.421	5.254.421.955.087	18,60%

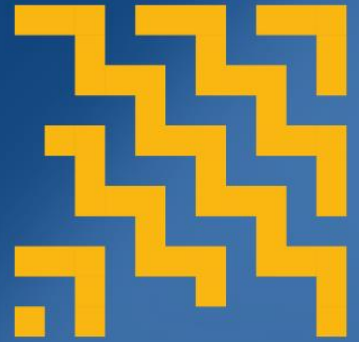


**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
C1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	27.582.799.005.831	28.199.723.397.994	-2,19%
C11 Pajak	3.984.474.094.027	3.856.541.403.490	3,32%
C13 Hibah	21.191.219.749.705	22.285.770.328.690	-4,91%
C14 Penerimaan Lainnya	2.407.105.162.099	2.057.411.665.813	17,00%
C2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	23.211.605.836.393	23.860.876.272.101	-2,72%
C21 Kompensasi Pegawai	10.280.081.022.708	9.793.453.720.502	4,97%
C22 Pembelian Barang dan Jasa	8.062.659.018.343	7.835.494.687.251	2,90%
C23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	-
C24 Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
C25 Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
C26 Hibah	3.737.747.073.078	4.875.937.861.272	-23,34%
C27 Manfaat Sosial	17.590.895.469	28.683.910.863	-38,67%
C28 Pembayaran Lainnya	1.099.780.347.310	1.302.173.545.464	-15,54%
CIO Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) (C1-C2)	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAS)			
C31A Pembelian Aset Non Keuangan			
C311A Aset Tetap	3.772.110.577.922	4.643.639.015.380	-18,77%
C312A Persediaan untuk Tujuan Strategis	3.760.463.699.586	4.630.106.868.880	-18,78%
C313A Barang Berharga	-	-	-
C314A Aset Non Produksi	-	-	-
C31B Penjualan Aset Non Keuangan	11.646.878.336	13.532.146.500	-13,93%
C311B Aset Tetap	-	-	-
C312B Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
C313B Barang Berharga	-	-	-
C314B Aset Non Produksi	-	-	-
C31 Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B)	3.772.110.577.922	4.643.639.015.380	-18,77%
CSD Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31)	599.082.591.516	-304.791.889.487	-296,55%
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
C32x Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas	457.837.063.856	-524.336.126.526	-187,32%
C321x Domestik	457.837.063.856	-524.336.126.526	-187,32%
C322x Luar Negeri	-	-	-
C33 Keterjadian Kewajiban Neto	-73.970.327.040	-219.544.237.040	-66,31%
C331 Domestik	-73.970.327.040	-219.544.237.040	-66,31%
C332 Luar Negeri	-	-	-
NFB Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	-531.807.390.896	304.791.889.486	-274,48%
NCB Perubahan Kas (CSD+NFB)	-	-	-





*new DJPb
in Town*

Follow us:

 Kanwil DJPb Kalbar

 djpbkalbar

 DJPb_Kalbar

New DJPB
in Town



METADATA

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



METADATA

INFORMASI DASAR

1. Nama Data : Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah Tahun 2025 *Unaudited*
2. Penyelenggara : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Statistik
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat : Jl. KS. Tubun No. 36 Pontianak
4. Nomor Telepon : (0561) 733466, 733444
5. Nomor Faksimili : (0561) 732029
6. Email : aklap016@gmail.com

DEFINISI DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts – SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

LSKPU-TW merupakan konsolidasi dari kertas kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKPU-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan Umum
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan Umum
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas
4. Metadata.

CAKUPAN DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik



- Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas merupakan laporan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan klasifikasi yang sama dengan Laporan Operasional. Informasi terkait sumber dan penggunaan kas digunakan untuk menilai likuiditas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menunjukkan total kas yang dihasilkan dan digunakan untuk kegiatan operasional tahun berjalan, transaksi aset non keuangan, transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

PERIODE PUBLIKASI

Triwulanan, Semesteran, Tahunan

WAKTU PUBLIKASI

Data triwulan dan semester diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data.

Data tahunan *preliminary* diterbitkan tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

Data tahunan *unaudited* diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya.

Data tahunan final (*audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

STATUS DATA

1. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (**) diberikan apabila:
 - a. LKPK-TW dan LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang disusun menggunakan angka estimasi.
 - b. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan *Preliminary*.
2. Status Angka Sementara dengan tanda satu bintang (*) diberikan apabila:
 - a. LKPK-TW dan LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang telah dilakukan updating
 - b. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan dengan data *Unaudited*
 - c. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan yang belum seluruhnya disusun dengan data *Audited*



3. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan berstatus angka tetap (tanpa tanda bintang) apabila telah seluruhnya disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit.

SUMBER DATA

1. Kertas kerja LKPP-TW diunduh dari Aplikasi SIKRI-MP.
2. Kertas kerja LKPKD-TW meliputi LRA LKPKD dan LRA LKPKD Per Urusan disusun menggunakan data yang diperoleh dari 15 Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kertas kerja LO LKPKD, Neraca LKPKD, dan LPE LKPKD disusun menggunakan data yang diperoleh dari 15 entitas Pemerintah Daerah.
4. Penyusunan LO LSKPP-TW, LO LSKPKD-TW, dan LO LSKP-TW menggunakan kertas kerja yang diunduh dari Aplikasi SIKRI MP, yaitu *Table 1 Revenue*, *Table 2 Expense*, dan *Table 3 Transactions in Assets and Liabilities* (dengan penyesuaian berupa penghapusan akun 3212 *Currency and Deposit*).
5. Penyusunan Neraca LSKPP-TW, Neraca LSKPKD-TW, dan Neraca LSKP-TW menggunakan kertas kerja yang diunduh dari Aplikasi SIKRI MP, yaitu *Table 6 Balance Sheet*.

METODOLOGI

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPKD-TW). LSKPKD-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPKD-TW. Sedangkan kertas kerja LSKPP-TW dihasilkan melalui Aplikasi SIKRI Modul MP. Data LKPKD-TW dimasukkan ke dalam Aplikasi SIKRI Modul MP dan kemudian akan menghasilkan LKPK-TW dan LSKP-TW.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data Tahun 2025 *Unaudited* yang telah terekonsiliasi dari 532 (lima ratus tiga puluh dua) UAKPA dari 44 (empat puluh empat) Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 *Unaudited*, proses konsolidasi dilakukan terhadap 1 LKPD provinsi, 12 LKPD kabupaten, dan 2 LKPD kota. Seluruhnya merupakan data LKPD Tahun 2025 *Unaudited* yang diperoleh dari masing-



masing Pemerintah Daerah melalui saluran komunikasi e-mail aklap016@gmail.com. Komponen LKPD yang diperoleh tersebut antara lain LRA, LRA Per Urusan LO, LPE, dan Neraca Tahun 2025 *Unaudited*.

3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. KS. Tubun No. 36 Pontianak. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.





New DJPB
Tahun

ANALISIS RASIO DAN ANALISIS INDIKATOR FISKAL

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

JALAN KS TUBUN NO. 36, PONTIANAK 78121; TELEPON (0561) 733444, 733445; FAKSIMILE (0561) 732029;
SUREL KANWIL16.DJPBKALBAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/KALBAR

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025 *UNAUDITED***

A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	<p>Rasio Solvabilitas Jangka Pendek mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun. Analisis terhadap rasio solvabilitas jangka pendek pada LKPK dan LKPDK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024 <i>Unaudited</i> dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>a. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 363,22% yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp11.060.726.421.582,00 dibagi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.045.164.577.476,00. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa secara konsolidasian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Aset Lancar yang 3 kali lebih besar dari jumlah Kewajiban Jangka Pendeknya.</p> <p>b. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPDK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 291,64% yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp3.182.682.195.955,00 dibagi dengan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.091.323.413.914,00.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Jumlah Aset Lancar yang 2 kali lebih besar dari Kewajiban Jangka Pendek tersebut menunjukkan Pemerintah Kalimantan Barat secara konsolidasian pada tingkat Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya.</p> <p>Jika dilihat lebih rinci, Solvabilitas Jangka Pendek tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sintang dengan rasio sebesar 1789,23%. Sementara itu, Solvabilitas Jangka Pendek terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sambas dengan rasio sebesar 36,91%.</p>
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	<p>Rasio Solvabilitas Jangka Panjang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun. Hasil analisis terhadap Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK dan LKPKD Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 5.008,48% yang berasal dari Total Aset sebesar Rp174.953.774.573.342,00 dibagi Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.493.152.437.824,00. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa secara konsolidasian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjangnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Total Aset yang 50 kali lebih besar dari jumlah Kewajiban Jangka Panjangnya. b. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPKD Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 35.519,34% yang berasal dari Total Aset sebesar Rp67.561.379.065.289,00 dibagi dengan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp190.210.140.959,00.



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Jumlah Total Aset yang 355 kali lebih besar dari Kewajiban Jangka Panjang tersebut menunjukkan Pemerintah Kalimantan Barat secara konsolidasian pada tingkat Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjangnya.</p> <p>Jika dilihat lebih rinci, Solvabilitas Jangka Panjang tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Singkawang dengan rasio sebesar 2.943,40%. Sementara itu, Solvabilitas Jangka Panjang terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan rasio sebesar 2.319,18%.</p>

2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah.</p> <p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Rasio Kemandirian = (Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan termasuk Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi) x 100%</i></p> <p>Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.</p> <p>Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS													
		Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah												
		>50,00	Sangat Baik												
		40,01 – 50,00	Baik												
		30,01 – 40,00	Cukup												
		20,01 – 30,00	Sedang												
		10,01 – 20,00	Kurang												
		0,00 – 10,00	Sangat Kurang												
		<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada lingkup Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 7,64% sampai 51,06%. Rasio Kemandirian tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 51,06% dan terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 7,64%.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tingkat wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> menunjukkan kondisi kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:</p>													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kemandirian Keuangan Daerah</th> <th>Pemda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>1. Pemprov Kalbar</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>1. Pemkot Pontianak</td> </tr> <tr> <td>Sedang</td> <td>1. Pemkot Singkawang</td> </tr> <tr> <td>Kurang</td> <td>1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Sanggau 3. Kabupaten Sambas 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kabupaten Ketapang 6. Kabupaten Sintang 7. Kabupaten Bengkayang</td> </tr> <tr> <td>Sangat Kurang</td> <td>1. Kabupaten Sekadau 2. Kabupaten Kayong Utara 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Melawi 5. Kabupaten Kapuas Hulu</td> </tr> </tbody> </table>	Kemandirian Keuangan Daerah	Pemda	Sangat Baik	1. Pemprov Kalbar	Cukup	1. Pemkot Pontianak	Sedang	1. Pemkot Singkawang	Kurang	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Sanggau 3. Kabupaten Sambas 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kabupaten Ketapang 6. Kabupaten Sintang 7. Kabupaten Bengkayang	Sangat Kurang	1. Kabupaten Sekadau 2. Kabupaten Kayong Utara 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Melawi 5. Kabupaten Kapuas Hulu	
Kemandirian Keuangan Daerah	Pemda														
Sangat Baik	1. Pemprov Kalbar														
Cukup	1. Pemkot Pontianak														
Sedang	1. Pemkot Singkawang														
Kurang	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Sanggau 3. Kabupaten Sambas 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kabupaten Ketapang 6. Kabupaten Sintang 7. Kabupaten Bengkayang														
Sangat Kurang	1. Kabupaten Sekadau 2. Kabupaten Kayong Utara 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Melawi 5. Kabupaten Kapuas Hulu														
		<p>Data di atas menunjukkan bahwa 41,67% Pemda tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang “Sangat Kurang”. Hal tersebut berarti sebagian daerah di Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pihak eksternal, seperti Transfer dari Pemerintah Pusat, untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>													



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Selain itu, secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 17,07% atau termasuk kategori “Kurang” menunjukkan bahwa 82,93% dari total pendapatan daerah secara rata-rata masih berasal dari kontribusi pihak eksternal. Hal tersebut juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah dalam pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
2.	Rasio Solvabilitas Anggaran	<p>Rasio Solvabilitas Anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi rasio solvabilitas suatu daerah maka semakin baik pula kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan. Rasio solvabilitas anggaran diukur dengan formula berikut:</p> <p><i>Rasio = (Total Pendapatan LRA – DAK LRA) / (Total Belanja – Belanja Modal)</i></p> <p>Secara rata-rata, rasio solvabilitas anggaran pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar 100,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata Pemda lingkup Kalimantan Barat dapat dikatakan mampu menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran.</p> <p>Apabila dirinci, Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki rasio solvabilitas anggaran paling tinggi terdapat pada Pemkot Pontianak dengan rasio sebesar 126,07% dan terendah pada Pemkab Melawi dengan rasio sebesar 91,13%. Rasio solvabilitas anggaran di atas 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang dapat membiayai seluruh belanjanya. Sebaliknya, pemerintah daerah dengan rasio solvabilitas anggaran kurang dari 100% dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut belum dapat membiayai aktivitas belanjanya melalui pendapatan, sehingga pemerintah perlu</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		mencari sumber pendapatan lain, seperti melalui aktivitas pembiayaan.
3.	Rasio Solvabilitas Layanan	<p>Rasio solvabilitas layanan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio solvabilitas layanan diukur dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Rasio = Total Aset / Jumlah Penduduk</i></p> <p>Semakin tinggi rasio solvabilitas layanan menunjukkan semakin baik pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada publik.</p> <p>Rata-rata rasio solvabilitas layanan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp8.517.846,00 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki total aset yang lebih dari cukup untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, apabila dilihat secara rinci, Pemkot Pontianak memiliki rasio solvabilitas layanan tertinggi, yaitu sebesar Rp15.231.746,00 untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki rasio solvabilitas layanan terendah yaitu sebesar Rp4.010.913,00 untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu.</p>
4.	Rasio Solvabilitas Operasional	<p>Rasio solvabilitas operasional menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio solvabilitas operasional dihitung dengan formula:</p> <p><i>Rasio = (Total Pendapatan LO – DAK LO) / Beban Operasi LO</i></p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Semakin tinggi rasio solvabilitas operasional suatu daerah, semakin baik pula kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan.</p> <p>Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2025 <i>Unaudited</i> secara rata-rata memiliki rasio solvabilitas operasional sebesar 103,14%. Rasio tertinggi terdapat pada Pemkab Kubu Raya dengan rasio sebesar 127,04% dan terendah pada Pemkab Sekadau dengan rasio sebesar 89,38%. Rasio solvabilitas operasional di atas 100% menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah dapat menutupi seluruh beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rata-rata rasio solvabilitas operasional lebih dari 100% menunjukkan rata-rata pendapatan operasional pemerintah mampu menutupi seluruh beban operasional selama periode anggaran. Dengan demikian, secara rata-rata, rasio solvabilitas pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 103,14% menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah dapat memenuhi seluruh beban operasional pada satu periode anggaran.</p>
5.	Rasio Fleksibilitas Keuangan	<p>Rasio fleksibilitas keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Rasio fleksibilitas keuangan diukur menggunakan formula sebagai berikut:</p> $\text{Rasio} = \frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{DAK LO} - \text{Pembayaran Pokok Utang} - \text{Beban Operasional LO})}{(\text{Beban Operasional LO} + \text{Pembayaran Pokok Utang})}$ <p>Semakin tinggi rasio fleksibilitas keuangan maka semakin baik pula fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi kondisi peningkatan pendapatan atau utang.</p> <p>Rata-rata rasio fleksibilitas keuangan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,22% pada periode Tahun 2025 <i>Unaudited</i>. Hal tersebut menunjukkan secara</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>rata-rata pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki fleksibilitas keuangan yang kurang baik. Pemerintah dapat dikatakan kurang mampu mampu meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang.</p> <p>Rasio fleksibilitas keuangan tertinggi terdapat pada Pemkab Kubu Raya sebesar 27,04% dan terendah pada Pemkab Sambas sebesar -13,13%. Rasio fleksibilitas keuangan bernilai negatif pada Pemkab Melawi dan beberapa pemerintah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh jumlah Pendapatan-LO setelah dikurangi DAK-LO belum dapat menutupi pembayaran Beban Operasional-LO dan Pembayaran Pokok Utang pada periode bersangkutan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah bersangkutan dalam hal pengelolaan utang untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang serta menjalankan aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang.</p>



B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Keseimbangan Operasi Neto (<i>Net Operating Balance / NOB</i>)	<p>NOB merupakan perubahan pada saldo <i>Net Worth</i> (kekayaan bersih pemerintah) yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan. Saldo NOB diperoleh dari saldo Pendapatan GFS dikurang Beban GFS.</p> <p>Selama periode Tahun 2025 <i>Unaudited</i>, nilai NOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sebesar (Rp10.322.487.592.633,00) yang berasal dari NOB Pemerintah Pusat sebesar (Rp14.693.680.762.071,00), NOB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp943.562.771.641,00, dan NOB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.427.630.397.797,00.</p> <p>Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa kekayaan bersih pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> mengalami pertumbuhan negatif yang berasal dari Pendapatan GFS yang lebih kecil dari Beban GFS.</p>
2.	Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Gross Operating Balance / GOB</i>)	<p>GOB merupakan perubahan pada saldo <i>Net Worth</i> (kekayaan bersih pemerintah) yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan tanpa memperhitungkan konsumsi aset tetap (<i>consumption of fixed capital/CFC</i>). GOB diperoleh melalui formula sebagai berikut:</p> <p><i>Keseimbangan Operasi Bruto (Gross Operating Balance/GOB) = Pendapatan GFS – (Beban GFS – Konsumsi Aset Tetap)</i></p> <p>GOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp10.322.487.592.633,00) yang berasal dari GOB Pemerintah Pusat sebesar (Rp14.693.680.762.071,00), GOB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp943.562.771.641,00, dan GOB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.427.630.397.797,00.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>GOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sebesar (Rp10.322.487.592.633,00) mencerminkan kondisi operasional sektor pemerintah belum mampu memenuhi beban dari pendapatannya, karena jumlah Pendapatan GFS lebih kecil dari Beban GFS tanpa memperhitungkan beban konsumsi aset tetap periode bersangkutan.</p>
3.	<p>Peminjaman / Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing/NLB</i>)</p>	<p>NLB menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan ataupun diperoleh dari sektor ekonomi lain. Peminjaman/pinjaman neto sama dengan total kebutuhan pembiayaan. NLB diperoleh melalui formula berikut:</p> <p><i>Peminjaman/Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing/NLB) = Pendapatan GFS – (Beban GFS + Investasi neto aset nonkeuangan)</i></p> <p>Berdasarkan perhitungan, NLB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.480.659.773.785,00) yang berasal dari NLB Pemerintah Pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), NLB Pemerintah Provinsi sebesar Rp192.618.167.810,00, dan NLB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp339.189.223.086,00.</p> <p>Nilai NLB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan posisi <i>net borrowing</i> atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. Sementara itu, NLB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bernilai positif menunjukkan posisi <i>net lending</i> atau adanya kelebihan sumber daya keuangan.</p>
4.	<p>Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>)</p>	<p>Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>) menunjukkan selisih <i>revenue</i> dan <i>expense</i> yang telah dikurangi dengan <i>interest expense</i>. Keseimbangan Operasi Primer diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p><i>Keseimbangan Operasi Primer (Primary Operating Balance)</i> = <i>NOB + Beban Bunga</i></p> <p>Keseimbangan Operasi Primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp10.310.387.798.147,00), berasal dari Pemerintah Pusat sebesar (Rp14.693.680.762.071,00), Pemerintah Provinsi sebesar Rp943.562.771.641,00, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.439.730.192.283,00.</p> <p>NOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban bunga utang melalui pendapatan operasionalnya, sehingga memerlukan sumber pembiayaan lainnya.</p>
5.	Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>)	<p><i>Primary Balance</i> atau keseimbangan primer merupakan selisih <i>revenue</i> dan <i>expenditure</i> yang telah dikurangi dengan <i>interest expense</i>. <i>Primary balance</i> menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban <i>interest expense</i> tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru. <i>Primary balance</i> dapat diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Keseimbangan Primer (Primary Balance) = NLB + Beban Bunga</i></p> <p>Berdasarkan perhitungan, Keseimbangan Primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.401.284.778.679,00) yang berasal dari Keseimbangan Primer Pemerintah Pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), Keseimbangan Primer Pemerintah Provinsi sebesar Rp192.618.167.810,00, dan Keseimbangan Primer Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp418.564.218.192,00</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Keseimbangan primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban bunga utang tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru, sehingga masih memerlukan penambahan kewajiban baru untuk memenuhi bunga utangnya. Sementara itu, keseimbangan primer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kalimantan Barat yang bernilai positif menunjukkan bahwa pemerintah mampu memenuhi kewajiban bunga utang tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru.</p>

2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>)	<p>Pajak langsung (<i>Direct Taxes</i>) merupakan penerimaan pajak yang perhitungannya mempertimbangkan situasi/keadaan/kemampuan masing-masing wajib pajaknya, misalnya pajak penghasilan perorangan dan badan usaha. Pajak langsung pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Pajak Langsung (Direct Taxes) = Taxes on Income, profits, and capital gain + recurrent taxes on immovable property + recurrent taxes on net wealth + other recurrent taxes on property</i></p> <p>Pajak Langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp4.317.185.269.875,00 yang berasal dari Pajak Langsung Pemerintah Pusat sebesar Rp3.908.522.125.059,00 dan Pajak Langsung pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp408.663.144.816,00. Kontribusi Pajak Langsung yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dapat disebabkan oleh penerimaan pajak penghasilan yang merupakan pajak pusat.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
2.	Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>)	<p>Pajak tidak langsung (<i>Indirect Taxes</i>) merupakan pajak yang perhitungannya tidak mempertimbangkan situasi/keadaan/kemampuan individual masing-masing wajib pajak, misalnya pajak atas barang dan jasa. Pajak tidak langsung diperoleh dari formula:</p> <p><i>Pajak tidak langsung (indirect taxes) = taxes on payroll and workforce + taxes on goods and services + taxes on international trade and transactions + other taxes</i></p> <p>Pajak tidak langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp11.297.270.997.370,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7.721.460.048.159,00, Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.292.462.645.747,00, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.283.348.303.464,00.</p> <p>Apabila dibandingkan dengan Pajak Langsung, Pajak Tidak Langsung memiliki proporsi yang lebih besar dari total pendapatan pajak tingkat wilayah Kalimantan Barat, yaitu 72,35% dari total penerimaan pajak. Pajak tidak langsung tersebut sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat yang dapat berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak pusat.</p>
3.	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>)	<p>Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) merupakan pajak yang dibebankan secara tidak berkala dan tidak sering atas nilai aset atau kekayaan neto unit institusi atau nilai aset yang ditransfer antar unit institusi sebagai warisan, hadiah, dan transfer lain. Pajak Modal diperoleh dari formula:</p> <p><i>Pajak modal (capital taxes) = estate, inheritance, and gift taxes + other nonrecurrent taxes on property</i></p> <p>Pajak modal Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp0,00.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
4.	Belanja Konsumsi Final Pemerintah (Government Final Consumption Expenditure)	<p>Belanja konsumsi final pemerintah (<i>government final consumption expenditure</i>) berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Belanja konsumsi final pemerintah tersebut diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Belanja konsumsi final pemerintah (government final consumption expenditure) = compensation of employees + use of goods and services + consumption of fixed capital + miscellaneous other expenses – sales of goods and services</i></p> <p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp23.992.506.641.287,00 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.343.322.538.489,00, Pemerintah Provinsi sebesar Rp3.572.178.594.247,00 dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp14.077.005.508.551,00.</p>
5.	Tabungan Bruto (Gross Saving)	<p>Tabungan bruto (<i>gross saving</i>) sama dengan keseimbangan operasi bruto dikurangi piutang transfer modal neto, termasuk hibah modal neto dan pajak modal, atau peminjaman neto/pinjaman neto tanpa investasi bruto aset non keuangan dan piutang transfer modal neto. Tabungan neto diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Tabungan bruto (gross saving) = GOB – net capital transfer.</i></p> <p>Tabungan Bruto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp9.805.091.048.223,00) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar (Rp13.740.009.169.123,00), pemerintah provinsi sebesar Rp1.158.862.986.381,00 dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp3.541.771.477.467,00.</p>



3. Analisis Indikator Pembiayaan

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)	<p>Total pembiayaan (<i>total financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban.</p> <p>Total Pembiayaan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.480.659.773.785,00) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), pemerintah provinsi sebesar - Rp192.618.167.810,00, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp339.189.223.086,00.</p> <p>Total pembiayaan pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif tersebut menunjukkan transaksi aset keuangan pemerintah yang lebih kecil dari transaksi kewajiban. Jumlah total pembiayaan tersebut seluruhnya berasal dari pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>).</p> <p>Angka negatif total pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota tersebut menunjukkan situasi di mana penerimaan pemerintah lebih kecil jumlah pengeluarannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah lebih banyak membayar atau mengurangi utang daripada memperoleh pendapatan atau mengambil utang baru.</p>
2.	Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>)	<p>Pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dengan unit institusi residen dikurangi transaksi kewajiban dengan unit institusi residen (debitur/kreditur dalam negeri). Pembiayaan dalam negeri diperoleh dengan formula:</p> <p><i>Pembiayaan dalam negeri (domestic financing) = transactions in financial assets with resident institutional units – transactions in liabilities with resident institutional units</i></p> <p>Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>2025 <i>Unaudited</i> sebesar (Rp16.480.659.773.785,00) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar (Rp17.012.467.164.681,00), pemerintah provinsi sebesar - Rp192.618.167.810,00, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp339.189.223.086,00.</p> <p>Pembiayaan pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat seluruhnya berasal dari pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>) ini mencerminkan bahwa pemerintah mengandalkan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakannya.</p>
3.	Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>)	<p>Pembiayaan luar negeri (<i>foreign financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dengan unit institusi non residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi non residen (debitur/kreditur luar negeri).</p> <p>Sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i>, tidak terdapat pembiayaan yang berasal dari luar negeri (<i>foreign financing</i>) pada pemerintah tingkat wilayah Kalimantan Barat.</p>
4.	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Bank Financing</i>)	<p>Pembiayaan perbankan dalam negeri (<i>domestic bank financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban dengan bank sentral dan korporasi penyimpan uang residen selain bank sentral.</p> <p>Pembiayaan perbankan dalam negeri (<i>domestic bank financing</i>) pemerintah pada tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> tidak dapat diidentifikasi nilainya.</p>
5.	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Nonbank Financing</i>)	<p>Pembiayaan non perbankan dalam negeri (<i>domestic nonbank financing</i>) merupakan transaksi aset finansial dengan pihak selain bank sentral dan perbankan dikurangi dengan transaksi liabilitas dengan pihak selain bank sentral dan perbankan.</p> <p>Pembiayaan non perbankan dalam negeri (<i>domestic nonbank financing</i>) pemerintah pada tingkat wilayah</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> tidak dapat diidentifikasi nilainya.



4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>)	<p>Utang bruto (<i>gross debt</i>) merupakan posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan pokok oleh debitur kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa depan, termasuk semua kewajiban dalam instrumen utang (total kewajiban kecuali saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Dengan kata lain, utang bruto menunjukkan total nilai dari seluruh utang yang dimiliki oleh pemerintah pada suatu periode, tanpa mempertimbangkan aset atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah.</p> <p>Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp6.731.129.560.161,00 berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp5.449.596.005.288,00, pemerintah provinsi sebesar Rp246.247.665.263,00, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.036.967.689.610,00.</p>
2.	Utang Neto (<i>Net Debt</i>)	<p>Utang neto (<i>net debt</i>) merupakan utang bruto dikurangi posisi aset keuangan terkait instrumen utang, termasuk semua aset keuangan, kewajiban dalam instrumen utang (aset keuangan/kewajiban tanpa saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Utang neto menggambarkan posisi utang pemerintah dengan mempertimbangkan nilai aset yang dapat digunakan untuk membayar utang.</p> <p>Utang Neto (<i>Net Debt</i>) Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2025 <i>Unaudited</i> sebesar Rp1.752.415.012.107,00 berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp3.269.572.136.698,00, pemerintah provinsi sebesar (Rp940.316.921.783,00) dan pemerintah kabupaten/kota sebesar (Rp775.768.317.995,00).</p> <p>Utang Neto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>memiliki aset yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Sementara itu, utang neto pemerintah pusat yang bernilai positif menunjukkan bahwa pemerintah memiliki lebih banyak utang daripada aset yang bisa digunakan untuk membayar utang. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya risiko keuangan.</p>



C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No	Kat.	Rasio	
		Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang
1.	LKPK	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} = \frac{11.060.726.421.582}{3.045.164.577.476} = 363,22\%$	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} = \frac{174.953.774.573.342}{3.493.152.437.824} = 5.008,48\%$
2.	LKPKD	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} = \frac{3.182.682.195.955}{1.091.323.413.914} = 291,64\%$	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} = \frac{67.561.379.065.289}{190.210.140.959} = 35.519,34\%$

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Barat

No.	Pemerintah Daerah	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas Jangka Panjang
1.	Provinsi Kalimantan Barat	241,06%	-
2.	Kabupaten Sambas	36,91%	-
3.	Kabupaten Sanggau	943,67%	-
4.	Kabupaten Sintang	1789,23%	-
5.	Kabupaten Mempawah	1338,37%	-
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	580,97%	-
7.	Kabupaten Ketapang	211,11%	-
8.	Kabupaten Bengkayang	116,13%	2319,18%
9.	Kabupaten Landak	953,80%	-
10.	Kabupaten Melawi	466,71%	-
11.	Kabupaten Sekadau	426,28%	-
12.	Kabupaten Kayong Utara	1666,48%	-
13.	Kabupaten Kubu Raya	431,77%	-
14.	Kota Pontianak	561,39%	-
15.	Kota Singkawang	346,35%	2943,40%

b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Pemerintah Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Solvabilitas Anggaran	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Operasional	Fleksibilitas Keuangan
1.	Provinsi Kalimantan Barat	51,06%	103,68%	2.980.173	117,89%	17,89%
2.	Kabupaten Sambas	14,49%	97,60%	5.248.135	94,60%	-13,13%
3.	Kabupaten Sanggau	15,51%	95,59%	6.739.740	99,06%	-0,94%
4.	Kabupaten Sintang	13,23%	98,81%	12.052.334	98,69%	-1,31%
5.	Kabupaten Mempawah	16,66%	94,68%	5.302.585	96,17%	-3,83%
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	7,64%	104,48%	12.074.494	94,48%	-5,52%
7.	Kabupaten Ketapang	13,89%	99,59%	10.538.001	98,80%	-1,20%
8.	Kabupaten Bengkayang	10,28%	91,61%	7.767.617	105,74%	2,27%
9.	Kabupaten Landak	8,24%	97,27%	6.614.765	107,79%	7,79%
10.	Kabupaten Melawi	7,76%	91,13%	8.835.804	89,51%	-10,49%
11.	Kabupaten Sekadau	8,87%	98,33%	9.554.846	89,38%	-10,62%
12.	Kabupaten Kayong Utara	8,26%	99,69%	10.714.446	109,61%	9,61%
13.	Kabupaten Kubu Raya	14,29%	92,04%	4.010.913	127,04%	27,04%
14.	Kota Pontianak	36,42%	126,07%	15.231.746	122,02%	22,02%
15.	Kota Singkawang	29,43%	109,87%	10.102.099	96,34%	-6,34%

2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

a. Analisis Keseimbangan Fiskal

No	Pemerintah Daerah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1.	Pemerintah Pusat	- 14.693.680.762.071	- 14.693.680.762.071	- 17.012.467.164.681	- 14.693.680.762.071	- 17.012.467.164.681
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	943.562.771.641	943.562.771.641	192.618.167.810	943.562.771.641	192.618.167.810
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	3.427.630.397.797	3.427.630.397.797	406.464.423.706	3.439.730.192.283	418.564.218.192
4.	Pemerintah Umum	- 10.322.487.592.633	- 10.322.487.592.633	- 16.413.384.573.165	- 10.310.387.798.147	- 16.401.284.778.679

b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No	Pemerintah Daerah	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1.	Pemerintah Pusat	3.908.522.125.059	7.721.460.048.159	-	6.343.322.538.489	- 13.740.009.169.123
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	-	2.292.462.645.747	-	3.572.178.594.247	1.158.862.986.381
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	408.663.144.816	1.283.348.303.464	-	14.077.005.508.551	3.541.771.477.467
4.	Pemerintah Umum	4.317.185.269.875	11.297.270.997.370	-	23.992.506.641.287	- 9.805.091.048.223

c. Analisis Indikator Pembiayaan

No	Pemerintah Daerah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1.	Pemerintah Pusat	-17.012.467.164.681	-17.012.467.164.681	0	N/A	N/A
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	192.618.167.810	192.618.167.810	0	N/A	N/A
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	339.189.223.086	339.189.223.086	0	N/A	N/A
4.	Pemerintah Umum	(16.480.659.773.785)	(16.480.659.773.785)	0	N/A	N/A

d. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No	Pemerintah Daerah	Utang Bruto	Utang Neto
1.	Pemerintah Pusat	5.449.596.005.288	3.269.572.136.698
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	246.247.665.263	(940.316.921.783)
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1.036.967.689.610	(775.768.317.995)
4.	Pemerintah Umum	6.731.129.560.161	1.752.415.012.107

Dibuat di Pontianak
Pada tanggal 16 April 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rahmat Mulyono

New DJPB
in Town



LAMPIRAN

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



New DJPB
in Town



LAMPIRAN

LKPK-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
PENDAPATAN KONSOLIDASI	19.592.310.916.270	31.045.135.490.591	-36,89%
Pendapatan Perpajakan Konsolidasi	15.624.444.191.938	15.758.842.981.577	-0,85%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.964.405.963.825	15.251.548.153.378	-74,01%
Pendapatan Hibah	3.460.760.507	34.744.355.636	-90,04%
BELANJA DAN TRANSFER	36.005.695.489.436	51.096.422.249.216	-29,53%
BELANJA KONSOLIDASI	33.158.991.674.948	36.621.626.098.098	-9,46%
Belanja Pegawai	15.371.174.955.146	14.063.278.549.304	9,30%
Belanja Barang dan Jasa	11.986.636.514.922	13.945.760.265.666	-14,05%
Belanja Modal	4.968.034.713.292	6.924.810.076.855	-28,26%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
Belanja Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
Belanja Hibah	751.007.068.359	1.606.015.104.776	-53,24%
Belanja Bantuan Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
Belanja Lain-Lain	33.330.606.274	13.977.908.786	138,45%
TRANSFER KONSOLIDASI	2.846.703.814.488	14.474.796.151.119	-80,33%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.658.107.317.596	3.054.594.880.596	-12,98%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	88.409.478.674	72.366.915.553	22,17%
Transfer Bantuan Keuangan	2.569.697.838.922	2.982.227.965.043	-13,83%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH DAN DANA DESA	188.596.496.892	11.420.201.270.523	-98,35%
Dana Bagi Hasil	15.773.434.115	956.355.074.480	-98,35%
Dana Alokasi Umum	-	7.517.739.381.007	-100,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	1.515.640.480.170	-100,00%
Dana Insentif Daerah	-	6.381.677.000	-100,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88.748.187.133	1.298.890.056.966	-93,17%
Dana Desa	84.074.875.644	125.194.600.900	-32,84%
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B-C)	(16.413.384.573.165)	(20.051.286.758.625)	-18,14%
PEMBIAYAAN	1.054.193.737.022	1.474.722.724.945	-28,52%
Penerimaan Pembiayaan	1.339.137.974.062	1.865.066.961.985	-28,20%
Pengeluaran Pembiayaan	284.944.237.040	390.344.237.040	-27,00%
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (D+E)	(15.359.190.836.143)	(18.576.564.033.680)	-17,32%



**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
ASET	174.953.774.573.342	174.235.467.665.738	0,41%
Aset Lancar	11.060.726.421.582	10.553.048.134.746	4,81%
Kas dan setara kas	2.204.120.426.902	2.197.339.299.770	0,31%
Investasi jangka pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	58,82%
Belanja dibayar di muka dan uang muka belanja	26.629.723.943	42.813.936.008	-37,80%
Piutang	1.679.801.381.557	1.790.921.694.181	-6,20%
Piutang Perpajakan	902.642.910.836	1.032.652.635.482	-12,59%
Piutang Bukan Pajak	1.817.991.372.368	1.662.740.212.220	9,34%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.523.471.478	-	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	620.743.272	584.645.137	6,17%
Piutang Lain-Lain	28.345.872.935	17.623.823.060	60,84%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1.071.322.989.331)	(922.679.621.718)	16,11%
Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	9,11%
Investasi Jangka Panjang	4.515.911.259.057	4.264.306.591.487	5,90%
Investasi jangka panjang non permanen	61.871.413	61.871.413	0,00%
Investasi jangka panjang permanen	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
Aset Tetap	154.882.146.698.333	154.912.343.702.823	-0,02%
Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
Peralatan dan Mesin	26.175.891.155.913	24.420.712.102.012	7,19%
Gedung dan Bangunan	34.570.081.165.092	33.058.859.080.729	4,57%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79.610.251.431.173	76.567.157.679.817	3,97%
Aset Tetap Lainnya	1.863.314.115.945	1.746.219.236.437	6,71%
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.524.240.215.198	1.846.562.430.198	-17,46%
Konsesi Jasa	3.508.429.618.546	3.507.516.169.746	0,03%
Akumulasi Penyusutan	(79.730.037.594.407)	(72.376.810.108.568)	10,16%
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	-1,80%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Piutang Jangka Panjang	9.952.214.237	6.125.046.122	62,48%
Tagihan piutang penjualan angsuran	1.401.564.945	1.575.385.210	-11,03%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	8.628.398.783	4.591.690.553	87,91%
Piutang jangka panjang lainnya	-	32.557.800	-100,00%
Penyisihan piutang jangka panjang	(77.749.491)	(74.587.441)	4,24%
Aset Lainnya	4.479.657.976.986	4.466.696.786.229	0,29%
Kemitraan dengan pihak ketiga	746.575.247.653	728.246.121.768	2,52%
Aset tidak berwujud	712.686.201.189	525.514.046.006	35,62%
Dana yang dibatasi penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	-31,04%
Aset lain-lain	3.550.228.167.318	3.552.319.480.738	-0,06%
Akumulasi penyusutan/amortisasi	(733.405.321.522)	(634.578.864.515)	15,57%
KEWAJIBAN	6.538.317.015.300	5.556.864.467.956	17,66%
Kewajiban Jangka Pendek	3.045.164.577.476	1.950.598.707.384	56,11%
Utang perhitungan pihak ketiga	599.636.211	518.107.784	15,74%
Utang kepada pihak ketiga	888.205.100.499	1.259.020.166.055	-29,45%
Utang bunga	7.613.724.020	9.802.763.059	-22,33%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Utang transfer	532.345.551.139	95.485.958.416	457,51%
Bagian lancar utang jangka panjang	62.144.237.040	62.144.237.040	0,00%
Utang kelebihan pembayaran pendapatan	405.848.803.088	274.862.110.657	47,66%
Pendapatan diterima dimuka	1.140.267.273.844	144.193.585.735	690,79%
Uang muka	19.562.000	260.384.809	-92,49%
Utang jangka pendek lainnya	8.120.689.634	104.311.393.829	-92,21%
Kewajiban Jangka Panjang	3.493.152.437.824	3.606.265.760.572	-3,14%
Utang jangka panjang dalam negeri	192.537.857.959	252.354.377.999	-23,70%
Kewajiban Konsesi Jasa	3.300.614.579.865	3.353.911.382.573	-1,59%
EKUITAS	168.415.457.558.042	168.678.603.197.783	-0,16%



LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional – LO	26.221.102.017.130	19.861.506.262.952	32,02%
Pendapatan Perpajakan – LO	14.934.573.552.292	15.847.498.280.977	-5,76%
Pendapatan Bukan Pajak – LO	2.942.425.421.430	2.814.315.067.531	4,55%
Pendapatan Transfer – LO	6.441.337.049.948	30.086.490.727	21309,40%
Pendapatan BLU – LO	734.536.117.542	614.538.933.035	19,53%
Pendapatan Hibah – LO	1.139.261.066.673	478.202.686.182	138,24%
Pendapatan Lainnya - LO	28.968.809.246	76.864.804.500	-62,31%
Beban Operasional	44.448.486.187.820	40.728.485.361.533	9,13%
Beban Pegawai	15.538.453.242.397	14.331.089.460.053	8,42%
Beban Persediaan	624.308.897.359	650.426.794.505	-4,02%
Beban Barang dan Jasa	11.102.455.572.933	13.392.723.804.840	-17,10%
Beban Bunga	10.093.937.097	20.584.710.225	-50,96%
Beban Subsidi	2.104.177.825	2.190.015.581	-3,92%
Beban Hibah	785.416.125.371	1.614.861.436.614	-51,36%
Beban Bantuan Sosial	35.092.337.469	43.743.482.890	-19,78%
Beban Lain-Lain/Tidak Terduga	3.036.359.569	0	100,00%
Beban Akrual Lainnya	7.382.050.354.464	7.527.227.383.317	-1,93%
Beban Transfer	8.965.475.183.336	3.145.638.273.508	185,01%
Transfer Pempus ke Daerah dan dana Desa	7.588.052.003.847	2.007.031.152.869	278,07%
Dana Bagi Hasil	0	198.247.735	-100,00%
Dana Bagi Hasil Pajak	0	0	0,00%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	198.247.735	-100,00%
Dana Bagi Hasil Cukai	0	0	0,00%
Dana Alokasi Umum	4.325.581.920.831	13.614.488.351	31671,90%
Dana Alokasi Khusus	0	0	0,00%
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	29.834.845.000	5.910.960.000	404,74%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.636.915.481.928	48.688.880.430	3261,99%
Dana Desa	1.595.719.756.088	1.938.618.576.353	-17,69%
Beban Transfer Lain-Lain			0,00%
Beban Transfer Pemda	1.377.423.179.488	1.138.607.120.639	20,97%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	712.068.448.369	93.424.722.400	662,18%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	5.951.885.098	-100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	37.449.114.634	0	100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	627.905.616.485	1.039.230.513.141	-39,58%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18.227.384.170.690)	(20.866.979.098.581)	-12,65%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	42.184.130.190	(179.014.223.226)	-123,56%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.185.200.040.501)	(21.045.993.321.807)	-13,59%
POS LUAR BIASA	(11.085.419.843)	(4.790.665.603)	131,40%
SURPLUS (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	-13,56%



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
EKUITAS AWAL	168.590.512.919.166	167.586.743.677.496	0,60%
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	168.590.512.919.166	167.586.743.677.496	0,60%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)	(21.050.783.987.410)	-13,56%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	40.048.222.871	(143.120.980.527)	-127,98%
Selisih Revaluasi Aset	13.521.622.880	(326.186.759.311)	-104,15%
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977	593.285.583.529	-47,34%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011	103.290.816.176	-98,77%
Koreksi Lain-lain	(890.233.778.538)	330.455.941.487	-369,40%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(522.990.918.799)	557.724.601.355	-193,77%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.544.221.018.018	21.584.918.906.345	-14,09%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(175.055.361.125)	1.091.859.520.290	-116,03%
EKUITAS AKHIR	168.415.457.558.041	168.678.603.197.786	-0,16%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN

LKPP-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
I. Pendapatan Perpajakan	11.639.970.097.911	11.902.301.578.087	-2,20%
1. Pajak Dalam Negeri	11.222.824.964.911	11.574.619.974.087	-3,04%
2. Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000	327.681.604.000	27,30%
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.340.904.303.635	1.340.721.625.509	0,01%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	-
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	600.370.473.248	621.813.087.217	-3,45%
4. Pendapatan PNBP Lainnya	740.533.830.387	718.908.538.292	3,01%
III. Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	12.980.874.401.546	13.243.023.203.596	-1,98%
B. BELANJA NEGARA			
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.767.142.747.491	12.360.701.965.645	-20,98%
1. Belanja Pegawai	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
2. Belanja Barang	3.950.905.076.900	5.837.444.808.345	-32,32%
3. Belanja Modal	1.187.367.511.626	2.274.614.912.926	-47,80%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-
5. Belanja Subsidi	-	-	-
6. Belanja Hibah	-	-	-
7. Belanja Sosial	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
8. Belanja Lain-Lain	-	-	-
II. Transfer ke Daerah	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
1. Dana Transfer Umum	14.294.864.139.901	13.908.446.382.005	2,78%
a. Dana Bagi Hasil	1.313.884.911.500	1.310.900.175.870	0,23%
b. Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401	12.597.546.206.135	3,04%
2. Dana Transfer Khusus	4.283.661.097.747	4.639.912.206.183	-7,68%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	765.716.342.948	1.580.677.889.833	-51,56%
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.517.944.754.799	3.059.234.316.350	14,99%
c. Hibah Kepada Daerah	-	-	-
3. Dana Insentif Daerah	51.953.825.000	140.326.341.000	-62,98%
4. Dana Otonomi Khusus	-	-	-
5. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-
6. Insentif Fiskal	-	-	-
7. Dana Desa	1.595.719.756.088	1.940.131.177.902	-17,75%
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29.993.341.566.227	32.989.518.072.735	-9,08%
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A – B)	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
D. PEMBIAYAAN	-	-	-
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN – SILPA (SIKPA) (D-C)	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%



**NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ASET			
Aset Lancar	8.076.972.340.814	8.002.576.109.291	0,93%
Kas dan setara kas			
Kas di Bendahara Pengeluaran	83.297.681	279.946.809	-70,25%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	286.708.064.215	647.602.020.800	-55,73%
Kas pada Badan Layanan Umum	329.652.158.324	369.064.989.385	-10,68%
Investasi jangka pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	58,82%
Belanja dibayar di muka (prepaid)	2.505.421.888	24.251.680.009	-89,67%
Uang muka belanja (prepayment)	10.228.565.859	485.860	2105149,63%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.064.969.830	14.109.522.627	-49,93%
Piutang	-	-	-
Piutang Perpajakan	873.092.255.320	919.374.484.207	-5,03%
Piutang Bukan Pajak	990.639.198.999	877.307.002.247	12,92%
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	620.743.272	584.645.137	6,17%
Piutang dari Kegiatan BLU	13.724.505.494	6.949.927.258	97,48%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(646.238.677.212)	(560.545.450.739)	15,29%
Persediaan	6.100.891.837.144	5.635.596.855.691	8,26%
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-
Aset Tetap	98.693.864.663.107	99.626.477.232.384	-0,94%
Tanah	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
Peralatan dan Mesin	14.368.923.965.871	13.280.952.865.951	8,19%
Gedung dan Bangunan	10.289.216.356.946	9.995.330.692.127	2,94%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.996.449.106.920	35.989.089.095.889	2,80%
Aset Tetap Lainnya	156.331.794.296	143.313.742.932	9,08%
Konstruksi dalam Pengerjaan	714.756.063.260	1.020.320.276.516	-29,95%
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-	-
Aset Konsesi Jasa	3.508.429.618.546	3.507.516.169.746	0,03%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(36.225.671.241.718)	(32.542.628.271.330)	11,32%
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	-1,80%
Properti Investasi	6.394.258.710	6.394.258.710	0,00%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.014.255.563)	(915.754.682)	10,76%
Piutang Jangka Panjang	369.682.572	662.834.558	-44,23%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	447.432.063	704.864.199	-36,52%
Piutang jangka panjang lainnya	0	32.557.800	-100,00%
Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka panjang	(77.749.491)	(74.587.441)	4,24%
Aset Lainnya	814.736.933.600	743.640.890.770	9,56%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	0,00%
Aset tidak berwujud	449.420.765.037	271.434.366.560	65,57%
Dana yang dibatasi penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	-31,04%
Aset lain-lain	667.652.408.266	600.034.312.862	11,27%
Akumulasi penyusutan aset lainnya	(350.760.857.616)	(300.566.230.052)	16,70%
Akumulasi amortisasi aset lainnya	(155.149.064.435)	(122.457.560.832)	26,70%
JUMLAH ASET KEWAJIBAN	107.591.323.623.240	108.378.835.571.031	-0,73%
Kewajiban Jangka Pendek	2.152.769.278.749	699.795.538.989	207,63%
Utang kepada pihak ketiga	214.854.807.408	255.933.589.694	-16,05%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
Utang transfer	731.273.666.326	251.723.337.326	190,51%
Utang kelebihan pembayaran pendapatan	148.259.680.705	129.271.866.789	14,69%
Pendapatan diterima dimuka	1.058.346.419.264	62.598.229.377	1590,70%
Utang jangka pendek lainnya	15.143.046	8.130.994	86,24%
Uang muka dari KPPN	19.562.000	260.384.809	-92,49%
Kewajiban Jangka Panjang	3.302.942.296.865	3.353.911.382.573	-1,52%
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	2.327.717.000	-	100,00%
Kewajiban konsesi jasa	3.300.614.579.865	3.353.911.382.573	-1,59%
JUMLAH KEWAJIBAN	3.776.761.620.792	4.053.706.921.562	-6,83%
EKUITAS	102.135.612.047.626	104.325.128.649.469	-2,10%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107.591.323.623.240	108.378.835.571.031	-0,73%

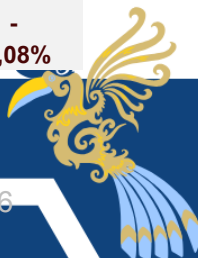


LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Perpajakan	10.889.935.092.693	11.928.383.417.279	-8,71%
Pendapatan Pajak Penghasilan	3.691.822.199.107	4.705.851.899.216	-21,55%
Pendapatan PPN dan PPnBM	6.324.942.604.083	6.098.720.060.701	3,71%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	192.673.297.412	504.474.989.247	-61,81%
Pendapatan Cukai	247.295.409.000	129.210.395.000	91,39%
Pendapatan Pajak Lainnya	14.967.211.091	160.900.716.115	-90,70%
Pendapatan Bea Masuk	67.645.443.000	76.214.898.000	-11,24%
Pendapatan Bea Keluar	350.588.929.000	253.010.459.000	38,57%
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.250.167.937.871	1.258.261.639.985	-0,64%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	644.305.546.118	643.722.706.950	0,09%
Pendapatan Badan Layanan Umum	605.862.391.753	614.538.933.035	-1,41%
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	12.140.103.030.564	13.186.645.057.264	-7,94%
Beban Operasional			
Beban Pegawai	4.845.807.569.274	4.455.492.271.687	8,76%
Beban Persediaan	623.008.899.309	649.438.474.565	-4,07%
Beban Barang dan Jasa	1.539.256.678.307	2.715.346.342.013	-43,31%
Beban Pemeliharaan	663.926.183.397	543.334.749.063	22,19%
Beban Perjalanan Dinas	257.494.259.337	718.729.538.472	-64,17%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	716.897.008.387	1.151.602.522.132	-37,75%
Beban Bantuan Sosial	17.501.442.000	13.967.735.100	25,30%
Beban Transfer	20.120.463.243.736	20.542.107.543.095	-2,05%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.434.810.556.338	3.477.710.798.072	-1,23%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	126.200.916.993	131.824.480.999	-4,27%
Jumlah Beban Operasional	32.345.366.757.078	34.399.554.455.198	-5,97%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20.205.263.726.514)	(21.212.909.397.934)	-4,75%
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.697.798.886	5.128.408.184	108,60%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.502.098.638	80.984.333.891	-93,21%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5.195.700.248	(75.855.925.707)	-106,85%
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	67.594.276.755	79.436.840.555	-14,91%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.682.254.373	8.627.507.799	-22,55%
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	60.912.022.382	70.809.332.756	-13,98%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	66.107.722.630	-5.046.592.951	-1409,95%
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	(20.139.156.003.884)	(21.217.955.990.885)	-5,08%



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
EKUITAS AWAL	104.237.038.370.849	102.952.402.952.357	1,25%
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	104.237.038.370.849	102.952.402.952.357	1,25%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(20.139.156.003.884)	(21.217.955.990.885)	-5,08%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	40.038.054.726	36.226.933.933	10,52%
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977	593.285.583.529	-47,34%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011	103.290.816.176	-98,77%
Koreksi Lain-lain	(860.202.406.071)	272.959.448.014	-415,14%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(506.491.337.357)	1.005.762.781.652	-150,36%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.544.221.018.018	21.584.918.906.345	-14,09%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2.101.426.323.223)	1.372.725.697.112	-253,08%
EKUITAS AKHIR	102.135.612.047.626	104.325.128.649.469	-2,10%



LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perpajakan	11.639.970.097.911	11.902.301.578.087	-2,20%
Pendapatan Pajak Penghasilan	3.741.968.047.659	4.682.093.557.746	-20,08%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	6.354.922.015.111	6.049.184.793.762	5,05%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	166.554.077.400	508.807.052.000	-67,27%
Pendapatan Cukai	247.295.409.000	129.222.749.000	91,37%
Pendapatan Pajak Lainnya	712.085.415.741	205.311.821.579	246,83%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000	327.681.604.000	27,30%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.330.206.370.920	1.335.593.217.325	-0,40%
Pendapatan PNBPN Lainnya	729.835.897.672	713.780.130.108	2,25%
Pendapatan Badan Layanan Umum	600.370.473.248	621.813.087.217	-3,45%
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	12.970.176.468.831	13.237.894.795.412	-2,02%
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
Belanja Barang	3.950.905.076.900	5.837.444.808.345	-32,32%
Belanja Bantuan Sosial	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	597.460.483.900	546.264.557.000	9,37%
Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	714.609.782.600	763.740.219.500	-6,43%
Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	1.814.645.000	895.399.370	102,66%
Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401	12.597.546.206.135	3,04%
Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	765.716.342.948	1.580.677.889.833	-51,56%
Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah	51.953.825.000	140.326.341.000	-62,98%
Transfer Lainnya	3.517.944.754.799	3.059.234.316.350	14,99%
Dana Desa	1.595.719.756.088	1.940.131.177.902	-17,75%
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	28.805.974.054.601	30.714.903.159.809	-6,21%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I – A.II)	(15.835.797.585.770)	(17.477.008.364.397)	-9,39%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pengelolaan dan Penjualan BMN	10.697.932.715	5.128.408.184	108,60%
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	10.697.932.715	5.128.408.184	108,60%
Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	1.187.367.511.626	2.274.614.912.926	-47,80%
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	1.187.367.511.626	2.274.614.912.926	-47,80%



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)	(1.176.669.578.911)	(2.269.486.504.742)	-48,15%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Transito (Netto)	(89.533.139.982)	24.279.954.477	- 468,75%
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	(89.533.139.982)	24.279.954.477	- 468,75%
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN			
Penyesuaian Pembukuan	(216.268.742.528)	-	- 100,00%
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN			
SALDO AWAL KAS	496.620.414.305	584.703.680.873	-15,06%
SALDO AKHIR KAS	(16.821.648.632.886)	(19.137.511.233.789)	-12,10%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(16.821.648.632.886)	(19.137.511.233.789)	-12,10%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LKPK-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
PENDAPATAN	26.649.038.836.568	27.010.727.123.562	-1,34%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	6.441.977.700.705	5.881.992.771.872	9,52%
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	3.984.474.094.027	3.856.541.403.490	3,32%
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	1.555.445.468.570	842.163.237.715	84,70%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	291.643.600.453	260.280.433.621	12,05%
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	610.414.537.655	923.007.697.045	-33,87%
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	20.135.624.146.686	21.034.161.709.753	-4,27%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	18.572.025.441.242	19.085.280.468.751	-2,69%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	1.563.598.705.444	1.948.881.241.002	-19,77%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	71.436.989.177	94.572.641.937	-24,46%
Pendapatan Hibah - LRA	3.460.760.507	34.744.355.636	-90,04%
Pendapatan Lainnya - LRA	67.976.228.670	59.828.286.301	13,62%
BELANJA	26.049.956.245.052	27.315.519.013.048	-4,63%
BELANJA OPERASI	19.577.851.119.517	19.596.751.059.738	-0,10%
Belanja Pegawai	10.759.774.238.181	9.828.604.040.030	9,47%
Belanja Barang dan Jasa	8.035.731.438.022	8.108.315.457.321	-0,90%
Belanja Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
Belanja Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
Belanja Hibah	751.007.068.359	1.606.015.104.776	-53,24%
Belanja Bantuan Sosial	17.590.895.469	28.683.910.863	-38,67%
BELANJA MODAL	3.780.667.201.666	4.650.195.163.929	-18,70%
Belanja Modal Tanah	11.646.878.336	13.532.146.500	-13,93%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.495.298.127	776.940.754.351	-18,46%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.017.347.703.137	1.245.727.475.426	-18,33%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.826.827.799.143	2.468.064.295.968	-25,98%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	174.007.245.506	138.485.129.188	25,65%
Belanja Modal Aset Lainnya	5.648.060.395	7.445.362.496	-24,14%
Belanja Modal BLUD	111.694.217.022	-	100,00%
BELANJA TAK TERDUGA	33.330.606.274	13.977.908.786	138,45%
TRANSFER	2.658.107.317.596	3.054.594.880.596	-12,98%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	88.409.478.674	72.366.915.553	22,17%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	80.866.638.118	65.946.246.920	22,63%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.542.840.556	6.420.668.633	17,48%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.569.697.838.922	2.982.227.965.043	-13,83%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	826.719.906.830	481.459.033.175	71,71%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.742.977.932.092	2.500.768.931.868	-30,30%
SURPLUS/DEFISIT LRA	599.082.591.516	(304.791.889.486)	-296,55%
PEMBIAYAAN	1.054.193.737.022	1.474.722.724.945	-28,52%
Penerimaan Pembiayaan	1.339.137.974.062	1.865.066.961.985	-28,20%
Pengeluaran Pembiayaan	284.944.237.040	390.344.237.040	-27,00%
SISA LEBIH/KURANG ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	1.653.276.328.538	1.169.930.835.459	41,31%



NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ASET	67.561.379.065.289	66.012.869.473.619	2,35%
Aset Lancar	3.182.682.195.955	2.706.709.404.368	17,58%
Kas dan Setara Kas	1.587.676.906.682	1.180.392.342.777	34,50%
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Piutang Pendapatan	1.055.830.944.072	1.054.948.740.158	0,08%
Piutang Lainnya	16.144.838.919	10.673.895.802	51,26%
Penyisihan Piutang	(425.084.312.119)	(362.134.170.978)	17,38%
Beban Dibayar Dimuka	6.830.766.366	4.452.247.512	53,42%
Persediaan	941.283.052.036	818.376.349.097	15,02%
Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-
Investasi Jangka Panjang	4.515.911.259.057	4.264.306.591.487	5,90%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	61.871.413	61.871.413	0,00%
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
Aset Tetap	56.188.282.035.226	55.285.866.470.439	1,63%
Tanah	18.474.547.591.887	17.909.544.451.900	3,15%
Peralatan dan Mesin	11.806.967.190.042	11.139.759.236.061	5,99%
Gedung dan Bangunan	24.280.864.808.146	23.063.528.388.602	5,28%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.613.802.324.253	40.578.068.583.928	5,02%
Aset Tetap Lainnya	1.706.982.321.649	1.602.905.493.505	6,49%
Konstruksi dalam Pengerjaan	809.484.151.938	826.242.153.682	-2,03%
Akumulasi Penyusutan	(43.504.366.352.689)	(39.834.181.837.239)	9,21%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	-100,00%
Dana Cadangan	-	27.468.900.302	100,00%
Aset Lainnya	3.674.503.575.051	3.728.518.107.023	-1,45%
Tagihan Jangka Panjang	9.582.531.665	5.462.211.564	75,43%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	746.575.247.653	728.246.121.768	2,52%
Aset Tidak Berwujud	35.770.036.681	42.524.605.815	-15,88%
Aset Lain-lain	2.882.575.759.052	2.952.285.167.876	-2,36%
KEWAJIBAN	1.281.533.554.873	1.659.394.925.303	-22,77%
Kewajiban Jangka Pendek	1.091.323.413.914	1.407.040.547.304	-22,44%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	599.636.211	518.107.784	15,74%
Utang Bunga	7.613.724.020	9.802.763.059	-22,33%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	62.144.237.040	62.144.237.040	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	82.541.312.878	81.835.354.696	0,86%
Utang Belanja	673.350.293.091	1.003.086.576.361	-32,87%
Utang Jangka Pendek Lainnya	265.074.210.673	249.653.508.364	6,18%
Kewajiban Jangka Panjang	190.210.140.959	252.354.377.999	-24,63%
Utang Dalam Negeri	190.210.140.959	252.354.377.999	-24,63%
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	0,00%
EKUITAS	66.279.845.510.416	64.353.474.548.316	2,99%



LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
PENDAPATAN - LO	26.613.410.226.455	25.209.937.595.914	5,57%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	6.500.400.869.945	6.106.743.742.478	6,45%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	4.044.638.459.599	3.919.114.863.698	3,20%
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.455.503.860.072	917.546.586.402	58,63%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	399.400.155.485	389.162.685.907	2,63%
Lain-lain PAD yang Sah - LO	600.858.394.790	880.919.606.472	-31,79%
PENDAPATAN TRANSFER - LO	18.905.772.061.167	18.565.162.880.953	1,83%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	18.609.226.256.957	18.416.845.619.099	1,04%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	36.804.095.000	140.326.341.000	-73,77%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	259.645.452.093	7.990.920.854	3149,26%
Bantuan Keuangan - LO	96.257.117	-	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	1.207.237.295.343	538.030.972.483	124,38%
Pendapatan Hibah - LO	1.139.261.066.673	478.202.686.182	138,24%
Pendapatan Lainnya - LO	67.976.228.670	59.828.286.301	13,62%
BEBAN	24.635.530.670.631	24.864.007.296.561	-0,92%
BEBAN OPERASI - LO	23.258.107.491.142	23.725.400.175.922	-1,97%
Beban Pegawai	10.692.645.673.123	9.875.597.188.366	8,27%
Beban Barang dan Jasa	7.926.181.441.555	8.264.698.973.100	-4,10%
Beban Bunga	10.093.937.097	20.584.710.225	-50,96%
Beban Subsidi	2.104.177.825	2.190.015.581	-3,92%
Beban Hibah	785.416.125.371	1.614.861.436.614	-51,36%
Beban Bantuan Sosial	17.590.895.469	29.775.747.790	-40,92%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.568.770.748.655	3.661.038.069.879	-2,52%
Beban Penyisihan Piutang	57.206.447.020	63.533.579.836	-9,96%
Beban Lain-lain	198.098.045.026	193.120.454.532	2,58%
BEBAN TRANSFER	1.377.423.179.488	1.138.607.120.639	20,97%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	712.068.448.369	93.424.722.400	662,18%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	5.951.885.098	-100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	37.449.114.634	-	100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	627.905.616.485	1.039.230.513.141	-39,58%
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	0,00%
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.977.879.555.824	345.930.299.353	471,76%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(23.923.592.440)	(173.967.630.275)	-86,25%
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(11.085.419.843)	(4.790.665.603)	131,40%
SURPLUS/DEFISIT - LO	1.942.870.543.540	167.172.003.475	1062,20%



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
EKUITAS AWAL	64.353.474.548.317	64.634.340.725.139	-0,43%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	1.942.870.543.540	167.172.003.475	1062,20%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(16.499.581.442)	(448.038.180.297)	-96,32%
Koreksi Nilai Persediaan (BAS Level 4)	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	10.168.145	(179.347.914.460)	-100,01%
Selisih Revaluasi Aset Tetap	13.521.622.880	(326.186.759.311)	-104,15%
Koreksi Lainnya	(30.031.372.467)	57.496.493.473	-152,23%
EKUITAS AKHIR	66.279.845.510.415	64.353.474.548.317	2,99%



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah	(3.642.674.449.496)	(3.252.844.522.907)	11,98%
Penerimaan Retribusi Daerah	(1.275.438.636.073)	-	-100,00%
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(276.258.385.369)	(242.972.523.903)	13,70%
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(610.414.537.655)	(785.821.724.986)	-22,32%
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(730.665.562.540)	(354.545.101.390)	106,09%
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(648.054.920.802)	-	-100,00%
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(12.962.676.011.391)	(5.019.978.538.827)	158,22%
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(4.194.912.910.614)	(1.825.381.669.047)	129,81%
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-	0,00%
Penerimaan Hibah	(2.959.386.170)	(34.744.355.636)	-91,48%
Penerimaan Lainnya	(67.976.228.670)	(59.828.286.301)	13,62%
Jumlah Arus Kas Masuk	(24.412.031.028.779)	(11.576.116.722.998)	110,88%
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	10.759.774.238.181	6.897.090.100.538	56,00%
Pembayaran Barang	6.816.981.484.648	6.746.376.861.596	1,05%
Pembayaran Bunga	12.099.794.486	11.052.613.833	9,47%
Pembayaran Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
Pembayaran Beban Hibah	751.007.068.359	1.348.490.496.983	-44,31%
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	17.590.895.469	-	100,00%
Pembayaran Tak terduga	33.330.606.274	13.977.908.786	138,45%
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	80.866.638.118	65.946.246.920	22,63%
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/Kota	7.542.840.556	6.420.668.633	17,48%
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	7.542.840.556	6.420.668.633	17,48%
Jumlah Arus Kas Keluar	18.488.384.091.646	15.097.965.581.503	22,46%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(42.900.415.120.424)	(26.674.082.304.501)	60,83%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan	(7.147.693.104)	(37.422.728.605)	-80,90%
Jumlah Arus Kas Masuk	(7.147.693.104)	(37.422.728.605)	-80,90%
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
Perolehan Tanah	897.921.000	-	100,00%
Perolehan Peralatan dan Mesin	633.495.298.127	433.901.610.964	46,00%
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.015.854.069.537	1.001.365.684.311	1,45%
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.705.837.679.542	2.269.902.342.179	-24,85%
Perolehan Aset Tetap Lainnya	174.007.245.506	88.784.870.324	95,99%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
Jumlah Arus Kas Keluar	3.606.292.213.712	3.868.154.507.778	-6,77%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.613.439.906.816)	(3.905.577.236.383)	-7,48%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-	0,00%
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	(134.773.910.000)	(96.600.000.000)	39,52%
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	(134.773.910.000)	(96.600.000.000)	39,52%
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	34.366.248.672	-100,00%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	-	232.000.000.000	-100,00%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	146.600.000.000	22.000.000.000	566,36%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	62.144.237.040	27.777.988.368	123,72%
Jumlah Arus Kas Keluar	208.744.237.040	316.144.237.040	-33,97%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(343.518.147.040)	(412.744.237.040)	-16,77%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(46.857.373.174.281)	(30.992.403.777.924)	51,19%
SALDO AKHIR KAS	(46.857.373.174.281)	(29.093.169.238.072)	61,06%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LSKPU-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Pendapatan	19.460.278.924.137	31.008.531.170.902	-37,24%
11 Pajak	15.614.456.267.245	15.642.661.243.531	-0,18%
12 Kontribusi Sosial	182.607.446.481	11.934.511.589.287	-98,47%
13 Hibah	3.663.215.210.411	3.431.358.338.083	6,76%
14 Pendapatan Lainnya	29.782.766.516.771	42.704.900.060.067	-30,26%
2 Beban	14.891.481.739.673	14.028.128.229.776	6,15%
21 Kompensasi Pegawai	10.677.645.631.544	12.028.162.026.003	-11,23%
22 Penggunaan Barang dan Jasa	-	-	0,00%
23 Konsumsi Aset Tetap	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
24 Bunga	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
25 Subsidi	2.871.249.341.289	15.075.666.945.858	-80,95%
26 Hibah	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
27 Manfaat Sosial	1.293.581.987.309	1.505.158.665.719	-14,06%
28 Beban Lainnya	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	-11,75%
GOB Saldo Operasi Bruto (Gross Operating Balance) (1-2+23+NOBz)	(10.322.487.592.633)	(11.696.368.889.165)	-11,75%
NOB Saldo Operasi Neto (Net Operating Balance) (1-2+NOBz)	(10.389.762.793.253)	(11.696.368.889.165)	-11,17%
3 TRANSAKSI ASET DAN KEWAJIBAN NETO (NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES)	6.090.896.980.532	8.354.917.869.460	-27,10%
31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	4.936.522.277.057	6.886.245.796.019	-28,31%
311 Aset Tetap	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
312 Persediaan	-	-	0,00%
313 Barang Berharga	12.257.879.776	26.879.724.102	-54,40%
314 Aset Non Produksi	(16.480.659.773.785)	(20.051.286.758.625)	-17,81%
NLB Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (Net Lending / Borrowing) (1-2+NOBz-31)			
3 TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) (TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING))	(16.628.600.427.865)	(20.051.286.758.625)	-17,07%
32 Akuisisi Aset Keuangan (321+322+323)			
321 Dalam Negeri	(16.554.630.100.825)	(20.270.830.995.665)	-18,33%
322 Luar Negeri	(16.554.630.100.825)	(20.270.830.995.665)	-18,33%
33 Keterjadian Kewajiban Neto (331+332)	-	-	-
331 Dalam Negeri	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
332 Luar Negeri	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%



NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6	KEKAYAAN BERSIH	168.421.573.128.368	168.678.603.197.783	-0,15%
61	Aset Non Keuangan	165.459.210.637.645	164.815.050.073.869	0,39%
611	Aset Tetap	71.057.059.157.592	72.218.949.756.628	-1,61%
6111	Gedung dan Bangunan	61.080.978.192.713	62.339.126.400.380	-2,02%
6112	Peralatan dan Mesin	4.868.926.374.391	4.958.119.968.502	-1,80%
6113	Aset Tetap Lainnya	5.107.154.590.489	4.921.703.387.746	3,77%
612	Persediaan	7.042.174.889.180	6.453.973.204.788	9,11%
6121	Persediaan untuk Tujuan Strategis	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6122	Persediaan Lainnya	7.042.099.409.780	6.453.862.097.388	9,11%
614	Aset Non Produksi	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
6141	Tanah	87.359.976.590.873	86.142.127.112.453	1,41%
6144	Aset Non Produksi Tak Berwujud	-	-	0,00%
62	Aset Keuangan	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	0,79%
6202	Uang dan Deposito	2.515.694.109.250	2.588.004.202.304	-2,79%
6203	Surat Berharga selain Saham	61.871.413	61.871.413	0,00%
6204	Pinjaman	0	32.557.800	-
				100,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lainnya	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6208	Piutang Lainnya	2.462.958.567.390	2.568.074.240.279	-4,09%
621	Aset Keuangan Domestik	9.494.563.935.697	9.420.417.591.870	0,79%
6212	Uang dan Deposito	2.515.694.109.250	2.588.004.202.304	-2,79%
6213	Surat Berharga selain Saham	61.871.413	61.871.413	0,00%
6214	Pinjaman	0	32.557.800	-
				100,00%
6215	Saham dan Ekuitas Lainnya	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6218	Piutang Lainnya	2.462.958.567.390	2.568.074.240.279	-4,09%
622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-	-
6222	Uang dan Deposito	-	-	-
6225	Surat Berharga selain Saham	-	-	-
63	Kewajiban	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	17,55%
6303	Surat Berharga selain Saham	-	-	-
6304	Pinjaman	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6308	Utang Lainnya	6.279.847.066.975	5.242.365.852.917	19,79%
631	Kewajiban Domestik	6.532.201.444.974	5.556.864.467.956	17,55%
6314	Pinjaman	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6318	Utang Lainnya	6.279.847.066.975	5.242.365.852.917	19,79%
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-	-
6323	Surat Berharga selain Saham	-	-	-
6324	Pinjaman	-	-	-



LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
C1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	19.460.278.924.137	56.309.886.199.612	-65,44%
C11 Pajak	15.614.456.267.245	7.930.196.792.551	96,90%
C13 Hibah	182.607.446.481	11.934.511.589.287	-98,47%
C14 Penerimaan Lainnya	3.663.215.210.411	36.445.177.817.774	-89,95%
C2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	29.782.766.516.771	38.894.497.914.751	-23,43%
C21 Kompensasi Pegawai	14.891.481.739.673	14.268.762.039.719	4,36%
C22 Pembelian Barang dan Jasa	10.677.645.631.544	12.331.169.797.445	100%
C23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
C24 Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
C25 Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
C26 Hibah	2.871.249.341.289	9.683.246.110.421	946,82%
C27 Manfaat Sosial	35.060.337.469	42.651.645.963	-17,80%
C28 Pembayaran Lainnya	1.293.581.987.309	2.543.535.774.456	-49,14%
CIO Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) (C1-C2)	(10.322.487.592.633)	17.415.388.284.861	-159,27%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAs)			
C31A Pembelian Aset Non Keuangan	8.188.084.767.130	6.917.364.714.359	18,37%
C311A Aset Tetap	4.955.776.833.516	6.890.484.990.257	-28,08%
C312A Persediaan untuk Tujuan Strategis	3.220.050.053.838	-	100,00%
C314A Aset Non Produksi	12.257.879.776	26.879.724.102	-54,40%
C31B Penjualan Aset Non Keuangan	2.097.187.786.598	11.684.556.733	17848,37%
C311B Aset Tetap	19.254.556.459	11.684.556.733	64,79%
C312B Persediaan untuk Tujuan Strategis	2.077.933.230.139	-	100,00%
C31 Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B)	6.090.896.980.532	6.905.680.157.625	-11,80%
CSD Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31)	(16.413.384.573.165)	10.509.708.127.235	-256,17%
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
C32x Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
C321x Domestik	76.200.000.000	74.200.000.000	2,70%
C322x Luar Negeri	-	-	-
C33 Keterjadian Kewajiban Neto	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
C331 Domestik	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
C332 Luar Negeri	-	-	-
NFB Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	150.170.327.040	293.744.237.040	-48,88%
NCB Perubahan Kas (CSD+NFB)	(16.263.214.246.125)	10.803.452.364.275	-250,54%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LSKPP-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1	Revenue	12.970.176.468.831	13.237.894.795.412	-2,02%
11	Taxes	11.629.982.173.218	11.786.119.840.041	-1,32%
12	Social Contributions	-	-	-
13	Grants	14.999.602.608	17.999.996.800	-16,67%
14	Other Revenue	1.325.194.693.005	1.433.774.958.571	-7,57%
2	Expense	27.663.857.230.902	29.273.110.810.470	-5,50%
21	Compensation of Employees	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
22	Use of Goods and Services	2.614.986.613.201	4.192.667.338.752	-37,63%
23	Consumption of Fixed Capital	-	0	-
24	Interests	-	-	-
25	Subsidies	-	-	-
26	Grants	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
27	Social Benefits	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
28	Other Expense	193.801.640.000	202.985.120.254	-4,52%
GOB	Gross Operating Balance (1-2+23+NOBz)	-14.693.680.762.071	-16.035.216.015.058	-8,37%
NOB	Net Operating Balance (1-2+NOBz)	-14.693.680.762.071	-16.035.216.015.058	-8,37%
3	NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	-14.693.680.762.071	-16.035.216.015.058	-8,37%
31	Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	2.318.786.402.610	3.711.278.854.081	-37,52%
311	Fixed Assets	1.176.058.577.471	2.256.138.927.140	-47,87%
312	Inventories	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
313	Valuables	-	-	-
314	Nonproduced Assets	611.001.440	13.347.577.602	-95,42%
NLB	Net Lending / Borrowing (1-2+NOBz-31)	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
3	TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
32	Net Acquisition of Financial Assets (321+322+323)	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
321	Domestic Debtors	-17.012.467.164.681	-19.746.494.869.139	-13,85%
322	External Debtors	-	-	-
33	Net Incurrence of Liabilities (331+332)	-	-	-
331	Domestic Creditors	-	-	-
332	External Creditors	-	-	-



**NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 NET WORTH	102.141.727.617.952	104.325.128.649.469	-2,09%
61 Nonfinancial Assets	105.411.299.754.650	105.715.997.480.641	-0,29%
611 Fixed Assets	30.424.978.918.520	31.847.817.964.397	-4,47%
6111 Building and structures	26.815.597.274.841	28.484.757.828.053	-5,86%
6112 Machinery and equipment	3.127.555.170.572	3.039.072.015.794	2,91%
6113 Other fixed assets	481.826.473.107	323.988.120.550	48,72%
6114 Weapon systems	-	-	-
612 Inventories	6.100.891.837.144	5.635.596.855.691	8,26%
6121 Strategic stocks	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6122 Other inventories	6.100.816.357.744	5.635.485.748.291	8,26%
614 Nonproduced Assets	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
6141 Land	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
6142 Mineral and energy resources	-	-	-
6143 Other naturally occurring assets	-	-	-
6144 Intangible nonproduced assets	-	-	-
62 Financial Assets	2.180.023.868.590	2.662.838.090.390	-18,13%
6202 Currency and deposits	928.017.202.568	1.380.142.959.226	-32,76%
6203 Debt securities	-	-	-
6204 Loans	-	32.557.800	-100,00%
6205 Equity and investment fund	-	-	-
6208 Other accounts receivable	1.252.006.666.022	1.282.662.573.364	-2,39%
621 Domestic	2.180.023.868.590	2.662.838.090.390	-18,13%
6212 Currency and deposits	928.017.202.568	1.380.142.959.226	-32,76%
6213 Debt securities	-	-	-
6214 Loans	-	32.557.800	-100,00%
6215 Equity and investment fund	-	-	-
6218 Other accounts receivable	1.252.006.666.022	1.282.662.573.364	-2,39%
622 External Creditors	-	-	-
6222 Currency and deposits	-	-	-
6225 Equity and investment fund	-	-	-
63 Liabilities	5.449.596.005.288	4.053.706.921.562	34,43%
6303 Debt securities	102.141.727.617.952	104.325.128.649.469	-2,09%
6304 Loans	105.411.299.754.650	105.715.997.480.641	-0,29%
6308 Other accounts payable	30.424.978.918.520	31.847.817.964.397	-4,47%
631 Domestic	26.815.597.274.841	28.484.757.828.053	-5,86%
6313 Debt securities	3.127.555.170.572	3.039.072.015.794	2,91%
6314 Loans	481.826.473.107	323.988.120.550	48,72%
6318 Other accounts payable	-	-	-
632 External Creditors	6.100.891.837.144	5.635.596.855.691	8,26%
6323 Debt securities	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6324 Loans	6.100.816.357.744	5.635.485.748.291	8,26%
Memorandum items:	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%
6M2 Net Financial Worth (62-63)	68.885.428.998.986	68.232.582.660.553	0,96%



LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
C1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	12.970.176.468.831	13.237.894.795.412	-2,02%
C11 Pajak	11.629.982.173.218	11.786.119.840.041	-1,32%
C13 Hibah	14.999.602.608	17.999.996.800	-16,67%
C14 Penerimaan Lainnya	1.325.194.693.005	1.433.774.958.571	-7,57%
C2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	27.663.857.230.902	29.273.110.810.470	-5,50%
C21 Kompensasi Pegawai	4.611.400.716.965	4.234.674.509.274	8,90%
C22 Pembelian Barang dan Jasa	2.614.986.613.201	4.192.667.338.752	-37,63%
C23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	-
C24 Bunga	-	-	-
C25 Subsidi	-	-	-
C26 Hibah	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
C27 Manfaat Sosial	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
C28 Pembayaran Lainnya	193.801.640.000	202.985.120.254	-4,52%
CIO Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) (C1-C2)	(14.693.680.762.071)	(16.035.216.015.058)	-8,37%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAS)			
C31A Pembelian Aset Non Keuangan	2.318.786.402.610	3.711.278.854.081	-37,52%
C311A Aset Tetap	1.176.058.577.471	2.256.138.927.140	-47,87%
C312A Persediaan untuk Tujuan Strategis	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
C313A Barang Berharga	-	-	-
C314A Aset Non Produksi	611.001.440	13.347.577.602	-95,42%
C31B Penjualan Aset Non Keuangan	-	-	-
C311B Aset Tetap	-	-	-
C312B Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
C313B Barang Berharga	-	-	-
C314B Aset Non Produksi	-	-	-
C31 Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B)	2.323.054.240.309	3.711.278.854.081	-37,41%
CSD Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31)	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
C32x Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
C321x Domestik	(17.012.467.164.681)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
C322x Luar Negeri	-	-	-
C33 Keterjadian Kewajiban Neto	-	-	-
C331 Domestik	-	-	-
C332 Luar Negeri	-	-	-
NFB Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	17.012.467.164.681	19.746.494.869.139	-13,85%
NCB Perubahan Kas (CSD+NFB)	-	-	-



New DJPB
in Town



LAMPIRAN

LSKPK-TW

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Revenue	27.582.799.005.831	28.199.723.397.994	-2,19%
11 Taxes	3.984.474.094.027	3.856.541.403.490	3,32%
12 Social Contributions	-	-	-
13 Grants	21.191.219.749.705	22.285.770.328.690	-4,91%
14 Other Revenue	2.407.105.162.099	2.057.411.665.813	17,00%
2 Expense	23.211.605.836.393	23.860.876.272.101	-2,72%
21 Compesation of Employees	10.280.081.022.708	9.793.453.720.502	4,97%
22 Use of Goods and Services	8.062.659.018.343	7.835.494.687.251	2,90%
23 Consumption of Fixed Capital	-	-	#DIV/0!
24 Interests	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
25 Subsidies	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
26 Grants	3.737.747.073.078	4.875.937.861.272	-23,34%
27 Social Benefits	17.590.895.469	28.683.910.863	-38,67%
28 Other Expense	1.099.780.347.310	1.302.173.545.464	-15,54%
GOB Gross Operating Balance (1-2+23+NOBz)	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
NOB Net Operating Balance (1-2+NOBz)	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
3 NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
31 Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	3.772.110.577.922	4.643.639.015.380	-18,77%
311 Fixed Assets	3.760.463.699.586	4.630.106.868.880	-18,78%
312 Inventories	-	-	-
313 Valuables	-	-	-
314 Nonproduced Assets	11.646.878.336	13.532.146.500	-13,93%
NLB Net Lending / Borrowing (1-2+NOBz-31)	531.807.390.896	(304.791.889.487)	-274,48%
3 TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	531.807.390.896	(304.791.889.486)	-274,48%
32 Net Acquisition of Financial Assets (321+322+323)	457.837.063.856	(524.336.126.526)	-187,32%
321 Domestic Debtors	457.837.063.856	(524.336.126.526)	-187,32%
322 External Debtors	-	-	-
33 Net Incurrence of Liabilities (331+332)	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
331 Domestic Creditors	(73.970.327.040)	(219.544.237.040)	-66,31%
332 External Creditors	-	-	-



**NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 NET WORTH	66.279.845.510.416	64.353.474.548.314	2,99%
61 Nonfinancial Assets	60.047.910.882.995	40.371.131.792.231	48,74%
611 Fixed Assets	40.632.080.239.072	33.854.368.572.327	20,02%
6111 Building and structures	34.265.380.917.872	0	100,00%
6112 Machinery and equipment	1.741.371.203.818	1.919.047.952.708	-9,26%
6113 Other fixed assets	4.625.328.117.382	4.597.715.267.196	0,60%
6114 Weapon systems	-	0	-
612 Inventories	941.283.052.036	818.376.349.097	15,02%
6121 Strategic stocks	-	-	-
6122 Other inventories	941.283.052.036	818.376.349.097	15,02%
614 Nonproduced Assets	18.474.547.591.887	17.909.544.451.900	3,15%
6141 Land	18.474.547.591.887	17.909.544.451.900	3,15%
6142 Mineral and energy resources	-	-	-
6143 Other naturally occurring assets	-	-	-
6144 Intangible nonproduced assets	-	-	-
62 Financial Assets	7.515.149.982.294	6.913.816.880.390	8,70%
6202 Currency and deposits	1.587.676.906.682	1.207.861.243.078	31,45%
6203 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6204 Loans	-	0	-
6205 Equity and investment fund	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6208 Other accounts receivable	1.411.561.816.555	1.441.649.045.824	-2,09%
621 Domestic	7.515.149.982.294	6.913.816.880.390	8,70%
6212 Currency and deposits	1.587.676.906.682	1.207.861.243.078	31,45%
6213 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6214 Loans	-	0	-
6215 Equity and investment fund	4.515.849.387.643	4.264.244.720.074	5,90%
6218 Other accounts receivable	1.411.561.816.555	1.441.649.045.824	-2,09%
622 External Creditors	-	-	-
6222 Currency and deposits	-	-	-
6225 Equity and investment fund	-	-	-
63 Liabilities	1.283.215.354.873	1.659.394.925.303	-22,67%
6303 Debt securities	-	-	-
6304 Loans	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6308 Other accounts payable	1.030.860.976.874	1.344.896.310.264	-23,35%
631 Domestic	1.283.215.354.873	1.659.394.925.303	-22,67%
6313 Debt securities	-	-	-
6314 Loans	252.354.377.999	314.498.615.039	-19,76%
6318 Other accounts payable	1.030.860.976.874	1.344.896.310.264	-23,35%
632 External Creditors	-	-	-
6323 Debt securities	-	-	-
6324 Loans	-	-	-
Memorandum items:	-	-	-
6M2 Net Financial Worth (62-63)	6.231.934.627.421	5.254.421.955.087	18,60%

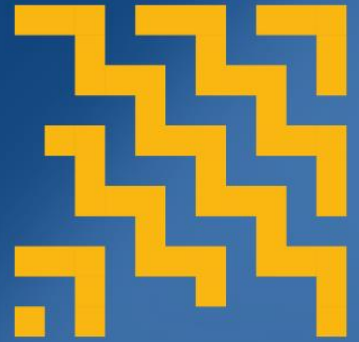


**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*) dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
C1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	27.582.799.005.831	28.199.723.397.994	-2,19%
C11 Pajak	3.984.474.094.027	3.856.541.403.490	3,32%
C13 Hibah	21.191.219.749.705	22.285.770.328.690	-4,91%
C14 Penerimaan Lainnya	2.407.105.162.099	2.057.411.665.813	17,00%
C2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	23.211.605.836.393	23.860.876.272.101	-2,72%
C21 Kompensasi Pegawai	10.280.081.022.708	9.793.453.720.502	4,97%
C22 Pembelian Barang dan Jasa	8.062.659.018.343	7.835.494.687.251	2,90%
C23 Konsumsi Aset Tetap	-	-	-
C24 Bunga	12.099.794.486	22.942.531.167	-47,26%
C25 Subsidi	1.647.685.000	2.190.015.581	-24,76%
C26 Hibah	3.737.747.073.078	4.875.937.861.272	-23,34%
C27 Manfaat Sosial	17.590.895.469	28.683.910.863	-38,67%
C28 Pembayaran Lainnya	1.099.780.347.310	1.302.173.545.464	-15,54%
CIO Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) (C1-C2)	4.371.193.169.438	4.338.847.125.893	0,75%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAS)			
C31A Pembelian Aset Non Keuangan			
C311A Aset Tetap	3.772.110.577.922	4.643.639.015.380	-18,77%
C312A Persediaan untuk Tujuan Strategis	3.760.463.699.586	4.630.106.868.880	-18,78%
C313A Barang Berharga	-	-	-
C314A Aset Non Produksi	-	-	-
C31B Penjualan Aset Non Keuangan	11.646.878.336	13.532.146.500	-13,93%
C311B Aset Tetap	-	-	-
C312B Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
C313B Barang Berharga	-	-	-
C314B Aset Non Produksi	-	-	-
C31 Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B)	3.772.110.577.922	4.643.639.015.380	-18,77%
CSD Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31)	599.082.591.516	-304.791.889.487	-296,55%
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
C32x Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas	457.837.063.856	-524.336.126.526	-187,32%
C321x Domestik	457.837.063.856	-524.336.126.526	-187,32%
C322x Luar Negeri	-	-	-
C33 Keterjadian Kewajiban Neto	-73.970.327.040	-219.544.237.040	-66,31%
C331 Domestik	-73.970.327.040	-219.544.237.040	-66,31%
C332 Luar Negeri	-	-	-
NFB Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	-531.807.390.896	304.791.889.486	-274,48%
NCB Perubahan Kas (CSD+NFB)	-	-	-





*new DJPb
in Town*

Follow us:

 [Kanwil DJPb Kalbar](#)

 [djbkalbar](#)

 [DJPb_Kalbar](#)

new DJPB
in Town



LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

LKPK-TW dan LSKP-TW Tingkat Wilayah
Kalimantan Barat Tahun 2025 *Unaudited*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT





REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
dan
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (
Unaudited)

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2025

FACE

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI	19.592.310.916.270
Pendapatan Perpajakan konsolidasi	15.624.444.191.938
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	15.207.299.058.938
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.964.405.963.825
Pendapatan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	291.643.600.453
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.669.442.687.737
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	167.106.469.535
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
Bantuan Keuangan - LRA	
Pendapatan Badan Layanan Umum	836.213.206.100
Pendapatan hibah	3.460.760.507
Pendapatan hibah dalam negeri	3.460.760.507
Pendapatan hibah luar negeri	
B. Belanja	36.005.695.489.435
Belanja pegawai	15.371.174.955.146
Belanja gaji dan tunjangan	14.032.013.495.320
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito	1.000.982.373.054
Belanja kontribusi sosial	338.179.086.772
Belanja barang dan jasa	11.986.636.514.922
Belanja barang	4.153.122.939.749
Belanja Jasa	1.589.214.575.745
Belanja Pemeliharaan	1.211.565.018.841
Belanja Perjalanan Dinas	875.496.948.211
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	553.902.259.485
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	2.676.870.856.837
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	926.463.916.054
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden	
Belanja Modal	4.968.034.713.292
Belanja Modal Tanah	12.257.879.776
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	792.709.754.848
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.385.073.326.658
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.440.489.618.376
Belanja Modal Lainnya	191.518.665.747
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	145.985.467.887
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	12.099.794.486
Belanja Pembayaran Bunga Utang	12.099.794.486
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	
Belanja Denda	
Belanja Subsidi	1.647.685.000
Belanja Subsidi Perusahaan Negara	1.647.685.000
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	
Belanja Hibah	751.007.068.359
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	24.545.526.802
Belanja Hibah Lainnya	726.461.541.557
Belanja Bantuan Sosial	35.060.337.469
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	17.469.442.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	17.590.895.469
Belanja Lain-lain	33.330.606.274

Belanja Lain-lain	33.330.606.274
C. BELANJA TRANSFER	2.846.703.814.488
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.658.107.317.596
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	88.409.478.674
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	80.866.638.118
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.542.840.556
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.569.697.838.922
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	826.719.906.830
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.742.977.932.092
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	188.596.496.892
Dana Bagi Hasil	15.773.434.115
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15.773.434.115
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88.748.187.133
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88.748.187.133
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	84.074.875.644
Dana Desa	84.074.875.644
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	(16.413.384.573.165)
E. Pembiayaan	1.054.193.737.022
Penerimaan Pembiayaan	1.339.137.974.062
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.339.137.974.062
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan	284.944.237.040
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	208.744.237.040
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
Penyertaan Modal Negara	76.200.000.000
RDI/RPD	
Dukungan Infrastruktur	
Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Suspense Pembiayaan	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	(15.359.190.836.143)

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
Aset	174.953.774.573.342
Aset lancar	11.060.726.421.582
Kas dan setara kas	2.204.120.426.902
Uang muka rekening BUN-khusus pusat	
Investasi jangka pendek	108.000.000.000
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	26.629.723.943
Piutang	1.679.801.381.557
Piutang Perpajakan	902.642.910.836
Piutang Bukan Pajak	1.817.991.372.368
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.523.471.478
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	620.743.272
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	
Piutang lain-lain	28.345.872.935
Penyisihan piutang tak tertagih	(1.071.322.989.331)
Persediaan	7.042.174.889.180
Piutang PFK	
Investasi jangka panjang	4.515.911.259.057
Investasi jangka panjang non permanen	61.871.413
Investasi jangka panjang permanen	4.515.849.387.643
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Aset tetap	154.882.146.698.333
Tanah	87.359.976.590.873
Peralatan dan mesin	26.175.891.155.913
Gedung dan bangunan	34.570.081.165.092
Jalan, irigasi, dan jaringan	79.610.251.431.173
Aset tetap lainnya	1.863.314.115.945
Konstruksi dalam pengerjaan	1.524.240.215.198
Konsesi Jasa	3.508.429.618.546
Akumulasi penyusutan	(79.730.037.594.407)
Aset Tetap Yang Belum Diregister	
Properti Investasi	5.380.003.147
Dana cadangan	
Dana cadangan	
Piutang jangka panjang	9.952.214.237
Tagihan piutang penjualan angsuran	1.401.564.945
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	8.628.398.783
Piutang jangka panjang kredit pemerintah	
Piutang jangka panjang lainnya	
Penyisihan piutang jangka panjang	(77.749.491)
Aset lainnya	4.479.657.976.986
Kemitraan dengan pihak ketiga	746.575.247.653
Aset tidak berwujud	712.686.201.189
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	203.573.682.348
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Aset lain-lain	3.550.228.167.318
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(733.405.321.522)
Kewajiban / Utang	6.538.317.015.300
Kewajiban jangka pendek	3.045.164.577.476
Utang perhitungan pihak ketiga	599.636.211
Utang kepada pihak ketiga	888.205.100.499
Utang bunga	7.613.724.020
Utang subsidi	
Utang Transfer	532.345.551.139
Bagian lancar utang jangka panjang	62.144.237.040
Utang surat perbendaharaan negara	
Utang Yang Belum Ditagihkan	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	405.848.803.088
Pendapatan Diterima Dimuka	1.140.267.273.844
Uang Muka	19.562.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.120.689.634
Kewajiban jangka panjang	3.493.152.437.824

Utang jangka panjang dalam negeri	192.537.857.959
Utang jangka panjang luar negeri	3.300.614.579.865
Kewajiban Konsesi Jasa	168.415.457.558.042
Ekuitas	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	168.590.512.919.166
Ekuitas Awal pemerintah Pusat	104.237.038.370.849
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	64.353.474.548.317
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	168.590.512.919.166
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	40.048.222.871
Selisih Revaluasi Aset	13.521.622.880
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	(890.233.778.538)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(522.990.918.799)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18.544.221.018.018
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(175.055.361.125)
EKUITAS AKHIR	168.415.457.558.041

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	(27.192.859.354.026)
Pendapatan Operasional-LO	26.221.102.017.130
Pendapatan perpajakan-LO	14.934.573.552.292
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	14.516.339.180.292
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	418.234.372.000
Pendapatan bukan pajak-LO	2.942.425.421.430
Pendapatan sumber daya alam-LO	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	399.400.155.485
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	2.543.025.265.945
Pendapatan Transfer - LO	6.441.337.049.948
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	6.166.910.225.738
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	14.685.115.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	259.645.452.093
Bantuan Keuangan - LO	96.257.117
Pendapatan BLU-LO	734.536.117.542
Pendapatan Jasa BLU - LO	629.546.086.209
Pendapatan Hibah BLU - LO	15.977.028.976
Pendapatan Lainnya BLU - LO	89.013.002.357
Pendapatan hibah-LO	1.139.261.066.673
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	1.139.261.066.673
Pendapatan lainnya-LO	28.968.809.246
Pendapatan lainnya Pemda	
Pendapatan Penyesuaian Akrual	28.968.809.246
Beban Operasional	44.448.486.187.820
Beban pegawai	15.538.453.242.397
Beban gaji dan tunjangan	14.535.312.187.008
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transit	1.003.141.055.389
Beban kontribusi sosial	
Beban persediaan	624.308.897.359
Beban barang dan jasa	11.102.455.572.933
Beban barang	7.237.166.521.731
Beban jasa	1.476.387.501.952
Beban pemeliharaan	845.343.908.954
Beban perjalanan dinas	569.287.248.131
Beban BLU/BLUD	258.673.381.829
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	715.597.010.337
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil	
Presiden	
Beban bunga	10.093.937.097
Beban Pembayaran Bunga Utang	10.093.937.097
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Beban Denda	
Beban subsidi	2.104.177.825
Beban subsidi kepada perusahaan publik	2.104.177.825
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	
Beban Subsidi - Estimasi	
Beban hibah	785.416.125.371
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	
Beban hibah kepada organisasi internasional	
Beban hibah kepada pemerintah daerah	5.770.057.590
Beban Hibah Lainnya	779.646.067.781
Beban bantuan sosial	35.092.337.469
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	32.000.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	17.469.442.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	17.590.895.469
Beban lain-lain/beban tidak terduga	3.036.359.569
Beban Lain-lain	3.036.359.569
Beban akrual lainnya	7.382.050.354.464
Beban Penyusutan Aset Tetap	6.948.249.698.445
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	55.331.606.549

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	378.469.049.471
BEBAN TRANSFER	8.965.475.183.336
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	7.588.052.003.847
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	4.325.581.920.831
Dana Alokasi Umum	4.325.581.920.831
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	29.834.845.000
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	29.834.845.000
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.636.915.481.928
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.636.915.481.928
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	1.595.719.756.088
Dana Desa	1.595.719.756.088
Beban Transfer Lain-lain	
Beban Suspense Transfer	
BEBAN TRANSFER PEMDA	1.377.423.179.488
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	712.068.448.369
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	37.449.114.634
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	627.905.616.485
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18.227.384.170.690)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	5.195.700.248
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	60.912.022.382
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	(34.083.313.001)
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	10.159.720.561
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	42.184.130.190
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.185.200.040.501)
POS LUAR BIASA	(11.085.419.843)
PENDAPATAN LUAR BIASA	
BEBAN LUAR BIASA	(11.085.419.843)
SURPLUS (DEFISIT) LO	(18.196.285.460.344)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL	
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	496.639.976.305
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih	
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian	496.639.976.305
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	496.639.976.305
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(23.507.205.673.411)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(23.010.565.697.106)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	216.268.742.528
2. Penyesuaian Lain-lain	22.794.296.954.578
Total Penyesuaian SAL (A.II)	23.010.565.697.106
Rincian Penyesuaian Pembukuan:	
Koreksi SILPA	216.268.742.528
Selisih Kurs (Unrealized)	
Koreksi Kas BUN	
Koreksi Kas KPPN	
Koreksi Kas BLU	
Koreksi Kas Hibah	
Koreksi Utang PFK	
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:	
Penyesuaian Transaksi RPL	
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL	
Pembulatan	22.794.296.954.578
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	
2. PERHITUNGAN FISIK SAL	
SALDO AKHIR KAS BUN	
SALDO AKHIR KAS KPPN	
SALDO AKHIR KAS BLU	224.914.560.611
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	63.735.681
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice	
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	
Selisih Kiriman Uang	
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan	
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	
Pengembalian Escrow PNB	
Transito BLU	
Dana Optimalisasi Kas	
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

FACE

**LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT
WILAYAH**

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
REVENUE	19.460.278.924.137
Taxes	15.614.456.267.245
Social contributions	
Grants	182.607.446.481
Other revenue	3.663.215.210.411
EXPENSE	29.782.766.516.771
Compensation of employees	14.891.481.739.673
Use of goods and services	10.677.645.631.544
Consumption of fixed capital	
Interests	12.099.794.486
Subsidies	1.647.685.000
Grants	2.871.249.341.289
Social benefits	35.060.337.469
Other expense	1.293.581.987.309
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	(10.322.487.592.633)
Net operating balance (1-2+NOBz)	(10.322.487.592.633)
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	(10.389.762.793.253)
Net/gross investment in nonfinancial assets	6.090.896.980.532
Fixed Assets	4.936.522.277.057
Weapon systems	
Inventories	1.142.116.823.699
Nonproduced assets	12.257.879.776
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	(16.480.659.773.785)
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	(16.554.630.100.825)
Domestic debtors	(16.554.630.100.825)
External debtors	
Net incurrence of liabilities [331+332]	(73.970.327.040)
Domestic creditors	(73.970.327.040)
External creditors	
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)	67.275.200.620

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
NET WORTH	168.421.573.128.368
Nonfinancial assets	165.459.210.637.645
Fixed assets	71.057.059.157.592
Buildings and structures	61.080.978.192.713
Dwellings	8.207.767.227.754
Buildings other than dwellings	22.131.604.638.785
Other structures	30.741.606.326.174
Land improvements	
Machinery and equipment	4.868.926.374.391
Transport equipment	4.868.926.374.391
Machinery and equipment other than transport equipment	
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	
Machinery and equipment not elsewhere classified	
Other fixed assets	5.107.154.590.489
Cultivated biological resources	
Animal resources yielding repeat products	
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	
Intellectual property products	5.107.154.590.489
Research and development	135.421.056.454
Mineral exploration and evaluation	
Computer software and databases	214.110.291.101
Entertainment, literary, and artistic originals	
Other intellectual property products	4.757.623.242.934
Weapon systems	
Inventories	7.042.174.889.180
Strategic stocks	75.479.400
Other inventories	7.042.099.409.780
Materials and supplies	2.585.457.120.356
Work in progress	
Finished goods	
Goods for resale	4.456.642.289.424
Military inventories	
Valuables	
Nonproduced assets	87.359.976.590.873
Land	87.359.976.590.873
Mineral and energy resources	
Other naturally occurring assets	
Noncultivated biological resources	
Water resources	
Other natural resources	
Radio spectrum	
Natural resources not elsewhere classified	
Intangible nonproduced assets	
Contracts, leases, and licenses	
Marketable operating leases	
Permits to use natural resources	
Permits to undertake specific activities	
Goodwill and marketing assets	
Financial assets [621+622]	9.494.563.935.697
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits [6212+6222]	2.515.694.109.250
Debt securities [6213+6223]	61.871.413
Loans [6216+6226]	
Equity and investment fund shares [6215+6225]	4.515.849.387.643
Equity [62151+62251]	4.515.849.387.643
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	

Employee stock options [62172 + 62272]	2.462.958.567.390
Other accounts receivable [6218+6228]	18.720.000.634
Trade credit and advances [62181 + 62281]	2.444.238.566.757
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	9.494.563.935.697
Domestic debtors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	2.515.694.109.250
Debt securities	61.871.413
Loans	
Equity and investment fund shares	4.515.849.387.643
Equity	4.515.849.387.643
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	2.462.958.567.390
Trade credit and advances	18.720.000.634
Miscellaneous other accounts receivable	2.444.238.566.757
External creditors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	
Liabilities [631+632]	6.532.201.444.974
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]	
Currency and deposits [6212+6222]	
Debt securities [6213+6223]	
Loans [6216+6226]	252.354.377.999
Equity and investment fund shares [6215+6225]	
Equity [62151+62251]	
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts payable [6218+6228]	6.279.847.066.975
Trade credit and advances [62181 + 62281]	94.953.574.264
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	6.184.893.492.711
Domestic creditors	6.532.201.444.974
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	252.354.377.999
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	

<ul style="list-style-type: none"> Pension entitlements Claims of pension funds on pension manager Provisions for calls under standardized guarantee schemes Financial derivatives and employee stock options Financial derivatives Employee stock options Other accounts receivable Trade credit and advances Miscellaneous other accounts payable External creditors Special Drawing Rights (SDRs) Currency and deposits Debt securities Loans Equity and investment fund shares Equity Investment fund shares Insurance, pension, and standardized guarantee schemes Nonlife insurance technical reserves Pension entitlements Claims of pension funds on pension manager Provisions for calls under standardized guarantee schemes Financial derivatives and employee stock options Financial derivatives Employee stock options Other accounts receivable Trade credit and advances Miscellaneous other accounts receivable 	<p>6.279.847.066.975</p> <p>94.953.574.264</p> <p>6.184.893.492.711</p>
---	--

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Cash receipts from operating activities	19.460.278.924.137
Taxes	15.614.456.267.245
Social Contribution	
Grants	182.607.446.481
Other Receipts	3.663.215.210.411
Cash payments for operating activities	29.782.766.516.771
Compensation of Employees	14.891.481.739.673
Purchase of Goods and Service	10.677.645.631.544
Interest	12.099.794.486
Subsidies	1.647.685.000
Grants	2.871.249.341.289
Social Benefits	35.060.337.469
Other Payments	1.293.581.987.309
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(10.322.487.592.633)
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS	
Purchases of nonfinancial assets	8.188.084.767.130
Fixed Assets	4.955.776.833.516
Inventories	3.220.050.053.838
Valuables	
Nonproduced Assets	12.257.879.776
Sales of nonfinancial assets	2.097.187.786.598
Fixed Assets	19.254.556.459
Inventories	2.077.933.230.139
Valuables	
Nonproduced Assets	
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	6.090.896.980.532
CASH SURPLUS/DEFISIT	(16.413.384.573.165)
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	76.200.000.000
Domestic debtors	76.200.000.000
External creditors	
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	(73.970.327.040)
Domestic creditors	(73.970.327.040)
External creditors	
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	150.170.327.040
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	(16.630.830.100.825)
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities	67.275.200.620
.....Central government	
.....Budgetary central government	

LEMBAR PEMERIKSAAN DAN REVIU BERJENJANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tanggal Cetak :
 Tanggal LKPP :
 Tanggal LKPD :

LAPORAN REALISASI

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

NERACA

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

LAPORAN ARUS KAS

Penyusun Laporan	Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Arus Kas dan SAL	Kepala Subdirektorat PLKPP
..... NIP..... NIP..... NIP.....

LAPORAN OPERASIONAL

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... NIP..... NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... NIP..... NIP.....

LAMPIRAN

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Unaudited)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	11.639.970.097.911
1. Pajak Dalam Negeri	11.222.824.964.911
2. Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.340.904.303.635
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	600.370.473.248
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	740.533.830.387
III. Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	12.980.874.401.546
B. Belanja Negara	
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.767.142.747.491
1. Belanja Pegawai	4.611.400.716.965
2. Belanja Barang	3.950.905.076.900
3. Belanja Modal	1.187.367.511.626
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
5. Belanja Subsidi	
6. Belanja Hibah	
7. Belanja Bantuan Sosial	17.469.442.000
8. Belanja Lain-lain	
II. Transfer ke Daerah	20.226.198.818.736
1. Dana Bagi Hasil	1.313.884.911.500
2. Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401
3. Dana Alokasi Khusus	4.283.661.097.747
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	765.716.342.948
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.517.944.754.799
c. Hibah Kepada Daerah	
4. Dana Otonomi Khusus	
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
6. Dana Desa	1.595.719.756.088
7. Insentif Fiskal	51.953.825.000
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29.993.341.566.227
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(17.012.467.164.681)
D. Pembiayaan	
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	
2. Pemberian Pinjaman	
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
5. Surat Berharga Negara (Neto)	
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	
6. Pinjaman dalam negeri (Neto)	
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
7. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	
8. Kewajiban Penjaminan	
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	
10. Pembiayaan Lain-lain	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	
a. Penarikan Pinjaman Tunai	
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	(17.012.467.164.681)

NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas:	
Rekening Kas BUN di BI	
Rekening Pemerintah Lainnya	
Rekening Kas di KPPN	
Kas dalam Transit	
Kas di Bendahara Pengeluaran	83.297.681
Kas di Bendahara Penerimaan	
Kas Lainnya dan Setara Kas	286.708.064.215
Kas pada Badan Layanan Umum	329.652.158.324
Jumlah Kas dan Setara Kas	616.443.520.220
Uang Muka Dari Rekening BUN	
Investasi Jangka Pendek	
Investasi dalam Deposito	
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
Investasi Jangka Pendek BLU	108.000.000.000
Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Investasi Jangka Pendek	108.000.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2.505.421.888
Uang Muka Belanja (prepayment)	10.228.565.859
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.064.969.830
Piutang:	
Piutang Perpajakan	873.092.255.320
Piutang Bukan Pajak	990.639.198.999
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	620.743.272
Piutang Penerusan Pinjaman	
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	
Piutang dari Kegiatan BLU	13.724.505.494
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	
Piutang PFK	
Jumlah Piutang (Bruto)	1.878.076.703.085
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(646.238.677.212)
Jumlah Piutang (Bersih)	1.231.838.025.873
Persediaan	6.100.891.837.144
Persediaan yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lancar	8.076.972.340.814
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	
Dana Restrukturisasi Perbankan	
Dana Bergulir	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)	
Investasi dalam Obligasi	
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Diragukan Tertagih	
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)	
Jumlah Investasi Non Permanen	
Investasi Permanen	
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Permanen Lainnya	
Jumlah Investasi Permanen	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	
Aset Tetap	
Tanah	68.885.428.998.986
Peralatan dan Mesin	14.368.923.965.871
Gedung dan Bangunan	10.289.216.356.946

Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.996.449.106.920
Aset Tetap Lainnya	156.331.794.296
Konstruksi Dalam Pengerjaan	714.756.063.260
Tanah Belum Diregister	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	
Aset Konsesi Jasa	3.508.429.618.546
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	134.919.535.904.825
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(36.225.671.241.718)
Jumlah Aset Tetap	98.693.864.663.107
Properti Investasi	
Properti Investasi	6.394.258.710
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	6.394.258.710
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.014.255.563)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	5.380.003.147
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	447.432.063
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
Piutang Jangka Panjang Subsidi	
Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	447.432.063
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	(77.749.491)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	369.682.572
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	449.420.765.037
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	203.573.682.348
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Dana Jangka Panjang	
Aset Lain-lain	667.652.408.266
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Aset Lainnya yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	1.320.646.855.651
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(350.760.857.616)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(155.149.064.435)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	814.736.933.600
JUMLAH ASET	107.591.323.623.240
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
Utang kepada Pihak Ketiga	214.854.807.408
Utang Bunga	
Utang Subsidi	
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	
Utang Transfer	731.273.666.326
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	148.259.680.705
Pendapatan Diterima Dimuka	1.058.346.419.264
Pendapatan Yang Ditangguhkan	
Utang Kepada KUN	
Utang Kepada RPL	
Utang Jangka Pendek Lainnya	15.143.046
Hibah Yg Belum Disahkan	
Uang Muka Rekening Khusus	
Uang Muka	
Uang Muka Dari KPPN	19.562.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.152.769.278.749
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	2.327.717.000
Utang Jangka Panjang Subsidi	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	2.327.717.000
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Kewajiban Konsesi Jasa	3.300.614.579.865
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	3.300.614.579.865
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	3.302.942.296.865
JUMLAH KEWAJIBAN	5.455.711.575.614
EKUITAS	102.135.612.047.626
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107.591.323.623.240

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	104.237.038.370.849
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	104.237.038.370.849
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(20.139.156.003.884)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	40.038.054.726
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	312.398.434.977
Koreksi Atas Reklasifikasi	1.274.579.011
Koreksi Atas Transaksi BMN Lainnya	
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	(860.202.406.071)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI	(506.491.337.357)
EKUITAS	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	18.544.221.018.018
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2.101.426.323.223)
EKUITAS AKHIR	102.135.612.047.626

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	3.691.822.199.107
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	6.324.942.604.083
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	192.673.297.412
Pendapatan Cukai	247.295.409.000
Pendapatan Pajak Lainnya	14.967.211.091
Pendapatan Bea Masuk	67.645.443.000
Pendapatan Bea Keluar	350.588.929.000
Pendapatan Pajak Lain-lain	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	10.889.935.092.693
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Penerimaan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	644.305.546.118
Pendapatan Badan Layanan Umum	605.862.391.753
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.250.167.937.871
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Hibah	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	12.140.103.030.564
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	4.845.807.569.274
Beban Persediaan	623.008.899.309
Beban Barang dan Jasa	1.539.256.678.307
Beban Pemeliharaan	663.926.183.397
Beban Perjalanan Dinas	257.494.259.337
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	716.897.008.387
Beban Bunga	
Beban Subsidi	
Beban Hibah	
Beban Bantuan Sosial	17.501.442.000
Beban Transfer	20.120.463.243.736
Beban Lain-lain	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.434.810.556.338
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	126.200.916.993
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	32.345.366.757.078
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20.205.263.726.514)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.697.798.886
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.502.098.638
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5.195.700.248
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	67.594.276.755
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.682.254.373
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	60.912.022.382
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	66.107.722.630
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(20.139.156.003.884)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	3.741.968.047.659
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	6.354.922.015.111
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	166.554.077.400
e. Pendapatan Cukai	247.295.409.000
f. Pendapatan Pajak Lainnya	712.085.415.741
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000
Total Penerimaan Perpajakan	11.639.970.097.911
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
c. Pendapatan PNBPN Lainnya	729.835.897.672
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	600.370.473.248
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.330.206.370.920
3. Penerimaan Hibah	
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	12.970.176.468.831
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	4.611.400.716.965
2. Belanja Barang dan Jasa	3.950.905.076.900
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
4. Belanja Subsidi	
5. Belanja hibah	
6. Belanja Bantuan Sosial	17.469.442.000
7. Belanja Lain-lain	
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	597.460.483.900
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	714.609.782.600
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	1.814.645.000
11. Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	765.716.342.948
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	51.953.825.000
14. Transfer Lainnya	3.517.944.754.799
15. Dana Desa	1.595.719.756.088
16. Hibah Kepada Daerah	
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	28.805.974.054.601
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	(15.835.797.585.770)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	10.697.932.715
2. Penerimaan Kembali Investasi	
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	10.697.932.715
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	1.187.367.511.626
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penyertaan Modal Negara	
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	1.187.367.511.626
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(1.176.669.578.911)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	

II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	(89.533.139.982)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	(89.533.139.982)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(17.102.000.304.663)
Penggunaan SAL	
Penyesuaian Pembukuan	(216.268.742.528)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(17.318.269.047.191)
SALDO AWAL KAS	496.620.414.305
SALDO AKHIR KAS	(16.821.648.632.886)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(16.821.648.632.886)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(17.012.467.164.681)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(17.012.467.164.681)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	
Total Penyesuaian SAL (A.II)	
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	(17.012.467.164.681)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
PENDAPATAN - LRA	26.649.038.836.568
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	6.441.977.700.705
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	3.984.474.094.027
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.555.445.468.570
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	291.643.600.453
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	610.414.537.655
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	20.135.624.146.686
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	18.572.025.441.242
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	1.563.598.705.444
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
Bantuan Keuangan - LRA	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	71.436.989.177
Pendapatan Hibah - LRA	3.460.760.507
Dana Darurat - LRA	
Pendapatan Lainnya - LRA	67.976.228.670
BELANJA	26.049.956.245.052
BELANJA OPERASI	19.577.851.119.517
Belanja Pegawai	10.759.774.238.181
Belanja Barang dan Jasa	8.035.731.438.022
Belanja Bunga	12.099.794.486
Belanja Subsidi	1.647.685.000
Belanja Hibah	751.007.068.359
Belanja Bantuan Sosial	17.590.895.469
BELANJA MODAL	3.780.667.201.666
Belanja Modal Tanah	11.646.878.336
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.495.298.127
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.017.347.703.137
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.826.827.799.143
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	174.007.245.506
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	
Belanja Modal Aset Lainnya	5.648.060.395
Belanja Modal BLUD	111.694.217.022
BELANJA TAK TERDUGA	33.330.606.274
Belanja Tak Terduga	33.330.606.274
TRANSFER	2.658.107.317.596
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	88.409.478.674
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	80.866.638.118
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.542.840.556
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.569.697.838.922
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	826.719.906.830
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.742.977.932.092
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT LRA	599.082.591.516
PEMBIAYAAN	1.054.193.737.022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.339.137.974.062
Penggunaan SiLPA	1.197.216.370.958
Pencairan Dana Cadangan	7.147.693.104
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Pinjaman Dalam Negeri	134.773.910.000
Penerimaan Kembali Piutang	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
Pinjaman Luar Negeri	
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	284.944.237.040
Pembentukan Dana Cadangan	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	76.200.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	208.744.237.040
Pemberian Pinjaman Daerah	
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1.653.276.328.538

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
ASET	67.561.379.065.289
ASET LANCAR	3.182.682.195.955
Kas dan Setara Kas	1.587.676.906.682
Investasi Jangka Pendek	
Piutang Pendapatan	1.055.830.944.072
Piutang Lainnya	16.144.838.919
Penyisihan Piutang	(425.084.312.119)
Beban Dibayar Dimuka	6.830.766.366
Persediaan	941.283.052.036
Aset Untuk Dikonsolidasikan	
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.515.911.259.057
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	61.871.413
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.515.849.387.643
ASET TETAP	56.188.282.035.226
Tanah	18.474.547.591.887
Peralatan dan Mesin	11.806.967.190.042
Gedung dan Bangunan	24.280.864.808.146
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.613.802.324.253
Aset Tetap Lainnya	1.706.982.321.649
Konstruksi Dalam Pengerjaan	809.484.151.938
Akumulasi Penyusutan	(43.504.366.352.689)
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	3.674.503.575.051
Tagihan Jangka Panjang	9.582.531.665
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	746.575.247.653
Aset Tidak Berwujud	35.770.036.681
Aset Lain-lain	2.882.575.759.052
KEWAJIBAN	1.281.533.554.873
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.091.323.413.914
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	599.636.211
Utang Bunga	7.613.724.020
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	62.144.237.040
Pendapatan Diterima Dimuka	82.541.312.878
Utang Belanja	673.350.293.091
Utang Jangka Pendek Lainnya	265.074.210.673
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	190.210.140.959
Utang Dalam Negeri	190.210.140.959
Utang Jangka Panjang Lainnya	
EKUITAS	66.279.845.510.416

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	64.353.474.548.317
Surplus/Defisit-LO	1.942.870.543.540
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(16.499.581.442)
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	
Koreksi Nilai Persediaan	10.168.145
Selisih Revaluasi Aset Tetap	13.521.622.880
Koreksi Lainnya	(30.031.372.467)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	66.279.845.510.415

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
PENDAPATAN - LO	26.613.410.226.455
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	6.500.400.869.945
Pendapatan Pajak Daerah - LO	4.044.638.459.599
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.455.503.860.072
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	399.400.155.485
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	600.858.394.790
PENDAPATAN TRANSFER - LO	18.905.772.061.167
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	18.609.226.256.957
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	36.804.095.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	259.645.452.093
Bantuan Keuangan - LO	96.257.117
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	1.207.237.295.343
Pendapatan Hibah - LO	1.139.261.066.673
Dana Darurat - LO	
Pendapatan Lainnya - LO	67.976.228.670
BEBAN	24.635.530.670.631
BEBAN OPERASI - LO	23.258.107.491.142
Beban Pegawai - LO	10.692.645.673.123
Beban Barang dan Jasa	7.926.181.441.555
Beban Bunga	10.093.937.097
Beban Subsidi	2.104.177.825
Beban Hibah	785.416.125.371
Beban Bantuan Sosial	17.590.895.469
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.568.770.748.655
Beban Penyisihan Piutang	57.206.447.020
Beban Lain-lain	198.098.045.026
BEBAN TRANSFER	1.377.423.179.488
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	712.068.448.369
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	37.449.114.634
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	627.905.616.485
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.977.879.555.824
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	34.779.698.174
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	11.078.950.299
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	23.700.747.875
DEFISIT NON OPERASIONAL	58.703.290.614
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	45.162.263.300
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	13.541.027.314
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(23.923.592.440)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.953.955.963.383
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
Pendapatan Luar Biasa - LO	
BEBAN LUAR BIASA	11.085.419.843
Beban Luar Biasa	11.085.419.843
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	(11.085.419.843)
SURPLUS/DEFISIT-LO	1.942.870.543.540

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	(3.642.674.449.496)
Penerimaan Retribusi Daerah	(1.275.438.636.073)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(276.258.385.369)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(610.414.537.655)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(730.665.562.540)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(648.054.920.802)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(12.962.676.011.391)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(4.194.912.910.614)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	
Penerimaan Dana Penyesuaian	
Penerimaan Hibah	(2.959.386.170)
Penerimaan Dana Darurat	
Penerimaan Lainnya	(67.976.228.670)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
Jumlah Arus Masuk Kas	(24.412.031.028.779)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	10.759.774.238.181
Pembayaran Barang	6.816.981.484.648
Pembayaran Bunga	12.099.794.486
Pembayaran Subsidi	1.647.685.000
Pembayaran Beban Hibah	751.007.068.359
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	17.590.895.469
Pembayaran Tak Terduga	33.330.606.274
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	80.866.638.118
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	7.542.840.556
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	7.542.840.556
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
Jumlah Arus Keluar Kas	18.488.384.091.646
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(42.900.415.120.424)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	(7.147.693.104)
Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan Aset Tetap Lainnya	
Penjualan Aset Lainnya	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Masuk Kas	(7.147.693.104)
Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	897.921.000
Perolehan Tanah	
Perolehan Peralatan dan Mesin	633.495.298.127
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.015.854.069.537
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.705.837.679.542
Perolehan Aset Tetap Lainnya	174.007.245.506
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	76.200.000.000
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	3.606.292.213.712
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.613.439.906.816)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	(134.773.910.000)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Masuk Kas	(134.773.910.000)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	146.600.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	62.144.237.040
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Keluar Kas	208.744.237.040
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(343.518.147.040)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	(46.857.373.174.281)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
Saldo Akhir Kas	(46.857.373.174.281)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Unaudited) DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Sub Total	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
Sub Total	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4)	
Lain-lain	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

LAMPIRAN I
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1110100- Kas di Kas Daerah	0	1188998632691,44	1188998632691,44
1110200- Kas di Bendahara Penerimaan	0	51905052,03	51905052,03
1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1337049971,09	1337049971,09
1110400- Kas di BLUD	0	173873036609,6	173873036609,6
1110500- Kas Lainnya	0	36130696290,19	36130696290,19
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	15.855.161	15.855.161
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	39.124.000	28.318.520	67.442.520
111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	17.645.533	104.915.966	122.561.499
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	567.765.633.184	(283.882.816.592)	283.882.816.592
111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	3.206.530.719	(764.699.319)	2.441.831.400
111826- Kas Lainnya di BLU	118.738.755	142.115.969	260.854.724
111911- Kas dan Bank - BLU	350.475.195.426	(23.823.037.102)	326.652.158.324
111929- Setara kas Lainnya - BLU	7.000.000.000	(4.000.000.000)	3.000.000.000
111ZZZZ- Kas dan Setara Kas (BAS Level 4)	0	187285586067,54	187285586067,54
1130100- Piutang Pajak Daerah	0	631608317455,76	631608317455,76
1130200- Piutang Retribusi	0	78307071027,42	78307071027,42
1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	2.121.195.554	2.121.195.554
1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	112332231485,85	112332231485,85
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	194.838.813.587	194.838.813.587
1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	4.089.301.600	4.089.301.600
1130800- Piutang Pendapatan Lainnya	0	2983357845,73	2983357845,73
113311- Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	68.000.000.000	40.000.000.000	108.000.000.000
113ZZZZ- Piutang Pendapatan (BAS Level 4)	0	29550655515,8	29550655515,8
1140100- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	2.078.949.519	2.078.949.519
1140200- Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	540.819.089	540.819.089
1140300- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	24.900.000	24.900.000
1140400- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	1498571477,61	1498571477,61
114111- Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	66.011.619	(19.317.272)	46.694.347
114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	24.185.668.390	(21.726.940.849)	2.458.727.541
114211- uang muka belanja pegawai (prepayment)	485.860	(485.860)	0
114212- uang muka belanja barang (prepayment)	0	10.228.565.859	10.228.565.859
114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	14.109.522.627	(7.044.552.797)	7.064.969.830
114ZZZZ- Piutang Lainnya (BAS Level 4)	0	12001598833,06	12001598833,06
1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan	0	-295771989504,42	-295771989504,42
1150200- Penyisihan Piutang Lainnya	0	-16711978858,94	-16711978858,94
115121- Piutang PPh Pasal 21	9.671.616.173	622.181.948	10.293.798.121
115122- Piutang PPh Pasal 22	1.751.180.693	(303.962.728)	1.447.217.965
115123- Piutang PPh Pasal 22 Impor	211.332.325	(211.332.325)	0
115124- Piutang PPh Pasal 23	26.398.582.096	832.103.821	27.230.685.917
115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	17.611.672.617	990.248.774	18.601.921.391
115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	168.042.141.807	(4.548.006.533)	163.494.135.274
115127- Piutang PPh Pasal 26	68.580.840	1.414.686.497	1.483.267.337
115128- Piutang PPh Final	30.693.980.172	(5.216.478.733)	25.477.501.439
115129- Piutang PPh Non Migas Lainnya	0	9.745.572	9.745.572
115131- Piutang PPN Dalam Negeri	389.276.375.475	(13.941.124.653)	375.335.250.822
115132- Piutang PPN Impor	1.071.623.120	(1.070.123.120)	1.500.000
115153- Piutang PBB Perkebunan	91.716.119.350	(18.374.352.152)	73.341.767.198
115154- Piutang PBB Perhutanan	62.370.093.260	(10.673.619.537)	51.696.473.723
115155- Piutang PBB Pertambangan	32.022.664.977	(1.194.199.510)	30.828.465.467
115159- Piutang PBB Lainnya	1.898.855.523	909.745.806	2.808.601.329
115165- Piutang Bea Materai	2.424.000	0	2.424.000
115169- Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	4.060.800	(4.060.800)	0
115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh	46.004.027.096	(700.167.139)	45.303.859.957
115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN	35.333.063.883	3.646.669.735	38.979.733.618
115179- Piutang Bunga/Denda Penagihan PTLL	0	440.577.190	440.577.190
115181- Piutang Bea masuk	749.547.000	(749.547.000)	0
115183- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	396.284.000	(396.284.000)	0
115185- Piutang Pajak/pungutan ekspor	1.670.329.000	1.840.775.000	3.511.104.000
115186- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.938.136.000	0	1.938.136.000
115187- Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	471.794.000	394.295.000	866.089.000
115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	198.319.321.444	127.216.344	198.446.537.788
115212- Piutang Lainnya	2.551.322.177	(52.900.448)	2.498.421.729

115231- Piutang Transfer ke Daerah - Dana Transfer Umum (DTU)	674.923.757.077	78.937.537.923	753.861.295.000
115232- Piutang Transfer ke Daerah - Dana Transfer Khusus (DTK)	0	32.752.786.003	32.752.786.003
115239- Piutang Transfer ke Daerah (TKD) - Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK)	1.512.601.549	1.567.556.930	3.080.158.479
115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	83.113.868	(83.113.868)	0
115431- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU	501.531.269	119.212.003	620.743.272
115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	3.995.263.558	6.913.003.356	10.908.266.914
115712- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	2.266.809.966	(63.613.000)	2.203.196.966
115719- Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	643.633.334	(46.998.171)	596.635.163
115791- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	2.720.400	(2.719.051)	1.349
115813- Piutang Sewa Ruangan - BLU	41.500.000	(27.849.137)	13.650.863
115891- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	0	2.754.239	2.754.239
115ZZZZ- Penyisihan Piutang (BAS Level 4)	0	-112600343755,52	-112600343755,52
116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(128.123.331.928)	(19.365.847.279)	(147.489.179.207)
116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(213.757.435.056)	(25.043.131.625)	(238.800.566.681)
116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(84.182.627.315)	9.950.598.799	(74.232.028.516)
116116- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	(4.060.800)	4.060.800	0
116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(16.830.425.879)	(26.281.975.014)	(43.112.400.893)
116118- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.732.166.155)	(5.446.195)	(3.737.612.350)
116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	(110.323.177.253)	(25.037.034.061)	(135.360.211.314)
116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(1.450.618.523)	(144.384.408)	(1.595.002.931)
116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(415.570)	415.570	0
116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(19.976.318)	(34.565.017)	(54.541.335)
116612- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(2.086.047.841)	250.807.625	(1.835.240.216)
116619- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(4.081.841)	(1.043.570)	(5.125.411)
116691- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(13.602)	13.595	(7)
116713- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	(28.565.000)	14.914.137	(13.650.863)
116732- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(2.507.658)	(596.059)	(3.103.717)
116791- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	(13.771)	(13.771)
116ZZZZ- Beban Dibayar Dimuka (BAS Level 4)	0	6830766366,31	6830766366,31
1170100- Persediaan Bahan Pakai Habis	0	117932328391,9	117932328391,9
117111- Barang Konsumsi	277.920.872.545	10.486.769.563	288.407.642.108
117112- Amunisi	394.409.499.861	10.772.276.077	405.181.775.938
117113- Bahan untuk Pemeliharaan	4.215.181.245	(2.889.897.296)	1.325.283.949
117114- Suku Cadang	954.811.517.030	(28.456.186.528)	926.355.330.502
117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	628.882.404.099	(73.349.618.759)	555.532.785.340
117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	735.395.267	116.833.277	852.228.544
117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	34.813.394.398	(1.856.273.781)	32.957.120.617
117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.563.767.887.091	223.069.663.586	2.786.837.550.677
117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	548.404.830.985	18.682.326.566	567.087.157.551
117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	450.000.000	450.000.000
117128- Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.512.848.519	33.536.703.921	35.049.552.440
117129- Persediaan Dalam Proses	192.970.203.229	271.664.586.969	464.634.790.198

117131- Bahan Baku	20.714.916.545	258.432.278	20.973.348.823
117151- Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	3.018.909.000	(1.088.222.000)	1.930.687.000
117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	111.107.400	(35.628.000)	75.479.400
117199- Persediaan Lainnya	9.307.888.477	3.933.215.580	13.241.104.057
117ZZZZ- Persediaan (BAS Level 4)	0	823350723643,89	823350723643,89
1210400- Dana Bergulir	0	61871413,31	61871413,31
1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	4515849387643,49	4515849387643,49
131111- Tanah	68.232.582.660.553	652.846.338.433	68.885.428.998.986
131ZZZZ- Tanah (BAS Level 4)	0	18474547591886,53	18474547591886,53
132111- Peralatan dan Mesin	13.280.952.865.951	1.087.971.099.920	14.368.923.965.871
132ZZZZ- Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	11806967190042,23	11806967190042,23
133111- Gedung dan Bangunan	9.995.330.692.127	293.885.664.819	10.289.216.356.946
133ZZZZ- Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	24280864808145,92	24280864808145,92
134111- Jalan dan Jembatan	27.143.158.996.190	623.774.832.858	27.766.933.829.048
134112- Irigasi	8.696.007.217.864	375.682.271.429	9.071.689.489.293
134113- Jaringan	149.922.881.835	7.902.906.744	157.825.788.579
134ZZZZ- Jalan, Irigasi, dan Jaringan (BAS Level 4)	0	42613802324253,18	42613802324253,18
135111- Aset Tetap Renovasi	54.803.017.651	6.902.312.470	61.705.330.121
135121- Aset Tetap Lainnya	88.510.725.281	6.115.738.894	94.626.464.175
135ZZZZ- Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	1706982321648,63	1706982321648,63
1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	809484151938,18	809484151938,18
136111- Konstruksi Dalam pengerjaan	1.020.320.276.516	(305.564.213.256)	714.756.063.260
1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-10065595986223,444	-10065595986223,444
1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	-7183173166742,05	-7183173166742,05
1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0	-26207730861839,297	-26207730861839,297
1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	-47866337884,2674459	-47866337884,2674459
137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.241.880.850.157)	(999.487.945.142)	(11.241.368.795.299)
137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.812.582.926.564)	(268.866.202.628)	(2.081.449.129.192)
137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16.298.896.608.890)	(1.757.733.787.131)	(18.056.630.396.021)
137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi	(3.954.273.881.485)	(599.407.970.057)	(4.553.681.851.542)
137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan	(46.163.975.671)	(4.438.019.926)	(50.601.995.597)
137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(23.197.780.328)	(265.402.449)	(23.463.182.777)
138111- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	6.425.542.000	0	6.425.542.000
138121- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	3.501.090.627.746	913.448.800	3.502.004.076.546
138211- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	(988.544.928)	(141.220.704)	(1.129.765.632)
138221- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(164.643.703.307)	(52.702.422.351)	(217.346.125.658)
138311- Properti Investasi	6.394.258.710	0	6.394.258.710
138411- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(915.754.682)	(98.500.881)	(1.014.255.563)
1510100- Tagihan Penjualan Angsuran	0	1401564944,5	1401564944,5
151ZZZZ- Tagihan Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	8.180.966.720	8.180.966.720
152111- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	161.246.126	(39.984.336)	121.261.790
152211- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	543.618.073	(217.447.800)	326.170.273
152ZZZZ- Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BAS Level 4)	0	746575247653,09	746575247653,09
1530200- Lisensi dan frenchise	0	294.393.635	294.393.635
1530300- Hak Cipta	0	49.987.000	49.987.000
1530500- Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	31804127445,25	31804127445,25
1530600- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	-227495399470,83	-227495399470,83
153ZZZZ- Aset Tidak Berwujud (BAS Level 4)	0	231116928071,37	231116928071,37
1540100- Aset Lain-lain	0	2882575759052,42	2882575759052,42
155111- Piutang Jangka Panjang lainnya	32.557.800	(32.557.800)	0
156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(71.706.562)	(4.412.078)	(76.118.640)
156411- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(2.718.090)	1.087.239	(1.630.851)
156911- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(162.789)	162.789	0
162141- Paten	25.200.000	0	25.200.000
162151- Software	117.006.392.376	5.734.311.082	122.740.703.458
162161- Lisensi	10.611.729.812	157.192.587.608	167.804.317.420
162171- Hasil Kajian/penelitian	104.135.469.509	(518.540.500)	103.616.929.009
162191- Aset Tak Berwujud Lainnya	39.655.574.863	15.578.040.287	55.233.615.150
163119- Dana Lainnya	1.487.860.786	(809.645.583)	678.215.203
163139- Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	292.384.433.446	(89.488.966.301)	202.895.467.145
163141- Dana di Rekening Penampungan - BLU	1.323.708.000	(1.323.708.000)	0
166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	533.840.345.520	67.587.871.904	601.428.217.424

pemerintahan			
166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	59.401.749.842	30.223.500	59.431.973.342
166114- BMN Dalam Proses PMPP	6.792.217.500	0	6.792.217.500
169121- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(4.506.397.624)	(239.414.732)	(4.745.812.356)
169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(296.059.832.428)	(49.955.212.832)	(346.015.045.260)
169314- Akumulasi Amortisasi Paten	(7.357.500)	(1.635.000)	(8.992.500)
169315- Akumulasi Amortisasi Software	(83.241.012.718)	(12.944.172.144)	(96.185.184.862)
169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi	(3.014.320.175)	(15.039.312.454)	(18.053.632.629)
169317- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(20.264.122.087)	(4.676.160.505)	(24.940.282.592)
169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(15.930.748.352)	(30.223.500)	(15.960.971.852)
211ZZZZ- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (BAS Level 4)	0	-599636210,72	-599636210,72
2120400- Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	-76886891,64	-76886891,64
212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(50.735.035.347)	(28.565.685.309)	(79.300.720.656)
212112- Belanja barang yang masih harus dibayar	(10.168.923.413)	5.025.636.442	(5.143.286.971)
212113- Belanja modal yang masih harus dibayar	(485.996.060)	(1.000.000)	(486.996.060)
212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(22.849.545.574)	12.826.974.997	(10.022.570.577)
212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(170.340.062.917)	52.491.343.845	(117.848.719.072)
212192- Dana Pihak Ketiga	(1.235.287.628)	(575.086.372)	(1.810.374.000)
212193- Dana Pihak Ketiga BLU	(118.738.755)	(123.401.317)	(242.140.072)
212ZZZZ- Utang Bunga (BAS Level 4)	0	-7536837128,53	-7536837128,53
2130300- Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	0	(27.777.988.368)	(27.777.988.368)
213ZZZZ- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	(34.366.248.672)	(34.366.248.672)
2140100- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0	(620.458.298)	(620.458.298)
214ZZZZ- Pendapatan Diterima Dimuka (BAS Level 4)	0	-81920854580,49	-81920854580,49
2150100- Utang Belanja Pegawai	0	(34.334.678.943)	(34.334.678.943)
2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa	0	-100604886496,97	-100604886496,97
2150300- Utang Belanja Modal	0	(38.860.873.528)	(38.860.873.528)
215111- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	(251.723.337.326)	251.723.337.326	0
215112- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Dana Transfer Umum (DTU)	0	(725.158.096.000)	(725.158.096.000)
215113- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Dana Transfer Khusus (DTK)	0	(6.115.570.326)	(6.115.570.326)
215ZZZZ- Utang Belanja (BAS Level 4)	0	-499549854122,89	-499549854122,89
2160100- Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0	(7.485.088.290)	(7.485.088.290)
216ZZZZ- Utang Jangka Pendek Lainnya (BAS Level 4)	0	-257589122383,26	-257589122383,26
219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	(39.392.781.013)	18.134.193.051	(21.258.587.962)
219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	(89.739.352.154)	(36.101.097.528)	(125.840.449.682)
219114- Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	(139.733.622)	(350.763.886)	(490.497.508)
219119- Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Lainnya	0	(670.145.553)	(670.145.553)
219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(1.438.457.299)	(245.085.633)	(1.683.542.932)
219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	(25.643.765.614)	6.834.724.773	(18.809.040.841)
219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU	(35.516.006.464)	5.816.992.617	(29.699.013.847)
219241- Pajak Diterima Dimuka PPh	0	(98.359.734.719)	(98.359.734.719)
219242- Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPN	0	(211.096.710.260)	(211.096.710.260)
219249- Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Pajak Lainnya	0	(698.698.376.665)	(698.698.376.665)
219511- Uang Muka dari KPPN	(19.562.000)	0	(19.562.000)
219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	(15.143.046)	0	(15.143.046)
2210200- Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	-69445002052,93	-69445002052,93
2210400- Utang Pemerintah Pusat	0	-120765138906,24	-120765138906,24
221929- Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	0	(2.327.717.000)	(2.327.717.000)
226113- Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra	(3.353.911.382.573)	53.296.802.708	(3.300.614.579.865)
3110100- Ekuitas	0	-66279845510415,89	-66279845510415,89
311111- SAL	55.980.360.018.169	0	55.980.360.018.169
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(56.396.809.706.138)	(29.341.268.526.245)	(85.738.078.232.383)
313121- Diterima dari Entitas Lain	186.060.616.395	12.425.305.951.099	12.611.366.567.494
313211- Transfer Keluar	0	60.064.595.585.853	60.064.595.585.853
313221- Transfer Masuk	0	(61.522.712.561.064)	(61.522.712.561.064)
3910100- Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	0	-64353474548316,59	-64353474548316,59
391111- Ekuitas	(103.232.331.485.063)	20.120.463.243.736	(83.111.868.241.327)
391113- Koreksi Nilai Persediaan	0	(40.038.054.726)	(40.038.054.726)
391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(306.905.040.273)	(306.905.040.273)

391118- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	(5.493.394.704)	(5.493.394.704)
391119- Koreksi Lainnya	(277.677.837.907)	859.392.760.488	581.714.922.581
391121- Ekuitas Transaksi Lainnya	0	809.645.583	809.645.583
391131- Pengesahan Hibah Langsung	0	(164.703.579.684)	(164.703.579.684)
391132- Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	757.428	757.428
391133- Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(5.438.645.405)	(5.438.645.405)
391151- Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	(1.274.579.011)	(1.274.579.011)
3920100- Koreksi Nilai Persediaan	0	-10168144,55	-10168144,55
3920200- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	-13521622880,35	-13521622880,35
3920300- Koreksi terhadap Ekuitas Lainnya	0	30031372466,83	30031372466,83
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BP KL	(19.562.000)	0	(19.562.000)
399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BLU KL	(212.737.597.713)	0	(212.737.597.713)
399913- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas Hibah KL	(283.882.816.592)	0	(283.882.816.592)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(1.335.835.100)	(1.335.835.100)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(9.856.819)	(9.856.819)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(813.120.659.662)	(813.120.659.662)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(116.414.722.335)	(116.414.722.335)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(32.128.462.291)	(32.128.462.291)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(258.750.551.098)	(258.750.551.098)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(196.357.161.734)	(196.357.161.734)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.599.551.400.946)	(1.599.551.400.946)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(55.884.765.298)	(55.884.765.298)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(617.914.664.585)	(617.914.664.585)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(354.119.239)	(354.119.239)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(6.160.731.351.099)	(6.160.731.351.099)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(99.120.862.740)	(99.120.862.740)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(16.915.081.329)	(16.915.081.329)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(31.418.041.567)	(31.418.041.567)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(214.645.137)	(214.645.137)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.781.099.509)	(1.781.099.509)
411241- Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	0	(14.761.522.702)	(14.761.522.702)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(137.900.545.427)	(137.900.545.427)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(40.213.342.202)	(40.213.342.202)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(12.964.885.537)	(12.964.885.537)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(1.594.524.246)	(1.594.524.246)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(245.100.623.000)	(245.100.623.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(2.194.786.000)	(2.194.786.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(20.354.314)	(20.354.314)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	0	(22.869.578)	(22.869.578)
411613- Pendapatan PPn Batubara	0	(286.000)	(286.000)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(3.050.925.021)	(3.050.925.021)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(1.446.848.200)	(1.446.848.200)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(7.713.102.764)	(7.713.102.764)
411659- Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	0	(2.711.799.174)	(2.711.799.174)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(65.623.717.000)	(65.623.717.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(1.557.013.000)	(1.557.013.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(124.000)	(124.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(464.589.000)	(464.589.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(350.089.615.000)	(350.089.615.000)
412213- Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	(499.314.000)	(499.314.000)
419999- Pendapatan Pajak lain-lain	0	(1.026.040)	(1.026.040)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(135.577.584.533)	(135.577.584.533)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(357.316.810.887)	(357.316.810.887)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(7.977.965.000)	(7.977.965.000)
424212- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(33.500.000)	(33.500.000)
424213- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	(14.999.602.608)	(14.999.602.608)
424215- Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(258.766.368)	(258.766.368)
424241- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Perorangan - Barang / Jasa	0	(685.160.000)	(685.160.000)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(293.525.000)	(293.525.000)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(14.271.262.794)	(14.271.262.794)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(42.519.836.515)	(42.519.836.515)

424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(2.965.417.828)	(2.965.417.828)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(6.162.359.181)	(6.162.359.181)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(11.893.956.785)	(11.893.956.785)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(8.790.833)	(8.790.833)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(1.381.844.741)	(1.381.844.741)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(1.596.748.622)	(1.596.748.622)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(1.336.152.727)	(1.336.152.727)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(6.274.411.084)	(6.274.411.084)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(317.487.080)	(317.487.080)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(91.498.800)	(91.498.800)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(312.756.936)	(312.756.936)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(2.228.160.267)	(2.228.160.267)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(8.156.881.683)	(8.156.881.683)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(2.200.573.658)	(2.200.573.658)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(23.345.773)	(23.345.773)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(84.896.955)	(84.896.955)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(3.095.480.044)	(3.095.480.044)
425211- Pendapatan Paspor	0	(82.522.750.000)	(82.522.750.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.149.500.000)	(1.149.500.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(12.936.500.000)	(12.936.500.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(3.497.205.000)	(3.497.205.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(30.327.280)	(30.327.280)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(220.000)	(220.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(57.400.000)	(57.400.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(423.278.500)	(423.278.500)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(10.377.031.457)	(10.377.031.457)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(2.351.790.000)	(2.351.790.000)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(3.055.511.690)	(3.055.511.690)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(879.802.200)	(879.802.200)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(512.180.000)	(512.180.000)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(73.000.000)	(73.000.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(17.024.481.649)	(17.024.481.649)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(503.765.903)	(503.765.903)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(1.600.010.000)	(1.600.010.000)
425247- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(737.500.000)	(737.500.000)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(677.383.382)	(677.383.382)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(20.300.000)	(20.300.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(6.664.131.637)	(6.664.131.637)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(9.364.110.000)	(9.364.110.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(8.110.810.000)	(8.110.810.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(41.876.200.000)	(41.876.200.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(327.560.000)	(327.560.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(57.905.021.719)	(57.905.021.719)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	0	(23.449.195.184)	(23.449.195.184)

(TNKB)			
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(677.550.000)	(677.550.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.137.650.000)	(1.137.650.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(1.760.000.000)	(1.760.000.000)
425271- Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425272- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(4.211.295.000)	(4.211.295.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(5.828.300.000)	(5.828.300.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(686.560.000)	(686.560.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(9.528.703.000)	(9.528.703.000)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(3.245.897.750)	(3.245.897.750)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(831.015.969)	(831.015.969)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(9.643.193.567)	(9.643.193.567)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(34.593.811.890)	(34.593.811.890)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(2.756.081.068)	(2.756.081.068)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.727.785.000)	(1.727.785.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(1.602.595.000)	(1.602.595.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(112.082.112)	(112.082.112)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.540.639.660)	(3.540.639.660)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(109.420.000)	(109.420.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(57.174.515.902)	(57.174.515.902)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(6.668.400.000)	(6.668.400.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(995.335.000)	(995.335.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(276.375.000)	(276.375.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(54.101.507.167)	(54.101.507.167)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(270.533.333)	(270.533.333)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(7.279.882.100)	(7.279.882.100)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(1.700.000)	(1.700.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(3.644.703.000)	(3.644.703.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(183.110.000)	(183.110.000)
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(73.971.750)	(73.971.750)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(68.000.000)	(68.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(30.863.665.989)	(30.863.665.989)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.291.495.660)	(10.291.495.660)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(7.536.034.800)	(7.536.034.800)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(4.308.567.446)	(4.308.567.446)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(1.943.486.875)	(1.943.486.875)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(14.558.983.755)	(14.558.983.755)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(2.865.095.001)	(2.865.095.001)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(580.156.000)	(580.156.000)
425533- Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	(3.700.000)	(3.700.000)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(563.010.000)	(563.010.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(354.183.325)	(354.183.325)
425619- Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	0	(402.709.000)	(402.709.000)
425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	(1.054.361.531)	(1.054.361.531)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	(1.176.583.035)	(1.176.583.035)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(2.007.190)	(2.007.190)
425692- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan	0	(182.620.000)	(182.620.000)

Informasi			
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.176.708.300)	(2.176.708.300)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(82.701)	(82.701)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(3.672.124)	(3.672.124)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(9.581.612)	(9.581.612)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(5.750.000)	(5.750.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(6.735.040.549)	(6.735.040.549)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(4.777.314.169)	(4.777.314.169)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.755.198.544)	(2.755.198.544)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(35.341.894)	(35.341.894)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(75.248.709)	(75.248.709)
425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	(55.662.636)	(55.662.636)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(14.523.687.278)	(14.523.687.278)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(232.785.031)	(232.785.031)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(564.135.736)	(564.135.736)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(3.928.682.026)	(3.928.682.026)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(2.708.744.998)	(2.708.744.998)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(317.672.470)	(317.672.470)
425931- Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	(103.110.300)	(103.110.300)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(90.340.964)	(90.340.964)
491315- Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa	0	(54.210.251.508)	(54.210.251.508)
491421- Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	(28.968.809.246)	(28.968.809.246)
491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	(5.447.384.649)	(5.447.384.649)
491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(174.592.890)	(174.592.890)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(20.120.463.243.736)	(20.120.463.243.736)
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	661.362.276.668	661.362.276.668
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9.082.776	9.082.776
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	44.573.684.028	44.573.684.028
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	13.023.510.115	13.023.510.115
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	8.964.675.527	8.964.675.527
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	73.101.473.173	73.101.473.173
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	12.201.991.180	12.201.991.180
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	33.755.057.970	33.755.057.970
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	112.881.456.607	112.881.456.607
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	121.852.300	121.852.300
511135- Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	1.625.000	1.625.000
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	109.400.000	109.400.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.175.200.000	1.175.200.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	10.763.249.759	10.763.249.759
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	286.837.297.508	286.837.297.508
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	68.909.982.417	68.909.982.417
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	10.554.572.200	10.554.572.200
511155- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	6.000.000	6.000.000
511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	2.932.200.000	2.932.200.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	4.774.395.000	4.774.395.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	34.075.535.058	34.075.535.058
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	483.681	483.681
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	1.883.945.816	1.883.945.816
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	515.348.422	515.348.422
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	1.319.680.000	1.319.680.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	246.510.000	246.510.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	199.102.914	199.102.914
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	1.644.064.386	1.644.064.386
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	5.933.285.700	5.933.285.700
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	4.675.000	4.675.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	1.260.274.500	1.260.274.500
511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau	0	43.594.800	43.594.800

Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI			
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.010.228.351.622	1.010.228.351.622
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	16.420.956	16.420.956
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	62.741.243.358	62.741.243.358
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	18.655.338.495	18.655.338.495
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	40.947.990.000	40.947.990.000
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.118.275.000	1.118.275.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	10.522.163.754	10.522.163.754
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	81.160.691.391	81.160.691.391
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	558.607.735.000	558.607.735.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	0	508.060.000	508.060.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	2.172.150.000	2.172.150.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	3.037.110.000	3.037.110.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	486.480.000	486.480.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	1.625.528.000	1.625.528.000
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	183.900.000	183.900.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	4.241.685.000	4.241.685.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	28.948.267.150	28.948.267.150
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	21.432.769.700	21.432.769.700
511245- Belanja Santunan Cacat TNI	0	43.358.800	43.358.800
511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI	0	10.982.937.093	10.982.937.093
511324- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	16.788.130.567	16.788.130.567
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	22.959.525.431	22.959.525.431
511339- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	75.743.855.000	75.743.855.000
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	1.190.116.055	1.190.116.055
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	354.058.078	354.058.078
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	154.350.000	154.350.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	48.612.937.635	48.612.937.635
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	9.690.000.000	9.690.000.000
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	702.500.000	702.500.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	144.854.527.885	144.854.527.885
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2.442.357	2.442.357
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	9.028.970.773	9.028.970.773
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2.660.575.936	2.660.575.936
511623- Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	54.829.000	54.829.000
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	11.305.375.061	11.305.375.061
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	8.885.517.190	8.885.517.190
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	30.578.525.158	30.578.525.158
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2.493.168.748	2.493.168.748
512211- Belanja Uang Lembur	0	18.069.649.670	18.069.649.670
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	1.395.891.000	1.395.891.000
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	868.458.392.327	868.458.392.327
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	115.217.122.392	115.217.122.392
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	190.710.378.674	190.710.378.674
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	112.614.728.927	112.614.728.927
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4.160.645.661	4.160.645.661
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.243.858.650	1.243.858.650
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	53.579.093.787	53.579.093.787
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	230.115.113.078	230.115.113.078
521211- Belanja Bahan	0	121.598.340.636	121.598.340.636
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	80.093.935.809	80.093.935.809
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	217.676.986.093	217.676.986.093
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	949.500.000	949.500.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	4.896.890.000	4.896.890.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	4.564.592.800	4.564.592.800
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	431.849.484	431.849.484
522111- Belanja Langganan Listrik	0	61.917.053.086	61.917.053.086
522112- Belanja Langganan Telepon	0	2.497.061.108	2.497.061.108
522113- Belanja Langganan Air	0	8.899.717.926	8.899.717.926
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	9.403.053.077	9.403.053.077
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	256.627.209	256.627.209
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	41.281.224.402	41.281.224.402
522141- Belanja Sewa	0	51.677.768.657	51.677.768.657
522151- Belanja Jasa Profesi	0	14.666.341.004	14.666.341.004

522191- Belanja Jasa Lainnya	0	67.325.647.396	67.325.647.396
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	132.826.701.668	132.826.701.668
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2.130.884.914	2.130.884.914
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	119.485.239.664	119.485.239.664
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	485.760.829	485.760.829
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	688.069.986	688.069.986
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	190.638.962.187	190.638.962.187
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	83.273.352.567	83.273.352.567
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1.834.703.741	1.834.703.741
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	9.255.738.902	9.255.738.902
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	169.045.774.383	169.045.774.383
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	971.385.294	971.385.294
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	27.602.778.925	27.602.778.925
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	31.943.787.024	31.943.787.024
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	21.417.796.999	21.417.796.999
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	70.659.025	70.659.025
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	205.761.171.187	205.761.171.187
525112- Belanja Barang	0	59.180.192.173	59.180.192.173
525113- Belanja Jasa	0	73.012.788.786	73.012.788.786
525114- Belanja Pemeliharaan	0	11.921.724.274	11.921.724.274
525115- Belanja Perjalanan	0	6.442.077.687	6.442.077.687
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	125.375.210.254	125.375.210.254
525141- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	27.500.000	27.500.000
525142- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	0	155.058.302	155.058.302
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	922.632.314	922.632.314
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	282.000.000	282.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	863.250.000	863.250.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	186.810.000.000	186.810.000.000
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	202.047.975.949	202.047.975.949
573112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0	32.000.000	32.000.000
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	17.469.442.000	17.469.442.000
591111- Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1.003.664.589.496	1.003.664.589.496
591211- Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	282.938.881.108	282.938.881.108
591311- Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1.447.112.938.634	1.447.112.938.634
591312- Belanja Penyusutan Irigasi	0	598.227.523.475	598.227.523.475
591313- Belanja Penyusutan Jaringan	0	4.140.474.100	4.140.474.100
591411- Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	192.588.600	192.588.600
591511- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	141.220.704	141.220.704
591521- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	52.675.722.197	52.675.722.197
591611- Beban Penyusutan Properti Investasi	0	98.500.881	98.500.881
592114- Belanja Amortisasi Paten	0	1.635.000	1.635.000
592115- Belanja Amortisasi Software	0	16.135.341.997	16.135.341.997
592116- Belanja Amortisasi Lisensi	0	11.500.565.724	11.500.565.724
592117- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	4.676.160.505	4.676.160.505
592221- Belanja Penyusutan Aset Lain-lain	0	239.414.732	239.414.732
592222- Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	13.064.999.185	13.064.999.185
593111- Belanja Persediaan konsumsi	0	513.082.663.718	513.082.663.718
593112- Belanja Persediaan amunisi	0	48.405.793.143	48.405.793.143
593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	6.207.956.363	6.207.956.363
593114- Belanja Persediaan suku cadang	0	105.177.088.302	105.177.088.302
593121- Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	1.299.998.050	1.299.998.050
593122- Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	70.198.689.577	70.198.689.577
593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	4.287.774.649	4.287.774.649

593124- Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	7.101.818.116	7.101.818.116
593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	195.863.594.062	195.863.594.062
593126- Belanja Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	9.908.678.880	9.908.678.880
593127- Belanja Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	12.000.000	12.000.000
593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	38.221.229.104	38.221.229.104
593131- Belanja Persediaan bahan baku	0	11.555.183.312	11.555.183.312
593141- Belanja Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	35.628.000	35.628.000
593149- Belanja persediaan lainnya	0	49.929.631.136	49.929.631.136
593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	0	3.129.774.659	3.129.774.659
594112- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	0	23.915.997.277	23.915.997.277
594113- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	0	41.528.087.827	41.528.087.827
594115- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	0	(9.950.598.799)	(9.950.598.799)
594117- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	0	26.616.767.653	26.616.767.653
594118- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	5.446.195	5.446.195
594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	44.073.548.700	44.073.548.700
594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	(141.109.113)	(141.109.113)
594421- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	324.249	324.249
594611- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	54.541.335	54.541.335
594612- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	89.258.500	89.258.500
594619- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	4.216.280	4.216.280
594641- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	7	7
594791- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	13.771	13.771
594931- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	4.585.900	4.585.900
594991- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	(162.789)	(162.789)
595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	22.889.014	22.889.014
596111- Beban Pelepasan Aset	0	5.502.098.638	5.502.098.638
596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang	0	3.526.448.630	3.526.448.630
596211- Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	26.031.084	26.031.084
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	181.819.580.500	181.819.580.500
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	11.727.346.200	11.727.346.200
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	52.416.763.700	52.416.763.700
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	300.310.408.500	300.310.408.500
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	31.657.415.000	31.657.415.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	446.496.229.000	446.496.229.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	751.269.000	751.269.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	30.276.922.600	30.276.922.600
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	19.979.047.000	19.979.047.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	19.282.857.000	19.282.857.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	111.668.030.000	111.668.030.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	1.763.468.000	1.763.468.000
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	10.507.962.953.000	10.507.962.953.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	294.855.878.401	294.855.878.401

621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	18.900.000.000	18.900.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.206.955.054.000	1.206.955.054.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	803.727.205.000	803.727.205.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	148.578.138.000	148.578.138.000
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	765.716.342.948	765.716.342.948
643111- Insentif Fiskal	0	51.953.825.000	51.953.825.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	1.389.145.439.600	1.389.145.439.600
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	240.660.699.700	240.660.699.700
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	18.102.250.000	18.102.250.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.319.100.936.388	1.319.100.936.388
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	341.571.049.711	341.571.049.711
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	69.838.308.000	69.838.308.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	27.754.100.000	27.754.100.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	68.790.099.400	68.790.099.400
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	25.219.650.000	25.219.650.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	4.341.863.000	4.341.863.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	1.943.583.000	1.943.583.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	6.171.342.000	6.171.342.000
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	5.305.434.000	5.305.434.000
662111- Belanja Dana Desa	0	1.595.719.756.088	1.595.719.756.088
8110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	0	(42.929.741.100)	(42.929.741.100)
8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	0	(43.742.515.900)	(43.742.515.900)
8110600- Pajak Hotel - LO	0	(10.036.365.538)	(10.036.365.538)
8110700- Pajak Restoran - LO	0	-30550873709,81	-30550873709,81
8110800- Pajak Hiburan - LO	0	(5.095.651.085)	(5.095.651.085)
8110900- Pajak Reklame - LO	0	-4020840675,58	-4020840675,58
8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO	0	(21.051.058.830)	(21.051.058.830)
8111100- Pajak Parkir - LO	0	(1.317.848.859)	(1.317.848.859)
8111200- Pajak Air Tanah - LO	0	(1.305.811.063)	(1.305.811.063)
8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO	0	(4.762.000)	(4.762.000)
8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0	-5381075427,39	-5381075427,39
8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	0	(62.985.293.437)	(62.985.293.437)
8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	0	(59.723.152.119)	(59.723.152.119)
811ZZZZ- Pendapatan Pajak Daerah - LO (BAS Level 4)	0	-3756493469854,92	-3756493469854,92
8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0	-254396181590,49	-254396181590,49
8120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	0	(5.211.384.600)	(5.211.384.600)
8120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	0	(1.365.498.000)	(1.365.498.000)
8120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0	(1.311.497.000)	(1.311.497.000)
8121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	0	-211720876,51	-211720876,51
8121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	0	(117.223.360)	(117.223.360)
8121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	0	(131.111.000)	(131.111.000)
8122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	0	(38.860.000)	(38.860.000)
8122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	0	(319.395.000)	(319.395.000)
8122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	0	(340.635.525)	(340.635.525)
8122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	0	(113.886.000)	(113.886.000)
8122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0	(43.720.000)	(43.720.000)
8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0	(5.821.132.347)	(5.821.132.347)
8123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0	(39.282.600)	(39.282.600)
812ZZZZ- Pendapatan Retribusi Daerah - LO (BAS Level 4)	0	-1186042332172,53	-1186042332172,53
8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik	0	(44.564.355.981)	(44.564.355.981)

Daerah/BUMD - LO			
813ZZZZ- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO (BAS Level 4)	0	-354835799503,9	-354835799503,9
8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0	(528.040.574)	(528.040.574)
8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO	0	-4403115352,57	-4403115352,57
8140400- Pendapatan Bunga - LO	0	-1178712058,64	-1178712058,64
8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	0	-48943266,35	-48943266,35
8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0	-1003885571,93	-1003885571,93
8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO	0	-4292812630,5	-4292812630,5
8140900- Pendapatan Denda Retribusi - LO	0	-350583,88	-350583,88
8141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	-456022649,38	-456022649,38
8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO	0	-18718215374,74	-18718215374,74
8141800- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0	-313663538,89	-313663538,89
8142000- Pendapatan BLUD - LO	0	-128673725788,51	-128673725788,51
814ZZZZ- Lain-lain PAD Yang Sah - LO (BAS Level 4)	0	-441240907400,51	-441240907400,51
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	(754.305.309.801)	(754.305.309.801)
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	(1.262.118.244.454)	(1.262.118.244.454)
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	(8.587.421.078.900)	(8.587.421.078.900)
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	(2.646.745.615.819)	(2.646.745.615.819)
821ZZZZ- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO (BAS Level 4)	0	(5.358.636.007.983)	(5.358.636.007.983)
8220300- Dana Penyesuaian - LO	0	(7.638.759.000)	(7.638.759.000)
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	(22.118.980.000)	(22.118.980.000)
822ZZZZ- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO (BAS Level 4)	0	(7.046.356.000)	(7.046.356.000)
823ZZZZ- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO (BAS Level 4)	0	(259.645.452.093)	(259.645.452.093)
824ZZZZ- Bantuan Keuangan - LO (BAS Level 4)	0	(96.257.117)	(96.257.117)
8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0	-126300015169,57	-126300015169,57
8310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0	(22.777.217.669)	(22.777.217.669)
8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0	(177.895.800)	(177.895.800)
831ZZZZ- Pendapatan Hibah - LO (BAS Level 4)	0	-990005938034,38	-990005938034,38
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	-67976228669,62	-67976228669,62
8410100- Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	-11078950298,75	-11078950298,75
8430100- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	-23700747875,17	-23700747875,17
9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO	0	564.822.689.980	564.822.689.980
9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0	320351396980,03	320351396980,03
9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	0	1.598.199.600	1.598.199.600
911ZZZZ- Beban Pegawai - LO (BAS Level 4)	0	9805873386562,94	9805873386562,94
9120100- Beban Bahan Pakai Habis	0	72477777907,55	72477777907,55
9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material	0	758623383499,88	758623383499,88
9120300- Beban Jasa Kantor	0	980301876771,32	980301876771,32
9120400- Beban Premi Asuransi	0	134306673868,69	134306673868,69
9120700- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	1.016.423.800	1.016.423.800
9120800- Beban Sewa Sarana Mobilitas	0	545.476.883	545.476.883
9121500- Beban Perjalanan Dinas	0	311.792.988.794	311.792.988.794
9121800- Beban Pemeliharaan	0	181417725557,13	181417725557,13
9121900- Beban Jasa Konsultasi	0	6613434099,85	6613434099,85
9122300- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	2.192.092.522	2.192.092.522
9122800- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	0	95440682950,76	95440682950,76
9123000- Beban Jasa Pihak Ketiga	0	238.439.713	238.439.713
9123100- Beban Barang dan Jasa BLUD	0	137017655961,93	137017655961,93
9123200- Beban Barang dan Jasa dana BOS	0	103929888737,44	103929888737,44
912ZZZZ- Beban Barang dan Jasa (BAS Level 4)	0	5140266920488,71	5140266920488,71
9130100- Bunga Utang Pinjaman	0	2557099968,37	2557099968,37
913ZZZZ- Beban Bunga (BAS Level 4)	0	7536837128,53	7536837128,53
9140100- Beban Subsidi	0	2104177825,32	2104177825,32
9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah	0	5770057590,49	5770057590,49
9150400- Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	2.902.916.156	2.902.916.156
9150500- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	96140980267,65	96140980267,65
9150600- Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	0	35.026.400.902	35.026.400.902

915ZZZZ- Beban Hibah (BAS Level 4)	0	645575770454,89	645575770454,89
9160100- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	359.880.000	359.880.000
9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	3.236.265.085	3.236.265.085
916ZZZZ- Beban Bantuan Sosial (BAS Level 4)	0	13.994.750.384	13.994.750.384
9170100- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	469627796483,19	469627796483,19
9170200- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	264495187580,33	264495187580,33
9170300- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	937066705110,71	937066705110,71
9170400- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	9713489405,57	9713489405,57
917ZZZZ- Beban Penyusutan dan Amortisasi (BAS Level 4)	0	1887867570075,53	1887867570075,53
9180100- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	8024575591,16	8024575591,16
9180200- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	9626923108,82	9626923108,82
918ZZZZ- Beban Penyisihan Piutang (BAS Level 4)	0	39554948320,29	39554948320,29
9190300- Beban Lain-lain	0	3.036.359.569	3.036.359.569
919ZZZZ- Beban Lain-lain (BAS Level 4)	0	195061685457,26	195061685457,26
9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	712068448369,48	712068448369,48
9230100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	0	37.449.114.634	37.449.114.634
9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	627.905.616.485	627.905.616.485
9310100- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	45162263300,17	45162263300,17
9330100- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	13541027314,17	13541027314,17
9410100- Beban Luar Biasa	0	11085419843,13	11085419843,13
9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah	0	1942870543540,22989 9	1942870543540,22989 9
Jumlah	0	- 64336974966874,6685 469	- 64336974966874,668546 9

LAMPIRAN II
NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	15.855.161	15.855.161
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	19.562.000	28.318.520	47.880.520
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	283.882.816.592	(283.882.816.592)	0
111911- Kas dan Bank - BLU	212.737.597.713	12.176.962.898	224.914.560.611
311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	33.841.452.221	216.268.742.528	250.110.194.749
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(110.769.283.048.349)	(30.355.998.912.445)	(141.125.281.960.794)
313121- Diterima dari Entitas Lain	58.884.117.398.943	13.309.435.718.948	72.193.553.117.891
391111- Ekuitas	51.353.705.314.517	20.226.198.818.736	71.579.904.133.253
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BP KL	(19.562.000)	(44.173.681)	(63.735.681)
399918- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas KPPN	15.308	0	15.308
399919- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas BLU	998.453.055	0	998.453.055
4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0	(775.245.770.844)	(775.245.770.844)
4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0	(777.917.044.200)	(777.917.044.200)
4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0	-813732932159,1	-813732932159,1
4110400- Pajak Air Permukaan - LRA	0	(29.255.863.572)	(29.255.863.572)
4110500- Pajak Rokok - LRA	0	(440.708.157.924)	(440.708.157.924)
4110600- Pajak Hotel - LRA	0	-11351922517,01	-11351922517,01
4110700- Pajak Restoran - LRA	0	-65886074028,91	-65886074028,91
4110800- Pajak Hiburan - LRA	0	-7896286422,18	-7896286422,18
4110900- Pajak Reklame - LRA	0	-36283522889,62	-36283522889,62
4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA	0	-195406115764,69	-195406115764,69
4111100- Pajak Parkir - LRA	0	-4084692488,64	-4084692488,64
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(1.335.835.100)	(1.335.835.100)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(9.856.819)	(9.856.819)
4111200- Pajak Air Tanah - LRA	0	(8.655.405.193)	(8.655.405.193)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(851.202.671.326)	(851.202.671.326)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(120.496.494.563)	(120.496.494.563)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	534.174	534.174
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(272.606.002.261)	(272.606.002.261)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(201.956.670.139)	(201.956.670.139)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.578.379.032.612)	(1.578.379.032.612)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(84.238.182.026)	(84.238.182.026)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(631.396.636.664)	(631.396.636.664)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(347.200.323)	(347.200.323)
4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0	(463.670.141)	(463.670.141)
4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0	-67123846535,67	-67123846535,67
4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0	-135581380776,5	-135581380776,5
4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	0	-273081764039,21	-273081764039,21
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(6.278.782.471.278)	(6.278.782.471.278)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(25.710.816.201)	(25.710.816.201)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(16.985.176.985)	(16.985.176.985)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(31.448.336.001)	(31.448.336.001)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(214.115.137)	(214.115.137)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.781.099.509)	(1.781.099.509)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(126.187.365.511)	(126.187.365.511)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(30.048.998.695)	(30.048.998.695)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(9.965.438.271)	(9.965.438.271)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(352.274.923)	(352.274.923)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(245.100.623.000)	(245.100.623.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(2.194.786.000)	(2.194.786.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(20.354.314)	(20.354.314)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	0	(22.869.578)	(22.869.578)
411613- Pendapatan PPn Batubara	0	(286.000)	(286.000)
411618- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	0	(700.952.477.740)	(700.952.477.740)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(3.054.800.416)	(3.054.800.416)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(2.072.701.821)	(2.072.701.821)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(3.690.703.888)	(3.690.703.888)

411659- Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	0	(2.271.221.984)	(2.271.221.984)
411ZZZZ- Pendapatan Pajak Daerah - LRA (BAS Level 4)	0	-341799644531,62	-341799644531,62
4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	0	-1196979978927,68	-1196979978927,68
4120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	0	(6.142.874.400)	(6.142.874.400)
4120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	0	(2.113.403.000)	(2.113.403.000)
4120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	0	-3247070863,5	-3247070863,5
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(66.373.264.000)	(66.373.264.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(1.953.297.000)	(1.953.297.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(124.000)	(124.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(464.589.000)	(464.589.000)
4121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0	-10162347654,14	-10162347654,14
4121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	0	(822.798.910)	(822.798.910)
4121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0	(86.240.000)	(86.240.000)
4121800- Retribusi Terminal - LRA	0	(93.450.000)	(93.450.000)
4121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	0	(207.163.000)	(207.163.000)
4122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	0	(2.350.642.590)	(2.350.642.590)
4122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	0	(33.725.000)	(33.725.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(348.248.840.000)	(348.248.840.000)
412213- Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	(105.019.000)	(105.019.000)
4122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	0	(1.743.509.875)	(1.743.509.875)
4122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	0	(1.655.280.000)	(1.655.280.000)
4122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	0	(1.904.346.755)	(1.904.346.755)
4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	0	(41.314.655.648)	(41.314.655.648)
4123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	0	(6.581.149.450)	(6.581.149.450)
412ZZZZ- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA (BAS Level 4)	0	-280006832496,97	-280006832496,97
4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0	-276258385368,88	-276258385368,88
413ZZZZ- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA (BAS Level 4)	0	(15.385.215.084)	(15.385.215.084)
4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0	(8.556.623.744)	(8.556.623.744)
4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA	0	-51622466648,79	-51622466648,79
4140400- Pendapatan Bunga - LRA	0	-28337623051,25	-28337623051,25
4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0	-2325238668,68	-2325238668,68
4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	0	-129674928595,03	-129674928595,03
4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0	-5482130489,49	-5482130489,49
4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA	0	-18573996746,84	-18573996746,84
4140900- Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0	-34136300,6	-34136300,6
4141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	-14028698768,3	-14028698768,3
4141300- Pendapatan dari Pengembalian	0	-112777435673,84	-112777435673,84
4141600- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0	-2048084141,07	-2048084141,07
4141700- Pendapatan Zakat* - LRA	0	(2.025.952)	(2.025.952)
4141800- Pendapatan BLUD - LRA	0	-235842732851,64	-235842732851,64
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	-1108416023,05	-1108416023,05
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	(730.665.562.540)	(730.665.562.540)
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	(648.054.920.802)	(648.054.920.802)
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	(12.962.676.011.391)	(12.962.676.011.391)
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	-4194912910614,17	-4194912910614,17
421ZZZZ- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA (BAS Level 4)	0	(35.716.035.895)	(35.716.035.895)
4220400- Dana Insentif Daerah	0	(51.953.825.000)	(51.953.825.000)
4220500- Dana Desa	0	(1.511.644.880.444)	(1.511.644.880.444)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(128.383.496.320)	(128.383.496.320)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(359.434.869.635)	(359.434.869.635)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(8.009.465.000)	(8.009.465.000)
424212- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(33.500.000)	(33.500.000)
424213- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	(14.999.602.608)	(14.999.602.608)
424215- Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-	0	(258.766.368)	(258.766.368)

Lembaga/Badan Usaha - Uang			
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(319.684.400)	(319.684.400)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(14.652.994.949)	(14.652.994.949)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(42.104.789.976)	(42.104.789.976)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(3.004.264.685)	(3.004.264.685)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(6.484.040.762)	(6.484.040.762)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(11.943.122.836)	(11.943.122.836)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(45.060.562)	(45.060.562)
424917- Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	0	(98.235.797)	(98.235.797)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(1.381.844.741)	(1.381.844.741)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(1.108.184.768)	(1.108.184.768)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(1.375.280.000)	(1.375.280.000)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(6.420.208.761)	(6.420.208.761)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(313.061.080)	(313.061.080)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(91.498.800)	(91.498.800)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(312.890.765)	(312.890.765)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(2.228.160.267)	(2.228.160.267)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(8.156.881.683)	(8.156.881.683)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(2.541.990.995)	(2.541.990.995)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(23.345.773)	(23.345.773)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(84.896.955)	(84.896.955)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(2.931.968.574)	(2.931.968.574)
425211- Pendapatan Paspor	0	(81.993.300.000)	(81.993.300.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.149.500.000)	(1.149.500.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(13.229.750.000)	(13.229.750.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(3.497.205.000)	(3.497.205.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(30.327.280)	(30.327.280)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(220.000)	(220.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(57.400.000)	(57.400.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(416.836.500)	(416.836.500)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(11.790.943.148)	(11.790.943.148)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(1.849.238.000)	(1.849.238.000)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(3.055.511.690)	(3.055.511.690)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(879.802.200)	(879.802.200)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(512.180.000)	(512.180.000)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(73.000.000)	(73.000.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(2.275.511.151)	(2.275.511.151)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(503.765.903)	(503.765.903)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(1.600.010.000)	(1.600.010.000)
425247- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(737.500.000)	(737.500.000)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(701.250.382)	(701.250.382)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(20.300.000)	(20.300.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(7.633.276.602)	(7.633.276.602)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(9.364.110.000)	(9.364.110.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(8.110.810.000)	(8.110.810.000)

425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(41.876.200.000)	(41.876.200.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(327.560.000)	(327.560.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(57.808.875.000)	(57.808.875.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(23.315.740.000)	(23.315.740.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(677.550.000)	(677.550.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.137.650.000)	(1.137.650.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(1.760.000.000)	(1.760.000.000)
425271- Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425272- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(4.211.295.000)	(4.211.295.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(5.828.300.000)	(5.828.300.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(686.560.000)	(686.560.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(9.528.703.000)	(9.528.703.000)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(3.259.529.500)	(3.259.529.500)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(831.015.969)	(831.015.969)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(9.643.193.567)	(9.643.193.567)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(33.818.499.247)	(33.818.499.247)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(2.756.081.068)	(2.756.081.068)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.727.785.000)	(1.727.785.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(1.602.595.000)	(1.602.595.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(112.082.112)	(112.082.112)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.542.132.255)	(3.542.132.255)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(109.420.000)	(109.420.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(49.436.435.707)	(49.436.435.707)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(6.668.400.000)	(6.668.400.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(995.335.000)	(995.335.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(276.375.000)	(276.375.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(54.668.461.600)	(54.668.461.600)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(308.450.000)	(308.450.000)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(7.279.882.100)	(7.279.882.100)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(1.700.000)	(1.700.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(3.644.703.000)	(3.644.703.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(183.110.000)	(183.110.000)
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(73.971.750)	(73.971.750)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(68.000.000)	(68.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(28.626.917.193)	(28.626.917.193)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.291.495.660)	(10.291.495.660)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(7.536.034.800)	(7.536.034.800)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(4.330.341.018)	(4.330.341.018)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(1.943.486.875)	(1.943.486.875)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(15.781.139.198)	(15.781.139.198)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(2.865.095.001)	(2.865.095.001)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(373.099.800)	(373.099.800)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(532.455.000)	(532.455.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(354.183.325)	(354.183.325)
425619- Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup	0	(402.709.000)	(402.709.000)

dan Kehutanan Lainnya			
425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	(1.057.985.410)	(1.057.985.410)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	(1.176.583.035)	(1.176.583.035)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(2.007.190)	(2.007.190)
425692- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	(182.620.000)	(182.620.000)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.177.088.300)	(2.177.088.300)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(82.701)	(82.701)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(3.672.124)	(3.672.124)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(9.581.612)	(9.581.612)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(5.750.000)	(5.750.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(6.744.240.549)	(6.744.240.549)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(4.779.071.929)	(4.779.071.929)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.755.198.544)	(2.755.198.544)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(35.341.894)	(35.341.894)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(141.626.154)	(141.626.154)
425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	(88.220.436)	(88.220.436)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(14.499.137.278)	(14.499.137.278)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(232.785.031)	(232.785.031)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(614.458.017)	(614.458.017)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(8.517.330.364)	(8.517.330.364)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(86.448.270.398)	(86.448.270.398)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(41.061.462.900)	(41.061.462.900)
425931- Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	(103.110.300)	(103.110.300)
425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	(485.860)	(485.860)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	109.409.052	109.409.052
4310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	0	-2559386169,6	-2559386169,6
4310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	0	(400.000.000)	(400.000.000)
431ZZZZ- Pendapatan Hibah - LRA (BAS Level 4)	0	-501374337,78	-501374337,78
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	-67976228669,62	-67976228669,62
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(20.226.198.818.736)	(20.226.198.818.736)
5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	6384690600547,4	6384690600547,4
5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	3666569240335,51	3666569240335,51
5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0	370.335.310.526	370.335.310.526
5110900- Belanja Pegawai Dana BLUD	0	338179086772,27	338179086772,27
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	661.040.355.516	661.040.355.516
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9.081.432	9.081.432
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	44.572.950.556	44.572.950.556
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	13.023.508.124	13.023.508.124
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	8.966.565.527	8.966.565.527
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	73.105.469.660	73.105.469.660
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	12.187.135.543	12.187.135.543
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	33.757.809.930	33.757.809.930
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	112.644.840.957	112.644.840.957
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	121.852.300	121.852.300
511135- Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	1.625.000	1.625.000
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	109.400.000	109.400.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.175.200.000	1.175.200.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	10.767.619.759	10.767.619.759
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	286.908.474.878	286.908.474.878
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	71.824.398.635	71.824.398.635
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	11.014.549.800	11.014.549.800
511155- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	6.000.000	6.000.000

511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	2.933.550.000	2.933.550.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	4.774.395.000	4.774.395.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	34.075.355.558	34.075.355.558
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	483.681	483.681
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	1.883.945.816	1.883.945.816
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	515.348.422	515.348.422
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	1.319.680.000	1.319.680.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	246.510.000	246.510.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	199.102.914	199.102.914
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	1.644.064.386	1.644.064.386
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	5.922.890.000	5.922.890.000
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	4.675.000	4.675.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	1.260.274.500	1.260.274.500
511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI	0	43.594.800	43.594.800
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.010.228.351.622	1.010.228.351.622
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	16.420.956	16.420.956
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	62.741.243.358	62.741.243.358
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	18.655.338.495	18.655.338.495
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	40.947.990.000	40.947.990.000
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.118.275.000	1.118.275.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	10.522.163.754	10.522.163.754
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	81.160.691.391	81.160.691.391
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	558.607.735.000	558.607.735.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	508.060.000	508.060.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	2.172.150.000	2.172.150.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	3.037.110.000	3.037.110.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	486.480.000	486.480.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	1.625.528.000	1.625.528.000
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	183.900.000	183.900.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	4.241.685.000	4.241.685.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	28.948.267.150	28.948.267.150
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	21.432.769.700	21.432.769.700
511245- Belanja Santunan Cacat TNI	0	43.358.800	43.358.800
511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI	0	10.982.937.093	10.982.937.093
511324- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	9.374.569.108	9.374.569.108
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	22.959.525.431	22.959.525.431
511339- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	54.311.855.000	54.311.855.000
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	1.190.116.055	1.190.116.055
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	354.058.078	354.058.078
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	154.350.000	154.350.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	48.624.187.635	48.624.187.635
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	9.690.000.000	9.690.000.000
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	702.500.000	702.500.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	144.854.107.485	144.854.107.485
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2.442.604	2.442.604
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	9.028.960.263	9.028.960.263
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2.660.571.732	2.660.571.732
511623- Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	54.829.000	54.829.000
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	11.310.475.061	11.310.475.061
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	8.885.517.190	8.885.517.190
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	30.065.177.508	30.065.177.508
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2.473.938.748	2.473.938.748
5120100- Belanja Bahan Pakai Habis	0	1746390329079,76	1746390329079,76
5120200- Belanja Bahan/Material	0	2.101.606.650	2.101.606.650
5120300- Belanja Jasa Kantor	0	857252374717,51	857252374717,51
5120400- Belanja Premi Asuransi	0	285197404960,19	285197404960,19
5120700- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	16.333.829.517	16.333.829.517
5120800- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	149.430.133	149.430.133
5120900- Belanja Sewa Alat Berat	0	35393639094,73	35393639094,73
5121000- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	2.758.431.777	2.758.431.777
5121500- Belanja Perjalanan Dinas	0	623.750.546.520	623.750.546.520
5121800- Belanja Pemeliharaan	0	610951554733,23	610951554733,23
5121900- Belanja Jasa Konsultansi	0	120273646370,2	120273646370,2
5122000- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	329441294409,29	329441294409,29

512211- Belanja Uang Lembur	0	18.069.649.670	18.069.649.670
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	1.395.891.000	1.395.891.000
5122200- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	3.329.150.641	3.329.150.641
5122300- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	43613301375,25	43613301375,25
5122400- Belanja Honorarium Non Pegawai	0	2.511.551.841	2.511.551.841
5122600- Honorarium Non PNS	0	907.978.886	907.978.886
5122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	7.217.754.428	7.217.754.428
5122900- Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	1.496.602.013	1.496.602.013
5123000- Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	1201447141447,13	1201447141447,13
5123100- Belanja Barang dan Jasa dana BOS	0	926463916054,26	926463916054,26
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	868.350.717.783	868.350.717.783
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	113.166.114.601	113.166.114.601
512ZZZZ- Belanja Barang dan Jasa (BAS Level 4)	0	1218749953374,92	1218749953374,92
5130100- Bunga Utang Pinjaman	0	12099794485,71	12099794485,71
5140100- Belanja Subsidi	0	1.647.685.000	1.647.685.000
5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah	0	24545526801,5	24545526801,5
5150400- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	26.517.482.839	26.517.482.839
5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	433.245.752.409	433.245.752.409
5150600- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***	0	266698306309,27	266698306309,27
5160100- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	2.269.512.000	2.269.512.000
5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	15.321.383.469	15.321.383.469
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	190.693.076.283	190.693.076.283
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	115.482.494.022	115.482.494.022
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4.160.645.661	4.160.645.661
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.244.750.101	1.244.750.101
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	53.845.755.787	53.845.755.787
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	231.362.648.438	231.362.648.438
5211300- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	897.921.000	897.921.000
521211- Belanja Bahan	0	121.700.388.347	121.700.388.347
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	80.106.335.809	80.106.335.809
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	219.318.352.855	219.318.352.855
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	949.500.000	949.500.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	4.896.890.000	4.896.890.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	3.586.601.573	3.586.601.573
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	124.265.750	124.265.750
521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	104.753.538.347	104.753.538.347
521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	6.999.900	6.999.900
521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	994.165.320	994.165.320
521822- Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	2.161.163.876	2.161.163.876
521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	3.460.646.473	3.460.646.473
521ZZZZ- Belanja Modal Tanah (BAS Level 4)	0	10.748.957.336	10.748.957.336
5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	10.920.959.699	10.920.959.699
5220300- Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0	7.352.873.769	7.352.873.769
5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	79.086.433.001	79.086.433.001
5220500- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	1.801.829.350	1.801.829.350
5220600- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0	687.706.650	687.706.650
5220700- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	330.705.000	330.705.000
5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0	221.699.650	221.699.650
5221000- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0	124.546.440	124.546.440
5221100- Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0	247.754.959	247.754.959
522111- Belanja Langganan Listrik	0	62.591.285.023	62.591.285.023
522112- Belanja Langganan Telepon	0	2.489.965.436	2.489.965.436
522113- Belanja Langganan Air	0	8.978.688.055	8.978.688.055
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	9.459.140.213	9.459.140.213
5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0	1.248.342.200	1.248.342.200
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	256.627.209	256.627.209

522131- Belanja Jasa Konsultan	0	44.093.743.180	44.093.743.180
5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0	51624947318,16	51624947318,16
522141- Belanja Sewa	0	46.009.941.639	46.009.941.639
5221500- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	58.274.505.270	58.274.505.270
522151- Belanja Jasa Profesi	0	14.738.956.130	14.738.956.130
5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer	0	65.696.947.948	65.696.947.948
5221700- Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	849.471.973	849.471.973
5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0	11873284110,8	11873284110,8
5221900- Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0	663.848.920	663.848.920
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	78.411.719.636	78.411.719.636
5222000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0	271.133.800	271.133.800
5222100- Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0	70.577.665.636	70.577.665.636
5222200- Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0	65.840.773.703	65.840.773.703
5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0	11.197.902.401	11.197.902.401
5222400- Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	193.419.767.000	193.419.767.000
5222500- Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	580.601.500	580.601.500
5222600- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	339.903.775	339.903.775
5222900- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	227.568.620	227.568.620
5223500- Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	34.125.434	34.125.434
5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	961659469591,56	961659469591,56
5230200- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	24.191.857.440	24.191.857.440
5230700- Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0	84.354.000	84.354.000
5230900- Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	18077251135,5	18077251135,5
5231000- Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	0	11.841.137.370	11.841.137.370
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	133.067.451.974	133.067.451.974
523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	640.937.085	640.937.085
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2.129.084.914	2.129.084.914
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	119.962.250.461	119.962.250.461
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	485.760.829	485.760.829
523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	16.836.102.196	16.836.102.196
523125- Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	40.722.691.396	40.722.691.396
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	688.069.986	688.069.986
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	190.641.381.495	190.641.381.495
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	83.273.352.567	83.273.352.567
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1.837.520.741	1.837.520.741
523136- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	65.222.000	65.222.000
523191- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	393.019.562	393.019.562
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	9.870.618.902	9.870.618.902
523ZZZZ- Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	1493633599,86	1493633599,86
5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan	0	1244047361816,6	1244047361816,6
5240200- Belanja modal Pengadaan Jembatan	0	139018365625,74	139018365625,74
5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0	46.084.760.496	46.084.760.496
5240400- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0	5.178.365.000	5.178.365.000
5240600- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	18894294278,39	18894294278,39
5240700- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	196.628.000	196.628.000
5240800- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0	2.471.944.880	2.471.944.880
5240900- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0	15620391859,8	15620391859,8
5241000- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	0	141118110902,5	141118110902,5
5241100- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum	0	4.819.468.750	4.819.468.750

Bersih			
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	169.593.221.905	169.593.221.905
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	971.385.294	971.385.294
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	27.877.119.925	27.877.119.925
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	31.766.007.024	31.766.007.024
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	21.468.008.518	21.468.008.518
5241200- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0	508.685.000	508.685.000
5241300- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0	324.213.000	324.213.000
5241500- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0	7.898.252.000	7.898.252.000
5242000- Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	32.098.535.756	32.098.535.756
5242100- Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	0	37148034777,4	37148034777,4
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	70.659.025	70.659.025
5242400- Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0	10.410.267.400	10.410.267.400
524ZZZZ- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (BAS Level 4)	0	120990119600,2	120990119600,2
5250300- Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0	56.032.405.692	56.032.405.692
5250400- Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	2.386.891.148	2.386.891.148
5250500- Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	2.060.920.421	2.060.920.421
5250700- Belanja modal Pengadaan Tanaman	0	3.690.000	3.690.000
5250800- Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN	0	113.523.338.245	113.523.338.245
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	215.378.056.263	215.378.056.263
525112- Belanja Barang	0	59.179.195.397	59.179.195.397
525113- Belanja Jasa	0	71.743.683.037	71.743.683.037
525114- Belanja Pemeliharaan	0	11.921.724.274	11.921.724.274
525115- Belanja Perjalanan	0	6.442.077.687	6.442.077.687
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	126.136.719.824	126.136.719.824
525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	37.925.324.735	37.925.324.735
525124- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	0	70.610.000	70.610.000
525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	23.999.677.652	23.999.677.652
525141- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	27.500.000	27.500.000
525142- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	0	155.058.302	155.058.302
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	922.632.314	922.632.314
526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	3.087.579.590	3.087.579.590
526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	7.662.336.750	7.662.336.750
526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	499.594.496.461	499.594.496.461
526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	2.512.148.650	2.512.148.650
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	282.000.000	282.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	863.250.000	863.250.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	186.810.000.000	186.810.000.000
526223- Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	13.589.144.016	13.589.144.016
526224- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	70.126.090.988	70.126.090.988
526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	151.469.230.149	151.469.230.149
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	202.768.389.949	202.768.389.949
5270100- Belanja Modal Aset Lainnya	0	5.648.060.395	5.648.060.395
5280100- Belanja Modal BLUD	0	111.694.217.022	111.694.217.022
5310100- Belanja Tak Terduga	0	33330606273,68	33330606273,68

531111- Belanja Modal Tanah	0	420.000.000	420.000.000
531114- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	191.001.440	191.001.440
532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	157.526.698.321	157.526.698.321
532112- Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	19.018.000	19.018.000
532114- Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0	18.700.000	18.700.000
532118- Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	25.460.000	25.460.000
532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1.624.580.400	1.624.580.400
533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	325.047.906.930	325.047.906.930
533112- Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	7.158.382.000	7.158.382.000
533113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	1.463.730.000	1.463.730.000
533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	1.616.416.000	1.616.416.000
533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	32.439.188.591	32.439.188.591
534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	88.033.881.287	88.033.881.287
534121- Belanja Modal Irigasi	0	285.165.000.200	285.165.000.200
534122- Belanja Modal Bahan Baku Irigasi	0	10.992.800	10.992.800
534124- Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi	0	327.950.000	327.950.000
534125- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	0	4.080.149.269	4.080.149.269
534128- Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0	1.121.668.897	1.121.668.897
534131- Belanja Modal Jaringan	0	34.957.000	34.957.000
534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	234.887.219.780	234.887.219.780
536111- Belanja Modal Lainnya	0	10.441.937.890	10.441.937.890
536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	116.867.740	116.867.740
536114- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	112.500.000	112.500.000
536117- Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	538.590.216	538.590.216
536121- Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	653.464.000	653.464.000
537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	18.677.674.786	18.677.674.786
537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	14.779.644.179	14.779.644.179
537115- Belanja Modal Lainnya - BLU	0	833.931.900	833.931.900
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	17.469.442.000	17.469.442.000
6110100- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	80866638117,63	80866638117,63
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	194.066.820.500	194.066.820.500
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	12.671.906.200	12.671.906.200
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	57.159.495.700	57.159.495.700
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	333.562.261.500	333.562.261.500
6120100- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	7.542.840.556	7.542.840.556
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	38.844.621.000	38.844.621.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	490.000.900.000	490.000.900.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	751.269.000	751.269.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	31.359.642.600	31.359.642.600
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	22.702.463.000	22.702.463.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	19.282.857.000	19.282.857.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	111.668.030.000	111.668.030.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	1.814.645.000	1.814.645.000
6210100- Bantuan Keuangan ke Propinsi	0	1.755.000.000	1.755.000.000
6210200- Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	327.025.115.130	327.025.115.130
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	10.507.962.953.000	10.507.962.953.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	294.855.878.401	294.855.878.401
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	18.900.000.000	18.900.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.206.955.054.000	1.206.955.054.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	803.727.205.000	803.727.205.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan	0	148.578.138.000	148.578.138.000

Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah			
621ZZZZ- Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya (BAS Level 4)	0	497.939.791.700	497.939.791.700
6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	1.742.977.932.092	1.742.977.932.092
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	765.716.342.948	765.716.342.948
643111- Insentif Fiskal	0	51.953.825.000	51.953.825.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	1.389.145.439.600	1.389.145.439.600
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	240.660.699.700	240.660.699.700
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	18.102.250.000	18.102.250.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.319.100.936.388	1.319.100.936.388
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	341.571.049.711	341.571.049.711
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	69.838.308.000	69.838.308.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	27.754.100.000	27.754.100.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	68.790.099.400	68.790.099.400
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	25.219.650.000	25.219.650.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	4.341.863.000	4.341.863.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	1.943.583.000	1.943.583.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	6.171.342.000	6.171.342.000
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	5.305.434.000	5.305.434.000
662111- Belanja Dana Desa	0	1.595.719.756.088	1.595.719.756.088
7110100- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	0	-1197216370957,57	-1197216370957,57
7120100- Pencairan Dana Cadangan	0	(7.147.693.104)	(7.147.693.104)
7140100- Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0	(134.773.910.000)	(134.773.910.000)
7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping LSKP	0	1586001127917,5898	1586001127917,5898
7220200- Penyertaan Modal pada BUMD	0	76.200.000.000	76.200.000.000
7230100- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	0	146.600.000.000	146.600.000.000
7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	62.144.237.040	62.144.237.040
815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	(26.870.041.539)	(26.870.041.539)
815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(5.388.332.667)	(5.388.332.667)
815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	(232.978.272.896)	(232.978.272.896)
815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(48.099.083.833)	(48.099.083.833)
815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(19.562.000)	(19.562.000)
815619- Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	(207.538.187.740)	(207.538.187.740)
817714- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	0	(16.221.646.860)	(16.221.646.860)
817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	(1.595.719.756.088)	(1.595.719.756.088)
825111- Pengeluaran Uang Persediaan	0	26.885.896.700	26.885.896.700
825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	5.388.332.667	5.388.332.667
825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	0	233.026.153.416	233.026.153.416
825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	48.099.083.833	48.099.083.833
825619- Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	297.027.154.041	297.027.154.041
827714- Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	0	16.221.646.860	16.221.646.860
827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	1.595.719.756.088	1.595.719.756.088
Jumlah	0	-67275200620,1002	-67275200620,1002

LAMPIRAN III
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	(194.838.813.587)	(194.838.813.587)
1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	(4.089.301.600)	(4.089.301.600)
215112- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Dana Transfer Umum (DTU)	0	198.928.115.187	198.928.115.187
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(181.819.580.500)	(181.819.580.500)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(11.727.346.200)	(11.727.346.200)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(52.416.763.700)	(52.416.763.700)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(300.310.408.500)	(300.310.408.500)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	(31.657.415.000)	(31.657.415.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(446.496.229.000)	(446.496.229.000)
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	(751.269.000)	(751.269.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(30.276.922.600)	(30.276.922.600)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(19.979.047.000)	(19.979.047.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(19.282.857.000)	(19.282.857.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(111.668.030.000)	(111.668.030.000)
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	(1.763.468.000)	(1.763.468.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	-6182381032168,62	-6182381032168,62
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(294.855.878.401)	(294.855.878.401)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(18.900.000.000)	(18.900.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(1.206.955.054.000)	(1.206.955.054.000)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(803.727.205.000)	(803.727.205.000)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(148.578.138.000)	(148.578.138.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(765.716.342.948)	(765.716.342.948)
643111- Insentif Fiskal	0	(22.118.980.000)	(22.118.980.000)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(240.660.699.700)	(240.660.699.700)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(18.102.250.000)	(18.102.250.000)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.071.330.894.060)	(1.071.330.894.060)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(341.571.049.711)	(341.571.049.711)
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(69.838.308.000)	(69.838.308.000)
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	(27.754.100.000)	(27.754.100.000)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(68.790.099.400)	(68.790.099.400)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(25.219.650.000)	(25.219.650.000)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	(4.341.863.000)	(4.341.863.000)
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(1.943.583.000)	(1.943.583.000)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(6.171.342.000)	(6.171.342.000)
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	(5.305.434.000)	(5.305.434.000)
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	548.037.566.900	548.037.566.900
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	660.111.769.600	660.111.769.600
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	8.587.421.078.900	8.587.421.078.900
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	2.646.745.615.819	2.646.745.615.819
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	22.118.980.000	22.118.980.000
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	67976228669,62	67976228669,62
Jumlah	0	0	0

LAMPIRAN IV
NERACA SALDO BUKU BESAR KAS
ELIMINASI/KONSOLDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	1108416023,05	1108416023,05
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	599.275.128.900	599.275.128.900
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	648.054.920.802	648.054.920.802
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	12.962.676.011.391	12.962.676.011.391
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	4194912910614,17	4194912910614,17
4220400- Dana Insentif Daerah	0	51.953.825.000	51.953.825.000
4220500- Dana Desa	0	1.511.644.880.444	1.511.644.880.444
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	67976228669,62	67976228669,62
6111111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(194.066.820.500)	(194.066.820.500)
6111112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(12.671.906.200)	(12.671.906.200)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(57.159.495.700)	(57.159.495.700)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(333.562.261.500)	(333.562.261.500)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	(38.844.621.000)	(38.844.621.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(490.000.900.000)	(490.000.900.000)
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	(751.269.000)	(751.269.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(31.359.642.600)	(31.359.642.600)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(22.702.463.000)	(22.702.463.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(19.282.857.000)	(19.282.857.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	-95894595884,67	-95894595884,67
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	(1.814.645.000)	(1.814.645.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(10.507.962.953.000)	(10.507.962.953.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(294.855.878.401)	(294.855.878.401)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(18.900.000.000)	(18.900.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(1.206.955.054.000)	(1.206.955.054.000)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(803.727.205.000)	(803.727.205.000)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(148.578.138.000)	(148.578.138.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(765.716.342.948)	(765.716.342.948)
643111- Insentif Fiskal	0	(51.953.825.000)	(51.953.825.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(1.389.145.439.600)	(1.389.145.439.600)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(240.660.699.700)	(240.660.699.700)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(18.102.250.000)	(18.102.250.000)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.319.100.936.388)	(1.319.100.936.388)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	-252822862578,17	-252822862578,17
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(69.838.308.000)	(69.838.308.000)
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	(27.754.100.000)	(27.754.100.000)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(68.790.099.400)	(68.790.099.400)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(25.219.650.000)	(25.219.650.000)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	(4.341.863.000)	(4.341.863.000)
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(1.943.583.000)	(1.943.583.000)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(6.171.342.000)	(6.171.342.000)
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	(5.305.434.000)	(5.305.434.000)
662111- Belanja Dana Desa	0	(1.511.644.880.444)	(1.511.644.880.444)
Jumlah	0	0	0